



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 119).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Ciamis.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ciamis.
7. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/ kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/ kota/ desa, pengusaha/ investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/ kota, pemerintahan desa dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

11. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang disusun setiap tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi.
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

20. Strategi Pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka berfikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategi daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
22. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJPD.
23. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai tugas dan fungsi.
24. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJPD.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Program Pembangunan Daerah Periode Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD dan merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 3

- (1) Penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada RPJPN.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang menjabat pada akhir periode RPJMD, menyusun RKPD untuk tahun pertama periode RPJMD berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Pasal 5

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Penyusunan RPJPD Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPD Provinsi dan RPJPN.
- (3) Periodisasi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Ciamis dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan pembangunan jangka menengah.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 6

Sistematika RPJPD adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------|------------------------------------|
| Bab I | : Pendahuluan |
| Bab II | : Gambaran Umum Kondisi Daerah |
| Bab III | : Permasalahan Dan Isu Strategis |
| Bab IV | : Visi Dan Misi Daerah |
| Bab V | : Arah Kebijakan Dan Sasaran Pokok |
| Bab VI | : Penutup |

Pasal 7

Isi dan uraian RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

PANJANG DAERAH

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Tahapan penyusunan RPJPD berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai RPJPD Tahun 2005-2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Agustus 2024
Pj. BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

ENGKUS SUTISNA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

ANDANG FIRMAN TRIYADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT: (7/137/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.
NIP. 19780521 200801 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, ditetapkan visi Indonesia Emas, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan". Visi pembangunan nasional tersebut mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lima tahunan, yang terdiri dari:

- a. Tahap I Tahun 2025–2029;
- b. Tahap II Tahun 2030–2034;
- c. Tahap III Tahun 2035–2039;
- d. Tahap IV Tahun 2040–2045.

RPJPD Kabupaten Ciamis digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD Kabupaten Ciamis. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJMD Kabupaten Ciamis sesuai dengan visi, misi, dan program Bupati yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah antara lain RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 134

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 7 TAHUN 2024
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2024
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045



RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

2025-2045





KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan landasan strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Dokumen RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045 memuat rumusan visi dan misi Kabupaten Ciamis dua puluh tahun ke depan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah.

RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045 ini disusun berdasarkan kajian akademis serta jaring aspirasi (FGD) dengan pemerintah daerah. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan gagasan strategis Kabupaten Ciamis 2045. Dokumen ini terdiri atas enam bab yang terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah, Visi Misi Daerah, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah, serta Penutup.

Diharapkan dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Ciamis dan mendorong partisipasi seluruh pihak untuk turut aktif mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang. Akhir kata, tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dalam penyusunan RPJPD ini.

Ciamis, Agustus 2024

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	I-3
1.4. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4.1 Maksud	I-4
1.4.2 Tujuan	I-4
1.5. Sistematika Penulisan	I-4
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Aspek Geografi	II-1
2.1.1.1 Peran Strategis Daerah	II-1
2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam	II-4
2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berdasarkan KLHS	II-13
2.1.1.4 Wilayah Rawan Bencana	II-18
2.1.1.5 Persentase Alih Fungsi Lahan	II-19
2.1.1.6 Indeks Kualitas lingkungan Hidup	II-20
2.1.1.7 Indeks Risiko Bencana	II-22
2.1.1.8 Indeks Ketahanan Daerah	II-23
2.1.1.9 Indeks Ketahanan Pangan	II-23
2.1.2 Aspek Demografi	II-24
2.1.2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	II-24
2.1.2.2 Komposisi Penduduk	II-26
2.1.2.3 Masyarakat Adat	II-27
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-28
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	II-28
2.2.1.1 Indeks Gini	II-29
2.2.1.2 Inflasi	II-29
2.2.1.3 Angka Kemiskinan	II-30
2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka	II-31



2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia	II-32
2.2.1.6 Pengeluaran Per Kapita	II-33
2.2.1.7 Indeks Ekonomi Hijau	II-33
2.2.1.8 Rasio Kewirausahaan.....	II-34
2.2.1.9 Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Basis serta Unggulan Kabupaten Ciamis	II-35
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya	II-37
2.2.2.1 Angka Harapan Hidup.....	II-37
2.2.2.2 Stunting	II-38
2.2.2.3 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender	II-39
2.2.2.4 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).....	II-40
2.2.2.5 Indeks Keluarga Sehat.....	II-41
2.2.2.6 Indeks Pembangunan Keluarga	II-41
2.3. Aspek Daya Saing	II-42
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah	II-42
2.3.1.1 Pertumbuhan PDRB.....	II-42
2.3.1.2 PDRB Per Kapita	II-44
2.3.1.3 Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Per Kapita (Angka Konsumsi RT Per Kapita)	II-47
2.3.1.4 Nilai Tukar Petani.....	II-47
2.3.1.5 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)	II-48
2.3.1.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	II-49
2.3.1.7 Opini BPK	II-49
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)	II-49
2.3.2.1 Indeks Pendidikan.....	II-50
2.3.2.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.....	II-50
2.3.2.3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	II-51
2.3.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	II-52
2.3.2.5 Kualitas Tenaga Kerja.....	II-53
2.3.2.6 Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>).....	II-53
2.3.2.7 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Keatas yang Pernah Mengakses Internet	II-54
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	II-55
2.3.3.1 Infrastruktur Wilayah.....	II-55
2.3.3.2 Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	II-58
2.3.3.3 Luas Wilayah Produktif	II-58
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi	II-59
2.3.4.1 Jumlah Investasi	II-59
2.3.4.2 Indeks Desa Membangun (IDM)	II-60



2.3.4.3	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	II-60
2.3.4.4	Indeks Daya Saing Daerah	II-61
2.4.	Aspek Pelayanan Umum	II-62
2.4.1	Indeks Reformasi Birokrasi	II-62
2.4.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	II-62
2.4.3	Indeks Inovasi Daerah	II-63
2.4.4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	II-64
2.4.5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-64
2.4.6	Merit Sistem	II-65
2.4.7	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	II-66
2.5.	Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025	II-67
2.5.1	Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025	II-67
2.5.2	Rekomendasi RPJPD Tahun 2025-2045	II-69
2.6.	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Publik	II-69
2.6.1	Analisis Proyeksi Kependudukan	II-69
2.6.1.1	Proyeksi Jumlah Penduduk.....	II-69
2.6.1.2	Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	II-70
2.6.1.3	Penduduk Berdasarkan Umur	II-71
2.6.1.4	Bonus Demografi	II-71
2.6.2	Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana	II-72
2.6.2.1	Analisis Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal.....	II-72
2.6.2.2	Analisis Kebutuhan Air Bersih	II-73
2.6.2.3	Analisis Kebutuhan Energi/Listrik.....	II-73
2.6.2.4	Analisis Kebutuhan Persampahan	II-74
2.6.2.5	Analisis Kebutuhan Sarana Kesehatan.....	II-75
2.6.2.6	Analisis Kebutuhan Sarana Pendidikan	II-75
2.7.	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-77
2.7.1	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat	II-78
2.7.2	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis	II-79
2.7.2.1	Pusat Kegiatan Lokal	II-79
2.7.2.2	Pusat Pelayanan Kawasan.....	II-81
2.7.2.3	Pusat Pelayanan Lingkungan.....	II-82
2.7.3	Kawasan Strategis Kabupaten	II-83
2.7.3.1	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi.....	II-84
2.7.3.2	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosisal dan Budaya.....	II-84
2.7.4	Kebijakan Pusat dan Daerah	II-85

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS III-1

3.1.	Permasalahan	III-1
------	--------------------	-------



3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	III-1
3.1.1.1 Geografi	III-1
3.1.1.2 Demografi	III-2
3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	III-2
3.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	III-2
3.1.2.2 Kesejahteraan Sosial	III-3
3.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	III-4
3.1.3.1 Daya Saing Ekonomi.....	III-4
3.1.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	III-5
3.1.3.3 Daya Saing Infrastruktur.....	III-6
3.1.3.4 Daya Saing Iklim Investasi	III-6
3.1.4 Aspek Pelayanan Umum	III-7
3.2. Isu Strategis Daerah	III-8
3.2.1 Isu Global	III-8
3.2.1.1 Demografi Global	III-8
3.2.1.2 Geopolitik dan Geoekonomi.....	III-8
3.2.1.3 Perkembangan Teknologi	III-9
3.2.1.4 Urbanisasi Dunia	III-9
3.2.1.5 Perdagangan Internasional	III-9
3.2.2. Isu Strategis Nasional	III-9
3.2.2.1 Perpindahan IKN.....	III-9
3.2.2.2 Bonus Demografi Indonesia	III-9
3.2.2.3 Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	III-10
3.2.2.4 Konektivitas dan Infrastruktur Dasar.....	III-11
3.2.2.5 Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, serta Ketahanan Bencana	III-11
3.2.2.6 Desentralisasi dan Otonomi Daerah	III-12
3.2.3. Isu Provinsi Jawa Barat	III-12
3.2.3.1 <i>Green</i> dan <i>Blue Economy</i> serta Pembangunan Inklusif	III-13
3.2.3.2 Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	III-13
3.2.3.3 Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar	III-13
3.2.3.4 Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	III-13
3.2.3.5 Keberlanjutan Penataan Ruang	III-14
3.2.3.6 Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	III-14
3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Ciamis	III-14
3.2.4.1 Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	III-14
3.2.4.2 Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi	III-16
3.2.4.3 Infrastruktur Wilayah dan Penataan Ruang	III-17
3.2.4.4 Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.....	III-18



3.2.4.5 Tata Kelola Pemerintahan..... III-19

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH IV-1

4.1. Visi IV-1

 4.1.1 Visi Indonesia Emas 2045 IV-1

 4.1.2 Visi Jawa Barat 2045 IV-2

 4.1.3 Visi Ciamis 2025-2045 IV-3

4.2. Misi IV-7

 4.2.1 Misi (Agenda) Pembangunan Nasional 2045 IV-7

 4.2.2 Misi Pembangunan Jawa Barat 2045 IV-7

 4.2.3 Misi Pembangunan Kabupaten Ciamis IV-10

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK V-1

5.1. Arah Kebijakan V-1

5.2. Sasaran Pokok V-21

BAB VI PENUTUP VI-1

6.1. Kaidah Pelaksanaan VI-1

 6.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan VI-1

 6.1.2 Kerangka Pengendalian VI-1

 6.1.3 Mekanisme Perubahan VI-2

 6.1.4 Komunikasi Publik VI-2

6.2. Pembiayaan VI-2

6.3. Proses Pelaksanaan Manajemen Risiko VI-2

LAMPIRAN 1

Lampiran 1 Matrix Penelaahan KLHS RPJPD ke Dokumen RPJPD Ciamis 1

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Luas Wilayah Per-Kecamatan di Kabupaten Ciamis	II-1
Tabel 2.2 Kondisi Ketinggian di Kabupaten Ciamis	II-4
Tabel 2.3 Kondisi Kemiringan Lereng di Kabupaten Ciamis	II-4
Tabel 2.4 Tutupan Lahan di Kabupaten Ciamis	II-7
Tabel 2.5 Luas Tanam Sawah Kabupaten Ciamis Menurut Jenis Pengairan	II-8
Tabel 2.6 Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2013-2023 di Kabupaten Ciamis	II-19
Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja Penataan Ruang Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2023.	II-20
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2023 (ribu jiwa)	II-25
Tabel 2.9 Jumlah Kepadatan Penduduk, Angka Ketergantungan dan <i>Sex Ratio</i> di Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2023	II-25
Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ciamis Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2023 (Persen)	II-28
Tabel 2.11 Perkembangan Indikator Indeks Ekonomi Hijau	II-34
Tabel 2.12 Sektor Lapangan Usaha Sumber Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Komoditas	II-37
Tabel 2.13 PDRB Kabupaten Ciamis Menurut Lapangan Usaha AdHK Tahun 2013-2023 (Tahun Dasar 2010)	II-43
Tabel 2.14 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ciamis dan Wilayah Setara Tahun 2013-2022	II-45
Tabel 2.15 Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2023 (Persen)	II-45
Tabel 2.16 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Non-Makanan Perkapita di Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2023	II-47
Tabel 2.17 Perkembangan PAD Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2023	II-49
Tabel 2.18 Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan pada Kabupaten Ciamis tahun 2013-2023	II-49
Tabel 2.19 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Ciamis (Jiwa) Tahun 2013-2023.....	II-53
Tabel 2.20 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2023	II-54
Tabel 2.21 Capaian Infrastruktur Lainnya Tahun 2015-2023	II-58
Tabel 2.22 Persentase Luas Wilayah Produktif di Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2023	II-59
Tabel 2.23 Capaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2019-2023	II-63
Tabel 2.24 Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023	II-65
Tabel 2.25 Nilai SAKIP Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2023	II-66



Tabel 2.26 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045	II-70
Tabel 2.27 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045	II-70
Tabel 2.28 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045	II-71
Tabel 2.29 Proyeksi Bonus Demografi Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045	II-71
Tabel 2.30 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Ciamis 2025-2045	II-73
Tabel 2.31 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045	II-73
Tabel 2.32 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045	II-74
Tabel 2.33 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045	II-74
Tabel 2.34 Kebutuhan Sarana Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045.....	II-75
Tabel 2.35 Kebutuhan Sarana Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045	II-76
Tabel 2.36 Perbandingan Antara Jumlah Siswa Dengan Kebutuhan Fasilitas Sekolah di Kabupaten Ciamis	II-76
Tabel 3.1 Keterhubungan antara Permasalahan, Isu Strategis Kabupaten Ciamis, Isu Global, Isu Nasional, Isu Strategis Provinsi Jawa Barat dan Hasil Penjaringan Aspirasi	III-20
Tabel 4.1 Keselarasan Visi RPJP Nasional, Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat dan Visi RPJPD Kabupaten Ciamis	IV-4
Tabel 4.2 Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Ciamis dengan Provinsi Jawa Barat dan RPJPN Tahun 2025-2045	IV-6
Tabel 4.3 Sinkronisasi Misi RPJP Nasional, Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat dan Misi RPJPD Kabupaten Ciamis	IV-13
Tabel 5.1 Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045	V-2
Tabel 5.2 Kesesuaian Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Ciamis dengan RPJPD Jawa Barat dan RPJPN Tahun 2025-2045	V-21
Tabel 5.3 Keterkaitan Visi, Misi, Sasaran Pokok, Arah Pembangunan Serta Target Indikator Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045	V-27



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045	I-2
Gambar 1.2 Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-4
Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Ciamis	II-2
Gambar 2.2 Posisi Kabupaten Ciamis dan Pola Struktur Ruang Jawa Barat	II-3
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya	II-3
Gambar 2.4 Peta Kondisi Topografi Kabupaten Ciamis	II-5
Gambar 2.5 Peta Jenis Tanah Kabupaten Ciamis	II-6
Gambar 2.6 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Ciamis	II-7
Gambar 2.7 Peta Grid Daya Dukung Pangan di Kabupaten Ciamis	II-15
Gambar 2.8 Peta Daya Dukung Air Kabupaten Ciamis.....	II-17
Gambar 2.9 Penduduk yang Berusia Lima Belas Tahun ke Atas yang bekerja selama seminggu lalu berdasarkan status pekerjaan utama di Kabupaten Ciamis Tahun 2023....	II-35
Gambar 2.10 Analisis Tipologi Klassen Potensi Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Share dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Kabupaten Ciamis	II-36
Gambar 2.11 Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman	II-79
Gambar 2.12 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Ciamis	II-83
Gambar 2.13 Peta Ciamis dalam Mendukung Kawasan Strategis Nasional di Jawa Barat.....	II-85
Gambar 5.1 Tema Pembangunan Per Tahapan Pada RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045	V-1



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Produksi Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2020	II-13
Grafik 2.2 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2015-2023	II-21
Grafik 2.3 Capaian Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2023	II-22
Grafik 2.4 Capaian Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023	II-23
Grafik 2.5 Capaian Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2023	II-24
Grafik 2.6 Jumlah Penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023	II-24
Grafik 2.7 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2023	II-26
Grafik 2.8 Piramida Penduduk Kabupaten Ciamis Menurut Umur Tahun 2023	II-26
Grafik 2.9 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Capaian Nasional Tahun 2013- 2023	II-29
Grafik 2.10 Perbandingan Pencapaian Indeks Gini Daerah Dengan Nasional Tahun 2013 - 2023	II-29
Grafik 2.11 Perbandingan Inflasi Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013- 2023	II-30
Grafik 2.12 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ciamis Dengan Jawa Barat dan Nasional Tahun 2014-2023	II-30
Grafik 2.13 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Ciamis Dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2023	II-31
Grafik 2.14 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Ciamis Dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2023	II-31
Grafik 2.15 Perbandingan TPT Kabupaten Ciamis dengan Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013- 2023	II-32
Grafik 2.16 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ciamis dengan Jawa Barat dan Nasional tahun 2013-2023	II-32
Grafik 2.17 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2023 (Juta Rupiah)	II-33
Grafik 2.18 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Ciamis dengan Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2023	II-38
Grafik 2.19 Prevalensi <i>Stunting</i> di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2023	II-39
Grafik 2.20 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2023	II-39
Grafik 2.21 Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023	II-40
Grafik 2.22 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2023	II-41
Grafik 2.23 Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Ciamis Tahun 2021-2023	II-41
Grafik 2.23 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2023 (Juta Rupiah)	II-44



Grafik 2.24 Perkembangan Nilai Tukar Petani di Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2023	II-47
Grafik 2.25 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2011-2021	II-48
Grafik 2.26 Indeks Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2023	II-50
Grafik 2.27 Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2023.....	II-50
Grafik 2.28 Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2023.....	II-51
Grafik 2.29 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2023	II-52
Grafik 2.30 Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2018-2023.....	II-52
Grafik 2.31 Capaian Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Keatas yang Pernah Mengakses Internet Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2023.....	II-54
Grafik 2.32 Capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Tahun 2020-2023.....	II-55
Grafik 2.33 Kondisi Jalan di Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2023 (km)	II-56
Grafik 2.34 Realisasi Nilai Investasi Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2023	II-59
Grafik 2.35 Indeks Desa Membangun Tahun 2018-2023	II-60
Grafik 2.36 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2023	II-61
Grafik 2.37 Capaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023	II-61
Grafik 2.38 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023	II-62
Grafik 2.39 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2023	II-63
Grafik 2.40 Indeks SPBE Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2023	II-64
Grafik 2.41 Merit Sistem Kabupaten Ciamis Tahun 2022-2023.....	II-65
Grafik 2.42 Rata-Rata Capaian Misi RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025	II-69



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perjalanan waktu laju pembangunan yang semakin meningkat, berbagai fenomena juga semakin terasa antara lain peningkatan kerusakan dan polusi lingkungan, peningkatan kebutuhan pangan, peningkatan produk industri untuk pemenuhan kebutuhan penduduk, serta peningkatan produksi bahan bakar minyak dan sumber energi lain guna mendukung proses berjalannya roda perekonomian masyarakat. Namun disisi lain, ketersediaan sumber daya alam yang terbatas menunjukkan laju pengurangan yang cukup tajam. Permintaan akan sumber daya alam untuk pemenuhan pembangunan pada saatnya akan sampai pada titik jenuh, karena keterbatasan daya dukung lingkungan. Dampaknya berantai dan berlipat ganda terhadap proses pembangunan berikutnya. Kemungkinan yang terjadi adalah terganggunya berbagai proses pembangunan apabila tidak ada intervensi atau upaya mengatasi kondisi yang berlangsung. Pengendalian populasi penduduk, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, penggunaan teknologi, Laju Pertumbuhan Ekonomi khususnya industrialisasi, merupakan faktor-faktor utama yang mempengaruhi prediksi kondisi pembangunan jangka panjang kedepan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan responsif perlu disusun oleh pemerintah untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran. Perencanaan pembangunan perlu diwujudkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang (dua puluh tahun), menengah (lima tahun), dan tahunan (satu tahun). Dokumen rencana pembangunan tersebut berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

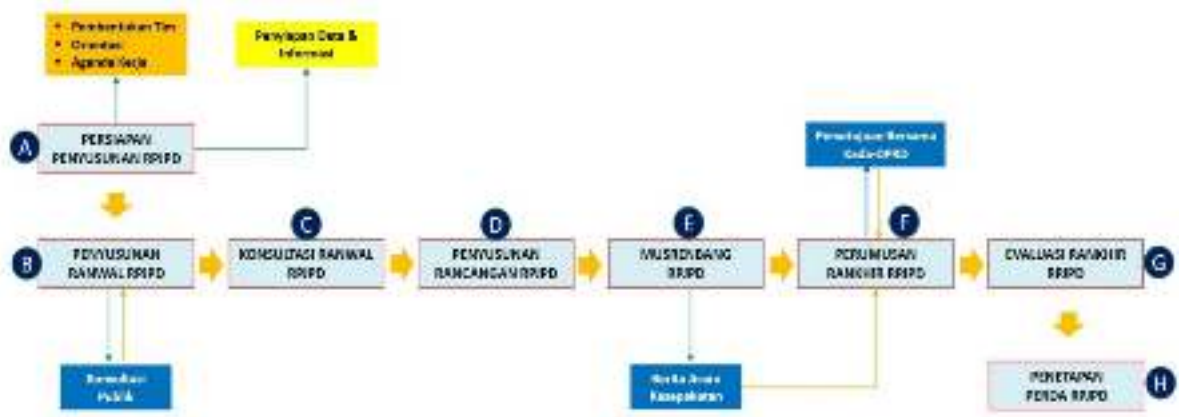
Rencana Pembangunan Jangka Panjang merupakan dokumen rencana untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang disingkat RPJPD, memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi. RPJPD merupakan acuan untuk menyusun dokumen perencanaan yang ada di bawahnya dan sebagai upaya untuk mewujudkan keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Kebijakan pembangunan Jangka Panjang Nasional dan kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan kebijakan Pembangunan Kabupaten Ciamis.

RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045 disusun untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan, disamping sebagai salah satu upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat, lebih jauh juga untuk mendukung pembangunan Nasional dalam rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Ciamis dilakukan melalui upaya pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down*, holistik-tematik, integratif dan spasial dengan tahapan penyusunan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045 dimulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir sampai tahap penetapan Perda. Tahapan penyusunan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045 dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:



Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Salah satu tahapan penting dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045 diawali dengan pelaksanaan penjangkaran aspirasi masyarakat serta *Focus Group Discussion* (FGD) dengan berbagai *stakeholders* sebagai wujud pendekatan partisipatif dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya dilakukan pembahasan lebih spesifik bersama dengan perangkat daerah dan DPRD untuk mendapatkan kesepakatan terhadap rancangan visi, misi dan arah kebijakan serta sasaran pokok pembangunan Kabupaten Ciamis 20 (dua puluh) tahun kedepan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



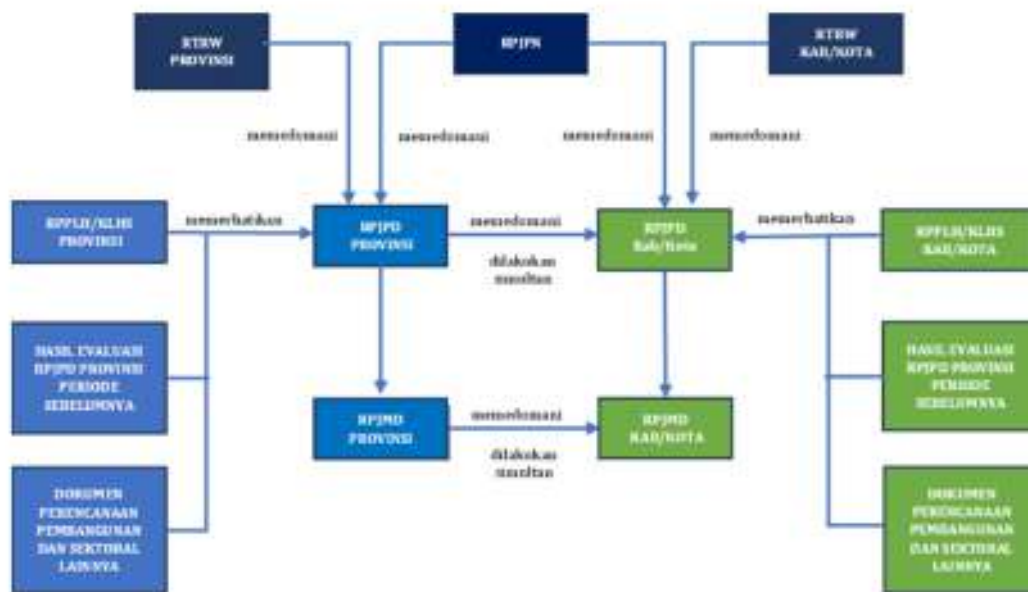
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023/Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6866)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 119).

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Penyusunan RPJPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi RPJPD Tahun 2025-2045 harus sinergis dengan dokumen perencanaan pusat dan dokumen perencanaan provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota. RPJPD Kabupaten Ciamis disusun dengan berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan secara simultan dan terkoordinasi. Hal ini dilakukan guna menyelaraskan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Ciamis dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Penyusunan RPJPD Kabupaten Ciamis disusun dengan memperhatikan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042, RTRW Kabupaten Ciamis 2023-2043 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).



Gambar 1.2
Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber: Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045 dimaksudkan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan serta untuk memberikan arah sekaligus acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten Ciamis, masyarakat maupun *stakeholders* lainnya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045 yang dijadikan pedoman dalam merencanakan pembangunan Kabupaten Ciamis 20 tahun ke depan sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- Tersusunnya RPJPD yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045 mencakup aspek pembangunan di segala bidang kehidupan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Adapun sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menguraikan kondisi eksisting pembangunan daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, pelayanan umum, Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025, Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik, dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menjelaskan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis sesuai konteks global, nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Ciamis.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Menjelaskan terkait visi yang ingin diwujudkan hingga Tahun 2045 dan misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Menjelaskan arah kebijakan yang merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun, serta menjelaskan sasaran pokok yang merupakan gambaran rangkaian kinerja dalam rangka pencapaian visi daerah.

BAB VI PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat. Dalam perkembangannya Kabupaten Ciamis telah dua kali mengalami pemekaran daerah yaitu dibentuknya Kota Banjar pada Tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, serta dibentuknya Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Pemekaran daerah ini membawa perubahan terhadap kondisi umum Kabupaten Ciamis dalam berbagai aspek terutama kondisi geografis/wilayah, demografis/penduduk dan perekonomian serta aspek-aspek lainnya. Secara umum gambaran mengenai kondisi Kabupaten Ciamis pada saat ini adalah sebagai berikut:

2.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1 Peran Strategis Daerah

Secara geografis letak wilayah Kabupaten Ciamis berada pada koordinat $7^{\circ} 34' 29''$ sampai dengan $7^{\circ} 3' 7''$ Lintang Selatan dan $108^{\circ} 10' 1''$ sampai dengan $108^{\circ} 43' 24''$ Bujur Timur berada di ujung Tenggara Provinsi Jawa Barat yang berjarak sekitar 121 km dari ibukota provinsi, serta mempunyai posisi strategis yang dilalui jalan nasional lintas Provinsi Jawa Barat-Provinsi Jawa Tengah dan jalan nasional lintas Ciamis-Cikijing-Cirebon dengan batas-batas administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan
- Sebelah Barat : Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya
- Sebelah Timur : Kota Banjar dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pangandaran

Kabupaten Ciamis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat yang wilayahnya telah dikurangi dengan Kota Banjar berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya wilayah Kabupaten Ciamis kembali berkurang setelah dibentuknya Kabupaten Pangandaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat sehingga luas wilayah Kabupaten Ciamis menjadi 159.593,70 ha.

Tabel 2.1

Luas Wilayah Per-Kecamatan di Kabupaten Ciamis

No	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	%
1	Banjaranyar	10.985,48	6,88
2	Banjarsari	5.800,99	3,63
3	Baregbeg	3.823,53	2,40
4	Ciamis	3.379,69	2,12
5	Cidolog	5.632,19	3,53
6	Cihaurbeuti	6.406,34	4,01
7	Cijeungjing	6.066,67	3,80
8	Cikoneng	4.705,86	2,95
9	Cimaragas	2.643,13	1,66
10	Cipaku	7.855,73	4,92
11	Cisaga	8.006,63	5,02



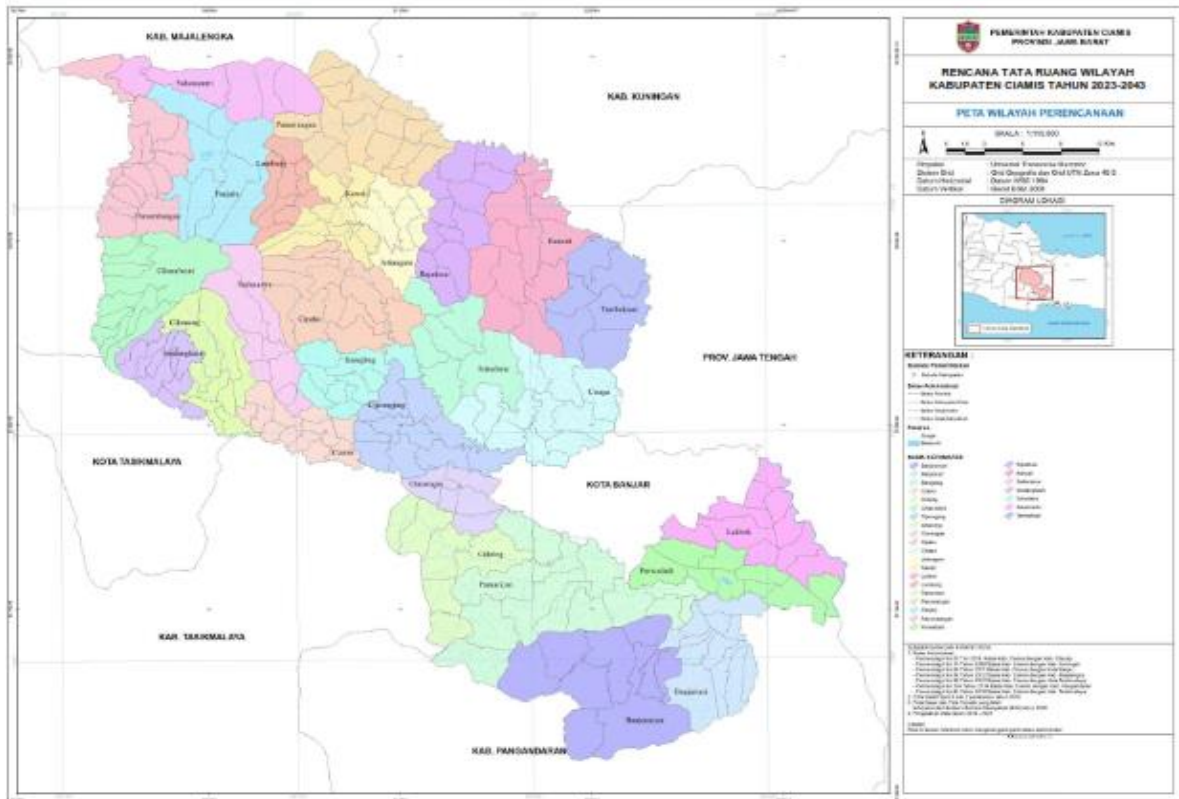
No	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	%
12	Jatinagara	3.412,28	2,14
13	Kawali	3.622,75	2,27
14	Lakbok	5.763,47	3,61
15	Lumbung	2.786,89	1,75
16	Pamarican	12.431,62	7,79
17	Panawangan	8.226,07	5,15
18	Panjalu	7.348,71	4,60
19	Panumbangan	6.312,83	3,96
20	Purwadadi	5.090,08	3,19
21	Rajadesa	6.159,26	3,86
22	Rancah	8.661,26	5,43
23	Sadananya	4.617,49	2,89
24	Sindangkasih	2.984,72	1,87
25	Sukadana	5.789,08	3,63
26	Sukamantri	5.055,25	3,17
27	Tambaksari	6.025,71	3,78
Kabupaten Ciamis		159.593,70	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043

Wilayah terluas adalah Kecamatan Pamarican dan yang terkecil adalah Kecamatan Cimaragas. Selanjutnya secara administrasi pemerintahan pada Tahun 2023 Kabupaten Ciamis terdiri dari 27 kecamatan, 7 kelurahan, 258 desa, 1.227 dusun, 2.830 RW dan 8.762 RT.

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang letaknya berada di ujung Timur Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Ciamis berada pada posisi strategis yang dilalui jalan Nasional lintas Provinsi Jawa Barat - Provinsi Jawa Tengah dan jalan Provinsi lintas Ciamis - Cirebon - Jawa Tengah.

Gambar 2.1
Peta Administratif Kabupaten Ciamis

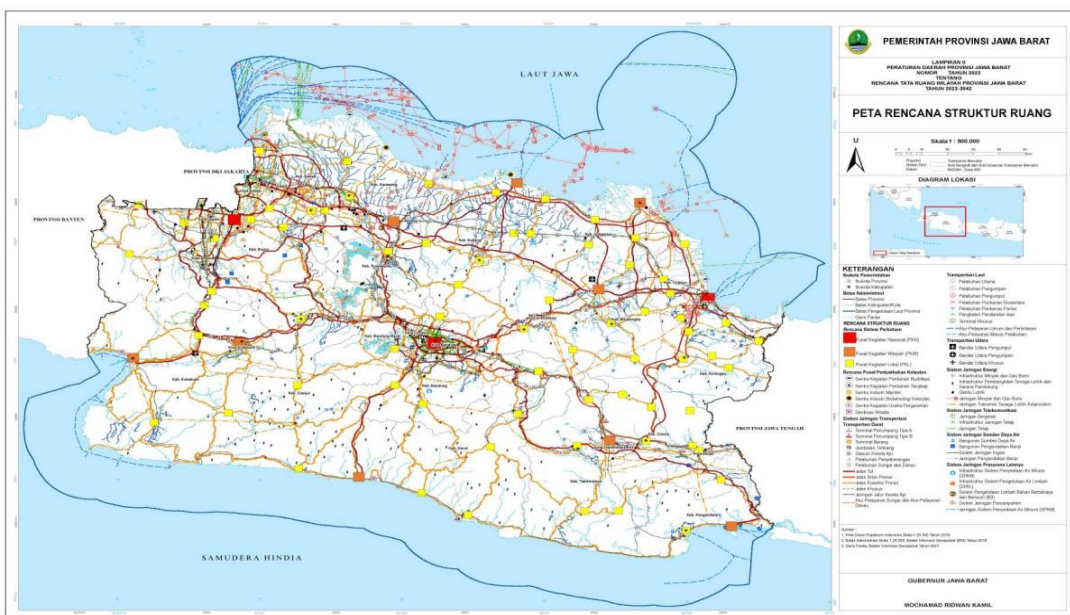


Sumber: RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043



Kabupaten Ciamis merupakan akses penghubung menuju Pusat Pertumbuhan Pangandaran yang merupakan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat dan juga penghubung menuju Kawasan Perkotaan Cilacap di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sehingga diharapkan mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat Selatan. Adapun beberapa kebijakan pembangunan yang secara positif akan mendorong aktivitas ekonomi di Kabupaten Ciamis, diantaranya Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka, pengembangan Bandara Wiriadinata di Tasikmalaya yang dikembangkan sebagai bandara yang melayani penerbangan komersil yang akan berdampak signifikan kepada kunjungan wisatawan dan juga rencana pembangunan jalan tol yang rutenya akan melalui Gedebage, Majalaya, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran.

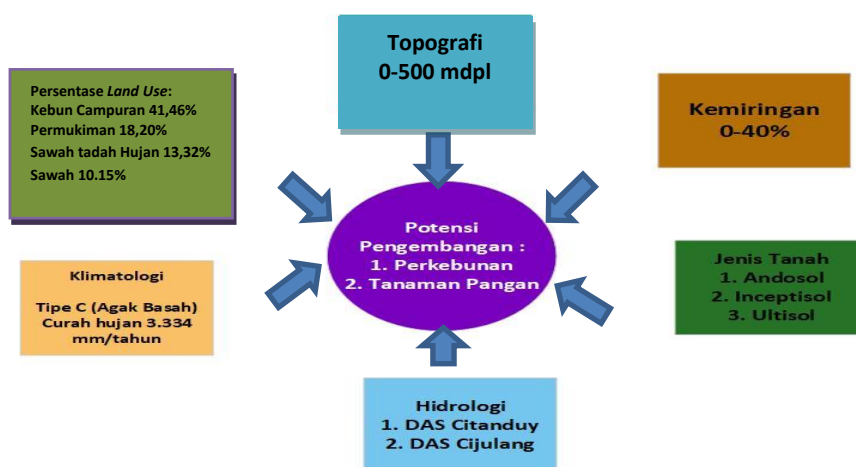
Gambar 2.2
Posisi Kabupaten Ciamis dan Pola Struktur Ruang Jawa Barat



Sumber: RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043

Dari gambaran mengenai kondisi fisik wilayah Kabupaten Ciamis mulai dari topografi, kemiringan, jenis tanah, hidrologi, klimatologi, penggunaan lahan dan aspek fisik lainnya dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Ciamis memiliki pengembangan potensi paling dominan dalam pengembangan kawasan budidaya yaitu perkebunan dan tanaman pangan.

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya



Sumber: Hasil Analisis, 2024



2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Ciamis berada pada ketinggian antara 0 – 1.775 mdpl. Elevasi Kabupaten Ciamis cenderung semakin tinggi dari selatan ke utara kecuali bagian barat yang wilayahnya perbukitan. Jika dilihat dari kondisi kemiringan lerengnya, Kabupaten Ciamis memiliki kemiringan lereng yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%. Kemiringan lereng yang besar terdapat di daerah perbukitan dan terdapat gawir sesar di bagian tengah timur Kabupaten Ciamis yang memanjang arah tenggara-barat laut sehingga kemiringan lerengnya sangat curam. Kondisi ketinggian dan kemiringan di Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Kondisi Ketinggian di Kabupaten Ciamis

No	Kecamatan	Ketinggian (Ha)				Jumlah
		0–500 mdpl	500-1000 mdpl	1000–1500 Mdpl	1500–1775 Mdpl	
1	Banjaranyar	10.664,08	321,40			10.985,48
2	Banjarsari	5.619,50	181,48			5.800,99
3	Baregbeg	3.823,53				3.823,53
4	Ciamis	3.379,69				3.379,69
5	Cidolog	5.534,04	98,14			5.632,19
6	Cihaurbeuti	1.585,39	2.814,62	1.796,30	210,03	6.406,34
7	Cijeungjing	6.066,67				6.066,67
8	Cikoneng	2.612,50	1.796,98	296,37		4.705,86
9	Cimaragas	2.643,13				2.643,13
10	Cipaku	6.254,62	1.537,09	64,02		7.855,73
11	Cisaga	8.006,63				8.006,63
12	Jatinagara	3.308,93	103,35			3.412,28
13	Kawali	2.770,54	804,63	47,57		3.622,75
14	Lakbok	5.763,47				5.763,47
15	Lumbung	1.165,75	1.594,55	26,59		2.786,89
16	Pamarican	12.281,80	149,82			12.431,62
17	Panawangan	2.848,34	5.333,50	44,23		8.226,07
18	Panjalu	12,58	5.917,64	1.194,86	223,63	7.348,71
19	Panumbangan	1.213,30	4.224,94	869,78	4,80	6.312,83
20	Purwadadi	5.090,08				5.090,08
21	Rajadesa	5.079,39	1.079,87			6.159,26
22	Rancah	8.288,92	372,33			8.661,26
23	Sadananya	2.133,26	1.834,68	635,42	14,12	4.617,49
24	Sindangkasih	2.245,64	739,08			2.984,72
25	Sukadana	5.789,08				5.789,08
26	Sukamantri		3.713,80	1.341,45		5.055,25
27	Tambaksari	6.017,16	8,55			6.025,71
Kabupaten Ciamis		120.198,01	32.626,49	6.316,61	452,59	159.593,70
Proporsi (%)		75,32	20,44	3,96	0,28	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043

Tabel 2.3
Kondisi Kemiringan Lereng di Kabupaten Ciamis

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng (Ha)						Jumlah
		0–2 %	2-8 %	8-15 %	15-25 %	25-40 %	>40 %	
1	Banjaranyar	1.496,14	3.081,02	3.095,81	2.757,60	546,34	8,57	10.985,48
2	Banjarsari	3.656,13	494,93	505,08	824,51	318,10	2,24	5.800,99
3	Baregbeg	1.055,10	1.571,25	995,70	201,48			3.823,53
4	Ciamis	1.837,44	1.071,64	307,31	114,74	48,56		3.379,69
5	Cidolog	798,57	2.157,23	1.511,43	927,33	234,93	2,70	5.632,19
6	Cihaurbeuti	719,51	1.093,06	1.010,55	1.675,68	1.532,88	374,66	6.406,34
7	Cijeungjing	2.635,27	2.573,41	517,22	287,94	47,47	5,35	6.066,67
8	Cikoneng	758,80	1.224,84	1.114,70	826,04	657,10	124,37	4.705,86
9	Cimaragas	851,63	1.059,66	341,71	310,81	78,22	1,11	2.643,13

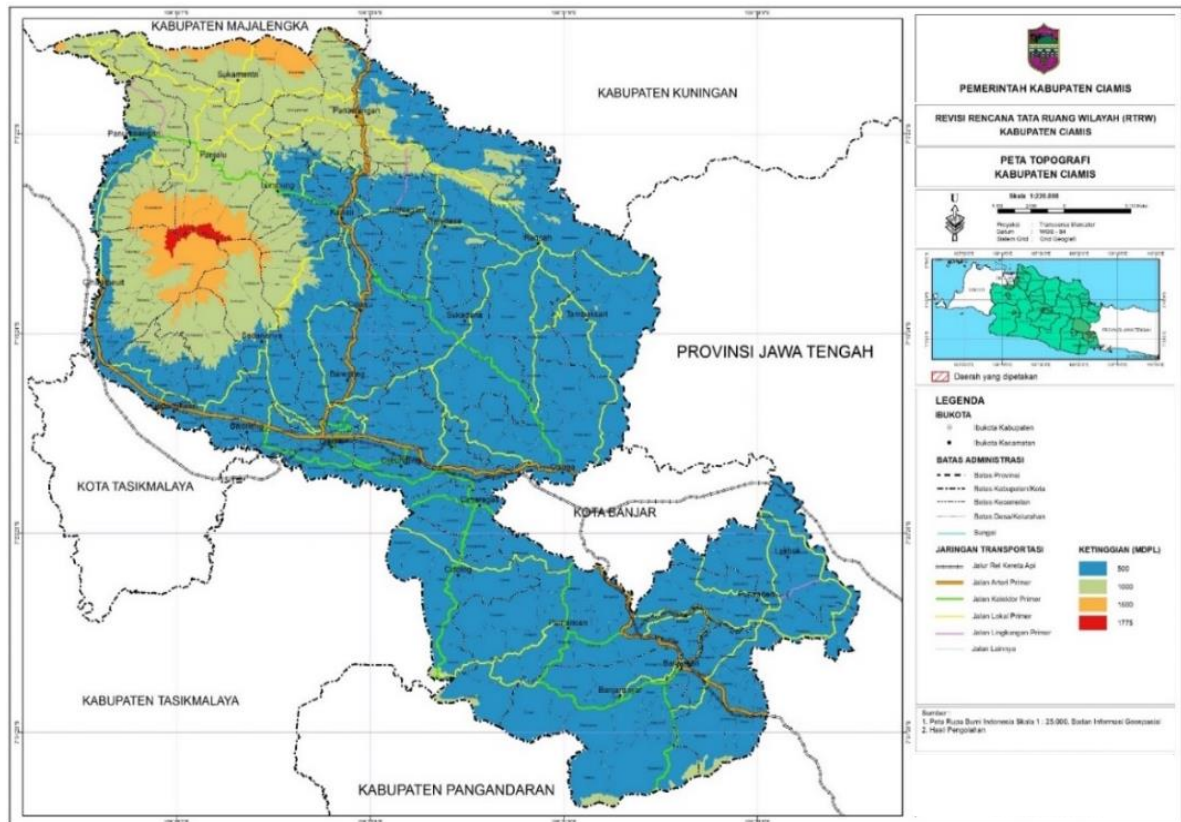


No	Kecamatan	Kemiringan Lereng (Ha)						Jumlah
		0-2 %	2-8 %	8-15 %	15-25 %	25-40 %	>40 %	
10	Cipaku	596,21	3.406,94	2.660,52	970,25	203,22	18,60	7.855,73
11	Cisaga	1.899,22	3.713,73	1.965,13	415,39	13,16		8.006,63
12	Jatinagara	331,34	1.243,16	1.313,30	522,00	2,49		3.412,28
13	Kawali	648,23	1.505,33	828,60	510,73	126,28	3,58	3.622,75
14	Lakbok	5.485,30	172,45	91,01	14,71			5.763,47
15	Lumbung	460,12	878,06	687,34	652,09	105,31	3,97	2.786,89
16	Pamarican	4.080,00	2.724,93	2.788,72	2.225,53	589,52	22,93	12.431,62
17	Panawangan	377,37	2.330,69	2.852,90	2.342,58	302,62	19,92	8.226,07
18	Panjalu	451,67	1.547,92	2.297,22	2.275,11	723,01	53,79	7.348,71
19	Panumbangan	848,05	1.079,18	1.796,41	1.932,90	610,99	45,30	6.312,83
20	Purwadadi	3.709,63	849,51	459,02	71,93			5.090,08
21	Rajadesa	724,48	2.513,37	2.140,63	681,23	92,45	7,09	6.159,26
22	Rancah	974,46	3.363,14	3.149,11	1.020,62	147,04	6,89	8.661,26
23	Sadananya	570,73	1.252,98	941,88	990,81	722,68	138,40	4.617,49
24	Sindangkasih	861,33	770,98	715,60	561,23	75,58		2.984,72
25	Sukadana	1.357,92	2.428,22	1.534,05	465,58	3,30		5.789,08
26	Sukanantri	302,23	1.201,59	1.892,94	1.439,23	195,49	23,78	5.055,25
27	Tambaksari	867,98	3.270,02	1.480,82	352,07	54,82		6.025,71
Kabupaten Ciamis		38.354,87	48.579,22	38.994,69	25.370,12	7.431,55	863,25	159.593,70
Proporsi (%)		24,03	30,44	24,43	15,90	4,66	0,54	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Ciamis didominasi oleh ketinggian 0-500 mdpl dan kemiringan lereng 2-8%. Kondisi ketinggian >1.000 mdpl dan kemiringan >25% berada dekat dengan daerah pegunungan. Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran kondisi ketinggian dan kemiringan di Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.4
Peta Kondisi Topografi Kabupaten Ciamis



Sumber: RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043



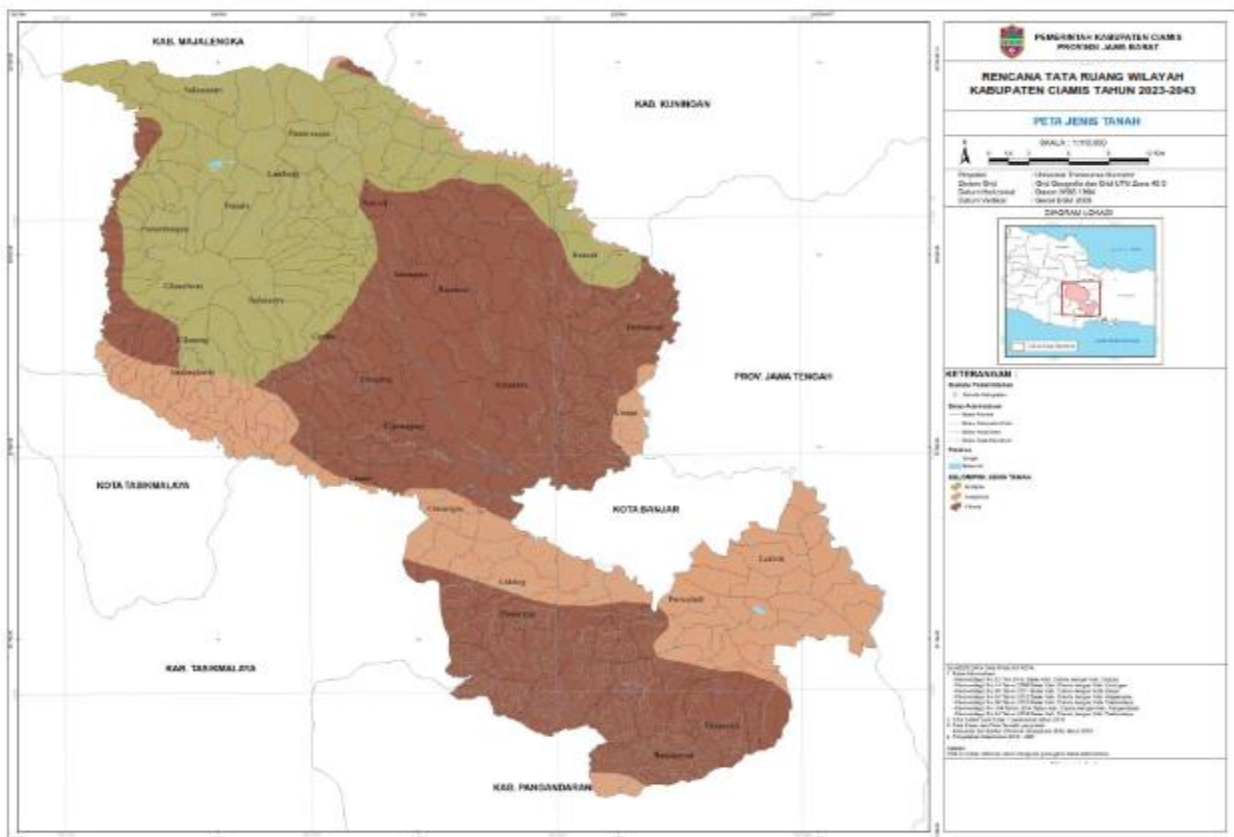
Kabupaten Ciamis memiliki 3 jenis tanah yang berbeda, antara lain andisol, inceptisol, dan ultisol. Andisol adalah tanah yang berkembang dari bahan vulkanik seperti abu vulkan, batu apung, sinder, lava, dan/atau bahan vulkanoklastik yang fraksi koloidnya didominasi oleh mineral "short-range-order" atau ordo kisaran pendek, seperti alophan, Imogolit, ferihidrit, atau kompleks Al-humus. Dalam keadaan lingkungan tertentu, pelapukan mineral aluminosilikat primer dalam bahan induk non-vulkanik dapat juga menghasilkan mineral "short-range-order" sebagian tanah seperti ini juga masuk kedalam andisol.

Tanah inceptisol memiliki kadar posfor rendah, sedangkan kadar alumunium dan zat besinya tinggi. Keasaman yang dikandung jenis tanah ini antara 5,0 sampai dengan 7 dengan tingkat kejenuhan 0-72 persen. Oleh karena itu, tanah ini termasuk tanah yang memiliki tingkat keasaman sedang. Sementara itu, tanah yang baik untuk digunakan lahan pertanian adalah tanah yang sifatnya netral, memiliki tingkat keasaman 6,7 sampai 7,0. Oleh karena itu, jenis tanah inceptisol kurang cocok untuk dijadikan lahan pertanian, namun cocok untuk tanaman perkebunan.

Ultisol adalah tanah dengan horizon argilik atau kandik bersifat asam dengan kejenuhan basa rendah. Ultisol bervariasi dalam warna dari ungu-merah, oranye kemerahan dengan terang-menyilaukan, untuk oranye pucat kekuningan dan bahkan beberapa ada kekuningan-coklat terang banyak nutrisi, seperti kalsium dan potasium. Sifat-sifat penting pada tanah ultisol berkaitan dengan jumlah fosfor dan mineral-mineral resisten dalam bahan induk, komponen-komponen ini umumnya terdapat dalam jumlah yang tidak seimbang, walupun tidak terdapat beberapa pengecualian.

Untuk lebih jelasnya mengenai jenis tanah di Kabupaten Ciamis, dapat lihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.5
Peta Jenis Tanah Kabupaten Ciamis

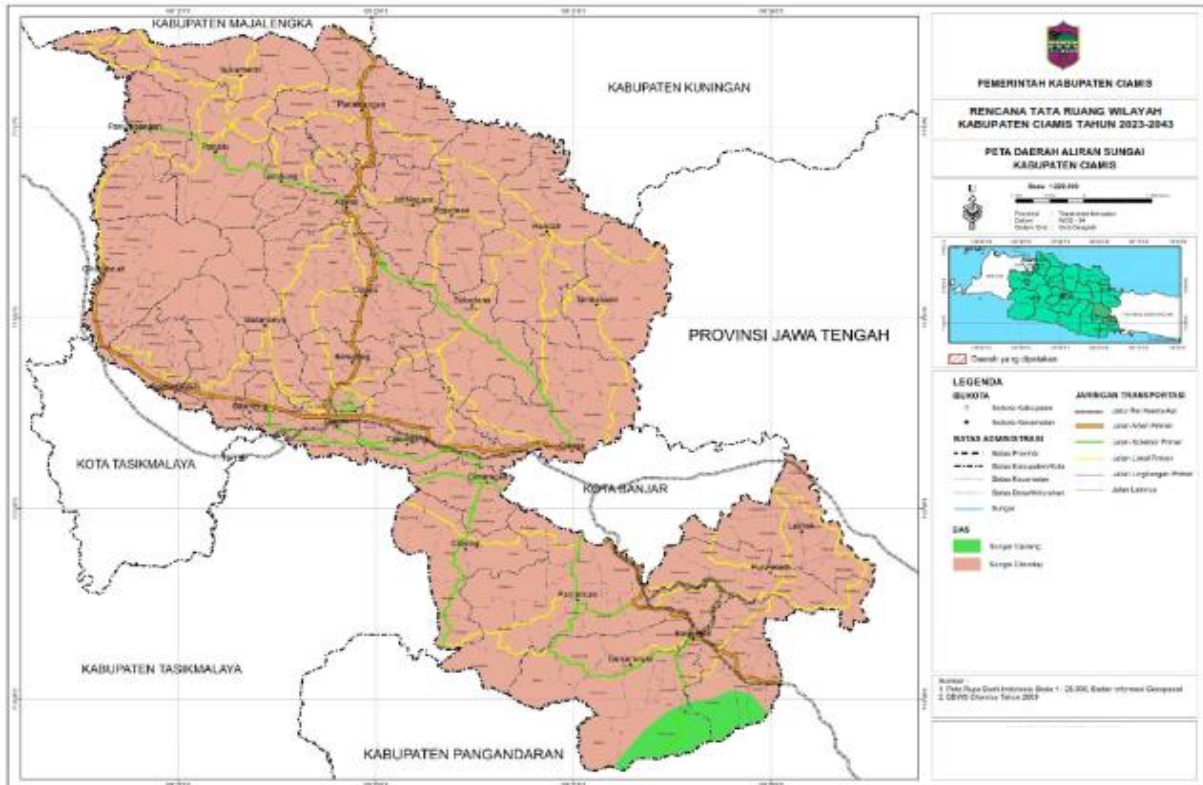


Sumber: RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043



Kabupaten Ciamis dialiri oleh sungai utama yaitu Sungai Citanduy yang mengalir mulai dari Gunung Cakrabuana (hulu) di Kabupaten Tasikmalaya dan bermuara di Sagara Anakan Provinsi Jawa Tengah dengan anak-anak sungainya terdiri dari Sungai Cimuntur, Sungai Cijolang, dan Sungai Ciseel. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ciamis termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy ($\pm 156.511,77$ ha), sedangkan sisanya termasuk ke dalam DAS Cijolang, yaitu Kecamatan Banjaranyar ($\pm 1.781,77$ ha) dan Kecamatan Banjarsari ($\pm 1.300,16$ ha).

Gambar 2.6
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Ciamis



Sumber: RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043

Potensi air baku tersebut pada saat ini dimanfaatkan untuk pengairan/irigasi dan air bersih. Disamping itu, potensi Sumber Daya Air juga dimanfaatkan untuk kegiatan lain seperti pariwisata. Tutupan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu, misalnya permukiman, perkotaan, dan persawahan. Tutupan lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Kabupaten Ciamis memiliki tutupan lahan yang bervariasi, yaitu perkebunan, hutan, ladang, sawah, semak/belukar, dan lahan terbangun lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Tutupan Lahan di Kabupaten Ciamis

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Proporsi (%)
1	Danau/Situ	112,17	0,07
2	Kolam	5,43	0,00
3	Padang Rumput	118,80	0,07
4	Permukiman/Tempat Kegiatan	29.044,75	18,20
5	Sawah Tadah Hujan	21.263,16	13,32
6	Perkebunan	10.758,28	6,74
7	Sungai	1.163,85	0,73



No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Proporsi (%)
8	Semak Belukar	169,33	0,11
9	Kebun Campuran	66.164,00	41,46
10	Tegalan Ladang	36,92	0,02
11	Lahan Terbuka	86,18	0,05
12	Sawah	16.197,03	10,15
13	Hutan	14.473,81	9,07
Kabupaten Ciamis		159.593,70	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa tutupan lahan Kabupaten Ciamis didominasi oleh kebun campuran dengan luas 66.164 ha, kemudian disusul oleh permukiman dengan luas 29.044,75 ha.

Sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan yang memiliki kontribusi terbesar dalam laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ciamis. Jenis pertanian di Kabupaten Ciamis terbagi menjadi beberapa komoditi. Salah satu komoditinya adalah padi yang ditanam berdasarkan sistem pengairan lahannya terbagi menjadi sawah irigasi teknis, irigasi ½ teknis, irigasi sederhana/desa, tadah hujan dan lebak.

Jenis sawah yang mendominasi Kabupaten Ciamis adalah sawah irigasi sebesar 26.457,42 ha. Sedangkan jenis sawah yang paling sedikit adalah sawah lainnya sebesar 424,41 ha atau <2% mengingat keberadaannya yang beresiko terkena banjir. Kecamatan yang memiliki lahan sawah terluas adalah Kecamatan Laktok. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.5
Luas Tanam Sawah Kabupaten Ciamis Menurut Jenis Pengairan

No	Kecamatan	Jenis Sawah (Ha)				Jumlah
		Irigasi	Tadah Hujan	Pasang Surut	Lainnya	
1	Banjarsari	1.679,00	451,00	-	-	2.130,00
2	Banjaranyar	505,00	591,00	-	-	1.096,00
3	Laktok	3.194,00	-	-	148,00	3.342,00
4	Purwadadi	1.898,00	624,00	-	-	2.522,00
5	Pamarican	1.858,00	1.058,00	-	-	2.916,00
6	Cidolog	642,00	473,00	-	-	1.115,00
7	Cimaragas	187,00	206,00	-	-	393,00
8	Cijeungjing	946,00	30,00	-	-	976,00
9	Cisaga	1.017,47	322,18	-	148,00	1.487,65
10	Tambaksari	711,00	817,00	-	-	1.528,00
11	Rancah	1.048,17	800,37	-	-	1.848,54
12	Rajadesa	868,00	450,00	-	-	1.318,00
13	Sukadana	593,00	248,00	-	-	841,00
14	Ciamis	615,00	210,37	-	-	825,37
15	Baregbeg	609,00	41,00	-	-	650,00
16	Cikoneng	570,00	114,00	-	90,41	774,41
17	Sindangkasih	669,00	100,00	-	38,00	807,00
18	Cihaurbeuti	1.058,00	228,00	-	-	1.286,00
19	Sadananya	707,80	2,20	-	-	710,00
20	Cipaku	1.190,80	41,00	-	-	1.231,80
21	Jatinagara	466,00	12,00	-	-	478,00
22	Panawangan	1.760,00	502,00	-	-	2.262,00
23	Kawali	657,18	209,00	-	-	866,18
24	Lumbung	821,00	98,00	-	-	919,00



No	Kecamatan	Jenis Sawah (Ha)				Jumlah
		Irigasi	Tadah Hujan	Pasang Surut	Lainnya	
25	Panjalu	554,00	716,00	-	-	1.270,00
26	Sukamantri	502,00	394,00	-	-	896,00
27	Panumbangan	1.131,00	55,00	-	-	1.186,00
Kabupaten Ciamis		26.457,42	8.793,12	-	424,41	35.674,95

Sumber: RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043

Sementara itu berdasarkan Kabupaten Ciamis Dalam Angka Tahun 2023 yang menyajikan data capaian Tahun 2022 untuk jumlah produksi jenis palawija terbanyak adalah ubi kayu dengan hasil produksi sebesar 22.762 ton dan jagung sebesar 20.590 ton. Kecamatan yang paling berkontribusi besar dalam produksi ubi kayu adalah Kecamatan Banjaranyar sebesar 5.126 ton dan Kecamatan Sukadana sebesar 4.000 ton, sedangkan untuk jagung adalah Kecamatan Panumbangan sebesar 4.385 ton dan Kecamatan Tambaksari sebesar 4.116 ton.

Selain padi dan palawija, Kabupaten Ciamis memiliki potensi ekonomi pada tanaman hortikultura meliputi sayur-sayuran dan buah-buahan. Jenis komoditi sayur-sayuran yang hasil produksinya paling mendominasi adalah cabai merah besar dengan hasil produksi sebesar 19.552 kuintal dan mentimun sebesar 24.618 kuintal. Kecamatan yang paling berkontribusi besar dalam produksi cabai merah besar adalah Kecamatan Cihaurbeuti sebesar 3.453 kuintal dan Kecamatan Panawangan sebesar 3.220 kuintal, sedangkan untuk mentimun adalah Kecamatan Cihaurbeuti sebesar 3.107 kuintal dan Kecamatan Sadananya sebesar 2.640 kuintal.

Sedangkan untuk jenis komoditi buah-buahan, hasil produksinya didominasi oleh pisang sebanyak 984.109 kuintal yang sebagian besar hasil produksi pisang tersebut akan diolah menjadi makanan ringan seperti sale pisang dan pepaya sebesar 469.944 kuintal. Kecamatan yang paling berkontribusi besar dalam produksi pisang adalah Kecamatan Purwadadi sebesar 156.617 kuintal dan Kecamatan Banjaranyar sebesar 155.874 kuintal, sedangkan untuk pepaya adalah Kecamatan Cidolog sebesar 137.386 kuintal dan Kecamatan Purwadadi sebesar 93.160 kuintal. Berikut ini pembagian kawasan potensi daerah di Kabupaten Ciamis :

a. Kawasan Tanaman Pangan

Untuk kawasan tanaman pangan adalah kawasan usaha tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha tanaman pangan. Kawasan tanaman pangan dapat berupa kawasan yang telah eksis atau calon lokasi baru dan lokasinya dapat berupa hamparan atau *spot partial* (luasan terpisah) namun terhubung dengan aksesibilitas memadai.

Berdasarkan komoditasnya pertanian tanaman pangan di Kabupaten Ciamis berupa pertanian lahan basah. Sesuai potensi yang ada, pertanian lahan basah yang akan dikembangkan di Kabupaten Ciamis berupa komoditas tanaman padi. Delineasi pertanian lahan basah untuk komoditas tanaman padi berdasarkan sebarannya bisa dikategorikan sebagai *spot partial* (luasan terpisah) yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Kawasan tanaman pangan (P-1) berupa Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 35.611 ha di seluruh kecamatan.

b. Kawasan Hortikultura

Hortikultura merupakan sektor kegiatan yang sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama petani. Komoditas hortikultura juga relatif memiliki kandungan gizi yang baik sehingga juga dapat menunjang kesejahteraan nutrisi masyarakat.



Kecamatan Panjalu merupakan salah satu kecamatan yang memiliki luasan panen untuk komoditi hortikultura terbesar di Kabupaten Ciamis, yaitu untuk komoditi aneka cabai, mentimun, dan tomat. Kecamatan Sukamantri juga merupakan daerah yang memiliki potensi untuk berbagai komoditi hortikultura, produksi utamanya yaitu cabai besar. Kecamatan Sukamantri merupakan Kecamatan dengan produksi cabai besar terbesar di Kabupaten Ciamis. Kawasan hortikultura (P-2) seluas kurang lebih 111 ha meliputi:

- 1) Kecamatan Panjalu;
- 2) Kecamatan Panumbangan;
- 3) Kecamatan Sukamantri.

c. Potensi Peternakan

Pertumbuhan usaha budidaya ayam yang dilaksanakan oleh perusahaan besar terintegrasi akan mengalihkan usaha ke Wilayah Priangan Timur (termasuk didalamnya Kabupaten Ciamis). Sejalan dengan tertutupnya penambahan jumlah/perluasan usaha dimaksud di beberapa wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Barat (antara lain: Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung), serta beberapa wilayah di Provinsi Banten. Adapun rencana pengembangan peternakan terdiri dari:

- 1) Budidaya Ayam Ras Pedaging *Close House System*;
- 2) Pembibitan Ayam Ras Pedaging;
- 3) Budidaya Ayam Ras Petelur;
- 4) Budidaya Ayam Bukan Ras;
- 5) Pembibitan Ayam Bukan Ras;
- 6) Pengembangan Sapi Perah;
- 7) Pembangunan Rumah Potong Unggas Skala Menengah;
- 8) Pengolahan Daging Unggas Skala Menengah;
- 9) Penggembalaan Terbatas Sapi Potong;
- 10) Budidaya Sapi Potong Penggemukan;
- 11) Pembibitan Sapi Potong;
- 12) Pasar Hewan Terpadu;
- 13) Sentra Kuliner Hasil Produksi Peternakan.

d. Potensi Perikanan

Pengembangan komoditas perikanan sangat ditentukan oleh adanya dukungan lahan dan ketersediaan air yang memenuhi standar teknis. Adapun rencana pengembangan perikanan terdiri dari:

- 1) Pengembangan Komoditas Perikanan Berdasarkan Potensi Kewilayahan (Sentra);
- 2) Sentra Kuliner Hasil Produksi Perikanan;
- 3) Pasar Ikan Bersih;
- 4) Pengembangan Benih Ikan;
- 5) Pengembangan *Restocking*;
- 6) Pengolahan ikan/hasil produksi perikanan.

e. Kawasan Perkebunan

Kawasan yang diperuntukkan bagi perkebunan dikelola oleh rakyat maupun pemerintah. Lahan potensial dengan peruntukan pengembangan tanaman tahunan/perkebunan tersebar di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Dengan arah pengembangan terutama pada lahan-lahan yang kurang/tidak mendukung untuk pengembangan pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering.

Untuk mencapai arah pengembangan kawasan tanaman tahunan/perkebunan diperlukan intervensi berupa pembangunan yang dapat menarik aktivitas kegiatan pertanian tahunan/perkebunan. Selain itu, diperlukan pengembangan infrastruktur yang



mendukung kegiatan tanaman tahunan/perkebunan seperti jaringan jalan, jaringan komunikasi, listrik dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengelolaan kawasan perkebunan meliputi:

- 1) Pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan perkebunan/tanaman tahunan seperti jaringan listrik, telekomunikasi, jalan, agroindustri dengan fungsi yang didasarkan pada potensi tanaman tahunan/perkebunan dan sarana prasarana lainnya yang dapat menunjang perkebunan.
- 2) Pengembangan fasilitas pertanian penting (Terminal Agribisnis, Sub Terminal Agribisnis, *Outlet* Agribisnis, tempat pengumpulan hasil pergudangan, kios sarana produksi pertanian, dan industri pengolahan hasil, dan lain-lain) beserta lokasi masing-masing dengan memperhatikan potensi pertanian dan jarak minimum (mudah dijangkau).
- 3) Pengembangan sumber daya manusia (petani dan aparatur pemerintah) dan kelembagaan agribisnis.
- 4) Pengembangan sistem, kelembagaan keuangan, dan perkreditan, serta sistem informasi pasar pertanian dalam rangka menunjang kesinambungan usaha pertanian sub sektor perkebunan/tanaman tahunan.
- 5) Pengembangan kebijakan pemerintah untuk mendukung pengembangan tanaman tahunan/perkebunan.
- 6) Memperluas wilayah pemasaran produksi tanaman perkebunan/tanaman tahunan baik lokal maupun pasar ekspor.

Pengembangan agroindustri dengan fungsi yang didasarkan pada potensi perkebunan/tanaman tahunan wilayah sekitarnya dan pengembangan pusat pengumpul dan distribusi bagi pertanian dengan memperhatikan jarak minimum (mudah dijangkau). Perkebunan seluas kurang lebih 29.262 ha meliputi semua kecamatan.

f. Potensi Industri

Peruntukan ruang untuk rencana pengembangan kegiatan industri di Kabupaten Ciamis meliputi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang berada di Kecamatan Cijeungjing seluas 478 ha.

g. Potensi Pariwisata

Rencana pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Ciamis dilakukan untuk memanfaatkan potensi wisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Ciamis dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan devisa dari sektor pariwisata dan meningkatkan investasi di daerah;
- 2) Mendorong kegiatan lain yang ada di sekitarnya;
- 3) Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 4) Meningkatkan kontribusi pada pendapatan daerah dan nasional;
- 5) Meningkatkan kesempatan kerja;
- 6) Melestarikan budaya lokal; dan
- 7) Meningkatkan perkembangan masyarakat.

Guna menghasilkan hasil yang optimal, maka pengelolaan potensi wisata meliputi:

- 1) Pengembangan destinasi pariwisata;
- 2) Peningkatan aksesibilitas;
- 3) Penyediaan fasilitas pendukung;
- 4) Perbaikan kondisi lingkungan;
- 5) Pengembangan ekonomi pendukung;
- 6) Peningkatan proses pemasaran dengan promosi;



- 7) Dukungan masyarakat setempat;
- 8) Peningkatan SDM pengelola;
- 9) Pengembangan pemasaran pariwisata;
- 10) Pengembangan kemitraan kepariwisataan melalui penataan obyek wisata unggulan;
- 11) Penataan sarana dan prasarana akomodasi pariwisata;
- 12) Pengembangan potensi budaya daerah dan penggalian potensi lainnya yang didukung dengan sistem informasi dan promosi yang mudah diakses oleh wisatawan;
- 13) Peningkatan manajemen kepariwisataan yang terintegrasi.

Kawasan-kawasan pariwisata Kabupaten Ciamis yang memiliki potensi alam dan budaya yang khas serta mampu menjawab isu strategis pengembangan pariwisata Provinsi terbagi menjadi:

- 1) Kawasan strategis pembangunan pariwisata Ciamis dan sekitarnya;
- 2) Kawasan pembangunan pariwisata Panjalu-Kawali dan sekitarnya;
- 3) Kawasan pembangunan pariwisata Cijeungjing-Tambaksari dan sekitarnya;
- 4) Kawasan pembangunan pariwisata Banjarsari-Cidolog dan sekitarnya.

Secara detail, sebaran daya tarik wisata di masing-masing Kawasan Strategis Pengembangan dan Pembangunan Pariwisata sebagai berikut:

- 1) Objek wisata budaya, meliputi:
 - a) Situs Pangcalikan Gunung Padang;
 - b) Padepokan Seni Rengganis;
 - c) Situs Jambansari;
 - d) Situ Lengkong Panjalu;
 - e) Astana Gede Kawali;
 - f) Situs Batu Panjang;
 - g) Kesenian Gambyung Buhun;
 - h) Cagar Budaya Karangkamulyan;
 - i) Kampung Kuta;
 - j) Situs Tambaksari I;
 - k) Situs Tambaksari II;
 - l) Situs Gunung Susuru;
 - m) Situs Salawe Cimaragas;
 - n) Upacara Adat Ngikis;
 - o) Makam Keramat Sang Hyang Cipta Permana Prabudigaluh;
 - p) Upacara Adat Misalin;
 - q) Situs Pangrumasan Kyai Bagus Santri;
 - r) Makam Kramat Situs Kawasen.
- 2) Objek wisata alam meliputi:
 - a) Situ Rancamaya;
 - b) Arung Jeram;
 - c) Situ Wangi;
 - d) Situ Cibubuhan;
 - e) Curug Tujuh Cibolang;
 - f) Curug Panganten;
 - g) Situ Cekdam Kadupandak;
 - h) Curug Cipatuhan;
 - i) Curug Gambir Santolo;
 - j) Air Terjun Cigumawang;
 - k) Curug Batu Ampar;
 - l) Gunung Pangalusan.



- 3) Objek wisata berbasis minat khusus atau buatan meliputi:
 - a) Museum Galuh Imbanagara;
 - b) Museum Galuh Pakuan;
 - c) Waterboom Tirta Sumber Jaya Cipangalun;
 - d) Waterboom Sukahaji Cihaurbeuti;
 - e) Taman Raflesia;
 - f) Stadion Galuh;
 - g) Museum Bumi Alit;
 - h) Musem Fosil Tambaksari;
 - i) Tirta Sejuk Rancah;
 - j) Objek Wisata Cipanas Geger Bentang;
 - k) Pemandian Pancuran Tujuh.

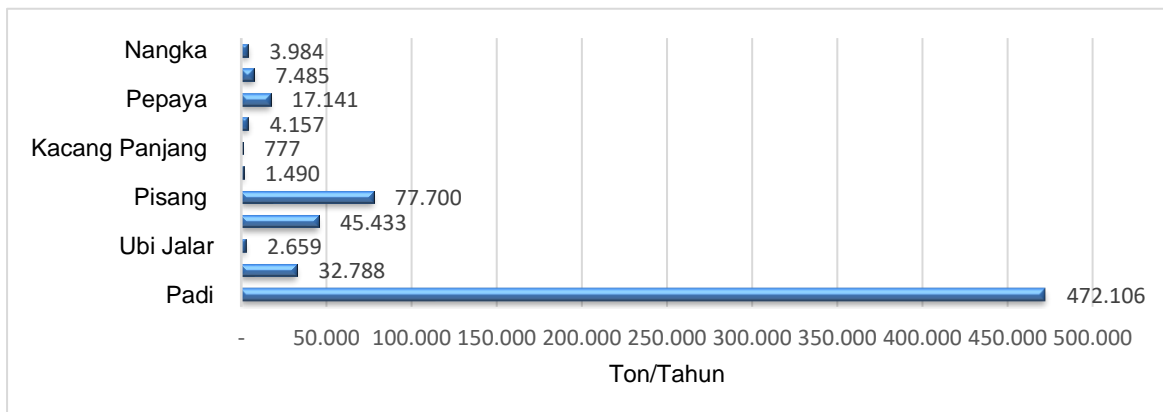
2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berdasarkan KLHS

Pada kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), kemampuan lingkungan Kabupaten Ciamis dalam menyediakan dan mendukung kebutuhan hidup penduduk dihitung sebagai daya dukung pangan dan daya dukung air. Pangan dan air dipilih sebagai variabel untuk mengkuantifikasi daya dukung lingkungan hidup sebagai kebutuhan dasar manusia. Ambang batas daya dukung pangan dan air dihitung dengan membandingkan jumlah kebutuhan dengan jumlah ketersediaan. Jika jumlah kebutuhan melebihi jumlah ketersediaan, maka ambang batas daya dukung telah terlampaui dan membutuhkan intervensi untuk tetap dapat mendukung dan memenuhi kebutuhan dasar penduduk. Dalam perhitungan daya dukung diasumsikan tidak terdapat aliran materi air dan pangan atau *closed system*.

1. Daya Dukung Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Daya dukung pangan dihitung untuk melihat status daya dukung pangan, dimana status daya dukung dilihat dari ambang batas daya dukung. Daya dukung dikatakan telah melampaui ambang batas jika kebutuhan pangan lebih tinggi dibandingkan dengan ketersediaan yang dapat diberikan suatu wilayah. Dalam perhitungan ketersediaan dilakukan inventarisasi data produksi pangan dan dikonversi ke kilogram kalori per tahun dan memperhatikan Indeks Jasa Ekosistem (IJE) penyediaan pangan, kemudian kebutuhan pangan dihitung berdasarkan jumlah penduduk dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) dalam peta sistem grid. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut.

Grafik 2.1
Produksi Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2020



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD, 2023



Tabel diatas merupakan komoditi pangan atau ketersediaan pangan di Kabupaten Ciamis dalam satuan ton kemudian dikonversi ke kilogram kalori per tahun (kkal/tahun). Daya dukung pangan di Kabupaten Ciamis yang dianalisa berdasarkan tingkat kecamatan dibagi atas 2 kategori yaitu telah melampaui daya dukung pangan dan Belum melampaui daya dukung pangan. Berdasarkan hal tersebut, kecamatan di Kabupaten Ciamis dibagi 2 yaitu :

a) Status Kecamatan yang telah melampaui daya dukung pangan yaitu tidak aman.

Kecamatan dengan status "*telah melampaui daya dukung pangan*" di Kabupaten Ciamis sebanyak 11 (sebelas) kecamatan, secara terperinci, yaitu Kecamatan Ciamis dengan rasio 0,30, hal ini bisa dipahami bahwa Kecamatan Ciamis merupakan perkotaan dengan tutupan lahan dominan merupakan permukiman kawasan perdagangan dan perkantoran yang merupakan memiliki karakteristik aspek sosial dan ekonomi yang heterogen. Selanjutnya adalah Kecamatan Sindangkasih dengan rasio sebesar 0,61, Cikoneng dengan rasio sebesar 0,63, Kecamatan Baregbeg dengan rasio 0,64. Kecamatan Cijeunjing dan Kecamatan Cipaku dengan rasio 0,70. Kecamatan Kawali memiliki rasio sebesar 0,82, Kecamatan Jatinagara memiliki rasio sebesar 0,80, serta Kecamatan Cimaragas memiliki rasio 0,96. Kecamatan kecamatan tersebut yang sudah melampaui daya dukung pangan memerlukan distribusi komoditi pangan dari kecamatan lainnya bahkan kabupaten lainnya yang daya dukung pangan belum terlampaui.

b) Kecamatan yang belum melampaui daya dukung pangan yaitu aman.

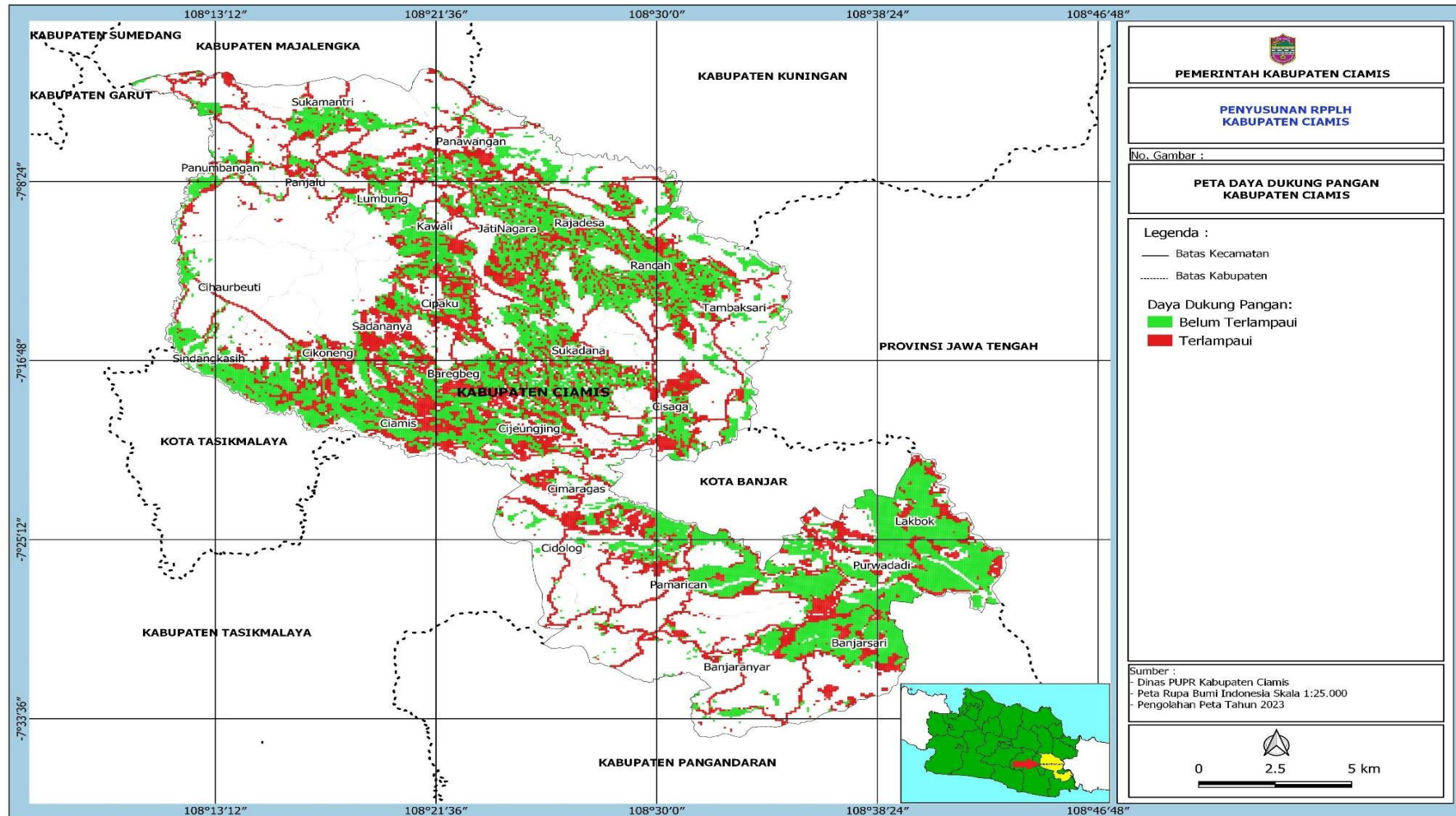
Beberapa kecamatan yang memiliki daya dukung pangan dengan status '*belum melampaui daya dukung pangan*' yaitu, terdapat di enam belas (16) kecamatan, terdiri dari 2 kategori:

- 1) *Status Kurang Aman (12 Kecamatan)*: yaitu Status daya dukung yang berada pada rasio 1 sampai rasio 2, yaitu berada pada kecamatan sebagai berikut: Kecamatan Sukadana rasio sebesar 1,92, Kecamatan Panawangan rasio sebesar 1,64. Kecamatan Banjaranyar rasio sebesar 1,55, Kecamatan Pamarican rasio sebesar 1,54, Kecamatan Cisaga rasio sebesar 1,41, Kecamatan Sukamantri rasio sebesar 1,24, Kecamatan Panumbangan rasio sebesar 1,28, Kecamatan Lumbung rasio sebesar 1,21, Kecamatan Banjarsari rasio sebesar 1,15, Kecamatan Panjalu rasio sebesar 1,13. Kecamatan Rajadesa rasio sebesar 1,08, Kecamatan Rancah rasio sebesar 1,01. Kecamatan yang memiliki status kurang aman, yakni daya dukung masih belum melampaui namun tidak dapat memberikan kontribusi bagi kecamatan lain yang mengalami kekurangan gizi.
- 2) *Status Aman (4 Kecamatan)*: yaitu status daya dukung yang berada pada rasio >2 (lebih besar sama dengan dari 2) yang secara rinci berada di kecamatan berikut ini: Kecamatan Kecamatan Tambaksari memiliki rasio 3,84, Kecamatan Cidolog dengan rasio 3,09. Berikutnya adalah Kecamatan Purwadadi dengan rasio sebesar 2,42, Kecamatan Lakbok dengan rasio 2,09. Pada rasio ini kecamatan tersebut mampu memberikan kontribusi kalori kecukupan gizi pada daerah lainnya yang kekurangan terutama pada kecamatan kecamatan dengan daya dukung pangan yang terlampaui dengan rasio yang kurang dari 1 (rasio <1).

Daya dukung pangan di Kabupaten Ciamis pada tahun 2031 dianalisa berdasarkan data jumlah penduduk yang diproyeksikan hingga 10 tahun ke depan atau sampai tahun 2031, sementara untuk jumlah produksi atau komoditi pangan diasumsikan tetap atau tidak mengalami perubahan. Secara keseluruhan Kabupaten Ciamis masih dominan dengan status pangan belum terlampaui (59,26 %), dengan status kurang aman sebanyak 12 kecamatan serta status aman sebanyak 4 kecamatan. Sedangkan ada 11 kecamatan yang sudah melampaui target. Jumlah konsumsi atau kebutuhan pangan sebesar 1.799.249.844.950 Kkal (atau 1,8 Trilyun Kkal) per tahun 2031 berdasarkan jumlah penduduk tahun proyeksi 2031 sebesar 2.292.768 Jiwa, dengan rasio rata-rata sebesar 0,9.



Gambar 2.7
Peta Grid Daya Dukung Pangan di Kabupaten Ciamis





2. Daya Dukung Air

a. Daya Dukung Air Tahun 2022

Daya dukung air di Kabupaten Ciamis yang dianalisa berdasarkan tingkat kecamatan dibagi atas 2 (dua) kategori yaitu: Telah melampaui daya dukung air dan Belum melampaui daya dukung air.

- 1) Kecamatan yang Telah melampaui daya dukung air yaitu Tidak aman.
Kecamatan dengan status "*telah melampaui daya dukung air*" di Kabupaten Ciamis sebanyak 3 (tiga) kecamatan, secara terperinci yaitu Kecamatan Purwadadi dengan rasio 0,90, Kecamatan Ciamis dengan rasio sebesar 0,90, dan Kecamatan Lumbung memiliki rasio 0,70.
- 2) Kecamatan yang belum melampaui daya dukung air yaitu aman.
Beberapa kecamatan yang memiliki daya dukung air dengan status '*belum melampaui daya dukung air*' yaitu, terdapat di 24 (dua puluh empat) kecamatan.

b. Daya Dukung Air Tahun 2052

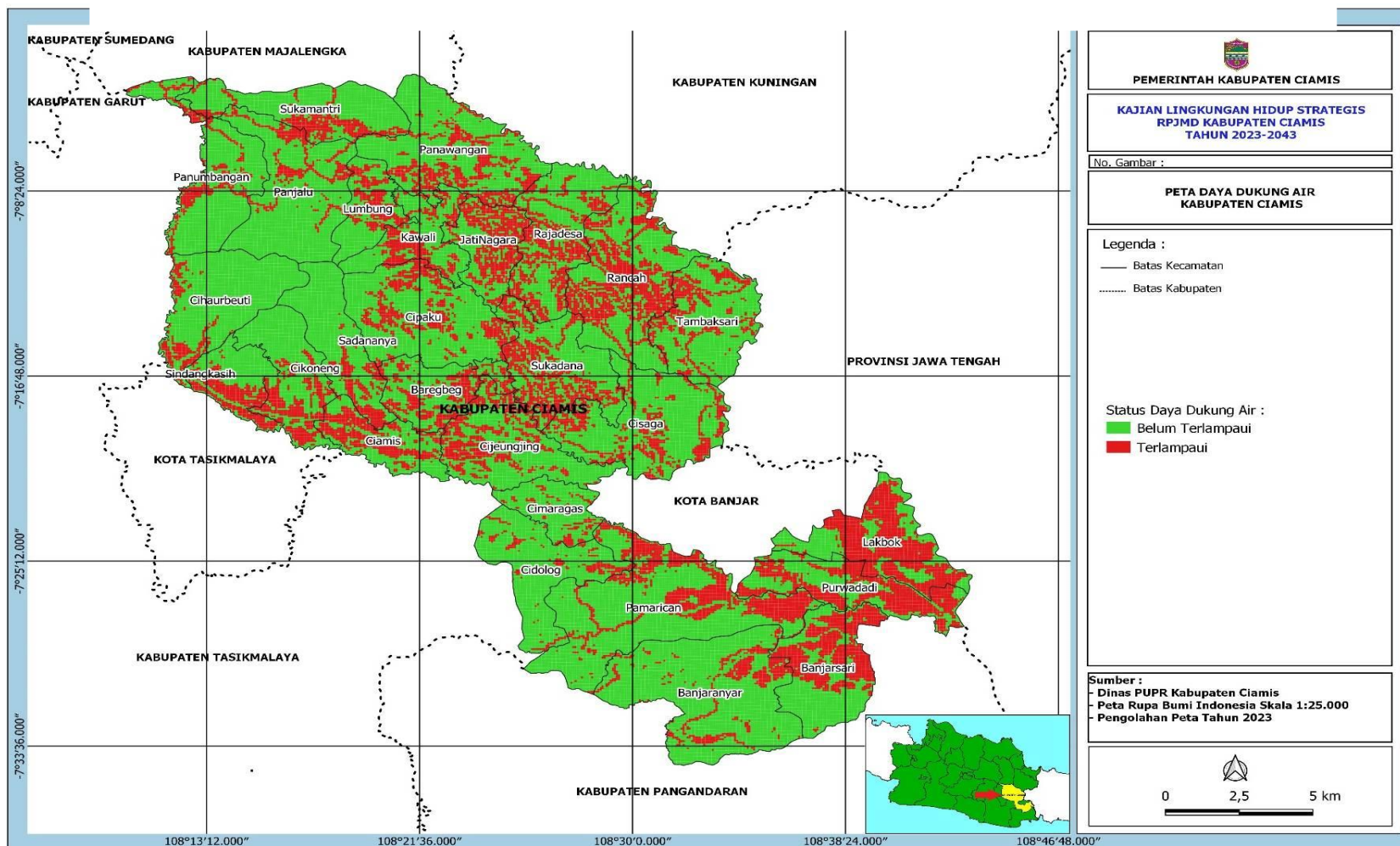
Daya dukung air di Kabupaten Ciamis yang dianalisa berdasarkan tingkat kecamatan dibagi atas 2 (dua) kategori yaitu:

- Telah melampaui daya dukung air
 - Belum melampaui daya dukung air
- 1). Kecamatan yang Telah melampaui daya dukung air yaitu Tidak aman.
Kecamatan dengan status "*telah melampaui daya dukung air*" di Kabupaten Ciamis sebanyak 4 (empat) kecamatan, secara terperinci, yaitu Kecamatan Purwadadi dengan rasio 0,90, Kecamatan Ciamis dengan rasio sebesar 0,80, Kecamatan Baregbeg dengan rasio sebesar 0,90 dan Kecamatan Lumbung memiliki rasio 0,60.
 - 2). Kecamatan yang belum melampaui daya dukung air yaitu aman.
Beberapa kecamatan yang memiliki daya dukung air dengan status '*belum melampaui daya dukung air*', yaitu, terdapat di 23 (dua puluh tiga) kecamatan.

Secara keseluruhan Kabupaten Ciamis memiliki status daya dukung air belum terlampaui dengan surplus sebesar 3.647.993.725 m³/tahun dengan kebutuhan air sebesar 2.081.223.044 m³/tahun, dengan rasio rata-rata 1,8 serta memiliki ambang batas 2.631.057. Namun terdapat 4 kecamatan tahun 2052 yang telah terindikasi memiliki status daya dukung air sudah terlampaui sebesar 206.098 atau 15.080,19 Ha (9,45 %) dari luas wilayah Kabupaten Ciamis.



Gambar 2.8
Peta Daya Dukung Air Kabupaten Ciamis





2.1.1.4 Wilayah Rawan Bencana

Kejadian bencana yang telah terjadi di Kabupaten Ciamis sangat dipengaruhi oleh kondisi morfologi, fisiografi maupun sosial dari wilayah tersebut. Hal-hal menyangkut pemanfaatan lahan yang berkaitan dengan proses alam akan saling berinteraksi dan mempengaruhi kondisi masyarakat serta tatanan pemerintahan. Aktivitas alam yang berinteraksi dengan masyarakat akan menciptakan anggapan yang berlainan salah satunya adalah bencana.

Kondisi kebencanaan merupakan kondisi-kondisi yang mempengaruhi potensi bencana yang akan timbul, seperti faktor alam, non alam maupun akibat ulah manusia. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kondisi/gambaran wilayah, baik dari segi geografis, demografis, topografis dan iklim suatu daerah. Kondisi kebencanaan suatu daerah akan berbeda dengan daerah lainnya, hal ini terkait karakteristik daerah kajian.

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu daerah dengan potensi berbagai jenis bencana. Seringnya kejadian bencana di Kabupaten Ciamis memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah dalam upaya penanggulangannya. Beberapa tahun belakangan ini upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Ciamis masih cenderung berfokus pada responsif, sehingga efektifitas upaya pengurangan risiko bencana belum dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

Kejadian bencana yang telah terjadi di Kabupaten Ciamis sangat dipengaruhi oleh kondisi morfologi, fisiografi maupun sosial dari wilayah tersebut. Hal-hal menyangkut pemanfaatan lahan yang berkaitan dengan proses alam akan saling berinteraksi dan mempengaruhi kondisi masyarakat serta tatanan pemerintahan. Aktivitas alam yang berinteraksi dengan masyarakat akan menciptakan anggapan yang berlainan, salah satunya adalah bencana.

Berdasarkan hasil analisis terhadap parameter ancaman, kerentanan, dan kapasitas yang telah dilakukan, maka secara umum tingkat risiko untuk masing-masing bencana di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

1. Tingkat risiko bencana banjir di Kabupaten Ciamis menunjukkan tingkat risiko tinggi. Kecamatan yang memiliki tingkat risiko tinggi adalah Cikoneng, Lakbok, dan Rancah. Kecamatan yang memiliki tingkat risiko sedang adalah Banjaranyar, Banjarsari, Baregbeg, Ciamis, Cidolog, Cihaurbeuti, Cijeungjing, Cimaragas, Cipaku, Cisaga, Jatinagara, Kawali, Lumbung, Pamarican, Panawangan, Panjalu, Panumbangan, Purwadadi, Rajadesa, Sadananya, Sindangkasih, Sukadana, Sukamantri, Tambaksari. Kecamatan yang memiliki tingkat risiko rendah hanya pada Kecamatan Cipaku;
2. Tingkat risiko bencana banjir bandang di Kabupaten Ciamis menunjukkan tingkat risiko sedang terdapat di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Baregbeg, Ciamis, Cidolog, Cijeungjing, Cikoneng, Cimaragas, Cipaku, Cisaga, Jatinagara, Kawali, Lumbung, Pamarican, Panawangan, Panjalu, Panumbangan, Purwadadi, Rajadesa, Rancah, Sadananya, Sindangkasih, Sukadana, Sukamantri, Tambaksari. Kecamatan yang memiliki tingkat risiko rendah hanya Kecamatan Lakbok, sedangkan kecamatan lainnya tidak berpotensi dengan bencana banjir bandang;
3. Tingkat risiko bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Ciamis menunjukkan tingkat risiko tinggi. Kecamatan yang memiliki tingkat risiko tinggi adalah Banjarsari, Cihaurbeuti, Cikoneng, Lakbok, Panawangan, Panumbangan, dan Sindangkasih, sedangkan kecamatan lainnya memiliki tingkat risiko sedang;
4. Tingkat risiko bencana gempa bumi di Kabupaten Ciamis menunjukkan tingkat risiko sedang di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis;



5. Tingkat risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ciamis menunjukkan tingkat risiko tinggi. Kecamatan yang memiliki tingkat risiko tinggi adalah Cihaurbeuti, Cikoneng, Panjalu, Panumbangan. Kecamatan yang memiliki tingkat risiko sedang adalah Banjaranyar, Banjarsari, Baregbeg, Ciamis, Cidolog, Cijeungjing, Cimaragas, Cipaku, Cisaga, Kawali, Lakbok, Lumbung, Pamarican, Panawangan, Purwadadi, Rajadesa, Rancah, Sadananya, Sindangkasih, Sukadana, Sukamantri, dan Tambaksari. Kecamatan yang memiliki tingkat risiko rendah hanya pada Kecamatan Jatinagara dan Rajadesa;
6. Tingkat risiko bencana kekeringan di Kabupaten Ciamis menunjukkan tingkat risiko tinggi. Kecamatan yang memiliki tingkat risiko tinggi adalah Banjaranyar, Banjarsari, Baregbeg, Ciamis, Cihaurbeuti, Cikoneng, Cipaku, Lakbok, Panjalu, Panumbangan, Sindangkasih, Sukadana, dan Sukamantri, sedangkan kecamatan lainnya memiliki tingkat risiko sedang;
7. Tingkat risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Ciamis menunjukkan tingkat risiko sedang di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana di Kabupaten Ciamis disusun rekomendasi yang terbagi ke dalam 2 (dua) bagian. Pertama, rekomendasi generik yang merupakan rekomendasi umum yang berhubungan dengan kebijakan administratif dan kebijakan teknis. Rekomendasi ini bersumber dari hasil kajian ketahanan daerah. Kedua, rekomendasi spesifik yang merupakan serangkaian aksi pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan bencana yang dapat dilakukan terhadap faktor penyebab terjadinya bencana. Rekomendasi ini bersumber dari hasil pengkajian bahaya dan kerentanan serta melihat tingkat risiko yang ada di setiap bencana.

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Ciamis setidaknya terdapat tujuh jenis bencana alam yang pernah terjadi dengan total 3.673 kejadian bencana selama periode Tahun 2013 hingga 2023. Adapun uraian dari kejadian bencana sebagai berikut:

Tabel 2.6
Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2013 – 2023 di Kabupaten Ciamis

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian per Tahun											Total
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Tanah Longsor	120	114	135	190	191	114	62	244	202	255	192	1819
2	Cuaca Ekstrim	91	90	179	114	196	154	180	194	135	133	84	1550
3	Banjir	51	17	11	42	28	11	5	25	16	31	29	266
4	Gempa Bumi	1	2	1	0	5	0	1	4	0	5	3	22
5	Kekeringan	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	62	64
6	Kebakaran hutan dan lahan	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	10	13
7	Banjir Bandang	0	0	0	0	2	1	4	2	2	0	0	11
JUMLAH TOTAL		263	223	326	346	422	280	255	469	357	424	380	3673

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, 2024

Tabel di atas menunjukkan kejadian bencana yang paling banyak di Kabupaten Ciamis yaitu tanah longsor pada Tahun 2023 sebanyak 192 kali. Hal ini berhubungan dengan kondisi topografi Kabupaten Ciamis yang memiliki banyak lereng curam dan tidak stabil yang rentan mengalami longsor, terutama jika curah hujan tinggi. Terdapat tiga bencana yang setiap tahunnya sering terjadi yakni, tanah longsor, cuaca ekstrim dan banjir.

2.1.1.5 Persentase Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan adalah perubahan penggunaan lahan dari satu jenis menjadi jenis lainnya, misalnya, mengubah lahan pertanian menjadi permukiman, industri, atau pertambangan, perubahan ini sering terjadi akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perkembangan ekonomi.



Salah satu upaya untuk mengendalikan alih fungsi lahan adalah dengan adanya penataan ruang, dimana didalamnya terdapat proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dokumen Perencanaan tata ruang yang telah disusun antara lain RTRW dan RDTR yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Ciamis.

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Penataan Ruang Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2023

Indikator	Satuan	Tahun											
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Pengendalian Alih Fungsi Lahan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Luas Kawasan Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	35.611	35.606	35.595
-LP2B	Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	27.962	27.962	27.962
-LCP2B	Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7.649	7.644	7633
Luas Lahan Sawah Dilindungi (LSD)	Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30.449	30.444	30.441

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, 2024

Pengendalian alih fungsi lahan di Kabupaten Ciamis selama kurun waktu 2013-2023 sebesar 100% dengan didukung kesesuaian perizinan terhadap tata ruang. Hal ini mencerminkan bahwa proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Ciamis telah dilaksanakan dengan baik, namun perubahan luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus menjadi perhatian khusus untuk menjaga ketersediaan pangan di masa yang akan datang.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Didalam KP2B terdapat Lahan Sawah yang dilindungi yaitu lahan baku sawah yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

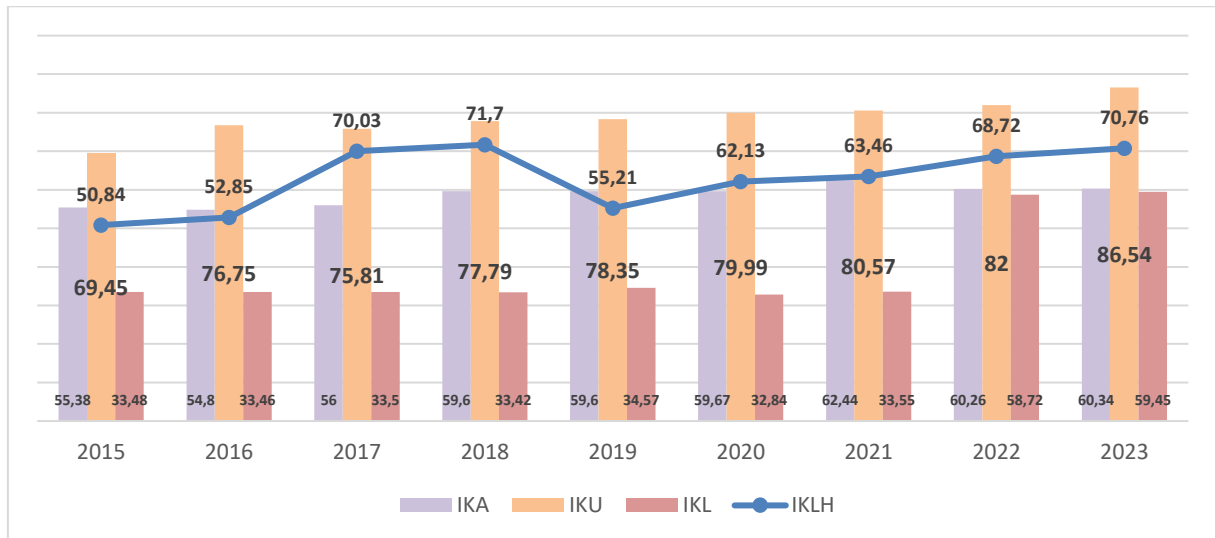
Sesuai Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor.1589/SK-HK.02.01/XII/2021 Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kabupaten Ciamis seluas 31.130,83 Ha namun setelah diverifikasi ulang ternyata luasannya adalah 30.449 Ha. Pada Maret 2023 di verifikasi dan ditetapkan kembali bahwa luasan LSD berkurang menjadi 30.441 Ha. Setiap perubahan yang terjadi dalam luasan LSD harus mendapatkan izin dari Kementerian ATR/BPN apabila sehingga perlu dilakukan verifikasi ulang setiap tahunnya.

2.1.1.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang merupakan representasi kinerja urusan pemerintah bidang lingkungan hidup, adalah komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).



Grafik 2.2
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2015 – 2023



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2024

Selama periode Tahun 2015-2023, IKLH Kabupaten Ciamis menunjukkan kecenderungan meningkat. Capaian IKLH Tahun 2015 sebesar 50,84 dan capaian Tahun 2023 adalah sebesar 70,76 dan termasuk dalam kategori "baik". Peningkatan capaian IKLH tentunya didukung oleh capaian IKA, IKU dan IKL yang menjadi komponen perhitungan IKLH. Capaian IKA Kabupaten Ciamis dari Tahun 2015-2023 menunjukkan kecenderungan meningkat, yaitu dari 55,38 pada Tahun 2015 menjadi 60,34 pada Tahun 2023 dan termasuk dalam kategori "sedang". Nilai kualitas air ini diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan pada 15 sungai. Peningkatan capaian IKA ini didukung oleh berbagai upaya pengendalian dan pencemaran sungai yang dilaksanakan melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Secara kualitas, sungai-sungai di Kabupaten Ciamis masih dalam kondisi yang cukup baik, namun terdapat hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian yaitu perkembangan penduduk dan aktivitas penduduk di sepanjang sungai-sungai tersebut yang dimungkinkan dapat memberikan dampak pada kualitas air di sungai-sungai tersebut di masa yang akan datang.

Capaian IKU selama tahun 2015-2023 menunjukkan kecenderungan peningkatan, dari 69,45 pada tahun 2015 menjadi 86,54 pada tahun 2023 dan termasuk dalam kategori "baik". Pemantauan kualitas udara dilakukan dengan parameter yang diuji yaitu sulfur dioksida (SO₂) dan nitrogen dioksida (NO₂). Pemantauan dilakukan di 4 titik lokasi yang mewakili daerah padat transportasi, daerah industri, permukiman padat penduduk, dan Kawasan perkantoran.

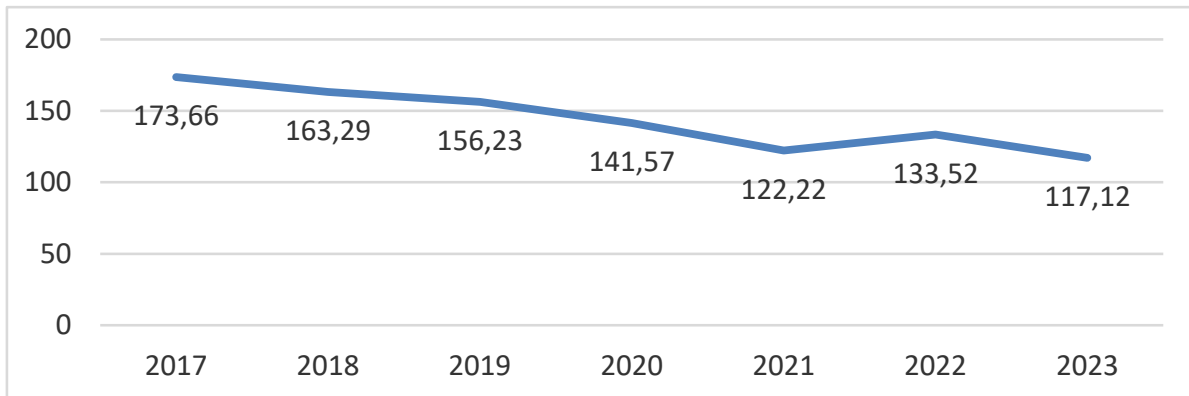
Hasil pengukuran Indeks Kualitas Lahan atau sebelumnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan selama periode tahun 2015-2023 menunjukkan angka yang semakin membaik, yaitu 33,48 pada tahun 2015 dan 59,45 pada tahun 2023. Kenaikan angka yang signifikan terjadi mulai pada tahun 2022, karena adanya perubahan metoda pengukuran tutupan lahan. Peningkatan capaian IKL ini memang tidak dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kabupaten Ciamis karena berkaitan dengan hutan dan urusan kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi. Namun pemerintah Kabupaten Ciamis berupaya melakukan gerakan penanaman pohon melalui GERMASIF – Gerakan Rehabilitasi Mata Air secara Masif yang dilaksanakan DPRKPLH bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat.



2.1.1.7 Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana adalah salah satu cara dalam menilai tingkat risiko bencana di suatu wilayah. Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Ciamis didasarkan pada beberapa parameter yang meliputi topografi wilayah, pola curah hujan, karakteristik tanah, tingkat kerawanan sosial ekonomi masyarakat, serta tingkat kesiapan dan ketangguhan dalam menghadapi bencana. Tiap parameter memiliki kontribusi yang berbeda dalam menentukan nilai Indeks Risiko Bencana.

Grafik 2.3
Capaian Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Ciamis Tahun 2017 – 2023



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024

Salah satu faktor yang memberikan kontribusi besar dalam penentuan nilai indeks Risiko Bencana di Kabupaten Ciamis adalah topografi wilayah. Kabupaten Ciamis memiliki topografi yang cenderung berbukit-bukit, dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 40 hingga 2.800 meter di atas permukaan laut. Hal ini menjadikan Kabupaten Ciamis sebagai wilayah yang rentan terhadap bencana tanah longsor dan banjir bandang.

Pola curah hujan juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam penentuan nilai Indeks Risiko Bencana. Kabupaten Ciamis berada di zona iklim tropis dan memiliki curah hujan yang cukup tinggi, yaitu rata-rata sekitar 2.000 hingga 3.000 mm per tahun. Kondisi ini berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor pada daerah-daerah rawan di Kabupaten Ciamis.

Karakteristik tanah di wilayah Kabupaten Ciamis juga memberikan kontribusi dalam penentuan nilai Indeks Risiko Bencana. Wilayah Ciamis terletak pada daerah cekungan yang dilalui oleh beberapa sungai besar seperti Sungai Cimanuk dan Sungai Cilutung. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ciamis merupakan tanah vulkanik yang labil dan mudah longsor. Selain itu, wilayah Ciamis juga memiliki lahan pertanian yang luas. Hal ini meningkatkan risiko bencana banjir ketika curah hujan tinggi.

Tingkat kerawanan sosial ekonomi masyarakat juga merupakan parameter yang perlu diperhatikan dalam penentuan nilai Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Ciamis. Sebagian besar masyarakat di wilayah Ciamis masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dan perkebunan. Tingkat kemiskinan yang cukup tinggi menyebabkan rendahnya kesiapan dan kesiagaan terhadap bencana yang dapat terjadi.

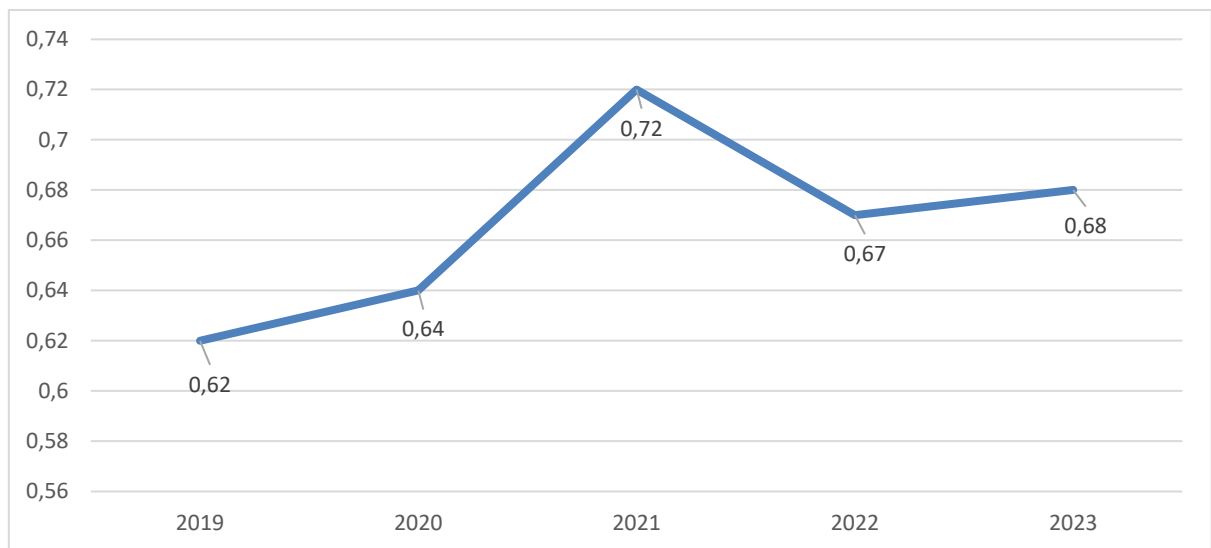
Tingkat kesiapan dan ketangguhan dalam menghadapi bencana juga merupakan faktor penting dalam penentuan nilai Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Ciamis. Dalam rangka meminimalkan dampak bencana, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah menerapkan berbagai program dan kebijakan, seperti pendirian posko bencana, pelatihan kebencanaan, dan peningkatan sistem peringatan dini. Namun, efektivitas dari program-program tersebut perlu dievaluasi dan ditingkatkan secara terus-menerus.



2.1.1.8 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi Indeks Risiko Bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasi fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa kuat dan tangguh suatu daerah dalam menghadapi segala macam risiko dan ancaman yang ada.

Grafik. 2.4
Capaian Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024

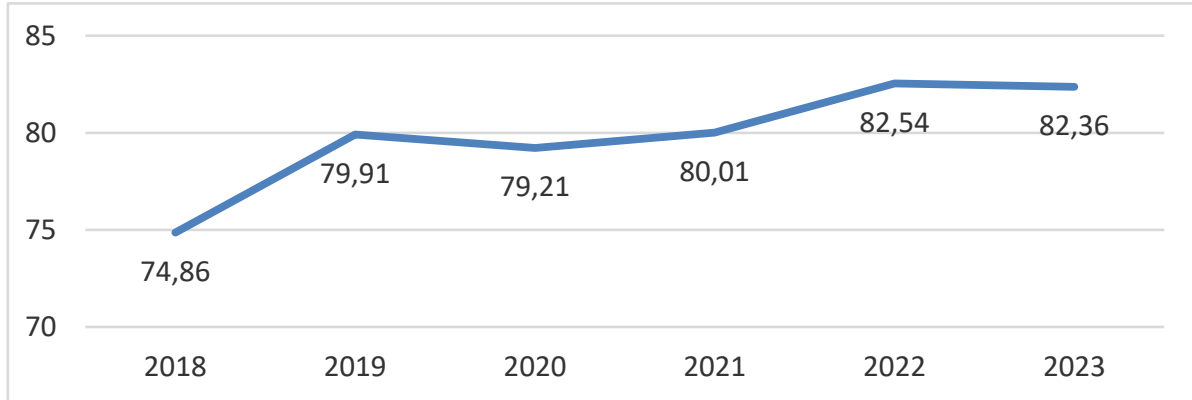
Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2023 sebesar 0,68 menunjukkan bahwa Kabupaten Ciamis memiliki tingkat ketahanan dalam kategori "sedang", dan perlu ditingkatkan lagi agar dapat menjadi lebih andal dan tangguh dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin meningkat.

2.1.1.9 Indeks Ketahanan Pangan

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki sektor pertanian yang cukup besar yang diimbangi dengan Indeks Ketahanan Pangan yang memadai. Indeks Ketahanan Pangan merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat ketahanan suatu daerah terhadap kemampuan menghasilkan pangan yang cukup, aman, serta baik untuk konsumsi manusia.



Grafik 2.5
Capaian Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Ciamis Tahun 2018 – 2023



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis, 2024

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis selama kurun waktu Tahun 2018-2023 cenderung mengalami kenaikan, dari tahun 2018 sebesar 74,86 menjadi 82,36 pada Tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Ciamis memiliki kemampuan yang meningkat dalam menghasilkan, mengakses, dan mengonsumsi pangan yang cukup, sehat, dan aman dari tahun ke tahunnya.

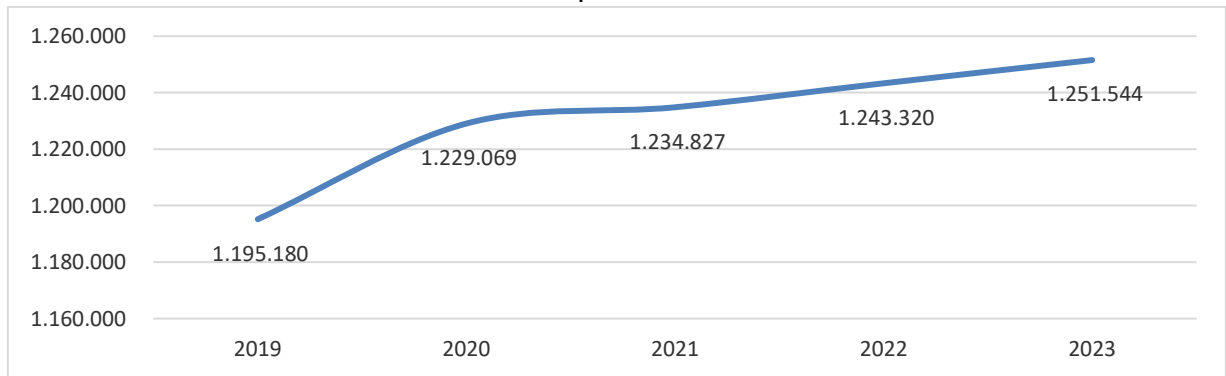
2.1.2 Aspek Demografi

2.1.2.1 Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk

Kependudukan merupakan salah satu aspek penting yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri.

Jumlah penduduk Kabupaten Ciamis dari tahun ke tahun terus meningkat, pada Tahun 2023 sebanyak 1.251.544 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk pada tahun 2019 - 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.6
Jumlah Penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, 2024

Adapun sebaran jumlah penduduk berdasarkan wilayah kecamatan tercantum pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis Berdasarkan Kecamatan
Tahun 2020-2023 (ribu jiwa)

No.	Kecamatan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Banjarsari	68,97	69,46	70,02	69,89
2	Banjaranyar	39,38	39,48	39,63	39,90
3	Lakbok	54,71	55,38	56,12	56,58
4	Purwadadi	38,94	39,34	39,78	40,03
5	Pamarican	67,42	67,77	68,20	68,29
6	Cidolog	19,29	19,35	19,43	19,42
7	Cimaragas	16,07	16,13	16,21	16,22
8	Cijeungjing	53,07	53,38	53,75	53,85
9	Cisaga	37,37	37,47	37,61	37,56
10	Tambaksari	20,78	20,80	20,84	20,74
11	Rancah	56,12	56,19	56,31	56,15
12	Rajadesa	52,53	52,96	53,46	53,69
13	Sukadana	22,92	22,95	23,00	22,94
14	Ciamis	98,61	99,13	99,75	99,88
15	Baregbeg	43,81	44,15	44,55	44,72
16	Cikoneng	54,98	55,52	56,13	56,45
17	Sindangkasih	51,04	51,71	52,44	52,93
18	Cihaurbeuti	50,66	51,07	51,53	51,74
19	Sadananya	37,91	38,37	38,88	39,21
20	Cipaku	65,99	66,77	67,63	68,16
21	Jajtinagara	27,59	22,75	27,94	28,00
22	Panawangan	50,51	50,82	51,18	51,28
23	Kawali	41,84	42,14	42,48	42,61
24	Lumbung	29,86	30,02	30,21	30,26
25	Panjalu	45,84	46,10	46,41	46,49
26	Sukamantri	22,69	22,87	23,08	23,18
27	Panumbangan	60,20	60,66	61,18	61,40
	Jumlah	1.229,07	1.237,73	1.247,77	1.251,54

Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, 2024

Wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak pada Tahun 2023 adalah Kecamatan Ciamis yaitu sebanyak 99,88 ribu jiwa dengan rata-rata penduduk 2.947 jiwa/ha. Wilayah penduduk dengan jumlah penduduk paling sedikit pada Tahun 2023 adalah Kecamatan Cimaragas yaitu sebanyak 16,22 ribu jiwa dengan rata-rata penduduk 61 jiwa/ha. Selanjutnya untuk mengetahui jumlah kepadatan penduduk, angka ketergantungan dan *sex ratio* di Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

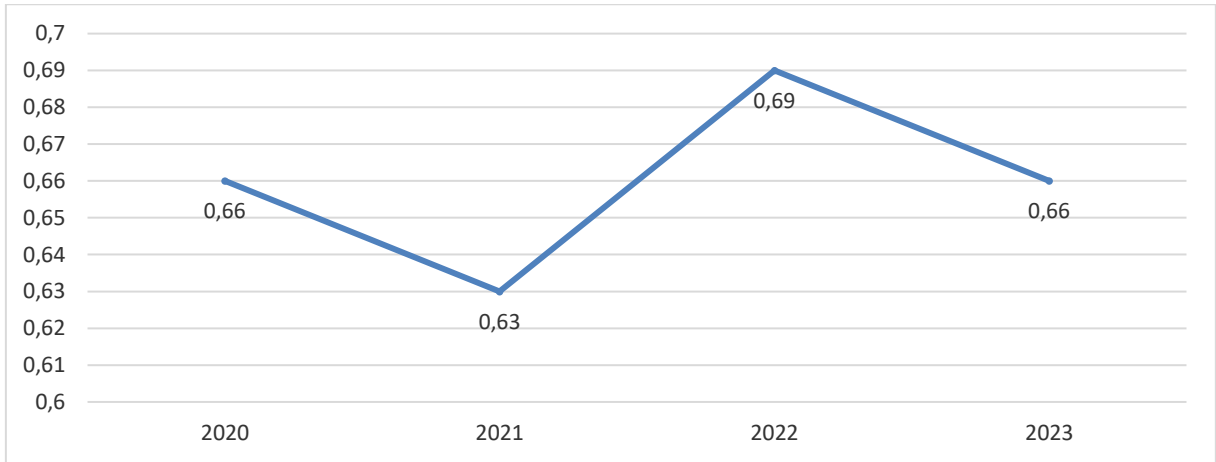
Tabel 2.9
Jumlah Kepadatan Penduduk, Angka Ketergantungan dan *Sex Ratio*
di Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2023

No	Uraian	Satuan	Jumlah/Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kepadatan Penduduk	Jiwa/Km ²	748	752	770	774	779	784
2	Angka Ketergantungan	Persen	47,99	47,80	45,94	46,18	46,60	47,08
3	Sex Ratio	Persen	97,66	97,59	100,32	100,19	100,10	100

Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, 2024



Grafik 2.7
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2023



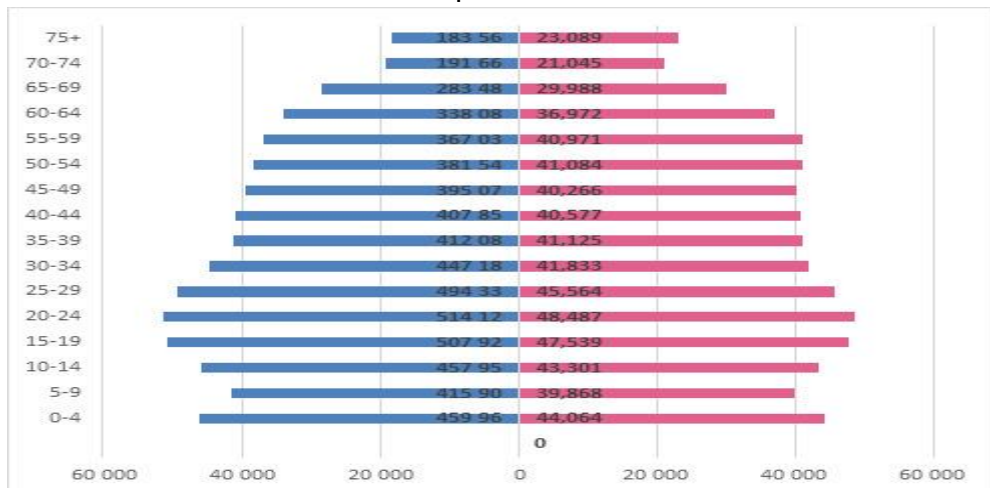
Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, 2024

Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2023 mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,06 % sedangkan pada Tahun 2023 mengalami perlambatan sebesar 0,03%. Hal ini bisa terjadi karena pengaruh dari angka mortalitas dan fertilitas serta jumlah *migrasi*.

2.1.2.2 Komposisi Penduduk

Penduduk merupakan salah satu aset yang sangat penting dalam suatu daerah. Kondisi demografi suatu daerah sangat penting untuk dipantau agar dapat memetakan permasalahan dan tantangan yang dihadapi, khususnya dalam pembangunan wilayah. Salah satu indikator penting dalam mengukur kondisi demografi suatu daerah adalah komposisi penduduk berdasarkan umur. Berikut ini komposisi penduduk di Kabupaten Ciamis menurut umur:

Grafik 2.8
Piramida Penduduk Kabupaten Ciamis Menurut Umur Tahun 2023



Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, 2024

Menurut grafik 2.8 dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 jumlah penduduk usia antara 20-24 Tahun berjumlah paling tinggi yaitu sebanyak 99.899 jiwa dan paling rendah berada pada usia 70-74 Tahun yaitu sebanyak 40.211 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda di Kabupaten Ciamis memiliki jumlah yang signifikan, sehingga usia produktif di masa yang akan datang akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan penduduk lansia. Jumlah penduduk usia produktif yang cukup besar dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di wilayah Kabupaten Ciamis.



Penduduk berkualitas akan menjadi modal bagi negara dan melahirkan keluarga sejahtera dan bahagia, sebaliknya jika penduduk tidak berkualitas maka akan meningkatkan angka kemiskinan. Atas pertimbangan tersebut, pemerintah terus memacu berbagai program untuk mencapai keluarga sejahtera, salah satunya dengan mengupayakan agar Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sinergi dengan peningkatan kualitas keluarga.

Program Keluarga Berencana merupakan salah satu bagian dalam pencapaian keluarga sejahtera. Kondisi pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kabupaten Ciamis belum dikatakan sepenuhnya berhasil. Hal ini karena berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis bahwa Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sampai dengan Tahun 2023 baru mencapai 24,67% serta rata-rata usia kawin pertama wanita di Kabupaten Ciamis adalah 19,8 tahun, yang bisa menyebabkan risiko pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan. Pernikahan muda dapat menurunkan peluang pengambilan keputusan keluarga dan meningkatkan risiko komplikasi kehamilan serta kekerasan dalam rumah tangga

2.1.2.3 Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal usul dan menempati wilayah adat secara turun temurun. Masyarakat adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat sebagai komunitas adat.

Masyarakat adat yang masih menerapkan kearifan lokal di Kabupaten Ciamis terletak di Kampung Adat Kuta. Kampung Adat Kuta terletak di Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.

Kampung Adat Kuta di sebelah utara berbatasan dengan Dusun Cibodas, di sebelah Barat dengan Dusun Margamulya, dan di sebelah timur dan selatan dengan Sungai Cijolang. Kampung Adat Kuta berada di suatu lembah yang dikelilingi tebing hingga kemudian memunculkan nama "Kuta" yang berarti tembok atau benteng. Luas kampung adat Kuta adalah 97 Ha termasuk di dalamnya permukiman, hutan lindung, sawah, ladang, kebun, kolam ikan, jalan, tanah lapang, gunung dan mata air keramat.

Tanaman pokok di kampung adat ini adalah tanaman Kawung dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian pembuat gula aren. Selain pembuat gula aren, mata pencaharian masyarakat kampung adat ini adalah petani sawah, peternak, dan pengrajin anyaman. Seluruh masyarakat kampung adat kuta beragama islam.

Adat-istiadat diimplementasikan dalam bentuk "pamali" (tabu). Tabu tersebut diantaranya berkenaan dengan pemberian nama anak yang baru lahir, membangun rumah, tata cara bekerja, kesehatan, pernikahan, kehamilan, penguburan, dan berkenaan dengan keberadaan hutan keramat. Adapun beberapa bentuk tabu diantaranya:

- Tabu berkenaan membangun rumah dengan genteng dan tembok.
- Tabu membangun rumah dengan posisi saling memunggungi satu sama lain. Dengan kata lain posisi rumah yang satu dengan yang lain harus berhadapan, terkecuali kalau jaraknya jauh.
- Tabu berkenaan dengan "leuweung karamat" (hutan keramat), salah satunya bagi yang masuk hutan keramat tabu untuk mengenakan baju dinas dan perhiasan. Maksudnya, diingatkan bahwa orang tidak boleh sombong karena di mata Tuhan semua makhluk itu sama.



2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam selang waktu tertentu. LPE digunakan untuk a) mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan ekonomi; b) Dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional; c) Dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan.

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ciamis Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2013-2023 (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,09	-1,97	-0,93	3,99	2,21	1,67	2,87	1,47	3,82	2,19	1,22
B	Pertambangan dan Penggalian	2,02	2,03	0,55	-0,71	0,13	2,99	-2,55	0,57	8,44	0,44	2,14
C	Industri Pengolahan	9,86	7,49	6,92	6,74	5,18	7,14	5,06	-1,63	4,35	7,06	3,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,85	0,22	0,68	6,04	2,07	8,77	4,64	2,51	11,19	11,55	6,79
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,19	1,18	1,21	5,97	7,12	9,90	9,47	9,72	9,79	2,24	3,35
F	Konstruksi	3,76	4,70	4,71	4,50	7,23	9,25	6,24	-7,41	6,45	-0,11	4,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,17	7,71	7,27	7,29	4,98	4,99	5,84	-5,42	3,06	5,92	5,15
H	Transportasi dan Pergudangan	2,79	11,44	9,44	6,23	5,24	5,72	6,53	-0,41	0,43	8,69	9,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,81	6,88	6,87	6,92	6,92	6,90	8,22	-7,87	-1,56	11,55	6,52
J	Informasi dan Komunikasi	3,08	15,41	15,43	12,92	11,81	9,13	9,22	32,81	7,27	6,01	6,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,93	1,82	6,86	6,99	2,89	4,05	0,74	5,42	6,49	6,11	4,69
L	Real Estate	5,27	4,41	5,01	5,02	9,26	9,62	9,55	8,24	9,94	5,90	5,96
M,N	Jasa Perusahaan	8,05	9,77	7,11	7,12	8,36	8,99	9,11	-13,11	8,53	12,33	9,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan SosialWajib	-0,96	-4,08	2,23	2,19	0,94	0,10	1,18	-1,03	-1,51	-1,39	4,62
P	Jasa Pendidikan	11,56	12,02	11,62	6,10	8,57	5,99	5,17	5,13	2,40	2,83	4,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,14	14,63	10,16	8,60	8,35	8,09	8,19	-5,36	7,47	5,28	8,47
R.S.T.U	Jasa lainnya	12,03	12,23	11,61	6,48	9,63	6,71	7,15	-2,24	0,80	11,19	9,54
	PDRB	5,34	5,07	5,59	5,99	5,21	5,31	5,38	-0,14	3,66	5,02	4,99

*)Angka Sementara

**)Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, Maret 2024

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Ciamis pada Tahun 2018 sampai Tahun 2022 mengalami fluktuasi. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis pada Tahun 2020 sebesar -0,14% dan meningkat pada tahun berikutnya seiring dengan pemulihan kondisi ekonomi daerah sehingga LPE Kabupaten Ciamis pada Tahun 2022 sebesar 5,02% menduduki peringkat ke 21 se Jawa Barat.

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa selama Tahun 2020 sampai 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis pernah mengalami kontraksi pada Tahun 2020 sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah dalam pembatasan aktivitas masyarakat karena pandemi *COVID-19*. Namun seiring dengan normalnya kembali aktivitas masyarakat pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis kembali meningkat bahkan melebihi target yang telah ditetapkan akan tetapi pada tahun 2023 mengalami pelambatan menjadi 4,99%.



Grafik 2.9
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Capaian Nasional Tahun 2013-2023

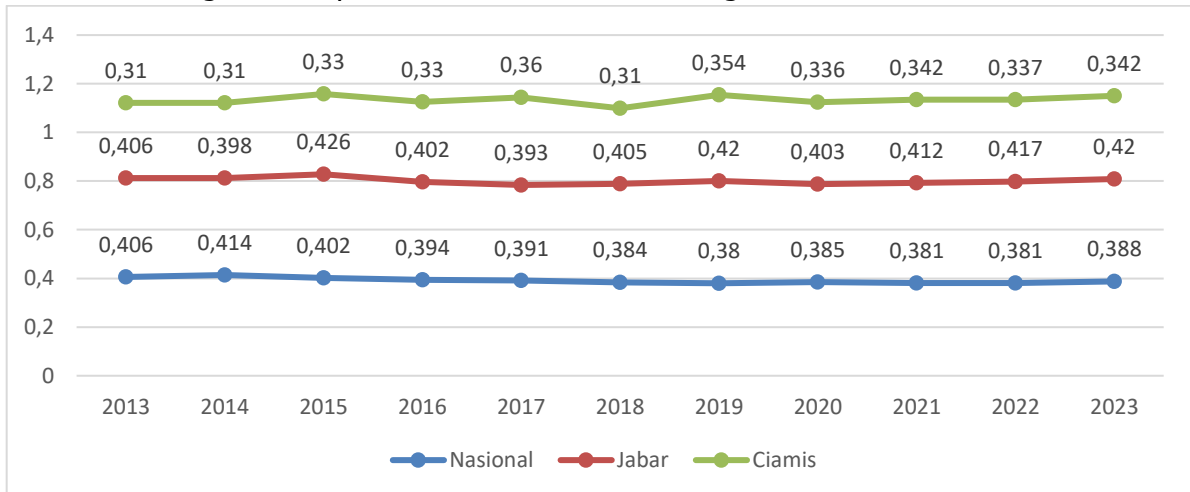


Sumber: BPS Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat, 2024

2.2.1.1 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai koefisien gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

Grafik 2.10
Perbandingan Pencapaian Indeks Gini Daerah Dengan Nasional Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat, 2024

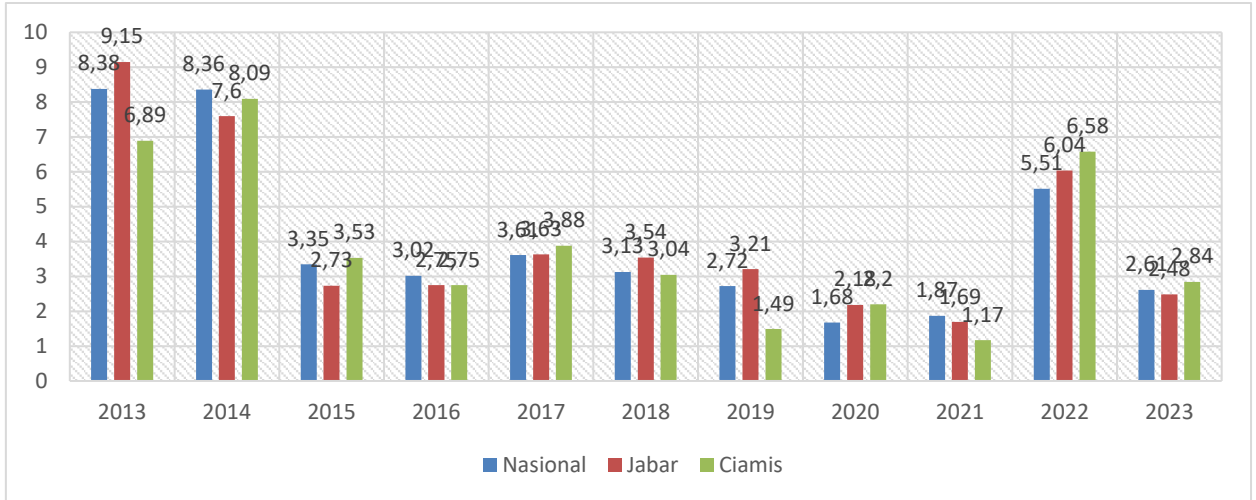
Selama periode Tahun 2013-2023 Indeks Gini Kabupaten Ciamis sebesar 0,3 poin atau stabil pada kategori tingkat ketimpangan rendah karena berada pada angka di bawah 0,4, akan tetapi selama kurun waktu tersebut masih terjadi adanya distribusi pendapatan yang cenderung tidak merata diantara masyarakat Kabupaten Ciamis. Capaian Indeks Gini Ciamis lebih baik dari Jawa Barat dan Nasional.

2.2.1.2 Inflasi

Inflasi Kabupaten Ciamis berdasarkan data BPS yang mengacu pada tingkat inflasi di Kota Tasikmalaya. Inflasi Tahun 2023 mencapai 2,84%, hal ini menunjukkan kondisi penurunan harga-harga secara umum dibandingkan tahun sebelumnya.



Grafik 2.11
Perbandingan Inflasi Kabupaten Ciamis dengan Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2023



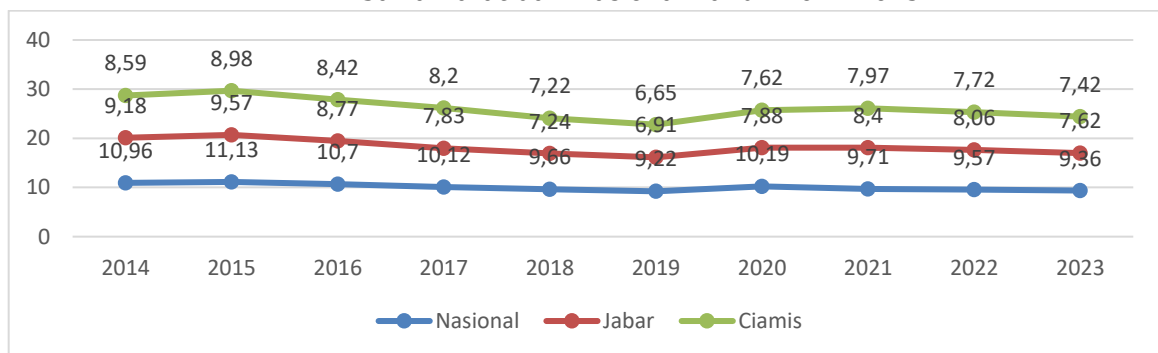
Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, 2024

Adapun komoditas pertanian dan perikanan yang sering mempunyai andil penyumbang inflasi adalah cabai merah, beras, telur ayam ras, bawang merah, ikan mujair, dan daging ayam.

2.2.1.3 Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah global. Perkembangan tingkat kemiskinan Tahun 2014 sampai dengan 2023 di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.12
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ciamis dengan Jawa Barat dan Nasional Tahun 2014-2023

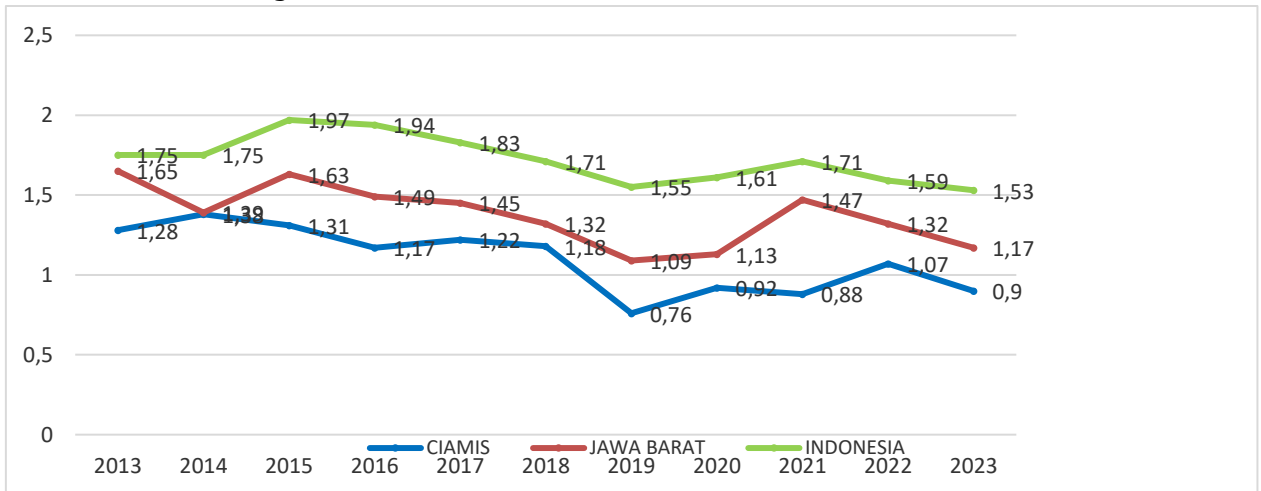


Sumber: BPS Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat, 2024

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Ciamis mengalami fluktuasi dan secara umum posisinya berada di bawah Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Ciamis memiliki angka kemiskinan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat dan tingkat Nasional. Penurunan persentase penduduk miskin menjadi 7,42% pada Tahun 2023 seiring adanya perbaikan dalam pemulihan ekonomi pasca Covid-19 di wilayah Kabupaten Ciamis.



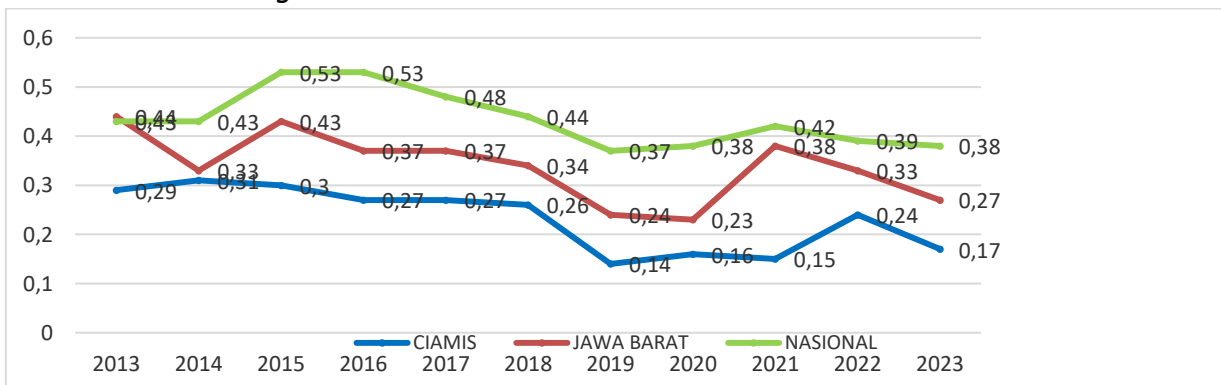
Grafik 2.13
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Ciamis dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2013 sebesar 1,28 mengalami penurunan pada Tahun 2023 menjadi sebesar 0,9. Posisi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Ciamis berada di bawah Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil.

Grafik 2.14
Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Ciamis Dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2024

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2013 sebesar 0,29 menurun pada Tahun 2023 menjadi sebesar 0,17 dan berada dibawah Indeks Keparahan Kemiskinan di Jawa Barat dan Nasional. Hal ini menggambarkan adanya perubahan positif terhadap upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, masyarakat, dan berbagai pihak terkait dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

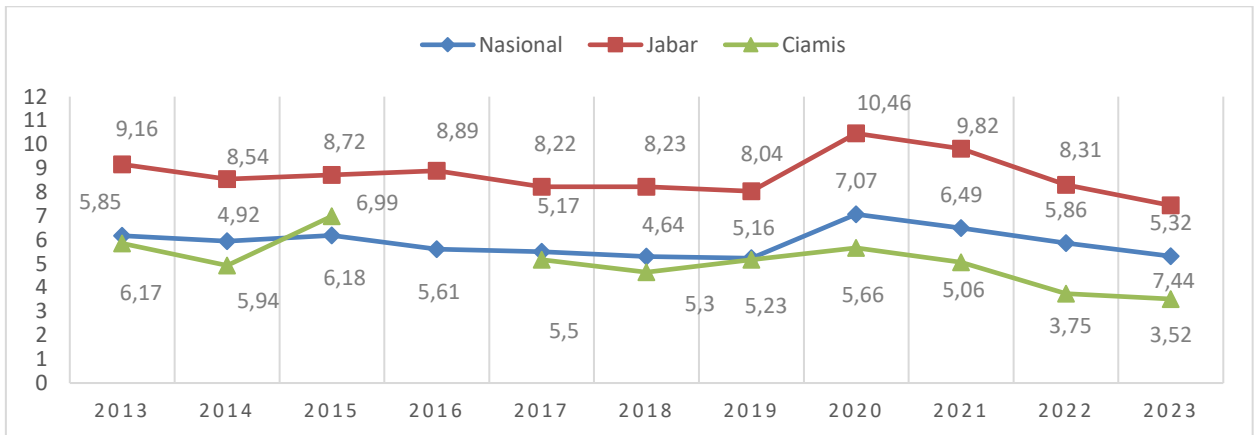
2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja



yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator untuk mengukur besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Grafik 2.15
Perbandingan TPT Kabupaten Ciamis dengan Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2013-2023



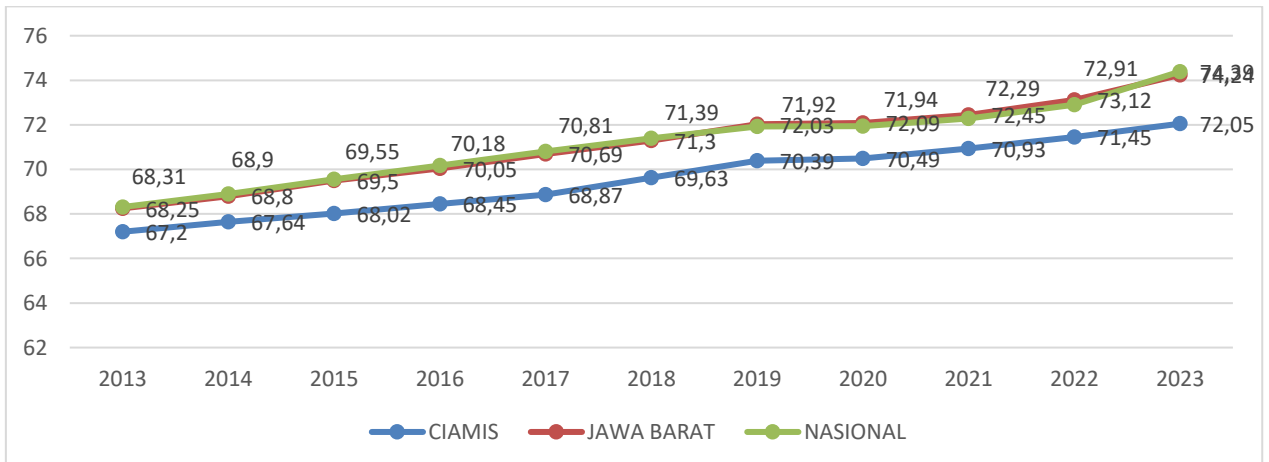
Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, 2024

Selama kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan 2023, angka TPT Kabupaten Ciamis tertinggi pada Tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi *Covid-19*. Namun Tahun 2021-2023 mengalami penurunan seiring dengan pulihnya kondisi perekonomian daerah. Capaian TPT Kabupaten Ciamis secara umum lebih baik dibanding dari capaian TPT Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

United Nations Development Programme (UNDP) pada Tahun 2010 melakukan perubahan indikator IPM, yaitu Angka Melek Huruf (AMH) pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan metode perhitungan metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Grafik 2.16
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ciamis dengan Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Kabupaten Ciamis dan BPS Prov. Jabar, 2024

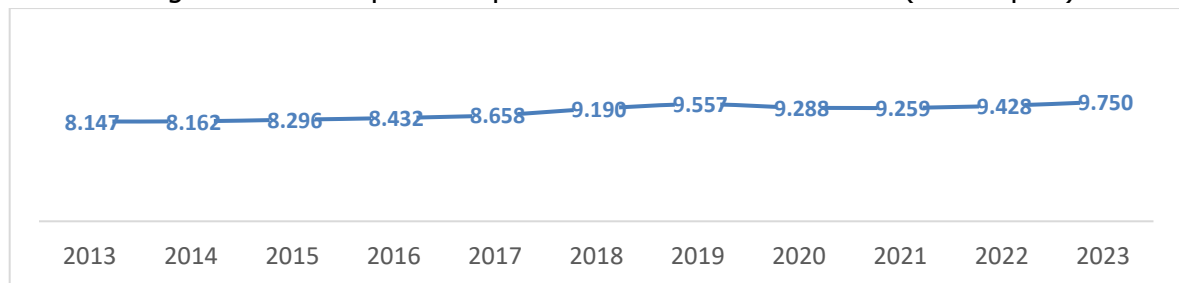


Capaian IPM Kabupaten Ciamis setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun posisinya masih berada di bawah capaian nasional dan Provinsi Jawa Barat. Kemajuan capaian pembangunan manusia selama Tahun 2023 di Kabupaten Ciamis tercatat paling tinggi didorong oleh perbaikan pada dimensi pengetahuan yaitu capaian angka harapan lama sekolah, dengan pertumbuhan sebesar 0,1%, dan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dengan pertumbuhan 0,08%, untuk dimensi umur panjang dan hidup sehat yang ditunjukkan dengan indikator usia harapan hidup dengan pertumbuhan sebesar 0,28%.

2.2.1.6 Pengeluaran Per Kapita

Pencapaian IPM Kabupaten Ciamis pada Tahun 2023 ditinjau dari dimensi standar hidup layak yaitu pengeluaran per kapita yang mencapai Rp9.750.000, meningkat Rp322.000 dari pencapaian Tahun 2022 yaitu Rp9.428.000. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.17
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2023 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, 2024

2.2.1.7 Indeks Ekonomi Hijau

Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerjadan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara tangible, representatif, dan akurat.

Indeks Ekonomi Hijau Daerah terdiri dari 16 indikator terpilih yang mewakili 3 (tiga) pilar Sustainable Development: ekonomi (6 indikator), sosial (4 indikator), dan lingkungan (6 indikator). Indikator ekonomi terdiri dari 6 (enam) indikator: intensitas emisi, intensitas energi, GNI per kapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja industri dan jasa. Indikator sosial terdiri dari 4 (empat) indikator: rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Indikator lingkungan terdiri dari 6 (enam) indikator: tutupan hutan, energi baru terbarukan, kualitas air permukaan, kualitas udara, penurunan emisi, dan lahan gambut terdegradasi.

Indeks Ekonomi Hijau Daerah pada prinsipnya terdapat tiga pilar namun, dengan menyesuaikan dengan kapasitas, kewenangan, akses data, dan rencana pelaporan ke depan di tingkat kabupaten/kota maka GEI yang diturunkan ke kabupaten/kota adalah "Indeks Ekonomi Hijau Daerah Pada Pilar Ekonomi" artinya untuk tingkatan Kabupaten/Kota cukup diukur sampai dengan pilar ekonomi dengan parameter yang ditentukan oleh provinsi. Terkait Pilar sosial dan pilar lingkungan tidak menjadi pilar yang dievaluasi di tingkat kabupaten/kota sehubungan hampir seluruh parameter pada 2 pilar tsb sudah tergambarkan pada indikator tersendiri/terpisah pada dokumen perencanaan kabupaten/kota sebagai turunan indikator juga dari provinsi.



Terkait “Indeks Ekonomi Hijau Daerah pada pilar ekonomi” ini yang menjadi parameter perhitungan diantaranya :

- a. Produktivitas Akuakultur
- b. Produktivitas Padi;
- c. Produktivitas Tenaga Kerja Industri;
- d. Produktivitas Tenaga Kerja Jasa;
- e. PDRB Perkapita.

Adapun perkembangan indikator indeks ekonomi hijau yang menjadi parameter di Kabupaten Ciamis sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.11
Perkembangan Indikator Indeks Ekonomi Hijau

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
1	Produktivitas Akuakultur	Ton Ha/Th	10,13	10,14	10,52
2	Produktivitas Padi	Ton Ha/Th	65,76	63,71	64,27
3	Produktivitas Tenaga Kerja Industri	IDR Juta/ Org	14,00	16,00	20,95
4	Produktivitas Tenaga Kerja Jasa	IDR Juta/ Org	72,00	89,00	89,52
5	PDRB Perkapita	ADHB Juta/ Kapita	27,22	29,47	31,83

Sumber: BPS, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis, 2024

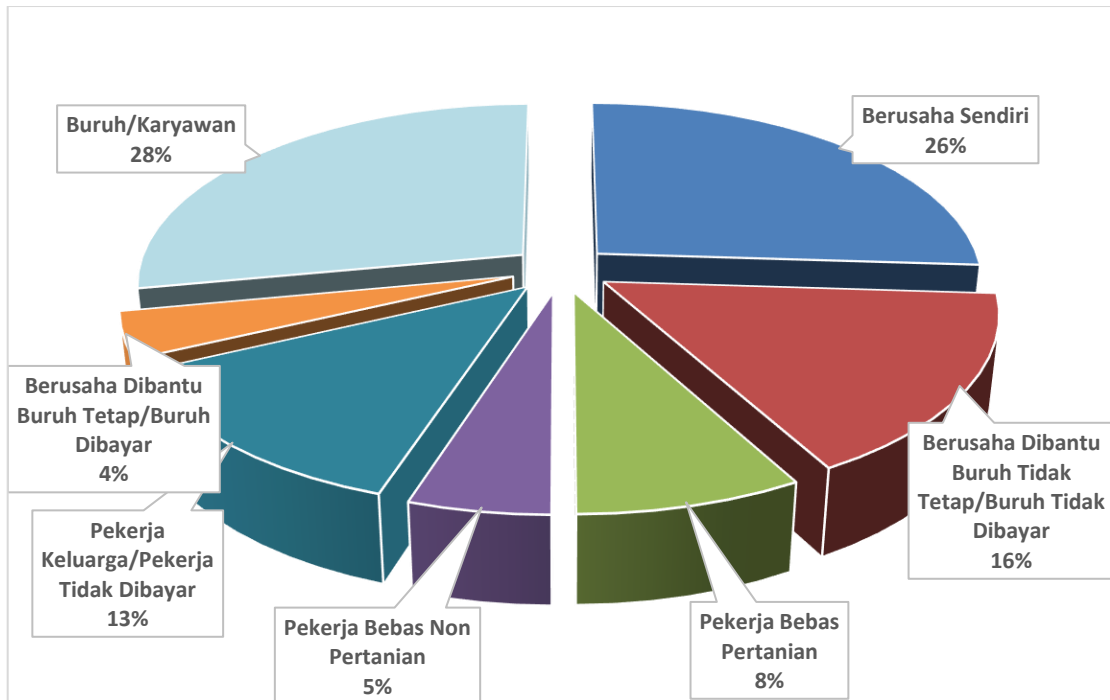
Perkembangan parameter indikator indeks ekonomi hijau secara umum mengalami peningkatan, produktivitas akuakultur di Kabupaten Ciamis meningkat karena beberapa faktor salah satunya yaitu pakan berkualitas, pengelolaan air yang baik, pemilihan spesies yang tepat, serta manajemen budidaya perikanan yang efektif dan efisien. Peningkatan produktivitas padi di Kabupaten Ciamis dipengaruhi oleh Varietas yang unggul, pemupukan yang tepat dengan didukung jaringan irigasi yang baik, pengendalian hama dan penyakit, teknik budidaya pertanian yang baik, pelatihan dan penyuluhan pertanian, serta teknologi pertanian. Adapun peningkatan produktivitas tenaga kerja industri dan jasa diantaranya dipengaruhi oleh pelatihan dan pengembangan keterampilan serta penggunaan teknologi.

2.2.1.8 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kewirausahaan dalam suatu populasi yang menggambarkan pekerja berusaha dibantu buruh tetap dibandingkan dengan total angkatan kerja dikalikan 100. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar proporsi penduduk yang terlibat dalam aktifitas kewirausahaan yang dikaitkan dengan dinamisme ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2023 oleh BPS menunjukkan terdapat sebanyak 431.428 orang dikategorikan sebagai pekerja sektor informal atau sekitar 67,98 persen dari seluruh penduduk bekerja di Kabupaten Ciamis. Struktur pekerja sektor informal terdiri dari pekerja yang berusaha sendiri (26 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap (16 persen), pekerja bebas pertanian (8 persen), pekerja bebas non pertanian (5 persen) dan pekerja keluarga sebesar 13 persen. Adapun struktur pekerja formal terdiri dari pekerja buruh karyawan (28 persen), dan berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar (4 persen) sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah:

Gambar 2.9
Penduduk yang Berusia Lima Belas Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Lalu Berdasarkan Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Ciamis Tahun 2023



Catatan:

1. Buruh/karyawan dan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar masuk sebagai pekerja formal
2. Pekerja keluarga, pekerja bebas non pertanian, pekerja bebas pertanian, berusaha dibantu buruh tidak tetap dan berusaha sendiri masuk sebagai pekerja informal

Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, 2024

Adapun Rasio kewirausahaan dapat dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kewirausahaan} = \frac{\text{Berusaha dibantu buruh tetap}}{\text{Total angkatan kerja}} \times 100$$

Jumlah angkatan kerja pada Tahun 2023 di Kabupaten Ciamis sebanyak 657.801 orang, terdiri dari bekerja sebanyak 634.660 dan pengangguran sebanyak 23.141 orang sehingga Rasio Kewirausahaan Tahun 2023 Kabupaten Ciamis sebesar 3,86 (kategori rendah 0-5%). Hal ini menunjukkan Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ciamis tidak terlepas dari peran pekerja pada sektor informal.

2.2.1.9 Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Basis serta Unggulan Kabupaten Ciamis

Hasil analisis tipologi kelas berdasarkan share dan pertumbuhan sektor lapangan usaha kabupaten dibandingkan provinsi menunjukkan bahwa sektor lapangan usaha dengan kategori prima meliputi sektor pertanian, perdagangan, jasa keuangan, jasa perusahaan, jasa kesehatan, serta administrasi pemerintahan. Sektor-sektor ini memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi tinggi, yang diindikasikan oleh tingginya peran kontribusi terhadap PDRB serta pertumbuhan yang relatif tinggi.

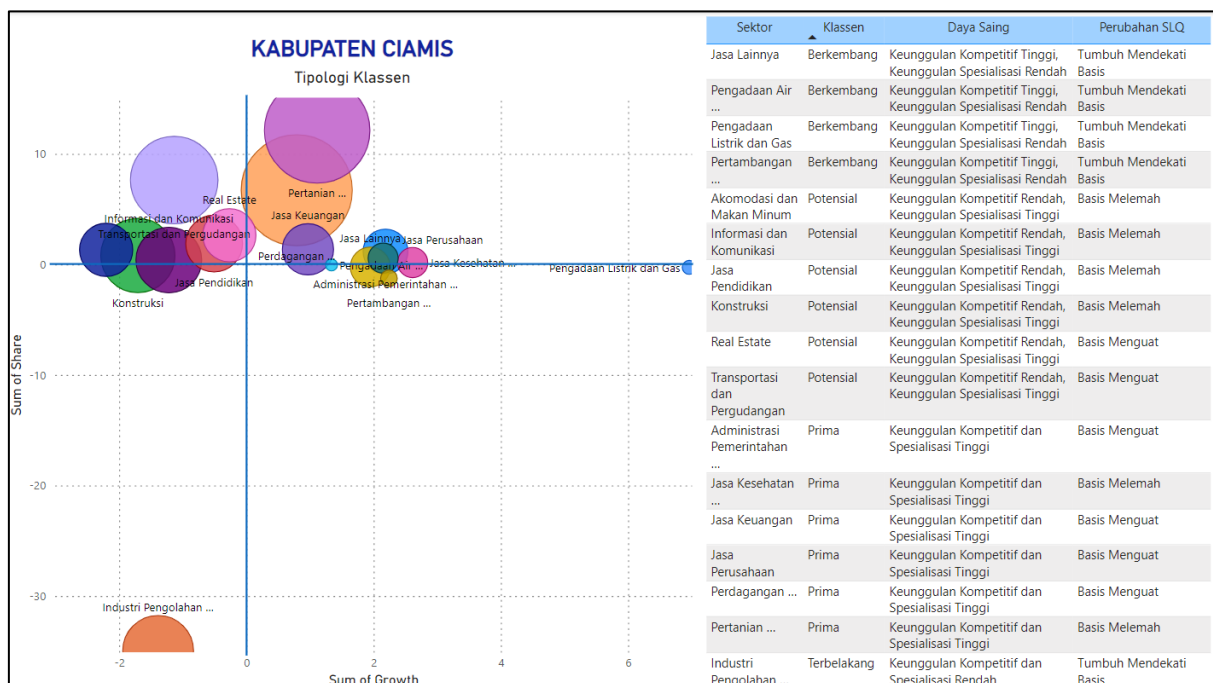
Untuk sektor lapangan usaha dengan kategori berkembang meliputi sektor pertambangan, pengadaan air, serta pengadaan listrik dan gas. Sektor-sektor ini walaupun memiliki share terhadap PDRB relatif rendah namun dari sisi pertumbuhan berkinerja tinggi di atas rata-rata provinsi.



Sementara sektor lapangan usaha dengan kategori potensial meliputi akomodasi makan dan minum, informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, konstruksi, real estate, serta transportasi dan pergudangan. Sektor ini memiliki nilai share yang lebih besar dibanding provinsi (spesialisasi tinggi) namun skala pertumbuhannya lebih rendah (keunggulan kompetitif rendah).

Sementara untuk sektor lapangan usaha dengan kategori terbelakang meliputi industri pengolahan. Peran share sektor ini terhadap PDRB relatif masih lebih kecil dibanding sektor pertanian, perdagangan serta informasi dan komunikasi, serta pertumbuhan dan share yang lebih kecil dibanding provinsi. Walaupun sektor industri pengolahan belum menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, namun apabila dilihat dari static LQ sektor ini terus mengalami pertumbuhan mendekati sektor basis.

Gambar 2.10 Analisis Tipologi Klasen Potensi Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Share dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Kabupaten Ciamis



Keterangan : Sumbu vertikal menggambarkan share lapangan usaha kabupaten dibandingkan dengan provinsi, sementara sumbu horizontal menjelaskan pertumbuhan lapangan usaha kabupaten dibandingkan dengan provinsi. Ukuran lingkaran menjelaskan share lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten/Kota.

Sumber: Hasil analisis, 2024

Keunggulan wilayah berupa potensi sumberdaya alam seperti pertanian dan perikanan budidaya menjadi modal dasar untuk pengembangan serta tumbuhnya sektor industri pengolahan berbasis potensi lokal. Hal ini sejalan dengan arahan pembangunan kewilayahan berdasarkan RTRWP Jawa Barat 2022-2037 yaitu diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, serta kegiatan pertambangan mineral non logam. Pembangunan ekonomi daerah diarahkan pada :

Fokus pengembangan sektor lapangan usaha dan komoditas sebagaimana pada tabel berikut:



Tabel 2.12
Sektor Lapangan Usaha sumber pertumbuhan ekonomi dan pengembangan komoditas

Kategori					
No	Lapangan Usaha	Urutan Share thd PDRB	Kategori 2023	Tren Pertumbuhan (Perubahan SLQ)	Potensi Pengembangan
1	Pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan	Ke 2	Prima	melemah	Komoditas Pertanian : 1. Padi 2. Jagung 3. Pisang Komoditas Peternakan : 1. Ayam dan telur ayam 2. Sapi pedaging Perikanan : Ikan Budidaya (Mas, Gurame, dsb)
2	Perdagangan	Ke 1	Prima	menguat	Sarana distribusi perdagangan, meliputi pasar dan gudang komoditas pertanian
3	Industri Pengolahan	Ke 5	Terbelakang	menguat	Pengembangan agribisnis melalui peningkatan nilai tambah produk pertanian dengan komoditas : <ul style="list-style-type: none"> ■ Produk turunan Kelapa (VCO, Tepung Kelapa, Gula Semut, dsb) ■ Industri pengolahan Pakan ternak ■ Industri kecil menengah makanan dan minuman olahan
4	Jasa Keuangan	Ke 10	Prima	menguat	Layanan akses keuangan untuk permodalan untuk KUMKM dan IKM melalui KUR dan sumber lainnya

Sumber: Hasil analisis, 2024

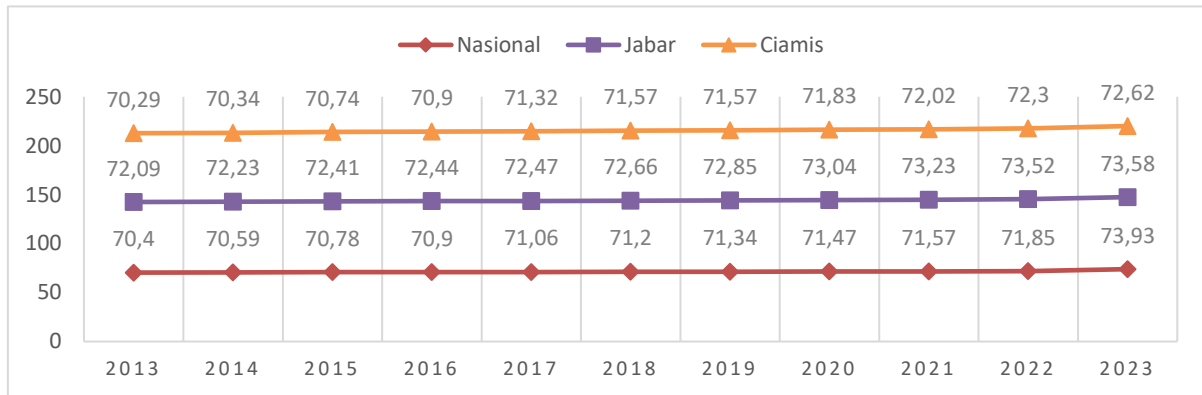
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata usia yang dapat dicapai oleh seseorang pada suatu populasi tertentu. Indikator ini dihitung berdasarkan faktor-faktor seperti tingkat kematian dan kelahiran. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Perkembangan AHH di Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut gambaran perkembangan AHH di Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2023.



Grafik 2.18
Angka Harapan Hidup di Kabupaten Ciamis dengan Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Kabupaten Ciamis. 2024

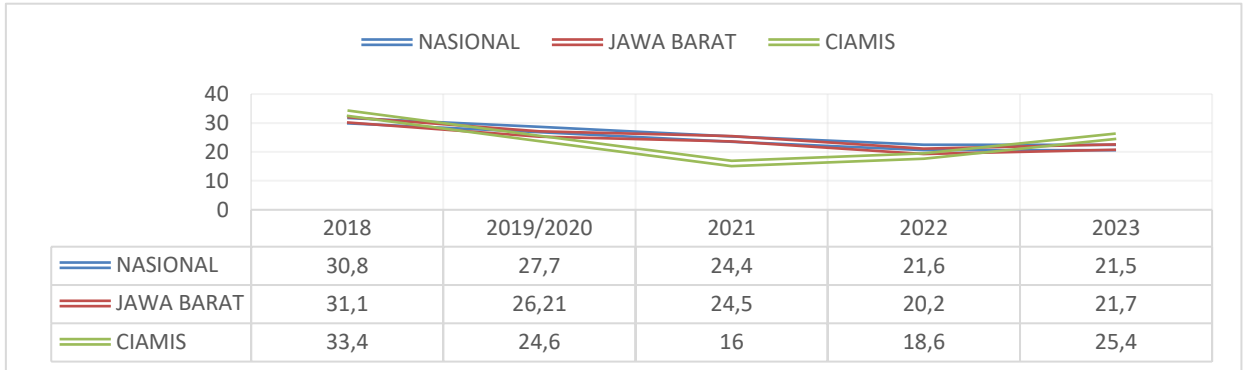
Angka Harapan Hidup Kabupaten Ciamis setiap tahunnya mengalami peningkatan, Tahun 2013 sebesar 70,29 Tahun meningkat Tahun 2023 menjadi sebesar 72,62 Tahun. Capaian ini berada di bawah Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Barat dan di atas Angka Harapan Hidup Nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas hidup dan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan di Kabupaten Ciamis lebih baik dari tingkat provinsi dan secara umum lebih baik dibandingkan dengan rata-rata di seluruh Indonesia. Untuk meningkatkan AHH di Kabupaten Ciamis sehingga setara atau bahkan lebih baik daripada rata-rata provinsi maupun nasional, diperlukan ada perluasan kebijakan dan peningkatan layanan kesehatan. Dalam rangka mendorong peningkatan AHH Kabupaten Ciamis berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah antara lain program imunisasi, pelayanan terhadap penyakit menular, tidak menular dan pemberdayaan masyarakat melalui desa siaga aktif. Capaian desa/kelurahan *universal child immunization* (UCI) Tahun 2023 baru mencapai 83,13%. Cakupan pelayanan TB sesuai standar mencapai 96,85%, HIV 87,07%, Hipertensi 92,37%, diabetes mellitus sebesar 96,84%. Capaian desa siaga aktif sampai dengan Tahun 2023 sebesar 45,3%.

2.2.2.2 Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar. Selanjutnya menurut WHO (2020) *stunting* adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang / tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi *irreversibel* akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang / kronis yang terjadi dalam 1000 HPK.



Grafik 2.19
Prevalensi *Stunting* Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2018-2023



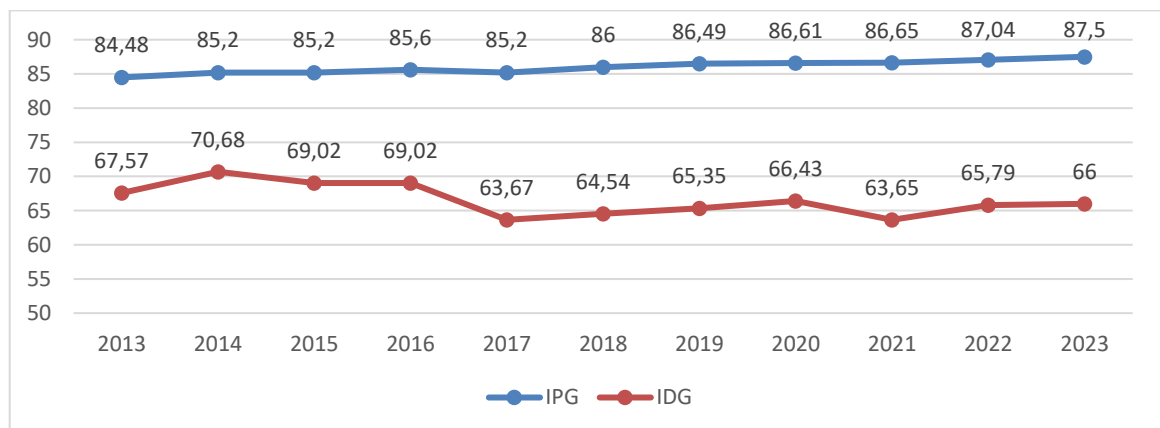
Sumber: SSGI Tahun 2018 - 2023

Prevalensi *stunting* di Kabupaten Ciamis dari Tahun 2018 sampai Tahun 2021 sudah mengalami penurunan, namun naik kembali pada Tahun 2022 dan Tahun 2023. Prevalensi *stunting* Tahun 2023 berada diatas Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

2.2.2.3 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan dua ukuran yang selalu digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan. IPG merupakan indikator yang mengukur tingkat kesetaraan gender dalam akses terhadap sumber daya di berbagai sektor pembangunan, seperti kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. Sementara itu, IDG merupakan indikator yang mengukur tingkat pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, dan politik. IPG dan IDG di Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

Grafik 2.20
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
di Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2023



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis, 2024

IPG Kabupaten Ciamis dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada Tahun 2023 IPG Kabupaten Ciamis mencapai angka 87,5. Pada kategori ini, kesetaraan gender masih perlu ditingkatkan di beberapa sektor, seperti kesehatan dan lapangan kerja. Dalam akses terhadap kesehatan, IPG Kabupaten Ciamis masih memerlukan perhatian khusus, terutama dalam meningkatkan akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan berkualitas. Dalam sektor



pendidikan, IPG menunjukkan kemajuan yang signifikan. Akses pendidikan sudah semakin merata, baik pada tingkat sekolah dasar maupun menengah. Dalam sektor lapangan kerja, IPG masih menunjukkan ketimpangan gender yang signifikan. Terdapat kesenjangan dalam partisipasi laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja.

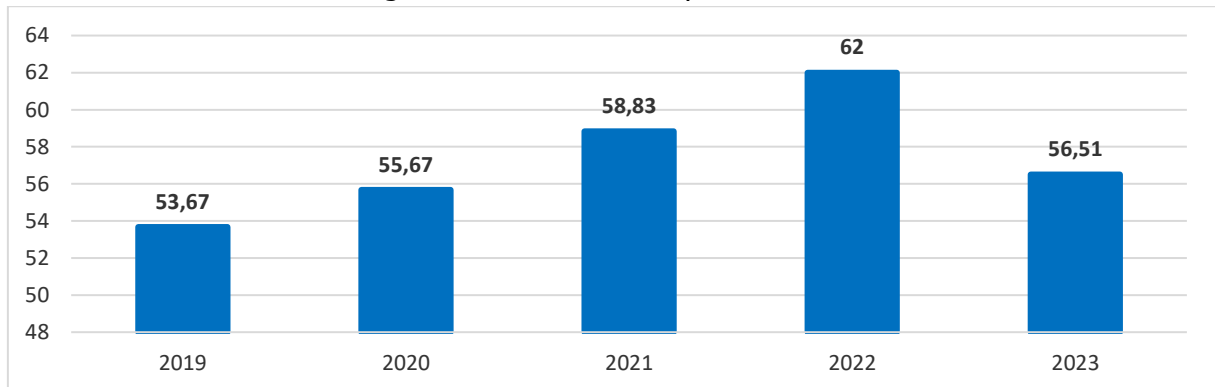
IDG Kabupaten Ciamis dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, pada Tahun 2023 IDG Kabupaten Ciamis mencapai 66. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di Kabupaten Ciamis masih perlu ditingkatkan keterlibatannya dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, dan politik. Partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi masih rendah, dan mayoritas perempuan masih bekerja di sektor informal. Hal ini menunjukkan minimnya akses perempuan dalam mendapatkan pelatihan dan dukungan dalam mengembangkan usaha. Sementara itu, dalam sektor sosial, IDG Kabupaten Ciamis menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam akses perempuan terhadap pelayanan dasar seperti air, sanitasi, dan energi.

2.2.2.4 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indikator yang mengukur berbagai aspek pembangunan masyarakat terkait dengan pemuda, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun sosial-budaya. Pelaksanaan pembangunan pada urusan pemuda dilakukan melalui peningkatan jumlah organisasi kepemudaan serta indeks pembangunan pemuda yang dilakukan melalui berbagai kegiatan kepemudaan. Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

Grafik 2.21

Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis, 2024

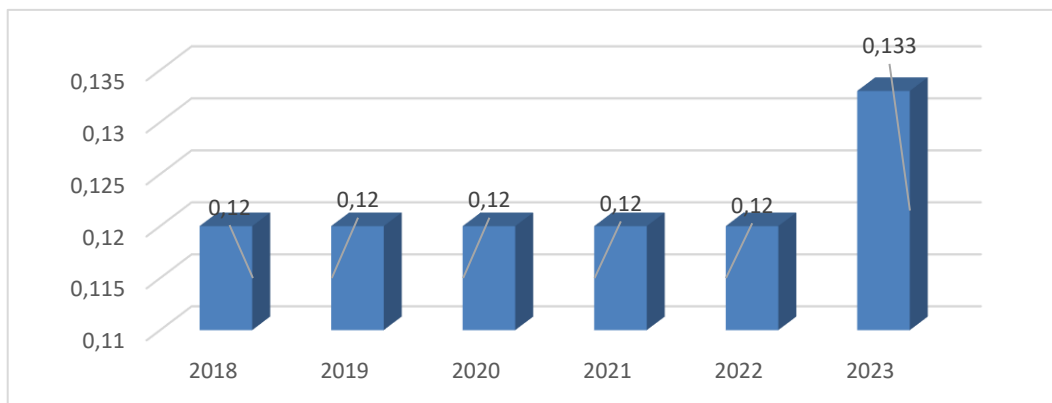
Keberhasilan dari upaya yang dilakukan Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan IPP pada Tahun 2021 - 2023, ditunjukkan dengan berhasilnya beberapa pemuda asal Kabupaten Ciamis meraih juara 1 dalam Pemilihan Pemuda Pelopor tingkat Provinsi Jawa Barat dan Juara ke 3 tingkat Nasional. Pemuda Pelopor adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada para pemuda yang telah menunjukkan semangat dalam mengembangkan potensi diri, merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah. Salah satu inovasi yang dikembangkan oleh pemuda pelopor Kabupaten Ciamis yaitu perontok padi *portable* yang sangat berguna bagi petani yang ada di Kabupaten Ciamis.



2.2.2.5 Indeks Keluarga Sehat

Pengukuran Indeks Keluarga Sehat mulai dilakukan Tahun 2018 seiring dengan dilaksanakannya Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2023 sebesar 0,133 meningkat dari Tahun 2022 sebesar 0,12. Hal ini karena adanya peningkatan kualitas layanan kesehatan yang diakses oleh keluarga di Kabupaten Ciamis yang diukur dari pelayanan kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Perkembangan Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.22
Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2023

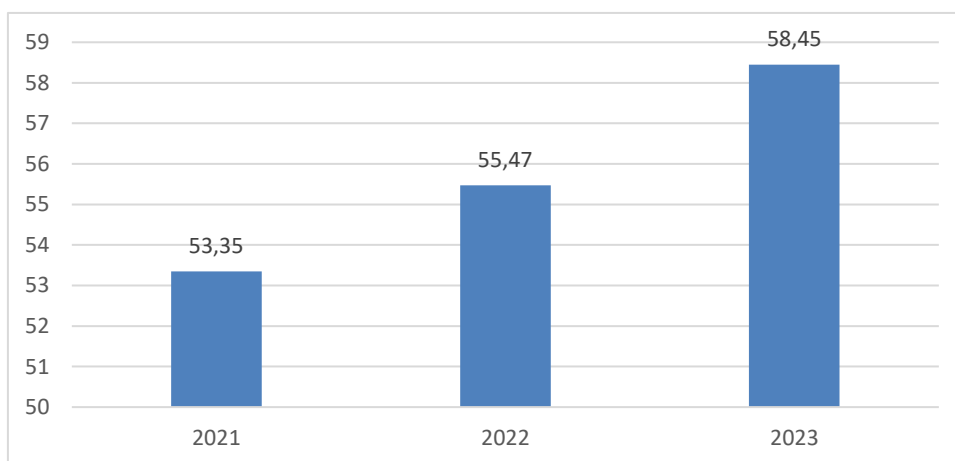


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, 2024

2.2.2.6 Indeks Pembangunan Keluarga

Faktor- faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Keluarga diantaranya meningkatnya akses pendidikan, Kesehatan, dan air bersih seiring dengan peningkatan sarana prasarana dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Ciamis. Selain itu adanya dukungan regulasi Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga melalui Indeks Pembangunan Keluarga. Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Ciamis mulai dihitung pada Tahun 2021. Kondisi Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Ciamis Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.23
Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Ciamis Tahun 2021-2023



Sumber : DPPKBPPA Kabupaten Ciamis, 2024



Capaian Indeks Pembangunan Keluarga meningkat sebesar 2,98 persen dari tahun sebelumnya, capaian pada Tahun 2023 sebesar 58,45 persen. Peningkatan tersebut dilihat dari 3 dimensi yaitu Indeks Ketentraman, Indeks Kemandirian, dan Indeks Kebahagiaan.

2.3 Aspek Daya Saing

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ciamis selama periode Tahun 2013-2023 atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar harga konstan adalah sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.13
PDRB Kabupaten Ciamis Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2023 (Tahun Dasar 2010)

Kategori	Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 *)	2023**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.034.859,78	3.955.539,82	3.918.597,70	4.075.074,10	4.165.067,80	4.234.706,85	4.356.420,05	4.420.522,30	4.589.581,03	4.690.181,03	4.747,35
B	Pertambangan dan Penggalian	37.476,78	38.237,56	38.449,10	38.177,90	38.228,50	39.370,90	38.367,92	38.585,50	41.841,55	42.026,15	42,92
C	Industri Pengolahan	1.204.274,21	1.294.506,79	1.384.131,80	1.477.353,30	1.553.859,20	1.664.729,90	1.748.889,96	1.720.352,40	1.795.134,99	1.921.844,88	1.986,24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12.413,80	12.440,61	12.525,80	13.282,20	13.557,60	14.746,20	15.429,81	15.817,80	17.588,27	19.620,04	20,95
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.884,88	5.954,32	6.026,30	6.386,10	6.840,90	7.518,00	8.230,00	9.030,40	9.914,33	10.136,11	10,48
F	Konstruksi	1.512.455,26	1.583.580,85	1.658.172,90	1.732.764,80	1.857.993,70	2.029.803,60	2.156.546,20	1.996.808,40	2.125.548,36	2.123.177,38	2.210,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.377.882,28	3.638.354,91	3.902.990,40	4.187.447,30	4.396.181,50	4.615.621,20	4.885.267,80	4.620.386,30	4.761.809,19	5.043.838,65	5.303,57
H	Transportasi dan Pergudangan	1.732.898,08	1.931.119,33	2.113.382,80	2.245.125,20	2.362.848,80	2.498.027,20	2.661.209,20	2.650.256,90	2.661.675,71	2.892.886,71	3.176,25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	635.258,98	678.969,84	725.630,60	775.854,50	829.535,00	886.759,50	959.691,10	884.121,20	870.354,61	970.867,13	1.034,16
J	Informasi dan Komunikasi	520.426,53	600.647,69	693.328,60	782.919,00	875.396,60	955.362,10	1.043.444,00	1.385.806,50	1.486.592,82	1.575.905,41	1.680,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	604.881,94	615.887,33	658.164,70	704.166,80	724.512,10	753.863,60	759.469,90	800.614,10	852.597,25	904.713,35	947,11
L	Real Estate	510.720,19	533.242,95	559.972,30	588.081,90	642.533,00	704.323,80	771.602,90	835.150,40	918.155,41	972.304,07	1.030,29
M.N	Jasa Perusahaan	134.259,70	147.370,32	157.842,10	169.079,40	183.217,30	199.693,90	217.880,30	189.316,20	205.469,26	230.796,12	252,62
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	669.473,05	642.132,30	656.479,70	670.885,40	677.214,90	677.877,40	685.868,10	678.833,60	668.574,01	659.304,01	689,78
P	Jasa Pendidikan	647.973,83	725.879,61	810.202,90	859.606,70	933.246,90	989.158,60	1.040.270,90	1.093.664,80	1.119.959,32	1.151.632,43	1.203,77
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	126.881,23	145.443,96	160.226,70	174.009,40	188.547,00	203.797,50	220.493,60	208.666,70	224.260,99	236.100,38	256,10
R.S.T.U	Jasa lainnya	258.493,68	290.107,46	323.790,70	344.759,50	377.967,10	403.329,10	432.158,20	422.476,90	425.877,09	473.551,77	518,71
	PDRB	16.026.514,21	16.839.415,60	17.779.912,90	18.844.973,50	19.826.747,90	20.878.689,28	22.001.239,95	21.970.410,39	22.774.934,20	23.918.885,63	25.111,71

Keterangan *)Angka Sementara

***)Angka Sangat Sementara (Angka tahun 2023 dalam Milyar Rupiah)

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, 2024

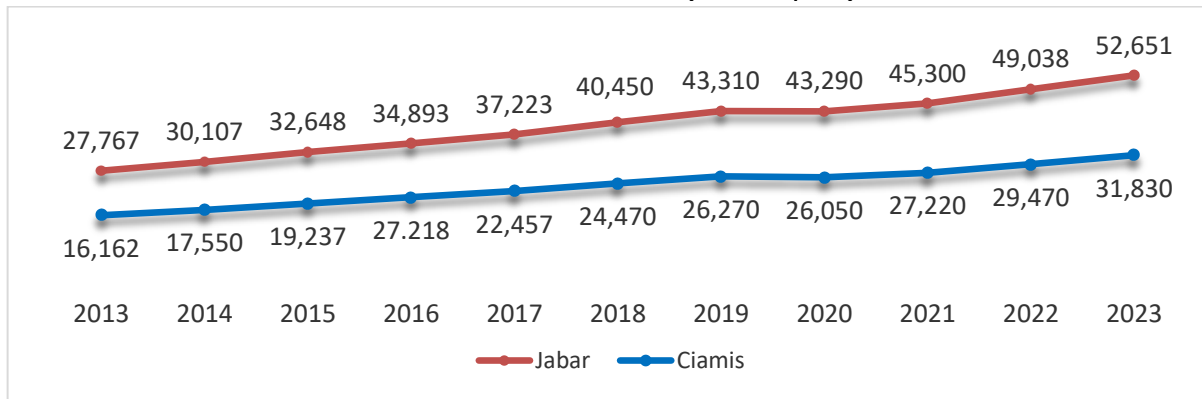


Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2023 Atas dasar Harga Berlaku mencapai Rp39,841 triliun, dan Atas dasar Harga Konstan adalah Rp25,111 triliun. Struktur Ekonomi Kabupaten Ciamis selama periode Tahun 2013-2022 Atas dasar Harga Berlaku didominasi oleh kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan selanjutnya adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Transportasi dan Pergudangan.

2.3.1.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Ciamis atas dasar harga berlaku sejak Tahun 2013 hingga 2023 senantiasa mengalami kenaikan terkecuali pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang mengalami penurunan karena pandemi Covid-19. Pada Tahun 2013 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp16,16 juta. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp31,830 juta pada Tahun 2023. Kenaikan angka PDRB per kapita atas dasar harga berlaku ini belum mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, karena masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Perbandingan dengan provinsi terlihat dalam grafik berikut:

Grafik 2.23
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2023 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Ciamis dan Jawa Barat, 2024

Capaian PDRB per kapita Kabupaten Ciamis pada Tahun 2023 sebesar Rp31,830 juta, apabila dibandingkan dengan capaian PDRB per kapita AdHB Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. PDRB per kapita AdHB Kabupaten Ciamis masih berada di bawah Provinsi Jawa Barat. Rata-rata peningkatan PDRB per kapita AdHB Kabupaten Ciamis selama kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2023 hanya sebesar Rp1,48 juta, sedangkan rata-rata peningkatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2,36 juta.

Adapun perbandingan pertumbuhan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ciamis dengan wilayah setara dapat digambarkan pada tabel berikut ini:



Tabel 2.14
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ciamis dan Wilayah Setara Tahun 2013-2023

No	Kabupaten/ Kota	Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
1	Kota Bogor	25.747.127	28.278.474	30.884.838	33.249.970	35.594.960	38.530.220	42.403.300	44.099.680	45.921.250	49.754.540	53.238.770
2	Kota Sukabumi	23.441.729	25.843.572	28.201.348	30.267.140	32.580.630	35.162.510	37.927.740	35.925.770	37.208.940	39.820.020	42.561.940
3	Kota Bandung	61.742.600	69.895.471	78.894.552	87.072.081	96.123.130	105.600.610	113.177.040	116.056.350	121.126.440	133.378.240	140.143.600
4	Kota Cirebon	45.113.364	49.371.770	54.322.621	58.421.576	63.261.150	68.418.680	74.397.890	70.468.470	72.749.220	78.004.430	84.135.310
5	Kota Bekasi	22.453.730	24.260.800	26.066.220	27.593.543	29.139.310	31.031.320	33.330.320	37.999.270	39.526.590	42.421.030	45.281.170
6	Kota Depok	19.685.837	21.542.101	23.043.825	24.465.884	25.907.490	27.619.760	30.079.120	34.357.720	35.658.990	38.225.820	40.816.920
7	Kota Tasikmalaya	18.865.112	20.806.243	23.175.221	25.395.682	27.616.990	30.144.650	32.213.080	30.223.190	31.555.960	34.050.170	36.954.580
8	Kabupaten Ciamis	10.023.773	17.550.492	19.327.952	20.864.966	16.774.168	17.587.559	18.431.493	18.283.003	27.217.700	29.471.600	31.833.510

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Kontribusi PDRB Atas Harga Berlaku berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2023 dapat dilihat pada tabel 2.14 berikut ini :

Tabel 2.15
Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2023 (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,92	25,42	24,42	24,34	23,64	23,62	23,50	23,60	23,28	22,73	22,06
B	Pertambangan dan Penggalian	0,24	0,23	0,22	0,20	0,18	0,17	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16
C	Industri Pengolahan	7,31	7,50	7,60	7,71	7,64	7,64	7,46	7,34	7,42	7,54	7,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,04



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
F	Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,05	9,09	8,97	8,75	8,88	9,11	9,21	8,45	8,96	8,70	8,57
G	Konstruksi	21,05	21,19	20,94	21,04	21,09	20,82	20,96	19,93	19,85	20,15	20,33
H	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,73	11,58	13,03	13,07	13,10	12,93	12,71	13,09	12,74	13,20	14,05
I	Transportasi dan Pergudangan	3,94	4,12	4,08	4,10	4,17	4,24	4,41	4,23	4,08	4,34	4,41
J	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,84	2,94	3,04	3,17	3,33	3,30	3,30	4,32	4,38	4,23	4,16
K	Informasi dan Komunikasi	3,67	3,62	3,56	3,59	3,56	3,52	3,33	3,46	3,69	3,91	3,87
L	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,18	3,19	3,07	3,01	3,08	3,12	3,18	3,42	3,58	3,56	3,52
M.N	Real Estate	0,85	0,88	0,86	0,86	0,88	0,90	1,02	0,90	0,94	1,00	1,05
O	Jasa Perusahaan	3,77	3,40	3,19	3,07	2,95	2,84	2,67	2,63	2,47	2,23	2,17
P	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,97	4,24	4,38	4,38	4,65	4,91	5,16	5,62	5,62	5,35	5,26
Q	Jasa Pendidikan	0,79	0,83	0,85	0,87	0,90	0,91	0,93	0,89	0,93	0,90	0,92
R.S.T.U	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,60	1,65	1,69	1,73	1,82	1,84	1,88	1,84	1,76	1,86	1,95
	Jasa lainnya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	PDRB											

Keterangan *)Angka Sementara

***)Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, Maret 2024



2.3.1.3 Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Per Kapita (Angka Konsumsi RT Per Kapita)

Hasil analisis konsumsi non makanan per kapita di Kabupaten Ciamis dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.16
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Non-Makanan Per Kapita di Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Konsumsi Per Kapita Sebulan	Rp	944.298	1.001.390	1.010.334	1.021.571	1.201.396	1.243.665
	- Konsumsi Non Makanan	Rp	412.026	461.103	446.952	450.761	548.372	544.926
	- Konsumsi Makanan	Rp	532.272	540.287	563.382	570.810	653.024	698.739
2	Rasio		77,41	85,34	79,33	78,96	83,97	77,98

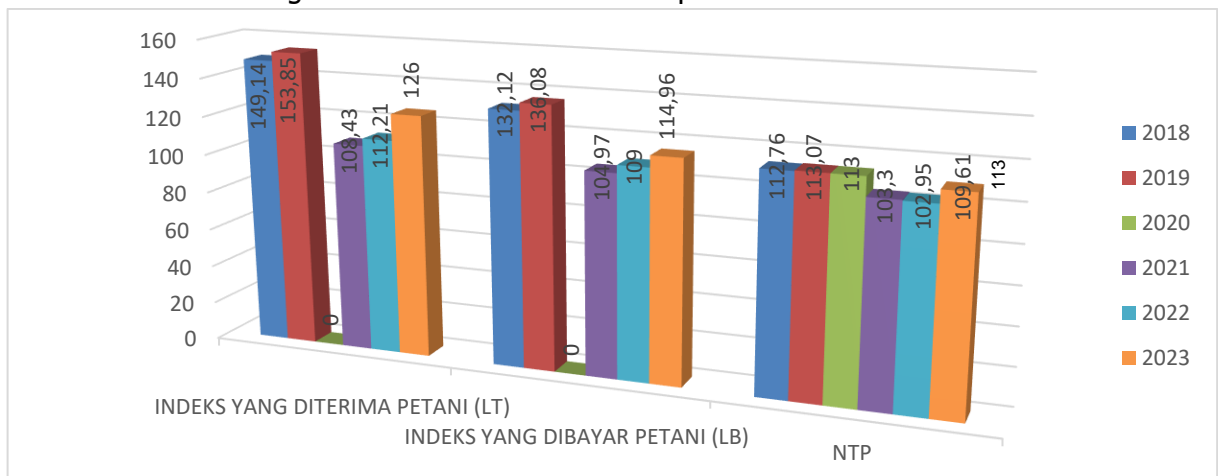
Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, 2024

Konsumsi per kapita sebulan pada Tahun 2023 sebesar Rp1.243.665 paling besar berasal dari faktor konsumsi makanan dengan rasio 77,98.

2.3.1.4 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase. Secara konseptual, Nilai Tukar Petani (NTP) diartikan sebagai pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Penggunaan teknologi sangat berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas yang mempunyai dampak terhadap NTP, berdasarkan data BPS, kondisi Kabupaten Ciamis pada Tahun 2023 jumlah petani umur 19 – 23 tahun yang tidak menggunakan teknologi digital sebanyak 14.456 terdiri dari 2.471 perempuan dan 11.985 laki-laki.

Grafik 2.24
Perkembangan Nilai Tukar Petani di Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, 2023

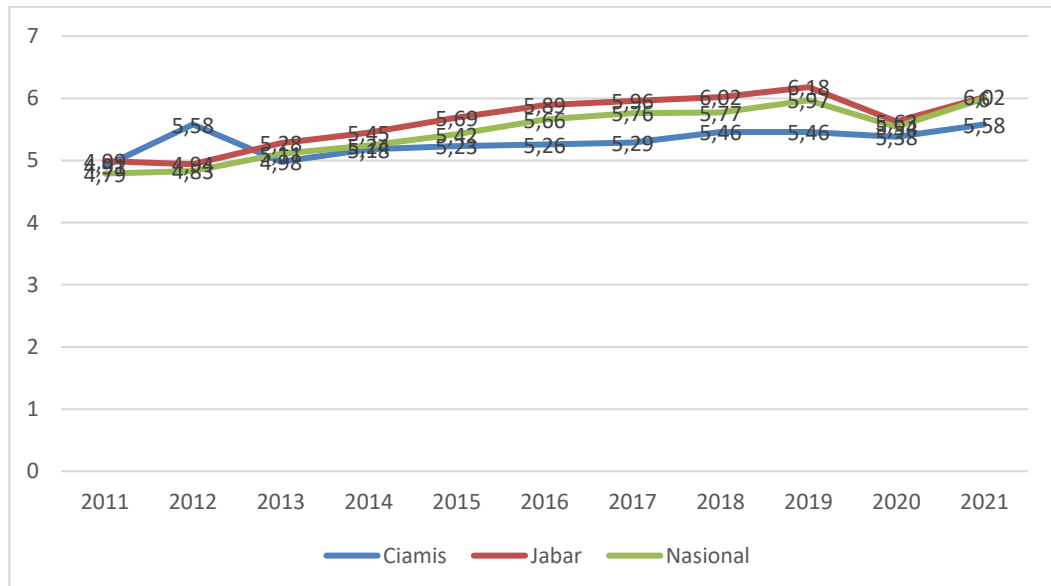


NTP di Kabupaten Ciamis Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 mengalami fluktuatif sebanding dengan indeks yang diterima petani dan indeks yang dibayar petani, hal ini karena adanya penurunan harga komoditas gabah pada Tahun 2023 yaitu pada Bulan April sampai dengan Oktober, sehingga berpengaruh terhadap indeks yang diterima petani.

2.3.1.5 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah, terutama dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif, adil, dan berkelanjutan. IPEI Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

Grafik 2.25
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2011 – 2021



Sumber : <https://inklusif.bappenas.go.id/data>

Berdasarkan grafik, Kabupaten Ciamis sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat memiliki IPEI sebesar 5,58, yang berada di bawah rata-rata IPEI nasional maupun Provinsi Jawa Barat. Angka IPEI yang masih rendah ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak persoalan dalam pengembangan ekonomi inklusif di Kabupaten Ciamis. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam sektor ekonomi di Kabupaten Ciamis antara lain persaingan dalam sektor usaha kecil dan menengah, masih adanya kemiskinan, dan tingkat di kalangan pemuda. Penyebab dari permasalahan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kurangnya dukungan kegiatan kerja, dan sulitnya akses pendanaan yang memadai untuk mengembangkan usaha.



2.3.1.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Ciamis terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Realisasi pendapatan asli daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp 267.600.065.584,- dengan persentase PAD terhadap pendapatan sebesar 9,83%. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis dari tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.17
Perkembangan PAD Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	PAD	Rp	264.280.368.264	254.192.324.020	273.498.413.369	301.566.468.476	267.600.065.584
2	Pedapatan Daerah	Rp	2.951.167.251.683	2.620.232.709.430	2.673/329.176.302	2.683.885.961.353	2.786.571.973.630
3	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	8,96	9,70	10,23	10,43	9,83

Sumber: BPKD dan Bapenda Kabupaten Ciamis, 2024

2.3.1.7 Opini BPK

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika laporan keuangan dianggap menyajikan informasi secara wajar dan bebas, WTP adalah opini audit dengan kualitas tertinggi. Opini WTP didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu, seperti: Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, Kecukupan pengungkapan, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini WTP menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, seperti: Posisi keuangan (neraca), Hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas.

Selama 11 tahun berturut – turut dari tahun 2013 – 2023 Kabupaten Ciamis mendapatkan penghargaan Opini WTP dari BPK-RI, seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.18
Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan pada Kabupaten Ciamis tahun 2013-2023

Uraian	Satuan	Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKD Kabupaten Ciamis, 2024

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

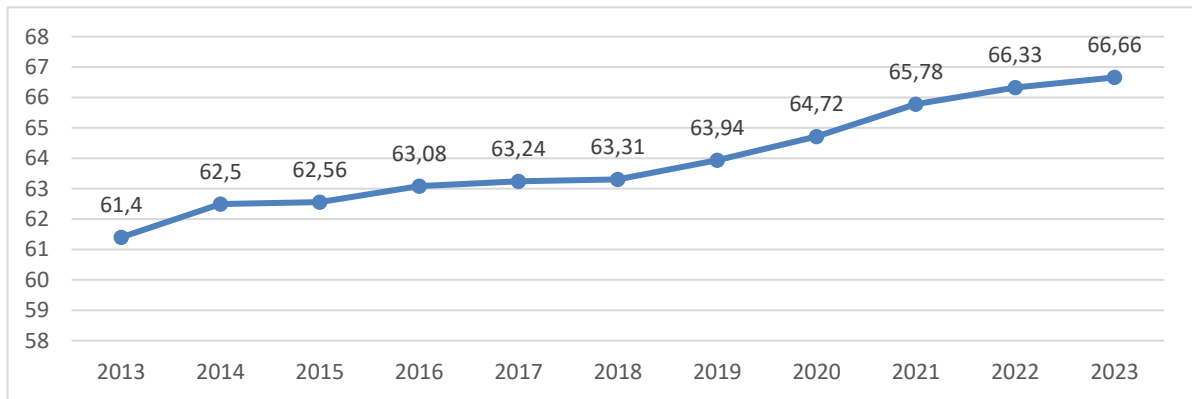
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah, manusia merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan. Oleh karena itu pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan daerah.



2.3.2.1 Indeks Pendidikan

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan di Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

Grafik 2.26
Indeks Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2023



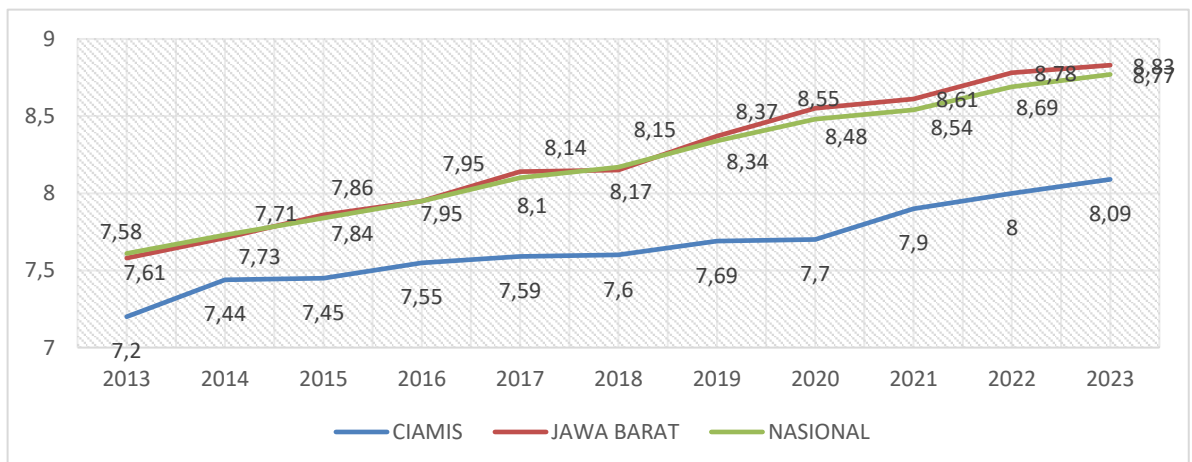
Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, 2024

Tahun 2023, Indeks Pendidikan Kabupaten Ciamis telah mencapai angka 66,66, yang mengindikasikan kemajuan yang signifikan dalam sektor pendidikan di Kabupaten Ciamis. Penyebab kenaikan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti peningkatan akses pendidikan, penurunan angka putus sekolah, peningkatan kualitas guru dan fasilitas pendidikan.

2.3.2.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan komponen IPM dari unsur pendidikan. HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 Tahun keatas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Grafik 2.27
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2023

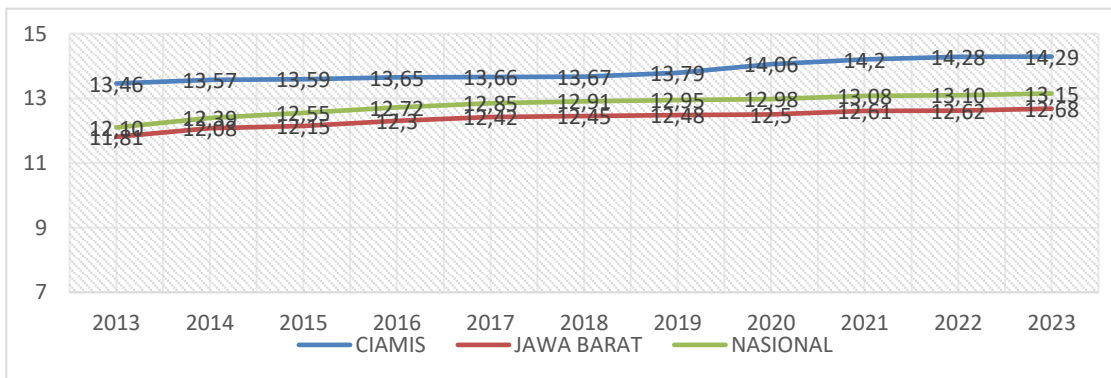


Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, 2024



Capaian RLS Kabupaten Ciamis setiap tahunnya mengalami peningkatan, Tahun 2023 menjadi 8,09 Tahun, namun posisinya masih berada dibawah capaian nasional dan Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Kabupaten Ciamis perlu mendapatkan perhatian lebih dalam upaya peningkatan kualitas dan akses pendidikan untuk mencapai atau melampaui angka rata-rata di tingkat provinsi dan nasional. Rendahnya angka harapan lama sekolah bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya fasilitas pendidikan, akses yang terbatas, atau anggaran yang tidak mencukupi. Kondisi ini menegaskan perlunya dukungan dan perbaikan dalam sistem pendidikan yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Ciamis.

Grafik 2.28
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, 2024

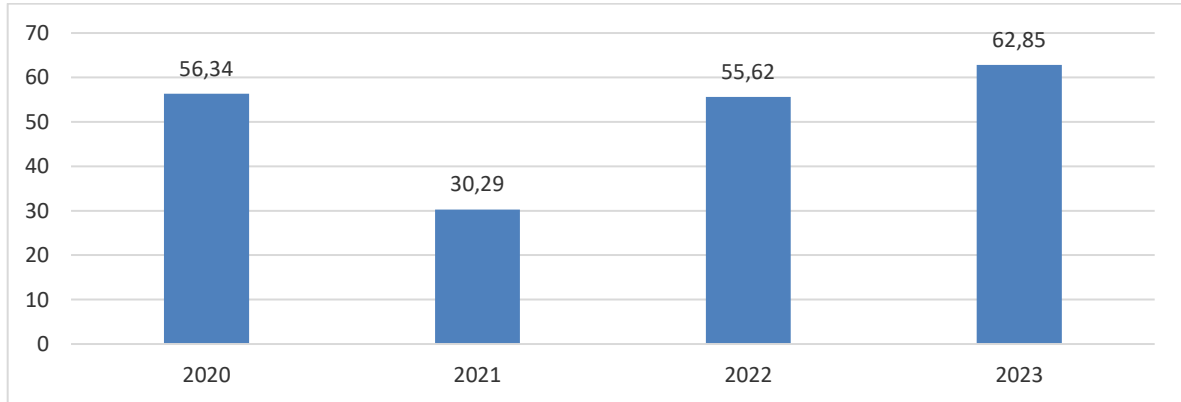
Angka harapan lama sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan, Tahun 2023 menjadi sebesar 14,29 tahun, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Kabupaten Ciamis memiliki tingkat aksesibilitas dan tingkat partisipasi yang lebih baik. Ini bisa menandakan bahwa lebih banyak orang di Kabupaten Ciamis memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada perkembangan masyarakat dan perekonomian di Kabupaten Ciamis.

2.3.2.3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu secara komprehensif. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Ciamis sebagai berikut:



Grafik 2.29
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2023

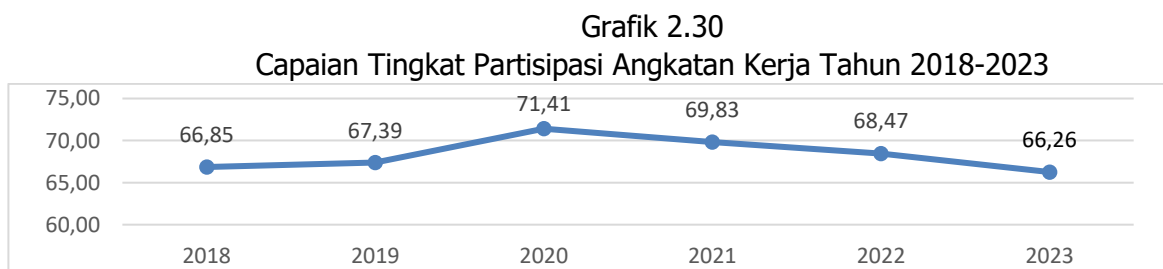


Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis, 2024

Berdasarkan grafik 2.29, pada Tahun 2023 IPLM di Kabupaten Ciamis meningkat menjadi 62,85 dari angka sebelumnya yaitu 55,62 pada Tahun 2022. Hal ini karena peningkatan akses terhadap layanan informasi yang berkualitas, yang ditunjukkan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur pendidikan dan perpustakaan, sehingga akses masyarakat terhadap buku atau literatur lain menjadi lebih mudah. Budaya membaca menjadi faktor penting dalam mengembangkan kemampuan literasi masyarakat.

2.3.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah sebuah indikator untuk mengukur persentase dari angkatan kerja yang aktif bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang rendah dapat berdampak pada berkurangnya jumlah tenaga kerja produktif, serta menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, 2023

Data Tahun 2023 menunjukkan bahwa TPAK di Kabupaten Ciamis menurun hingga mencapai angka 66,26, angka yang cukup rendah dibandingkan dengan standar nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ada cukup banyak masyarakat yang menganggur atau keluar dari Kabupaten Ciamis untuk mencari pekerjaan, sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Penyebab utama dari menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Ciamis adalah kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia disebabkan pandemi *Covid-19* yang memberikan dampak besar pada dunia kerja dan perekonomian secara keseluruhan, sehingga banyak usaha yang gulung tikar dan beberapa pekerja yang terpaksa di-PHK.



2.3.2.5 Kualitas Tenaga Kerja

Pendidikan merupakan suatu faktor yang sangat menentukan kualitas tenaga kerja di suatu daerah, tingkat pendidikan yang rendah dan ketidaksesuaian keahlian dan keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan memicu rendahnya penyerapan tenaga kerja, perkembangan jumlah penduduk berdasarkan pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2022, sebagai berikut:

Tabel 2.19
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Ciamis (Jiwa) Tahun 2013-2023

No	Kategori	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/ Sederajat	467.359	463.695	279.905	-	381.069	341.535	334.290	367.223	351.313	365.249	334.252
2	SMP/ Sederajat	133.358	140.001	83.578	-	107.412	113.482	118.683	123.939	132.886	130.845	129.141
3	SMA/ Sederajat	82.209	84.034	76.329	-	81.317	93.879	109.321	64.658	61.398	70.224	69.691
4	SMK (Kejuruan)	-	-	-	-	-	-	-	48.012	55.752	41.024	61.582
5	Diploma I/II/III/ Akademi/ Universitas	40.714	41.556	36.266	-	32.325	35.014	30.745	36.913	35.753	32.258	39.994
Jumlah		723.640	729.286	494.078	-	602.123	583.910	593.039	640.767	637.102	639.600	634.660

Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, 2024

Jumlah penduduk dengan pendidikan terakhir Diploma I/II/III/Akademisi/Universitas pada Tahun 2022 sejumlah 32.258 jiwa dan mengalami kenaikan pada Tahun 2023 yaitu sejumlah 39.994 jiwa. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dengan jenjang pendidikan SD/ sederajat pada Tahun 2023 merupakan yang paling banyak di Kabupaten Ciamis dengan jumlah sebesar 334.252 jiwa, disusul dengan jenjang pendidikan SMP/ sederajat sejumlah 129.141 jiwa. Dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, mayoritas penduduk di Kabupaten Ciamis berpendidikan SD/ sederajat. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Ciamis masih rendah.

2.3.2.6 Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 Tahun keatas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 Tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting, semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.



Tabel 2.20
Rasio Ketergantungan Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2023

No.	Uraian	Satuan	Tahun										
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	Jiwa	317.385	306.395	279.256	273.502	268.869	262.757	261.900	261.726	261.167	255.954	274.671
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	Jiwa	105.777	127.962	148.044	158.822	161.865	172.562	182.012	189.617	195.775	144.431	142.206
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	Jiwa	423.162	434.357	427.300	432.324	430.734	435.319	443.912	451.343	456.942	400.385	416.877
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	Jiwa	949.683	944.416	962.114	966.022	970.689	973.188	974.389	978.919	979.760	867.491	864.324
5	Rasio Ketergantungan		0,44	0,46	0,44	0,45	0,44	0,45	0,46	0,46	0,47	0,46	0,48

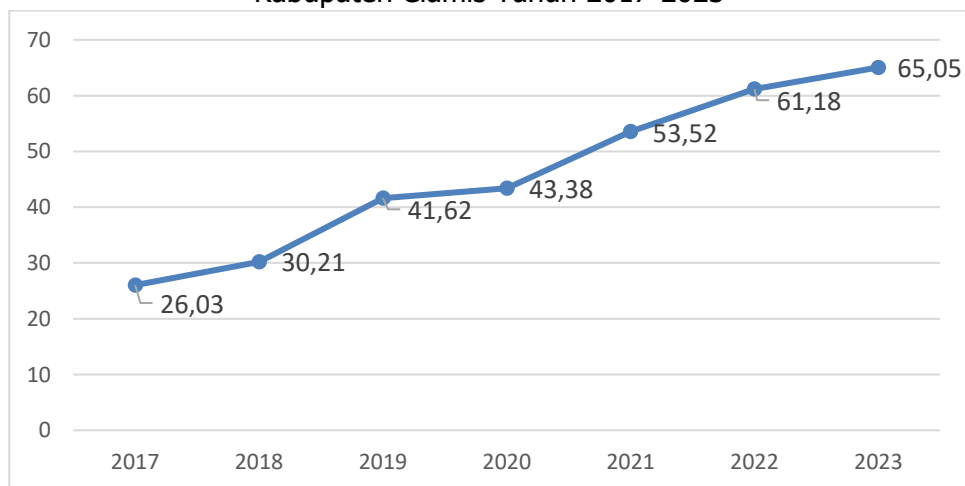
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, 2024

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 rasio ketergantungan di Kabupaten Ciamis sebesar 0,48 artinya 100 orang penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Salah satu faktor untuk menekan angka rasio ketergantungan yaitu dengan menurunkan angka kelahiran melalui program keluarga berencana.

2.3.2.7 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Keatas Yang Pernah Mengakses Internet

Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Keatas Yang Pernah Mengakses Internet merupakan indikator proxy pengganti dari Indeks Literasi Digital. Perkembangan Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Keatas dari Tahun 2017-2023 dapat digambarkan pada grafik berikut ini :

Grafik 2.31
Capaian Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Keatas Yang Pernah Mengakses Internet Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2023



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, 2024



Penduduk usia 5 Tahun keatas yang pernah mengakses internet di Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada Tahun 2023 mencapai sebesar 65,05% meningkat sebesar 3,87% dibanding Tahun 2022. Hal ini karena semakin berkembangnya teknologi informasi yang membuat masyarakat lebih tertarik untuk mengakses internet dalam melakukan aktivitas seperti komunikasi, edukasi, hiburan, dan bisnis.

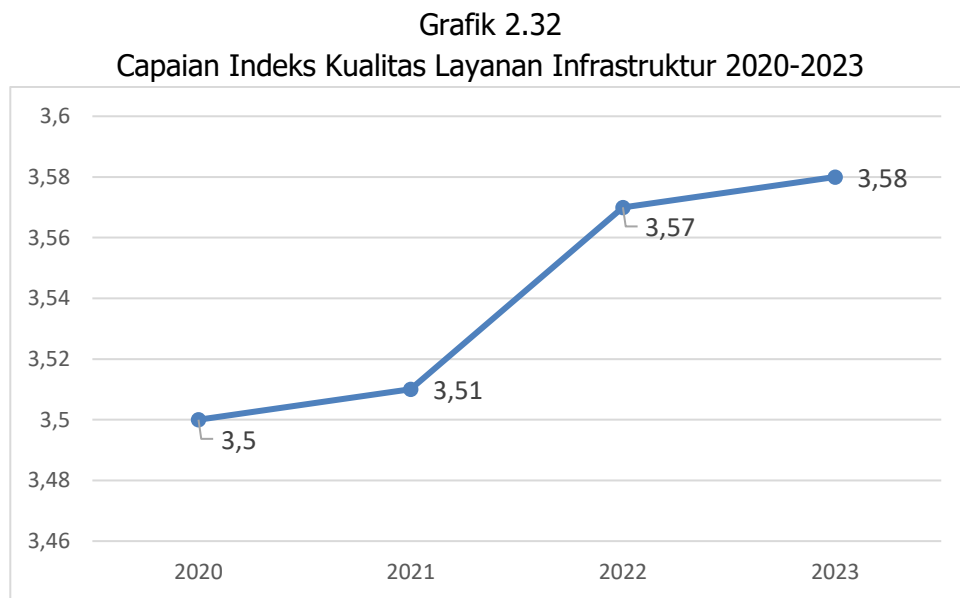
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

2.3.3.1 Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur wilayah menunjang daya saing daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah, semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Keberhasilan dari pembangunan infrastruktur adalah apabila indikator manfaat (*outcome*) atau dampak (*impact*) dapat dicapai artinya pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap masyarakat misalnya akses transportasi menjadi mudah dan cepat, sedangkan dari dampak jika pembangunan tersebut akan memberikan perubahan dalam lingkungan menjadi lebih sederhana, mudah dan meningkat.

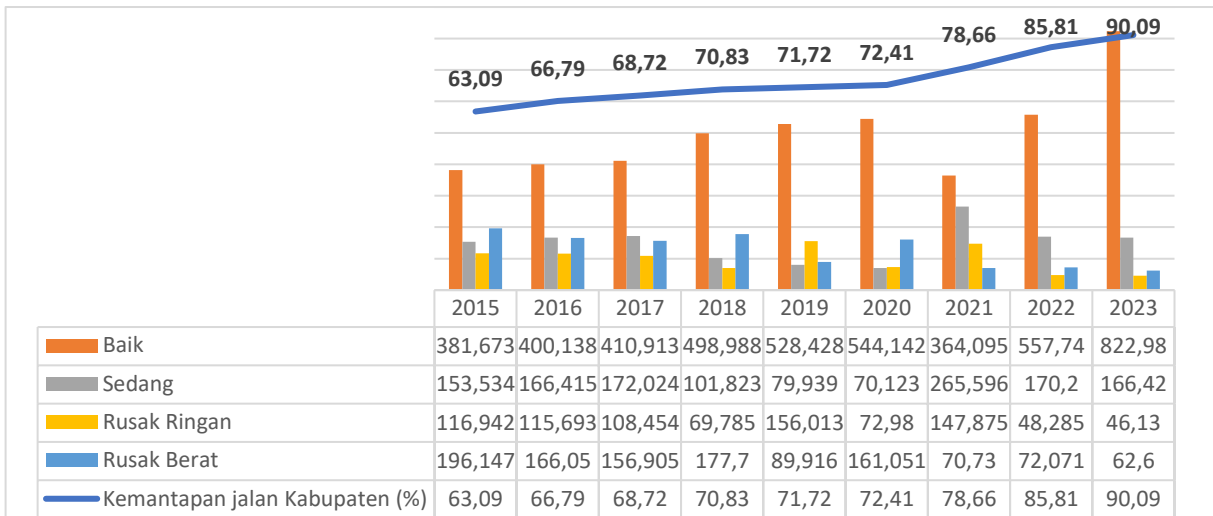
Indeks kualitas layanan infrastruktur merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh Pemerintah dan dihitung menggunakan metode survey kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur yang terbangun.



Berdasarkan grafik 2.32, IKLI Kabupaten Ciamis Tahun 2020 sebesar 3,5 poin dengan kategori Baik, meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 3,58 pada Tahun 2023 dengan kategori Sangat Baik. Angka ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas layanan infrastruktur dengan indikator infrastruktur jalan dan jembatan, transportasi, air bersih, irigasi pertanian dan rumah tidak layak huni.



Grafik 2.33
Kondisi Jalan di Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2023 (km)



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis, 2024

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang harus memiliki kondisi mantap untuk memberikan pelayanan maksimum terhadap pengguna jalan. Kemantapan jalan di Kabupaten Ciamis setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan yang merupakan usaha untuk mempertahankan kondisi mantapnya jalan agar dapat terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Disamping capaian indikator kemantapan jalan kabupaten yang semakin membaik, Pemerintah Kabupaten Ciamis senantiasa berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur terutama yang berkaitan dengan kelancaran aktivitas sosial ekonomi dan infrastruktur pelayanan dasar lainnya.

Pemerintah Kabupaten Ciamis terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten. Hal ini dilakukan karena jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi berperan penting dalam mendukung produktivitas lahan pertanian. Program rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan sebagai upaya meningkatkan kondisi jaringan irigasi, namun karena banyaknya terjadi bencana alam yang tidak diimbangi dengan kecepatan penanganan terhadap kerusakan jaringan irigasi serta umur bangunan jaringan irigasi sudah melewati umur konstruksi menyebabkan peningkatan jaringan irigasi kondisi baik mengalami peningkatan yang tidak terlalu cepat. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik sejak dilakukan survey kondisi tahun 2018 menunjukkan angka yang semakin meningkat, dari 49,5% pada tahun 2018 meningkat 10,4% menjadi 59,90% pada tahun 2023.

Drainase yang baik membantu mengalirkan air hujan dari permukaan tanah dan mencegah terjadinya genangan dan banjir. Panjang drainase yang dipelihara berfluktuasi menyesuaikan pada prioritas penanganan dan pendanaan dan sebagian besar berada di daerah perkotaan. Sampai dengan tahun 2023 kondisi drainase dalam keadaan baik mencapai 74% naik sebesar 39,02% dibanding tahun 2017 sebesar 34,52%.

Infrastruktur dasar permukiman yang terdiri dari penyediaan air minum dan sanitasi menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Ciamis dan terus diupayakan untuk ditingkatkan kinerjanya karena berkaitan juga dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM). Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan terus mengalami peningkatan dari 0,81 di tahun 2018 menjadi 0,92 di tahun 2023



atau naik sebesar 0,11. Capaian ini tidak terlepas dari peran Perumdam yang menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan air minum perkotaan dan program program yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan air minum untuk wilayah Perdesaan. Sedangkan untuk penduduk berakses air minum telah terpenuhi 100% sejak tahun 2015 dan terus dipertahankan sampai dengan Tahun 2023.

Penyediaan air minum di Kabupaten Ciamis setiap tahun terus ditingkatkan, baik itu untuk pemenuhan kebutuhan di perkotaan maupun di perdesaan. Pada saat ini kebutuhan air baku untuk air minum yang dimanfaatkan oleh Perumdam Tirta Galuh sebesar 0,456 m³/detik, sedangkan kapasitas air baku di kabupaten Ciamis pada Tahun 2023 sebesar 408 l/detik atau sebesar 35.251,2 m³/hari. Dari hasil proyeksi kebutuhan air baku untuk air minum sampai dengan Tahun 2045 diperkirakan sebesar 2 m³/detik. Dari data tersebut menunjukkan bahwa air baku yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat, namun yang perlu ditingkatkan adalah infrastruktur layanan air minum baik perkotaan maupun perdesaan.

Persentase rumah tangga bersanitasi menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 34,24% pada tahun 2015 menjadi 74,67% pada tahun 2023. Hal ini berkaitan dengan penerapan PHBS di masyarakat yang semakin meningkat yang ditunjukkan dengan semakin bertambahnya desa-desa yang mendeklarasikan ODF dari tahun ke tahun, program SANIMAS, juga adanya ketentuan bahwa rumah tidak layak huni yang direhabilitasi harus dilengkapi dengan fasilitas jamban.

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian indikator Cakupan ketersediaan rumah layak huni selama periode tahun 2015-2023 meningkat setiap tahunnya, dari 67,14% pada tahun 2015 menjadi 69,62% pada tahun 2023. Kondisi ini didukung dengan adanya upaya rehabilitasi rumah tidak layak huni dari berbagai sumber pendanaan baik APBN (program BPS/DAK dari Kementerian PUPR, program rehab RTLH bagi keluarga PKH dari Kementerian Sosial), APBD Provinsi (rehab Rutilahu dari bantuan keuangan provinsi), APBD Kabupaten (rehab Rutilahu melalui bantuan sosial bagi keluarga tidak mampu), CSR dan dana umat (BAZNAS). Selain itu, pembangunan perumahan di Kabupaten Ciamis oleh sektor swasta juga mempengaruhi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat di Kabupaten Ciamis, baik rumah yang bersubsidi pemerintah maupun yang tidak.

Kabupaten Ciamis merupakan daerah rawan bencana dimana kejadian bencana terjadi setiap tahunnya dan mengakibatkan beberapa rumah terdampak bencana. Relokasi/pembangunan rumah terdampak bencana baru dilaksanakan semenjak tahun 2022, Pembangunan kembali/relokasi rumah korban bencana di Kabupaten Ciamis telah sesuai dengan spesifikasi rumah tahan bencana yaitu salah satunya dengan menerapkan Teknologi Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN) di beberapa rumah yang di relokasi pada kawasan rawan gerakan tanah.

Timbulan sampah di Kabupaten Ciamis dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Ciamis telah dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan mengangkut sampah ke TPA, selain mengangkut ke TPA adalah dengan mendorong pembentukan bank sampah, penyediaan TPS3R dan sosialisasi ke masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya, sehingga sampah yang diangkut ke TPA semakin berkurang. Untuk mewujudkan hal tersebut penyediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan dari tahun ke tahun semakin terus ditingkatkan dari 14,92% di tahun 2019 menjadi 23,05% di tahun 2023. Adapun capaian infrastruktur lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.21
Capaian Infrastruktur Lainnya Tahun 2015-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun								
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	n/a	n/a	34,52	37,94	41,47	46,09	45,11	73,54	74,00
2	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	68,87	69,15	69,57	49,5	49,87	50,55	54,78	59,85	59,90
3	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	34,24	62,4	70,11	72,98	73,06	73,17	73,37	74,37	74,67
4	Kapasitas Air Baku *)	m ³ /detik	0,456	0,456	0,456	0,456	0,456	0,456	0,456	0,456	0,456
5	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen	n/a	n/a	n/a	81,08	89,12	89,78	90,57	91,58	91,98
7	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	14,92	17,99	19,14	20,32	23,05
8	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	67,14	67,38	67,56	67,92	68,31	68,73	69,25	69,41	69,62
9	Relokasi/Pembangunan Rumah Korban Bencana	Unit	0	0	0	0	0	0	0	21	13
10	Luas ruang terbuka Hijau yang dikelola	Ha	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	9,22	9,22	9,22	9,22
11	Jumlah TPS3R	unit	0	0	0	0	0	0	7	7	10
12	Jumlah Bank Sampah	unit	0	0	0	0	0	0	210	229	239
13	IPLT yang dikelola	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1

*) Kapasitas air baku untuk air minum (PDAM)

Sumber: DPUPRP, DPRKPLH, PDAM Kabupaten Ciamis, 2024

2.3.3.2 Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata ruang, sehingga RTRW harus menjadi pilar utama sebagai pintu masuk awal dan utama (*main entrance*) dalam hal perencanaan pembangunan sekaligus kekuatan perekonomian lokal. Perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi budi daya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya, serta fungsi pertahanan keamanan; aspek pengelolaan secara terpadu berbagai sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan, serta kualitas ruang. Perencanaan tata ruang juga mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya. Sehingga sudah seharusnya arah kebijakan pembangunan untuk mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ketaatan terhadap Tata Ruang di Kabupaten Ciamis Tahun 2023 adalah sebesar 85 persen.

2.3.3.3 Luas Wilayah Produktif

Dalam perkembangan yang sangat kompetitif sekarang ini setiap daerah perlu mengupayakan terbentuknya wilayah-wilayah yang produktif untuk memungkinkan tersedianya lapangan kerja yang stabil bagi penduduknya. Sesuai dengan perkembangan globalisasi dan pertumbuhan perekonomian yang cepat, maka para investor menjadi sangat selektif dalam memilih wilayah-wilayah dimana mereka akan menempatkan perusahaannya. Tata ruang wilayah perlu dikondisikan untuk mendukung terwujudnya wilayah-wilayah yang produktif tersebut yang ditempati oleh industri-industri bernilai tambah tinggi yang akan memberikan pendapatan tinggi bagi para pekerjanya.



Tabel 2.22
 Persentase Luas Wilayah Produktif di Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas wilayah budidaya	Hektar	140.563,06	140.563,06	130.381,96	130.381,96	152.712,43	152.712,43
2	Luas wilayah produktif	Hektar	102.362,06	102.362,06	114.457,30	114.457,30	101.317,18	101.317,18
3	Rasio (Luas Wilayah Produktif terhadap luas wilayah budidaya)	Persen	72,80	72,80	87,70	87,7	75	75

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis, 2024

Luas wilayah industri pada Tahun 2023 sebesar 477,69 hektar sedangkan luas wilayah produktif pada Tahun 2023 sebesar 152.712,43 hektar.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan.

2.3.4.1 Jumlah Investasi

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya untuk menarik para investor guna menanamkan modalnya di daerah, sehingga akan terbuka lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Berikut perkembangan nilai investasi PMDN di Kabupaten Ciamis:

Grafik 2.34
 Realisasi Nilai Investasi Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2023



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, 2024

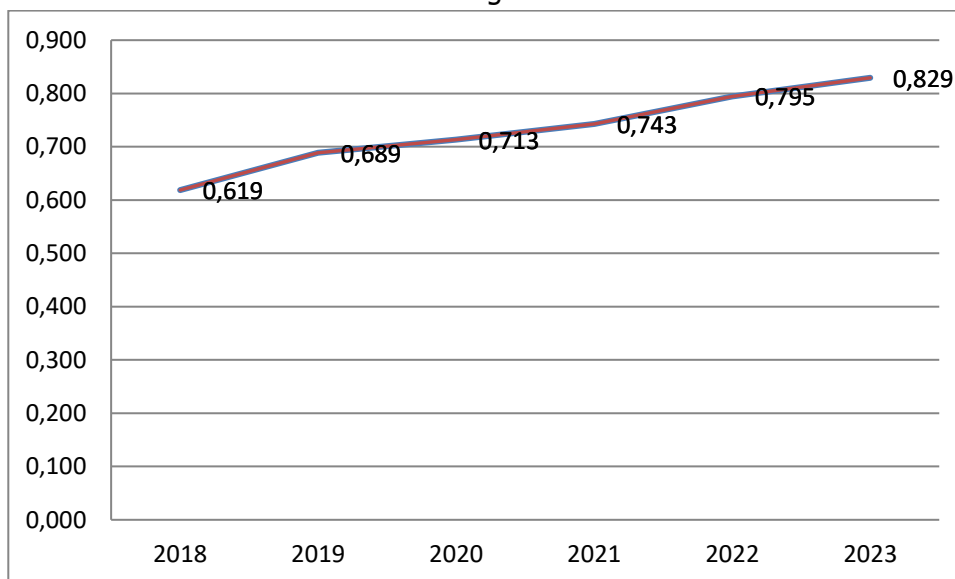


Perkembangan investasi di Kabupaten Ciamis pada periode Tahun 2013-2023 berfluktuasi, namun kecenderungan naik. Meskipun demikian investasi di Kabupaten Ciamis masih memerlukan perhatian Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam rangka optimalisasi dan meningkatkan iklim usaha dan investasi serta mempromosikan potensi-potensi yang ada. Salah satu upaya dari Pemerintah Kabupaten Ciamis yaitu dengan pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga akan lebih mempermudah investor didalam pengurusan proses perizinan, bisa dilakukan secara cepat dan efisien.

2.3.4.2 Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Semakin banyaknya jumlah desa yang semakin baik dari sosial, ekonomi, dan ekologi atau yang biasa disebut dengan Desa Mandiri.

Grafik 2.35
Indeks Desa Membangun Tahun 2018-2023



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, 2024

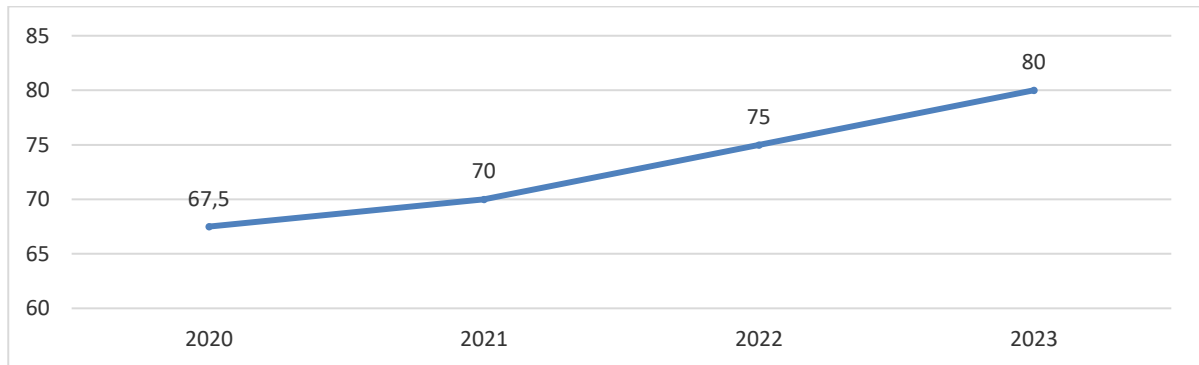
IDM Kabupaten Ciamis pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan. Hal ini karena berbagai program pembangunan desa yang terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis diantaranya pengembangan desa wisata, peningkatan infrastruktur, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

2.3.4.3 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peningkatan derajat keamanan dan kondisi daerah yang tertib dapat mendukung stabilitas ekonomi dan daya tarik investasi. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian Indeks Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2.36
Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2023



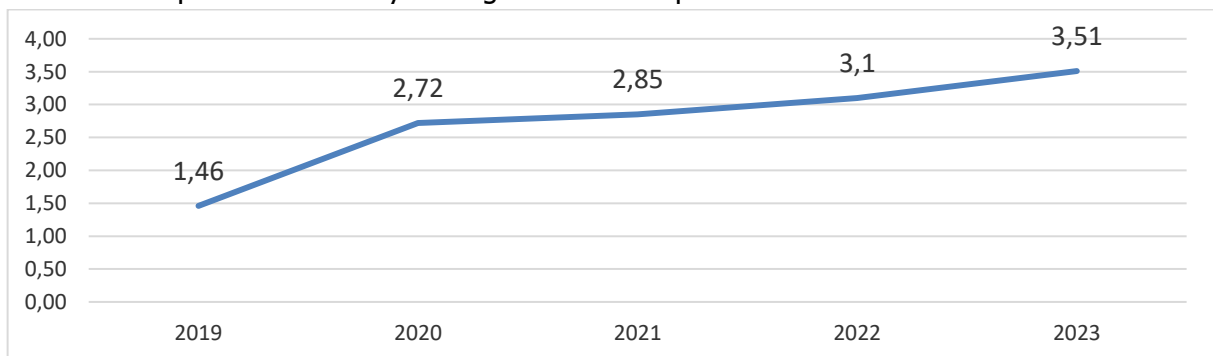
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis, 2024

Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 mengindikasikan dari berbagai faktor seperti peningkatan penegakan hukum, upaya pencegahan kejahatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan. Hal ini dapat berdampak positif pada stabilitas sosial, kesejahteraan masyarakat dan investasi di Kabupaten Ciamis.

2.3.4.4 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur daya saing suatu daerah dalam menghadapi persaingan global. Indeks ini mencakup beberapa aspek, seperti atribut ekonomi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan kemampuan masyarakat agar dapat menghasilkan kewirausahaan baru.

Grafik 2.37
Capaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023



Sumber : BRIN, 2024

Berdasarkan grafik 2.34, IDSD Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mencapai angka 3,51 dengan kategori tinggi, meningkat dari tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan adanya perbaikan dalam bidang ekonomi dan kualitas infrastruktur. Melalui berbagai program dan kebijakan pembangunan yang inovatif, Kabupaten Ciamis dapat memperkuat berbagai sektor ekonomi yang potensial diantaranya sektor pertanian dan pariwisata. Selain itu, peningkatan infrastruktur dan layanan publik yang memadai juga menjadi faktor utama meningkatnya IDSD.



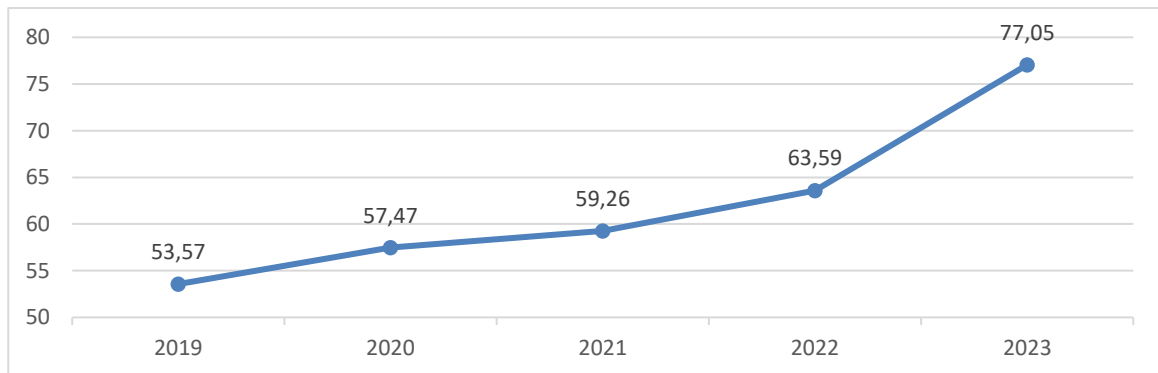
2.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Gambaran umum kondisi daerah dari aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

2.4.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah suatu indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian Indeks Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.38
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023



Sumber : Sekretariat Daerah, 2024

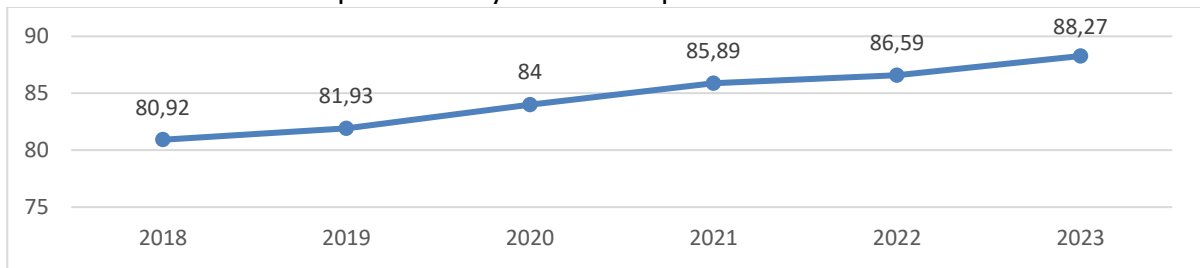
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Ciamis dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hingga pada Tahun 2023 mencapai 77,05. Angka tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah Kabupaten Ciamis untuk mengoptimalkan kinerja sektor publik. Salah satu program yang digelar adalah membentuk lembaga koordinasi dan supervisi yang dapat memaksimalkan pelayanan publik dan meningkatkan kinerja birokrasi. Selain itu, terdapat juga program yang memberikan pelatihan dan bimbingan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Pemerintah Kabupaten Ciamis melakukan beberapa perubahan dalam tata kelola birokrasi, yaitu dengan melakukan pemangkasan birokrasi yang tidak produktif, penyederhanaan regulasi, dan implementasi teknologi informasi untuk memudahkan akses masyarakat ke layanan publik.

2.4.2 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Untuk dapat lebih jelasnya mengenai capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2.39
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2023



Sumber : Sekretariat Daerah, 2024

Data Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Ciamis meningkat dari tahun ke tahun hingga pada Tahun 2023 mencapai angka 88,27. Angka yang tinggi ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas dengan kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ciamis. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat ini, karena adanya kebijakan pemerintah yang memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam memberikan layanan publik. Program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik seperti memperkuat infrastruktur publik seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk memperbaiki tata kelola administrasi publik dan memperkenalkan teknologi informasi dalam sistem pelayanan publik. Selain itu, masyarakat juga aktif dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah melalui berbagai mekanisme partisipasi publik seperti rapat-rapat pengaduan publik, koordinasi dengan LSM, dan survei kepuasan masyarakat.

2.4.3 Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah himpunan inovasi daerah yang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indeks Inovasi Daerah (IID) disusun melalui pengisian pada aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23
Capaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Inovasi Daerah	Poin	50	2.145	54,35	54,50	52,49

Sumber : BSKDN Kemendagri, 2024

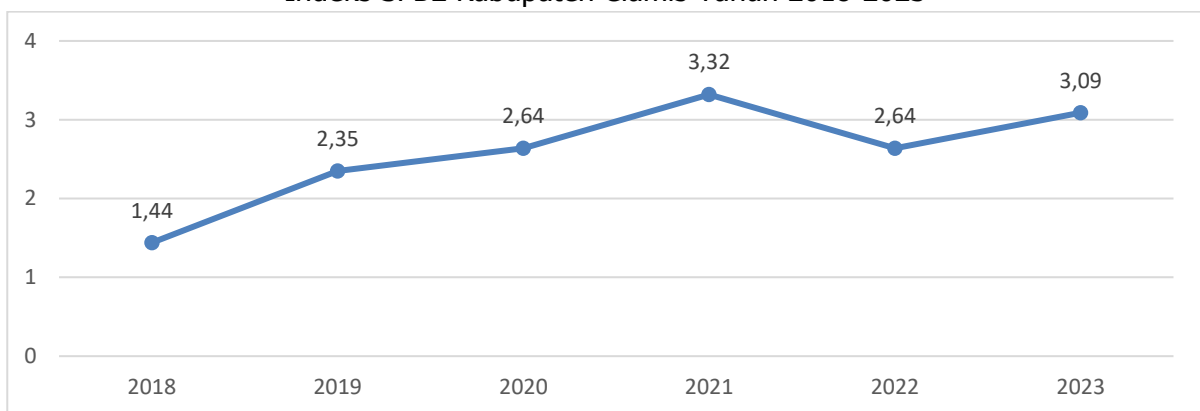
Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Ciamis pada Tahun 2019 sebesar 50 poin dengan kategori tidak inovatif karena belum optimalnya penginputan data pada aplikasi, namun pada Tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 2.145 dan termasuk kategori sangat inovatif. Pada Tahun 2021 IID mengalami perubahan metode perhitungan sehingga IID Kabupaten Ciamis diperoleh nilai sebesar 54,35 poin dengan kategori inovatif dan Tahun 2022 sedikit meningkat menjadi sebesar 54,50 poin dengan kategori inovatif. Capaian IID Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 52,49 poin dan berada pada kategori inovatif serta masuk peringkat ke-95 dari 252 kabupaten untuk kategori kabupaten se-Indonesia.



2.4.4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah nilai dari pelaksanaan SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen SPBE secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi SPBE. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian Indeks SPBE Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.40
Indeks SPBE Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2023



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah menciptakan banyak aplikasi digital yang digunakan oleh pemerintah dan masyarakat. Adanya *super apps* diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi, menguatkan kolaborasi perangkat daerah dan menyederhanakan layanan publik dan informasi bagi masyarakat. *Super apps* dimaksud dapat menyediakan informasi publik yang aktual, meningkatkan investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat perwujudan Kabupaten Ciamis sebagai *Smart City*.

2.4.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan Kependudukan dan Catatan Sipil diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan menertibkan dokumen kependudukan sebagai pendataan diri dan status seseorang. Indikator kinerja pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 2.24
Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2019 – 2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	-	96,11:100	95,40:100	97,39:100	97:100	98,95:100
2	Cakupan penerbitan KTP	Persen	85,55	126.97	121,91	97,60	98,95
3	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	46.32	63.82	66.46	56.57	69,46
4	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/ belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Rasio Ketergantungan		0.46	0.46	0.47	0.46	0.48

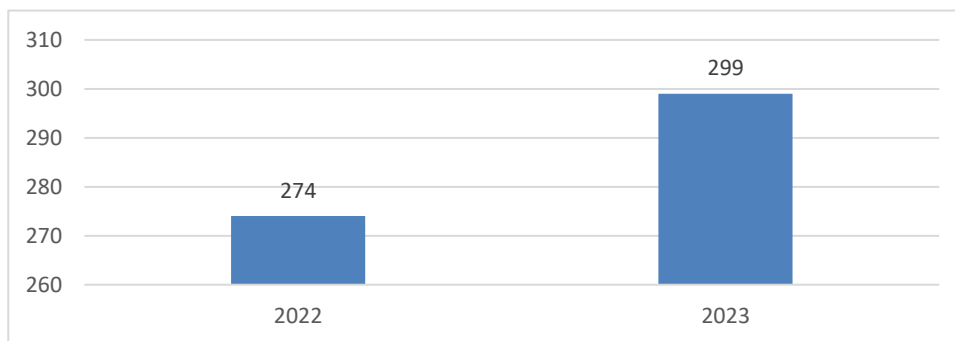
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, 2024

Pada Tahun 2023 persentase jumlah penduduk usia di atas 17 tahun atau telah menikah yang memiliki KTP mencapai 98,95% meningkat jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar 97% . Begitu pula persentase cakupan penerbitan akte kelahiran pada Tahun 2023 mencapai 69,46% meningkat dibandingkan capaian Tahun 2022 sebesar 56,57%.

2.4.6 Merit Sistem

Dengan terbitnya Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah maka manajemen Aparatur Sipil Negara di daerah harus menggunakan perhitungan Merit sistem. Di Kabupaten Ciamis perhitungan merit sistem baru dilaksanakan pada Tahun 2022, karena adanya pematangan peraturan di KASN. Perkembangan perhitungan merit sistem di Kabupaten Ciamis selama 2 tahun terakhir dari tahun 2021-2023 dapat dilihat pada grafik 2.38 berikut ini :

Grafik 2.41
Merit Sistem Kabupaten Ciamis Tahun 2022-2023



Sumber : BKPSDM Kabupaten Ciamis, 2024

Realisasi merit sistem meningkat pada Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar 25 dengan kategori baik. Faktor yang mempengaruhi diantaranya adanya regulasi Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah. Selain itu adanya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dalam pemenuhan eviden yang berhubungan dengan manajemen talenta yang merupakan salah satu aspek penilaian sistem merit, yaitu aspek pengembangan karier.



2.4.7 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dalam penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada pemerintah daerah dan PD mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 yang memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Pekembangan Laporan kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dari tahun 2015-2023 dapat digambarkan oleh nilai SAKIP Kabupaten Ciamis sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.25
Nilai Sakip Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2023

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Sakip	53.66	54.49	62.23	65.61	66.26	68.42	68.79	68.90	69.90
	(CC)	(CC)	(B)	(B)	(B)	(B)	(B)	(B)	(B)

Sumber : Inspektorat Kabupaten Ciamis, 2024

Berdasarkan tabel diatas nilai SAKIP Kabupaten Ciamis setiap tahun semakin meningkat, hal ini karena adanya peningkatan kualitas dalam penerapan manajemen kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil telah menunjukkan hasil yang baik pada unit kerja. Namun, nilai SAKIP masih tergolong dalam nilai yang belum maksimal. Hal ini karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi nilai SAKIP di Kabupaten Ciamis, yaitu :

1. Masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja.
2. Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, serta pemanfaatan aplikasi SIMPEG untuk pengukuran kinerja individu dan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja.
3. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah maupun Laporan Kinerja PD masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Sehingga perlu melakukan reuiu dan perbaikan penjenjangan/*cascading* kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memerhatikan *logical framework* dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selain itu, perlu pemanfaatan hasil penjenjangan/*cascading* kinerja digunakan sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan. Dalam peningkatan nilai SAKIP perlukan melakukan reuiu dan perbaikan dokumen perencanaan setiap PD dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal oleh setiap peran PD telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*), memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*), dan memenuhi unsur cukup dalam mengawal kinerja.

Dalam penyampaian PK sampai level terkecil perlu memastikan penjabaran kinerja yang mendukung pencapaian kinerja organisasi. Selan itu, memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja ke depan, pola pengembangan kompetensi, dan mutasi rotasi.



2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

2.5.1 Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Ciamis, Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Ciamis dirumuskan, dibahas dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah karena visi merupakan dasar bagi para stakeholder dalam mengoperasionalkan perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, visi dirumuskan sebagai tindak lanjut hasil analisis terhadap isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 adalah:

“Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025”

Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini adalah sebagai berikut:

Dengan Iman dan Taqwa bermakna bahwa “Keimanan dan Ketaqwaan” (yakni: berkeyakinan kuat bahwa tiada TUHAN kecuali ALLOH dalam menjalani hidup dan kehidupan selalu berpegang pada ajaran agama secara konsekuen) harus melandasi dan menjiwai seluruh perilaku aparatur pemerintahan dan masyarakat dalam menjalankan pembangunan di Kabupaten Ciamis.

Maju bermakna suatu kondisi yang dicapai untuk menjadi lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya dan kesetaraan dengan daerah lain, dilihat dari indikator sosial (pendidikan, kesehatan, kualitas pelayanan sosial), indikator ekonomi (pertumbuhan ekonomi, produktivitas dan kualitas, pendapatan perkapita, daya beli) dan penyelenggaraan pemerintahan.

Mandiri bermakna suatu kemampuan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kemasyarakatan berdasarkan potensi yang ada di daerah, sehingga mampu menciptakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan mendorong peran serta *stakeholder* dalam pembangunan. Demikian pula masyarakat dapat memberdayakan potensi dirinya sehingga mampu mengurangi ketergantungan kepada pihak lain dan berperan aktif sebagai mitra pemerintah.

Sejahtera bermakna suatu kondisi masyarakat yang ditandai oleh kehidupan beragama yang mantap, terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan perumahan yang layak, lingkungan yang sehat, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai serta memiliki rasa aman dan tentram.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Ciamis tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.

Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, pengamalan agama, keterampilan, sikap mental aparatur dan masyarakat melalui pendidikan formal, non formal dan informal, sejalan dengan perkembangan IPTEKS yang dilandasi Iman dan Taqwa serta memiliki kompetensi dan profesionalisme yang didukung oleh peningkatan derajat kesehatan.

2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Terselenggaranya fasilitasi, regulasi dan supervisi dari pemerintah yang profesional, ditandai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang jujur, bersih, berwibawa, adil dan bertanggung jawab, transparan, demokratis, efektif, dan efisien dengan dukungan masyarakat secara luas dan didorong dengan semangat kebersamaan dan kesalehan sosial, mampu menegakkan supremasi hukum serta dapat menjamin kelancaran, keserasian, keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.



3. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperbaharui, merupakan modal pembangunan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan sehingga penggalian, pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilakukan secara optimal untuk menjamin peningkatan produktivitas, kualitas dan nilai tambah yang diikuti dengan upaya penataan, rehabilitasi, konservasi dan perlindungan guna menjamin ketersediaan sumber daya alam secara berkelanjutan dimasa yang akan datang.

4. Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah dan pemasaran komoditas daerah.

Upaya untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi melalui peningkatan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah dan pemasaran produksi komoditi pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pariwisata, transportasi, industri dan pertambangan yang didukung infrastruktur dan pusat kajian yang memadai, sehingga mendorong peningkatan pendapatan dan daya belisecara merata untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Tahapan pembangunan jangka panjang merupakan penjabaran dari misi dan sasaran pembangunan. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan merupakan cerminan dari tingkat urgensi penyelesaian masalah pada waktu tertentu. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, namun tetap berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pokok dan perwujudan visi pembangunan jangka panjang daerah. Prioritas tahapan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 adalah sebagaimana gambar berikut:

1) Tahap 1 Tahun 2005 – 2009 (Tahap Penyiapan)

Penyiapan kemajuan daerah Kabupaten Ciamis dengan menekankan pada perkembangan sektor agribisnis dan pariwisata, dengan memfokuskan pada peningkatan iklim investasi dan pengembangan jiwa kewirausahaan, serta jaringan kemitraan. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dimulai saat ini, serta upaya peningkatan sumber daya manusia.

2) Tahap 2 Tahun 2009 – 2014 (Tahap Pengembangan)

Pengembangan kemajuan yang mantap, menuju kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ditekankan pada peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan iptek, serta upaya-upaya menggali potensi yang dimiliki daerah, seperti pelestarian lingkungan, peningkatan infrastruktur, dan kerjasama sebagai upaya penguatan perekonomian masyarakat.

3) Tahap 3 Tahun 2014 – 2019 (Tahap Pemantapan Kemandirian)

Pemekaran wilayah dijadikan sebagai momentum untuk memantapkan pengembangan hasil pembangunan pada tahap sebelumnya menuju pada kemandirian dan pencapaian daya saing yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif, ketersediaan infrastruktur yang baik, serta pengelolaan lingkungan, dengan fokus pada pembangunan.

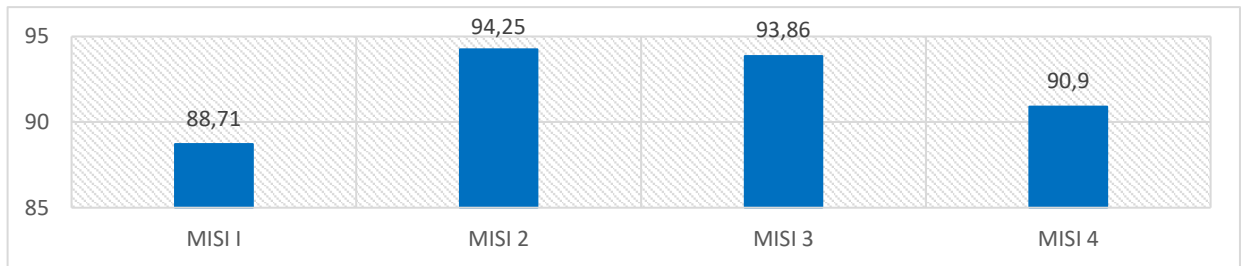
4) Tahap 4 Tahun 2019 – 2024 (Tahap Pencapaian Kesejahteraan)

Memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai sebagai modal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan struktur sosial dan ekonomi masyarakat yang kokoh berlandaskan kemandirian dan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki daya saing, infrastruktur yang baik dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif.



Hasil evaluasi dan analisis rata-rata capaian sasaran RPJPD pada setiap pentahapan perodesasi RPJMD sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.42
Rata-Rata Capaian Misi RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025



Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD 2005-2025

Berdasarkan Hasil evaluasi dan analisis rata-rata capaian sasaran RPJPD pada setiap pentahapan perodesasi RPJMD sampai dengan Tahun 2022, rata-rata capaian kinerja RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebesar **91,93 %** atau masuk pada kriteria **Sangat Tinggi**.

2.5.2 Rekomendasi RPJPD Tahun 2025-2045

Berdasarkan Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, disampaikan beberapa rekomendasi yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan RPJPD pada periode berikutnya, disarankan untuk menyesuaikan sasaran dan kebijakan pembangunan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis;
2. Sasaran dan arahan kebijakan yang ditetapkan diselaraskan dengan potensi unggulan Kabupaten Ciamis;
3. Diperlukan beberapa instrumen yang jelas untuk melihat konsistensi visi dan misi calon kepala daerah agar konsistensi RPJPD dengan RPJMD masing-masing periode dapat tetap terjaga;
4. Penyusunan misi, sasaran dan arah kebijakan pada periode RPJPD berikutnya perlu lebih memperhatikan kebijakan nasional dan global, terutama terkait dengan pembangunan berkelanjutan.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Publik

2.6.1 Analisis Proyeksi Kependudukan

Proyeksi penduduk menyediakan informasi mengenai gambaran jumlah penduduk untuk beberapa Tahun yang akan datang. Selain itu, proyeksi penduduk sebagai dasar dalam menentukan rencana pengembangan yang akan dilakukan di Kabupaten Ciamis.

2.6.1.1 Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2035 sesuai dengan hasil proyeksi penduduk kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat 2020-2035 hasil sensus penduduk 2020. Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Ciamis Tahun 2036-2045 dianalisis menggunakan metode komponen (kelahiran, kematian, migrasi) yang lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.27 berikut ini.



Tabel 2.26
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045

Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
	2025	2030	2035	2040	2045
1.251.544	1,266,331	1,297,478	1,320,111	1,331,284	1,332,571

Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.6.1.2 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Proyeksi penduduk menurut jenis kelamin untuk mengetahui jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di suatu daerah. Perbandingan jenis kelamin tersebut berpengaruh terhadap laju pertumbuhan penduduk. Struktur penduduk menurut jenis kelamin akan ditinjau dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan (*sex ratio*). Analisis *sex ratio* ini biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk perempuan per 100 jumlah penduduk laki-laki atau sebaliknya. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada Tabel 2.28 berikut ini.

Tabel 2.27
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	625.771	632.454	646.036	655.394	659.318	658.938
Perempuan	625.773	633.877	651.442	664.717	671.966	673.633
Rasio	99,99%	99,78%	99,17%	98,60%	98,12%	97,82%

Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.6.1.3 Penduduk Berdasarkan Umur

Struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin sering disebut sebagai struktur penduduk utama, yang sangat penting untuk data perencanaan pembangunan agar lebih terarah dan tepat sasaran. Hasil proyeksi penduduk berdasarkan umur banyak digunakan untuk perhitungan berbagai indikator seperti angka ketergantungan (*dependency ratio*). Hasil proyeksi penduduk berdasarkan umur di Kabupaten Ciamis, mengalami kenaikan dan penurunan dapat dilihat pada Tabel 2.29. Umur penduduk yang mengalami kenaikan dan penurunan jumlah yaitu:

- Umur 0-14 tahun
Jumlah penduduk dengan umur 0-14 Tahun pada Tahun 2025 berjumlah 260.933 jiwa atau sekitar 20,61% dari jumlah penduduk total, mengalami kenaikan hingga Tahun 2035 dengan jumlah penduduk 273.378 jiwa atau sekitar 20,71%. Pada usia ini tidak hanya mengalami kenaikan, tetapi dari hasil peroyeksi terjadi penurunan pada Tahun 2035 hingga Tahun 2045. Hingga Tahun 2045 jumlah penduduk diumur 0-14 Tahun berjumlah 245.907 jiwa atau sekitar 18,55% dari jumlah penduduk total.
- Umur 15-64 tahun
Berbanding terbalik dengan umur 0-14 tahun, proyeksi jumlah penduduk dengan umur 15-64 Tahun mengalami penurunan hingga Tahun 2035 dan mengalami kenaikan hingga Tahun 2045. Jumlah penduduk pada usia ini pada Tahun 2035 berjumlah 842.615 jiwa atau sekitar 63,83% sedangkan pada Tahun 2045 berjumlah 856.196 jiwa atau sekitar 65,41% dari jumlah penduduk total.



- Umur lebih dari 65 tahun
Berdasarkan proyeksi usia harapan hidup di Kabupaten Ciamis semakin tinggi, maka untuk proyeksi penduduk usia lebih dari 65 Tahun akan semakin meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2025, jumlah penduduk usia ini berjumlah 151.669 jiwa atau sekitar 11,98%. Sedangkan pada Tahun 2045 berjumlah 230.468 jiwa atau sekitar 16,94% dari jumlah penduduk total.

Tabel 2.28
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 Tahun	260.614	260.933	267.596	273.378	258.763	245.907
15-64 Tahun	850.938	853.729	849.418	842.615	854.757	856.196
> 65 Tahun	139.992	151.669	180.464	204.118	221.309	230.468
Angka Ketergantungan	47,08%	48,33%	52,75%	56,67%	55,93%	54,56%

Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.6.1.4 Bonus Demografi

Bonus demografi atau *demographic dividend* merupakan perubahan kondisi populasi manusia yang dimana proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia non produktif. Bonus demografi memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi suatu negara atau wilayah. Jika suatu negara atau wilayah mampu memanfaatkan dan mengatasi kondisi perubahan populasi ini, maka akan mendorong perekonomian di negara atau wilayah tersebut. Tetapi, jika bonus demografi ini tidak dipersiapkan dan dimanfaatkan dengan baik, maka akan membawa dampak buruk terutama masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi.

Berdasarkan hasil analisis penduduk usia produktif di Kabupaten Ciamis, jumlah penduduk dengan usia produktif dan non produktif setiap tahunnya mengalami kenaikan. Namun, jika dilihat dari pertambahan penduduk usia produktif hingga Tahun 2035 tidak mengalami pertambahan yang besar. Pertambahan penduduk usia produktif Kembali meningkat di Tahun 2036 hingga Tahun 2045. Pada Tahun 2025, jumlah penduduk usia produktif mencapai 853.729 jiwa atau sekitar 67,42%. Kendati penduduk usia produktif di Tahun 2035 bertambah dari jumlahnya, pertambahan usia nonproduktif naik dari Tahun sebelumnya. Sehingga penduduk usia produktif pada Tahun 2035 mengalami penurunan menjadi 63,83%. Kenaikan Kembali terjadi dari Tahun 2036 hingga Tahun 2045, dimana penduduk usia produktif menjadi 64,70%. Lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 2.30 berikut ini :

Tabel 2.29
Proyeksi Bonus Demografi Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Usia Tidak Produktif	Usia Produktif Total	Bonus Demografi (%)
1	2025	1.266.331	412.602	853.729	67,42
2	2030	1.297.478	448.060	849.418	65,47
3	2035	1.320.111	477.496	842.615	63,83
4	2040	1.331.284	480.072	854.757	64,13
5	2045	1.332.571	476.375	856.196	64,70

Sumber: Hasil Analisis, 2024



2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Sarana fisik memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan dan pengembangan suatu wilayah. Sarana-sarana ini mencakup infrastruktur yang mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Kabupaten Ciamis memiliki potensi perubahan yang signifikan dalam kebutuhan akan sarana fisik. Pertumbuhan populasi dan dinamika perpindahan penduduk, yang diiringi dengan perkembangan ekonomi, tentunya akan mempengaruhi tuntutan sarana dan prasarana di wilayah ini. Oleh karena itu, analisis kebutuhan sarana menjadi langkah awal yang krusial dalam merencanakan pengembangan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Ciamis. Analisis ini akan membantu merumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk memastikan tersedianya sarana yang memadai, sertaantisipasi dampak dari perkembangan di masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kabupaten Ciamis.

Prasarana adalah pilar utama dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah, dan memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat. Prasarana mencakup berbagai fasilitas fisik mulai dari penyediaan air bersih, energi, persampahan dan sebagainya.

Pertumbuhan penduduk dan berkembangnya Kabupaten Ciamis tentunya akan menciptakan tuntutan yang semakin meningkat dalam hal penyediaan air, pasokan listrik, manajemen persampahan yang efisien, dan konektivitas telekomunikasi yang memadai. Oleh karena itu, analisis kebutuhan prasarana ini menjadi pondasi kunci dalam upaya perencanaan yang efisien dan berkelanjutan di Kabupaten Ciamis. Melalui analisis ini, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan kritis, merancang solusi yang sesuai, dan memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung perkembangan wilayah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.6.2.1 Analisis Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Pembangunan hunian harus dilaksanakan secara berimbang dan proporsional antara rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana berdasarkan standar dan peraturan yang berlaku. Ketika membangun rumah mewah, maka sekurang-kurangnya harus diadakan pembangunan rumah menengah 2 (dua) kali dan rumah sederhana 3 (tiga) kali dari jumlah rumah mewah yang akan dibangun. Dengan kata lain, perbandingan antara rumah mewah, menengah, dan sederhana yang berimbang adalah 1:2:3. Setiap rumah akan dihuni oleh 1 keluarga, dengan asumsi setiap keluarga berjumlah 5 orang. Adapun hasil analisis kebutuhan sarana permukiman Kabupaten Ciamis pada Tahun 2025 hingga 2045.

Hasil analisis kebutuhan sarana permukiman di Kabupaten Ciamis selama periode Tahun 2025, 2030, 2035, 2040, dan 2045 menunjukkan bahwa kebutuhan akan sarana permukiman terus meningkat. Jumlah penduduk yang terus bertambah dari waktu ke waktu menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kebutuhan sarana permukiman. Urbanisasi yang berlangsung dan perubahan pola migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan merupakan faktor utama dari adanya lonjakan penduduk yang menyebabkan peningkatan permintaan sarana permukiman. Dengan adanya hasil analisis ini, maka Kabupaten Ciamis harus bersiap untuk menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan sarana permukiman yang terus meningkat, sambil merencanakan pembangunan yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan penduduk yang terus berlanjut di masa yang akan datang.



Tabel 2.30

Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045

No	Uraian	Kondisi Awal	Tahun				
		(2023)	2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk	1.251.544	1.266.331	1.297.478	1.320.111	1.331.284	1.332.571
2	Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	250.326	3.713	6.232	4.527	2.239	252

Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.6.2.2 Analisis Kebutuhan Air Bersih

Kebutuhan air bersih adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam analisis ini, kebutuhan air bersih dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan air domestik dan kebutuhan air non domestik. Kebutuhan air domestik mencakup pemanfaatan air bersih di lingkungan hunian pribadi, dimana air tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, mandi, mencuci, dan sanitasi. Sementara itu, kebutuhan air non domestik mengacu pada penggunaan air bersih di luar konteks rumah tangga. Kategori ini mencakup berbagai penggunaan umum, seperti di sekolah, rumah sakit, masjid, dan sejumlah sarana umum lainnya. Dalam konteks masyarakat, kebutuhan air non domestik ini juga memegang peran vital dalam mendukung beragam aktivitas sosial, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemahaman yang cermat tentang kedua jenis kebutuhan air ini adalah kunci dalam perencanaan penyediaan air bersih yang efektif dan efisien, serta memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya air yang bersih.

Adapun analisis kebutuhan prasarana air bersih melalui kegiatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Ciamis berdasarkan rujukan dapat dilihat dalam Tabel 2.32 Kebutuhan Prasarana Air minum Kabupaten Ciamis Tahun 2025- 2045 berikut:

Tabel 2.31

Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045

No	Uraian	Kondisi Awal	Tahun				
		(2023)	2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk	1.251.544	1.266.331	1.297.478	1.320.111	1.331.284	1.332.571
2	Proyeksi kebutuhan air minum (m ³ /hari)	142.676,02	144.361,73	147.912,49	150.492,65	151.766,37	151.913,09

Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.6.2.3 Analisis Kebutuhan Energi/Listrik

Analisis kebutuhan listrik merupakan tahapan yang esensial dalam rangka perencanaan yang efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan energi di Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, terutama jumlah penduduknya. Hal ini tentunya mendorong peningkatan permintaan akan pasokan listrik untuk berbagai kegiatan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Ciamis. Analisis proyeksi ini akan memberikan pandangan yang jelas tentang sejauh mana infrastruktur listrik yang ada dapat memenuhi kebutuhan saat ini dan di masa depan. Selain itu, hal ini akan membantu dalam perencanaan dan pengembangan sistem



kelistrikan yang mampu mendukung pertumbuhan berkelanjutan, memberikan layanan yang andal, dan mendukung perkembangan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat di wilayah ini. Adapun kebutuhan listrik di Kabupaten Ciamis yang mengacu pada standar tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2.33 Kebutuhan Listrik Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045.

Tabel 2.32
Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045

No	Uraian	Kondisi Awal (2023)	2025	2030	Tahun 2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk	1.251.544	1.266.331	1.297.478	1.320.111	1.331.284	1.332.571
2	Jumlah Rumah (unit)	250.326	3.713	6.232	4.527	2.239	252
3	Proyeksi Kebutuhan Listrik (KVA)	-	819,82	1.685,74	1.715,14	1.729,66	1.731,33

Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.6.2.4 Analisis Kebutuhan Persampahan

Prasarana persampahan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, menjaga kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Maka dari itu, dalam rangka mewujudkan amanat dari peraturan tersebut diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah yang efisien.

Berdasarkan hasil analisis, Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan timbulan sampah per tahun analisisnya, hal ini selaras dengan peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Ciamis. Dengan adanya hal ini, tentunya diperlukan prasarana persampahan untuk mengelola sampah yang ditimbulkan oleh kegiatan masyarakat. Pada Tahun 2025 Kabupaten Ciamis memerlukan TPS 3R sebanyak 7 unit. Selanjutnya, jumlah ideal TPS 3R di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2045 adalah sebanyak 22 unit, sehingga jumlahnya sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, Kabupaten Ciamis memerlukan penambahan TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) sebanyak 1 unit pada Tahun 2025, dan sampai dengan Tahun 2045 kebutuhan TPST adalah sebanyak 6 unit.

Tabel 2.34
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045

No	Uraian	Kondisi Awal (2023)	2025	2030	Tahun 2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk	1.251.544	1.266.331	1.297.478	1.320.111	1.331.284	1.332.571
2	Proyeksi Timbulan Sampah (ton/tahun)	182.725,42	184.884,33	189.431,79	192.736,21	194.367,46	194.555,37
3	Proyeksi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	0	1	2	1	1	1

Sumber: Hasil Analisis, 2024



2.6.2.5 Analisis Kebutuhan Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan merupakan sarana yang cukup vital keberadaannya bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, jumlah kebutuhan sarana kesehatan yang diperlukan harus sesuai dengan SNI 03-1733-2004. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap warga dapat mengakses pelayanan kesehatan yang tepat waktu dan berkualitas. Faktor-faktor seperti demografi, pertumbuhan penduduk, dan standar layanan kesehatan berperan dalam menentukan proyeksi kebutuhan sarana kesehatan, yang selanjutnya menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil analisis, pada Tahun 2025 sampai 2045 Kabupaten Ciamis membutuhkan penambahan sarana pelayanan kesehatan, antara lain posyandu, balai pengobatan/poliklinik, praktik mandiri dokter, praktik mandiri bidan, puskesmas pembantu, apotek, puskesmas, dan Rumah Sakit. Untuk Puskesmas masih kekurangan sebanyak 7 unit bila dibandingkan antara rasio puskesmas dan jumlah penduduk. Untuk mendukung kebijakan Integrasi Layanan Primer (ILP) bahwa setiap desa harus terdapat puskesmas pembantu sehingga puskesmas pembantu masih kekurangan sebanyak 179 unit. Sedangkan untuk Rumah Sakit, setiap 1 tempat tidur Rumah Sakit melayani 1.000 penduduk, sehingga masih kekurangan tempat tidur di Rumah Sakit sebanyak 10 Rumah Sakit Tipe D, karena data yang ada menunjukkan dari 6 Rumah Sakit baru terdapat 755 tempat tidur.

Tabel 2.34
Kebutuhan Sarana Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045

No	Uraian	Kondisi Awal (2023)	Tahun				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk	1.251.544	1.266.331	1.297.478	1.320.111	1.331.284	1.332.571
2	Proyeksi Jumlah Kebutuhan:						
	Rumah Sakit	6	1	1	2	3	3
	Puskesmas	37	1	1	1	1	3
	Posyandu	1.617	7	10	16	20	27
	Balai Pengobatan/Poliklinik	107	8	8	10	13	16
	Praktik Mandiri Dokter	92	6	6	6	6	8
	Praktik Mandiri Bidan	115	5	5	8	10	14
	Puskesmas Pembantu	86	25	25	35	40	54
	Apotek	139	10	10	10	15	20

Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.6.2.6 Analisis Kebutuhan Sarana Pendidikan

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan memiliki tujuan mendasar yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, perencanaan sarana pendidikan menjadi aspek krusial yang harus berlandaskan pada tujuan-tujuan pendidikan tersebut. Sarana-sarana pendidikan yang disediakan harus mampu menciptakan lingkungan yang mendukung peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap secara optimal. Analisis



kebutuhan sarana pendidikan Kabupaten Ciamis mengacu pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Ciamis, pada Tahun 2025-2030 Kabupaten Ciamis idealnya memerlukan sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebanyak 1 unit. Sedangkan untuk sarana pendidikan SMP, Kabupaten Ciamis membutuhkan 2 unit. Dibandingkan dengan Tahun 2025-2030, kebutuhan sarana pendidikan pada tahun-tahun berikutnya tidak terlalu signifikan, seperti TK yang membutuhkan sebanyak 5 unit dalam 20 Tahun ke depan, SD tidak membutuhkan unit sekolah baru, serta SMP membutuhkan sebanyak 8 unit sampai Tahun 2045.

Peningkatan kebutuhan sarana pendidikan dari masa ke masa di Kabupaten Ciamis dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang akan mendorong permintaan terhadap fasilitas pendidikan. Selain itu, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Ciamis juga dapat mempengaruhi permintaan terhadap fasilitas pendidikan. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan penduduk dapat menciptakan tuntutan yang lebih tinggi untuk kapasitas pendidikan yang memadai. Terlebih lagi, jika mengacu pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, peningkatan kebutuhan sarana pendidikan sangat bergantung pada pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut. Jika jumlah penduduk terus bertambah, maka secara otomatis akan terjadi sarana pendidikan, sesuai dengan SNI yang berlaku. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan di Kabupaten Ciamis ini harus memperhitungkan perubahan dalam demografi penduduk untuk memastikan bahwa sarana pendidikan yang memadai tersedia dan dapat mengakomodasi pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pendidikan masyarakat secara efektif.

Tabel 2.36
Kebutuhan Sarana Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045

No	Uraian	Kondisi Awal	Tahun				
		(2023)	2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk	1.251.544	1.266.331	1.297.478	1.320.111	1.331.284	1.332.571
2	Proyeksi Jumlah Kebutuhan:						
	TK	697	0	2	1	2	0
	SD	915	0	0	0	0	0
	SMP	253	1	5	1	1	0

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Tabel 2.37
Perbandingan Antara Jumlah Siswa Dengan Kebutuhan Fasilitas Sekolah di Kabupaten Ciamis

No	Tahun	Jenis	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1	2025	Anak Usia Sekolah (Orang)	PAUD	50.051
			SD	98.135
			SMP	51.980
		Jumlah Sekolah (Unit)	PAUD	687
			SD	911
			SMP	248
2	2030	Anak Usia Sekolah (Orang)	PAUD	57.305
			SD	108.674
			SMP	47.845
		Kebutuhan Fasilitas Sekolah (Unit)	PAUD	534
			SD	418
			SMP	150



No	Tahun	Jenis	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah
3	2035	Anak Usia Sekolah (Orang)	PAUD	54.198
			SD	111.917
			SMP	56.197
		Kebutuhan Fasilitas Sekolah (Unit)	PAUD	536
			SD	426
			SMP	151
4	2040	Anak Usia Sekolah (Orang)	PAUD	50.754
			SD	107.059
			SMP	56.336
		Kebutuhan Fasilitas Sekolah (Unit)	PAUD	546
			SD	429
			SMP	151
5	2045	Anak Usia Sekolah (Orang)	PAUD	48.380
			SD	101.247
			SMP	53.241
		Kebutuhan Fasilitas Sekolah (Unit)	PAUD	549
			SD	429
			SMP	151

Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Arah kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah Nusantara, dalam tahap perencanaan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan wilayah dan dinamika pasar. Dalam tahap pembangunan diarahkan pada pembangunan sentra produksi berbasis komoditas unggulan, kawasan industri pengolahan serta kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi dengan mempertimbangkan kesiapan lahan, keterkaitan kawasan dengan *hinterland* serta manajemen rantai nilai dan rantai pasok. Lalu percepatan pembangunan infrastruktur dalam dan luar kawasan dengan menekankan pada prinsip sinergi sumber pendanaan dari APBN dan Non-APBN, penyediaan SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia usaha serta penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan.

Pusat pertumbuhan (*growth pole*) merupakan kawasan yang memiliki perkembangan cukup pesat sehingga memberikan dampak bagi daerah itu sendiri maupun wilayah sekitarnya (*spread effect*). Pusat pertumbuhan biasanya mengambil peran sebagai pusat pelayanan bagi daerah sekitar. Berdasarkan RPJPN pusat pertumbuhan di Wilayah Jawa yaitu industri padat modal dan padat karya, seperti industri tekstil, logam besi, alat angkutan, makanan minuman, elektronik. Selain itu, Wilayah Jawa juga akan menjadi pusat pemanfaatan energi baru dan terbarukan dengan Pembangunan *National Grid* antara Sumatera-Jawa-Bali Nusra-Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua. Sedangkan dalam RTRW Provinsi, Kabupaten Ciamis merupakan bagian dari Wilayah Pengembangan (WP) Priangan Timur-Pangandaran sebagai salah satu pusat pertumbuhan sektor pertanian, peternakan, dan mineral non logam.

Pusat pertumbuhan Kabupaten Ciamis telah tertuang dalam RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043 terbagi menjadi 5 (lima) kawasan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), 6 (enam) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan 9 (sembilan) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).



2.7.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 – 2042 dilakukan pengembangan wilayah yang di bagi ke dalam 6 wilayah pengembangan (WP), Yaitu:

1. WP Bodebekpunjur (Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, sebagian wilayah di Kabupaten Cianjur);
2. WP Purwasuka (Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang);
3. WP Ciayumajakuning (Daerah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan sebagian Wilayah di Kabupaten Sumedang);
4. WP Priangan Timur-Pangandaran (Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran);
5. WP Sukabumi dan sekitarnya (Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan sebagian wilayah di Kabupaten Cianjur);
6. WP Cekungan Bandung (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang).

Berdasarkan pembagian tersebut Kabupaten Ciamis termasuk dalam WP Priangan Timur – Pangandaran. WP Priangan Timur – Pangandaran merupakan penjabaran dari kawasan andalan dengan kesetaraan fungsi dan peran Kawasan di KSN Pacangsanak yaitu Pangandaran – Kalipucang – Sagara Anakan yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan. Sebagai bagian WP Priangan Timur – Pangandaran kebijakan penataan ruang di Kabupaten Ciamis diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, serta kegiatan pertambangan mineral non logam.

Sesuai dengan sistem pusat permukiman dalam RTRW Provinsi Jawa Barat 2022 – 2042 ditetapkan wilayah di Kabupaten Ciamis sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dimana PKL memiliki wilayah pelayanan daerah Kabupaten/Kota dan beberapa Kecamatan. PKL di Kabupaten Ciamis meliputi Ciamis, Banjarsari, Kawali Rancah, Panjalu, dan Cisaga. Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat 2022 – 2042 sebagai berikut:

1. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan:
 - a. Pembangunan unit sekolah baru untuk jenjang PAUD, dasar, menengah, tinggi, dan vokasi;
 - b. Pembangunan Ruang Kelas untuk jenjang PAUD, dasar, menengah, tinggi, dan vokasi.
2. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan:
 - a. Pembangunan Rumah Sakit Tipe C;
 - b. Pembangunan Puskesmas PONED.
3. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya:
 - a. Terminal Agribisnis;
 - b. Pasar;
 - c. Jasa Keuangan;
 - d. IPAL industri komunal;
 - e. Masjid;
 - f. Lapangan olahraga/ ruang publik;
 - g. Tempat atraksi budaya.

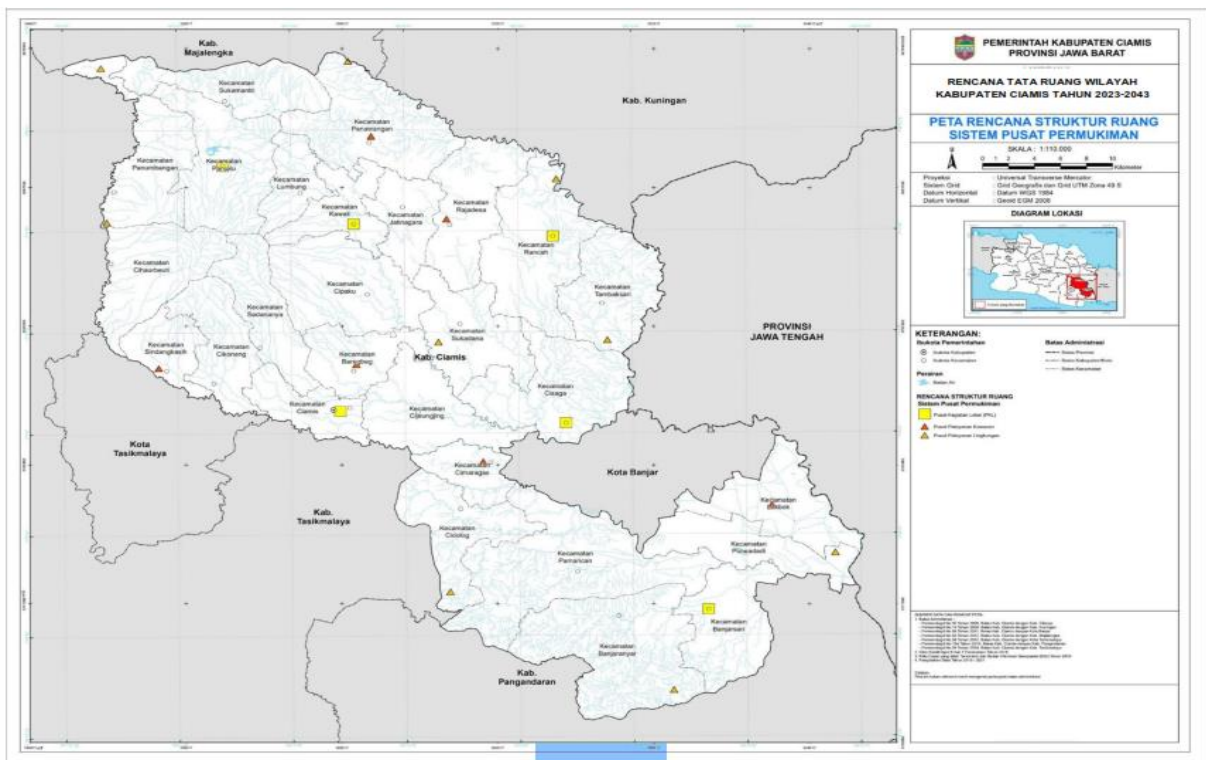


4. Peningkatan infrastruktur dasar permukiman:
 - a. Drainase;
 - b. Jalan Lingkungan;
 - c. TPA Lokal;
 - d. Fasilitas TPST;
 - e. SPAM IKK;
 - f. SPALD Komunal.
5. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi:
 - a. Peningkatan akses jalan dari PKL ke kecamatan sekitarnya;
 - b. Penyediaan Terminal Penumpang Tipe C dan sarana angkutan umum.

2.7.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis

Dalam sistem permukiman sesuai kewenangan, untuk penetapan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kewenangan Provinsi dan telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat 2022 – 2042. Adapun pusat – pusat lain di dalam wilayah Kabupaten seperti Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dalam penetapannya merupakan kewenangan kabupaten.

Gambar 2.11
Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman



Sumber: RTRW Kabupaten Ciamis 2023 – 2043

2.7.2.1 Pusat Kegiatan Lokal Kawasan Perkotaan Banjarsari

Kawasan Perkotaan Banjarsari meliputi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Banjaranyar, Kecamatan Banjarsari, dan Kecamatan Pamarican yang mempunyai fungsi pelayanan skala kabupaten. Kawasan Perkotaan Banjarsari ditujukan untuk melayani kegiatan sektor pertanian dan sektor perdagangan. Wilayah kecamatan Banjarsari adalah sebagai



hinterland dari Kota Banjar dan merupakan transit barang dan jasa dari dan menuju ke wilayah selatan yaitu Pangandaran dan sekitarnya. Hal ini terbukti dengan eksistensi pasar Banjarsari yang mampu mewadahi barang dan jasa di dalam wilayah perencanaan dan wilayah perbatasan seperti kecamatan Lakbok, Padaherang, dan Kalipucang, Pangandaran serta wilayah sekitarnya bahkan Provinsi Jawa Tengah seperti Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Oleh karena itu, Banjarsari memiliki Perkotaan Banjarsari diarahkan untuk melayani seluruh wilayah kecamatan yang ada di Bagian Selatan Kabupaten Ciamis sebanyak 6 (enam) kecamatan.

Kawasan Perkotaan Ciamis

Kawasan Perkotaan Ciamis meliputi Kecamatan Ciamis dan Sadananya berfungsi sebagai pusat pelayanan skala kabupaten. Selain itu, mengusulkan untuk meningkatkan dan mengembangkan PKL Ciamis menjadi PKW Ciamis yang berfungsi sebagai pusat pelayanan yang perlu dilengkapi sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya. Dalam rangka peningkatan dan pengembangan PKL Ciamis diusulkan untuk menjadi PKW Ciamis yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya, untuk mendorong kawasan perkotaan di Ciamis agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya perlu upaya promosi peningkatan hierarki dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) menjadi Pusat Kegiatan Wilayah, dengan pertimbangan:

- Kabupaten Ciamis merencanakan terminal tipe B dengan infrastruktur tipe A, terminal kering peti kemas (*dry port*). Selain itu Kabupaten Ciamis sudah memiliki stasiun kereta api.
- Kabupaten Ciamis merencanakan pasar induk/ regional.
- Kabupaten Ciamis merencanakan meningkatkan rumah sakit tipe C menjadi tipe B. Selain itu Kabupaten Ciamis relatif diminati rumah sakit khusus yang sangat berpotensi sebagai pusat- pusat baru bagi Kabupaten Ciamis dalam pelayanan kesehatan regional. Rumah sakit khusus tersebut, diantaranya berupa Pusat Rehabilitasi Jantung yaitu rumah sakit khusus jantung, Pusat Rehabilitasi Khusus Stroke yaitu Rumah Sakit Khusus Stroke, Rumah Sakit Khusus Napsa yaitu rumah sakit khusus ketergantungan obat, Pusat rehabilitasi patah tulang yaitu Rumah Sakit Ortopedi.
- Kabupaten Ciamis sudah memiliki perguruan tinggi.

Berdasarkan kondisi eksisting, termasuk potensi sektor unggulan dan rencana pengembangan infrastruktur di Kabupaten Ciamis, maka Kabupaten Ciamis berpotensi sebagai pusat kegiatan jasa, simpul transportasi yang mampu melayani beberapa kabupaten/ kota wilayah sekitar. Pengembangan infrastruktur dan pelayanan yang bersifat regional di Kabupaten Ciamis perlu didorong sebagai pusat koleksi dan distribusi yang dapat melayani kebutuhan skala regional. Ruang yang termasuk dalam PKW ini tidak terbatas ke dalam batas administrasi saja, akan tetapi mencakup sekitar koridor jalan arteri yang merupakan jalan nasional.

Kawasan Perkotaan Cisaga

Kawasan Perkotaan Cisaga meliputi Kecamatan Cisaga, Kecamatan Sukadana, dan Kecamatan Tambaksari. Kawasan perkotaan Cisaga melayani kebutuhan beberapa kecamatan di selatan Kabupaten Ciamis. Kawasan perkotaan Cisaga berada diantara jalur PKL Kawasan Perkotaan Ciamis dan Kota Banjar. Sehingga perkembangan perkotaan dapat dimanfaatkan sebagai *trading line* antar perkotaan.



Kawasan Perkotaan Kawali

Kawasan Perkotaan Kawali meliputi Kecamatan Cipaku, Kecamatan Kawali dan Kecamatan Lumbung sudah terakomodir dalam RTRW Provinsi Jawa Barat. PKL dipersiapkan sebagai pusat kegiatan yang mampu melayani wilayah kabupaten Ciamis bagian Utara. Sedangkan PKL Banjarsari diarahkan untuk melayani Kabupaten Ciamis bagian Selatan.

Kawasan Perkotaan Panjalu

Kawasan Perkotaan Panjalu meliputi Kecamatan Panjalu, Kecamatan Panumbangan dan Kecamatan Sukamantri. Kawasan Perkotaan Panjalu tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042. Dengan tetap mengakomodir Kawasan Perkotaan Panjalu sebagai PKL, maka pengembangan infrastruktur seperti terminal dan pusat perbelanjaan akan diprioritaskan terhadap perkotaan-perkotaan tersebut untuk terjadinya pemerataan pelayanan yang efektif. Secara faktual perkotaan-perkotaan tersebut sudah menjadi orientasi pelayanan bagi kecamatan sekitar.

Kawasan Perkotaan Rancah

Kawasan Perkotaan Rancah berada di Kecamatan Rancah. Hal ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa perkotaan tersebut berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi yang menghubungkan desa sentra produksi dengan Perkotaan Ciamis, Banjarsari dan Kawali. Selain itu, PKL Rancah sebagai pusat pelayanan jasa secara terbatas bagi beberapa kecamatan sekitar. Upaya untuk tetap mempertahankan Rancah sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sangat diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam upaya mengarahkan lokasi investasi pemerintah maupun swasta yang berskala pelayanan regional. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kejelasan struktur ruang dan harmonisasi ruang. Pembangunan dan penataan infrastruktur wilayah di Kabupaten Ciamis tidak dapat dilakukan secara sekaligus atau harus dilakukan secara bertahap karena keterbatasan kemampuan anggaran.

Perwujudan pengembangan pusat kegiatan lokal menurut RTRW Kabupaten Ciamis 2023-2043 berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi kegiatan lokal.

2.7.2.2 Pusat Pelayanan Kawasan

Pusat Pelayanan Kawasan merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kecamatan serta pelayanan umum berupa fasilitas sosial, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau. Pusat Pelayanan Kawasan diharapkan dapat menjadi pusat bisnis dan perdagangan skala kecamatan yang mudah diakses masyarakat. Adapun penetapan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Ciamis meliputi:

- a. Kawasan Perkotaan Baregbeg-Cijeungjing;
- b. Kawasan Perkotaan Cimaragas-Cidolog;
- c. Kawasan Perkotaan Lakbok-Purwadadi;
- d. Kawasan Perkotaan Panawangan;
- e. Kawasan Perkotaan Rajadesa-Jatinagara; dan
- f. Kawasan Perkotaan Sindangkasih-Cikoneng-Cihaurbeuti.



Perwujudan pengembangan pusat pelayanan kawasan menurut RTRW Kabupaten Ciamis 2023-2043 berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi pusat pelayanan kawasan.

2.7.2.3 Pusat Pelayanan Lingkungan

Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Pengelolaan kawasan perdesaan terutama diarahkan untuk meningkatkan produktivitas kawasan perdesaan tersebut sesuai potensi/kesesuaian lahan yang dimilikinya. Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:

- a. Pemberdayaan masyarakat perdesaan khususnya dalam kegiatan ekonomi perdesaan berbasis lingkungan;
- b. Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
- c. Konservasi sumber daya alam;
- d. Pelestarian warisan budaya lokal;
- e. Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan;
- f. Penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.

Sistem perdesaan merupakan kawasan perdesaan yang mendukung pusat-pusat perkotaan, merupakan desa-desa yang berfungsi strategis dan produktif berupa Pusat-Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) atau desa-desa yang teridentifikasi sebagai pusat-pusat pertumbuhan bagi wilayah di sekitarnya. PPL sebagai pusat pelayanan lingkungan merupakan desa-desa yang berfungsi strategis dan produktif dalam mendukung pusat-pusat perkotaan.

Adapun Rencana Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kabupaten Ciamis meliputi:

- a. Kawasan Perdesaan Dadiharja di Kecamatan Rancah;
- b. Kawasan Perdesaan Karangpaningal di Kecamatan Tambaksari;
- c. Kawasan Perdesaan Medanglayang di Kecamatan Panumbangan;
- d. Kawasan Perdesaan Pasawahan di Kecamatan Banjaranyar;
- e. Kawasan Perdesaan Sadapaingan di Kecamatan Panawangan;
- f. Kawasan Perdesaan Salakaria di Kecamatan Sukadana;
- g. Kawasan Perdesaan Sidarahayu di Kecamatan Purwadadi;
- h. Kawasan Perdesaan Sindangbarang di Kecamatan Panumbangan; dan
- i. Kawasan Perdesaan Sukasari di Kecamatan Cidolog.

Adapun perwujudan pusat pelayanan lingkungan menurut RTRW Kabupaten Ciamis 2023-2043 meliputi:

- a. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
- b. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang kawasan perdesaan.

Pada Tahun 2021 di tetapkan Peraturan Presiden Nomor 87 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan, yang dilaksanakan dalam rangka penyediaan infrastruktur dan peningkatan investasi yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional. Peraturan tersebut memperkuat indikasi program besar yang menjadi perwujudan penataan ruang yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis 2023 - 2043 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2022 - 2042.



Beberapa indikasi program perwujudan tersebut, diantaranya:

- a. Pelebaran jalan Lingkar Utara Ciamis – Banjar;
- b. Pembangunan dan peningkatan Jalur Tengah Selatan (JTS) Jawa Barat segmen timur;
- c. Pembangunan Jalan tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap segmen 2;
- d. Pembangunan Jembatan Benteng – Manonjaya;
- e. Pembangunan Embung pengendali banjir (Purwadadi, Lakbok, Panjalu, Kawali);
- f. Pembangunan pusat penelitian dan pengembangan Sapi Pasundan;
- g. Megaprojek Bendungan Matenggeng.

Selain itu tercantum juga sebagai perwujudan struktur ruang jaringan transportasi adanya rencana pembangunan Jalan tol Tasik – Kuningan yang melewati kabupaten Ciamis.

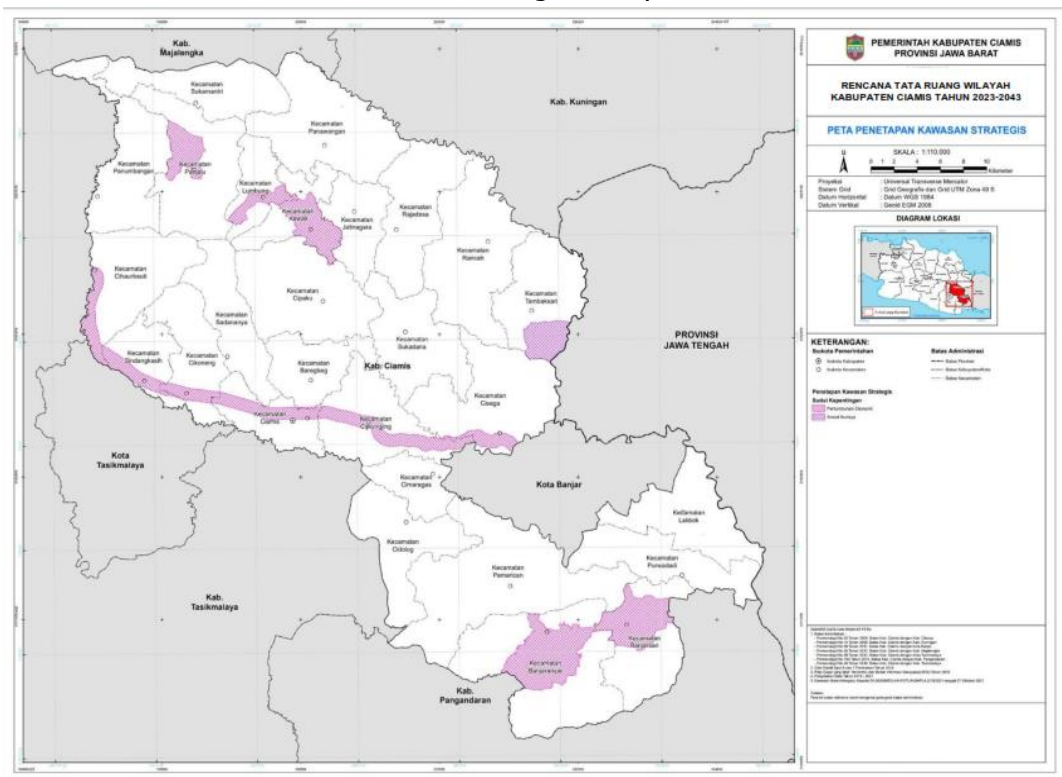
Indikasi program di atas diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi di Kabupaten Ciamis, membuka peluang investasi dari luar Kabupaten Ciamis dan mewujudkan Kabupaten Ciamis yang tangguh dan berdaya saing.

2.7.3 Kawasan Strategis Kabupaten

Kabupaten Ciamis juga merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang menjadi Kawasan Strategis Nasional Pangandaran – Kalipucang – Segara Anakan – Nusa Kambangan (Pacangsanak). Pacangsanak merupakan kawasan yang mempunyai fungsi sangat penting karena merupakan muara dari beberapa sungai yaitu Citanduy, Cibeureum, Cikonde dan sungai lainnya yang mempengaruhi kelancaran fungsi dan pengendalian banjir Wilayah Sungai (WS) Citanduy.

Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial dan/atau lingkungan.

Gambar 2.12
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Ciamis



Sumber: RTRW Kabupaten Ciamis 2023 – 2043



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Ciamis 2023 – 2043 Kawasan Strategis Kabupaten terdiri dari Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.

2.7.3.1 Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria diantaranya yaitu kawasan yang ditentukan memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh dan memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten.

Di Kabupaten Ciamis yang masuk ke dalam Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu:

- a. Kawasan Jalan Arteri Primer Cihaurbeuti – Cisaga;
- b. Kawasan Wisata Panjalu;
- c. Kawasan Pusat Pertumbuhan Kawali;
- d. Kawasan Pusat Pertumbuhan Banjarsari.

Tujuan pengembangan kawasan strategis tersebut adalah:

- a. tujuan pengembangan Kawasan Jalan Arteri Primer Cihaurbeuti-Cisaga adalah mengembangkan dan menata koridor menjadi Kawasan etalase Kabupaten Ciamis yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. tujuan pengembangan Kawasan Wisata Panjalu adalah mengembangkan pariwisata yang mampu menjadi penggerak bagi kegiatan wisata di Wilayah sekitarnya;
- c. tujuan pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kawali adalah mengembangkan Kawasan yang mampu memberikan pelayanan handal dan pendorong pertumbuhan di bagian utara Kabupaten Ciamis; dan
- d. tujuan pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Banjarsari adalah mengembangkan Kawasan yang mampu memberikan pelayanan handal dan pendorong pertumbuhan di bagian selatan Kabupaten Ciamis.

Adapun arah pengembangan Kawasan Strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Arah pengembangan Kawasan Jalan Arteri Primer Cihaurbeuti-Cisaga adalah pengembangan perdagangan, jasa, perkantoran, permukiman, dan industri;
2. Arah pengembangan Kawasan Wisata Panjalu adalah pengembangan pariwisata, sosial budaya, perdagangan, jasa, agropolitan, dan permukiman;
3. Arah pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kawali adalah pengembangan perdagangan, jasa, perkantoran, permukiman, sosial budaya, dan industri; dan
4. Arah pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Banjarsari adalah pengembangan perdagangan, jasa, perkantoran, permukiman, dan pertanian dalam mendukung lumbung padi kabupaten.

2.7.3.2 Kawasan strategis dari sudut kepentingan Sosial dan Budaya

KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan juga melalui beberapa kriteria diantaranya kawasan tersebut merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya serta memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya.



KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa kawasan kampung adat Tambaksari, dimana di kawasan tersebut terdapat Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kampung Kuta dan juga sebuah hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan adat di Provinsi Jawa Barat berupa hutan larangan.

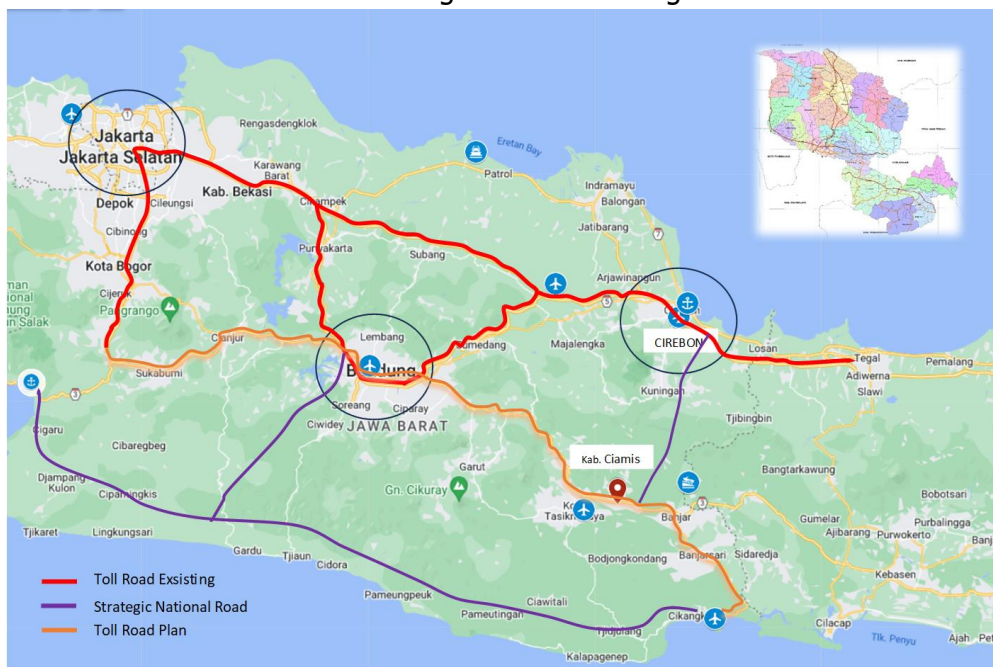
Tujuan pengembangan Kawasan Kampung Adat Tambaksari adalah mewujudkan pelestarian adat dan budaya. Adapun arahan pengembangan Kawasan Kampung Adat Tambaksari adalah pelestarian budaya, pengembangan pariwisata, dan pelestarian area bernilai konservasi tinggi.

2.7.4 Kebijakan Pusat dan Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah perlu mengacu kepada kebijakan pusat, sehingga dapat mendukung pencapaian pembangunan nasional. Di dalam RPJPN disebutkan bahwa Wilayah Jawa akan dikembangkan pariwisata dengan konsep ekowisata yang diarahkan pada wilayah Jawa bagian Selatan yang memiliki karakteristik wisata agro dan bentang alam. Dalam mendukung agenda kewilayahan dan sarana prasarana di Pulau Jawa dalam RPJPN, untuk meningkatkan kerja sama antar daerah, mendukung pengoperasian Pelabuhan Patimban, perwujudan wilayah *aero city* dengan mendukung optimalisasi pengoperasian Bandara Kertajati, serta peningkatan konektivitas wilayah untuk menurunkan ketimpangan antara desa-kota dan wilayah utara-selatan pulau Jawa khususnya Jawa Barat, perlu adanya sinergitas antara kebijakan pusat dan daerah, khususnya Kabupaten Ciamis yang secara geografis merupakan kabupaten yang cukup strategis sebagai akses kegiatan ekonomi dan sosial di selatan Jawa Barat.

Gambar 2.13

Posisi Ciamis dalam mendukung Kawasan Strategis Nasional di Jawa Barat



Sumber: Hasil analisis Bappeda, 2023

Selain Metropolitan Jabodebekpunjur, Metropolitan Bandung Raya juga merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sekaligus Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang berada di Cekungan Bandung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Kabupaten Ciamis yang merupakan wilayah sekitar kawasan Metropolitan Bandung Raya memiliki dampak dari



berkembangnya kawasan metropolitan Bandung Raya dimana Kabupaten Ciamis sebagai pendukung pertumbuhan Metropolitan Bandung Raya.

Dilihat dari letak Geografis Kabupaten Ciamis sebelah selatan, Kabupaten Ciamis merupakan penghubung menuju Pusat Kegiatan Nasional Metropolitan Bandung Raya. Metropolitan Bandung Raya merupakan salah satu dari tiga Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang memiliki posisi strategis sebagai pusat aktivitas pemerintahan daerah, pendidikan tinggi, perdagangan, industri, perkembangan teknologi, serta kawasan permukiman di Provinsi Jawa Barat.

Pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Ciamis yang mendukung agenda kewilayahan di Pulau Jawa dalam RPJPN yaitu untuk meningkatkan kerja sama antar daerah, serta peningkatan konektivitas, maka direncanakan pembangunan berupa jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap. Rencana Pembangunan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap bertujuan untuk mendukung dan menghubungkan Jawa Barat dengan Jawa Tengah serta mendukung pengembangan sektor pariwisata di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pembangunan tol ini juga dapat mendorong mobilitas perekonomian di Jawa Bagian Selatan, termasuk Kabupaten Ciamis.

Kemudian, untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat bagian Selatan, direncanakan pembangunan dan peningkatan Jalur Tengah Selatan (JTS) Jawa Barat segmen timur yang melewati Kabupaten Ciamis. Pembangunan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian Kabupaten Ciamis dari sektor pertanian, kehutanan, dan peternakan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, serta sektor transportasi, dan pergudangan.

Selain itu untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, yang telah dituangkan juga dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 – 2043 terkait Pembangunan Jembatan Benteng – Manonjaya, Pembangunan Embung pengendali banjir (Purwadadi, Lakbok, Panjalu, Kawali), Megaproyek Bendungan Matenggeng, dan Pembangunan pusat penelitian dan pengembangan Sapi Pasundan. Pembangunan tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis.

Dari gambaran mengenai kondisi fisik wilayah Kabupaten Ciamis yang tercantum dalam Rencana Struktur Ruang, Kabupaten Ciamis memiliki potensi yang dominan terhadap perkebunan dan tanaman pangan. Sejak Tahun 2010 sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor transportasi pergudangan merupakan tiga besar sektor yang memiliki kontribusi tinggi terhadap peningkatan perekonomian di Kabupaten Ciamis.

Dilihat dari letak Geografis Kabupaten Ciamis sebelah utara, Kabupaten Ciamis merupakan penghubung menuju Pusat Kegiatan Nasional Metropolitan Cirebon Raya. Metropolitan Cirebon Raya merupakan salah satu dari tiga Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang memiliki posisi strategis sebagai pusat aglomerasi penduduk, aktivitas ekonomi, dan sosial masyarakat di Propinsi Jawa Barat.

Pengaruh metropolitan Cirebon Raya terhadap Ciamis adalah sebagai pemicu percematan pembangunan di Kabupaten Ciamis dalam segala aspek, aspek yang paling berpengaruh adalah aspek ekonomi. Kabupaten Ciamis memiliki kualifikasi untuk penyelenggaraan kegiatan – kegiatan berskala nasional, selain di fokuskan pada pembangunan infrastruktur Kabupaten Ciamis juga memfokuskan pembangunan pada pemerataan kualitas Sumber Daya Masyarakat (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA).

Sebagai akses Kabupaten Ciamis ke wilayah Cirebon Raya di rencanakan pembangunan jalan tol Tasikmalaya – Kuningan yang akan terkoneksi dengan jalan Tol Gedebage –



Tasikmalaya – Cilacap di sebelah selatan dan Cikopo - Palimanan di sebelah utara. Rencana Pembangunan Tol Tasikmalaya Kuningan merupakan salah satu upaya pengembangan wilayah di Jawa Barat Bagian Selatan, utamanya untuk mendukung pengembangan sejumlah komoditas unggulan hingga komoditas wisata yang diproyeksikan menjadi andalan. Pembangunan jalan tol di Tasikmalaya Kuningan juga bermanfaat guna mendorong investasi dan hilirisasi industri di Kawasan yang berbatasan dengan Jawa Tengah termasuk Kabupaten Ciamis. Dibandingkan dengan wilayah Cirebon raya realisasi investasi di wilayah priangan timur sangat rendah faktor penyebabnya adalah berkuat pada infrastruktur yang kurang memadai, dengan sokongan infrastruktur yang prima, hilirisasi produk pertanian dan industri pengolahan pangan di Jawa Barat selatan mulai dari Tasikmalaya, Ciamis hingga Pangandaran akan optimal. Produk pertanian potensial di Priangan timur khususnya Kabupaten Ciamis diantaranya aneka cabai, tomat, daging ayam ras, telur ayam ras, jagung, dan ubi.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, yang telah dituangkan juga dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 – 2043 terkait Pelebaran Jalan Lingkar Utara Ciamis – Banjar, Jalan Lingkar Utara Ciamis – Banjar juga merupakan akses yang ditingkatkan untuk memenuhi kegiatan sosial dan ekonomi di wilayah Ciamis bagian utara yang akan terkoneksi dengan jalan Nasional Ciamis – Cikijing – Cirebon. Jalan Lingkar Utara Ciamis – Banjar juga diharapkan akan mendongkrak peekonomian Kabupaten Ciamis di wilayah Timur Utara Ciamis, karena selain merupakan akses terhubung dengan wilayah metropolitan Cirebon Raya, jalan ini juga merupakan akses kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat Ciamis dengan wilayah perkotaan Cilacap di Jawa Tengah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan

Permasalahan merupakan kesenjangan atau gap yang terjadi antara kinerja yang dicapai saat ini dengan rencana atau standar yang ada, serta apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil yang terjadi saat ini. Gap yang terjadi dipengaruhi oleh faktor penyebab baik faktor yang mendorong keberhasilan maupun kegagalan yang harus dilakukan analisis dalam rangka menyusun perencanaan selanjutnya. Sedangkan isu strategis merupakan permasalahan pembangunan daerah yang dikategorikan sebagai permasalahan prioritas untuk diselesaikan, ataupun isu yang berasal dari isu global, nasional, maupun provinsi.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045, perumusan permasalahan pembangunan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap data dan informasi pembangunan daerah, serta memperhatikan capaian kinerja baik capaian kinerja makro daerah maupun capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Data dan hasil evaluasi pembangunan daerah sampai dengan Tahun 2023 menjadi rujukan proses identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Ciamis.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan. Rumusan permasalahan diidentifikasi berdasarkan gap kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Permasalahan pembangunan Kabupaten Ciamis berdasarkan aspek dan/atau bidang urusan pemerintah daerah sebagai berikut.

3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Pada aspek ini, permasalahan pembangunan mencakup aspek kondisi geografi dan pemanfaatan fisik ruang serta kondisi demografi yang berdampak terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

3.1.1.1 Geografi

1. Kondisi topografi di Kabupaten Ciamis yang berbukit menjadikan rawan terjadi gerakan tanah
Kejadian bencana yang paling banyak di Kabupaten Ciamis yaitu tanah longsor pada Tahun 2023 sebanyak 192 kali. Hal ini berhubungan dengan kondisi topografi Kabupaten Ciamis yang memiliki banyak lereng curam dan tidak stabil yang rentan mengalami longsor, terutama jika curah hujan tinggi. Berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana, tingkat risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Ciamis menunjukkan tingkat risiko sedang di semua kecamatan.
2. Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan mencapai 70,76 poin pada Tahun 2023, secara capaian angka tersebut berada diatas capaian provinsi Jawa Barat sebesar 64,77 poin, namun masih dibawah angka capaian IKLH Nasional sebesar 72,54 poin. Hal tersebut menunjukkan masih perlunya upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Ciamis. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, masih rendahnya pengelolaan limbah serta masih kurangnya pemanfaatan teknologi tepat

guna yang ramah lingkungan dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan menjadi kendala dalam peningkatan kualitas lingkungan.

Sementara itu, dalam hal pengelolaan persampahan, persentase jumlah timbulan sampah yang tertangani baru mencapai 40,48%. Kabupaten Ciamis baru memiliki 1 (satu) TPA yang beroperasi yaitu TPA Sindangrasa yang berada di Kecamatan Banjaranyar, sekitar 48,40 Km dari ibu kota Kabupaten sehingga diperlukan penambahan TPA untuk menambah cakupan pelayanan dan pengganti TPA Handapherang yang ditutup akibat pembangunan Bendungan Leuwikeris. Untuk mengurangi timbunan sampah dimulai dari hulu telah dilakukan melalui pola 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan pendirian Bank Sampah namun perlu terus dilakukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

3. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Belum Optimal

Pengendalian pemanfaatan ruang selalu dilaksanakan setiap tahun, namun ketaatan terhadap tata ruang di Kabupaten Ciamis hanya 85%. Beberapa permasalahan yang masih ditemui dalam pemanfaatan fungsi tata ruang adalah seperti alih fungsi lahan dari pertanian ke fungsi lahan non pertanian, penggunaan badan jalan untuk kegiatan sektor informal, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan kebijakan pemanfaatan ruang perlu ditindaklanjuti melalui penetapan peraturan daerah zonasi pemanfaatan ruang maupun pengaturan penerbitan perizinan.

3.1.1.2 Demografi

Pertambahan penduduk berimplikasi terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, alam dan ruang. Jumlah penduduk di Kabupaten Ciamis berdasarkan data BPS mencapai 1.251.544 jiwa pada Tahun 2023 dengan laju pertumbuhan sebesar 0,66% akan meningkatkan kebutuhan pangan, energi, air bersih, hunian, serta sarana dan prasarana lainnya dalam jangka panjang.

Banyaknya penduduk di Kabupaten Ciamis yang melakukan migrasi keluar tetap yang mengakibatkan berpindahnya sebagian sumber daya manusia di Kabupaten Ciamis sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan pada aspek kesejahteraan masyarakat mencakup kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

3.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

1. Masih adanya ketimpangan pendapatan

Ketimpangan pendapatan dapat diukur dari capaian indeks gini. Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh, nilai indeks gini berkisar antara 0 hingga 1. Indeks gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Kabupaten Ciamis saat ini masih terdapat ketimpangan pendapatan masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan capaian Indeks Gini Tahun 2023 sebesar 0,341 dan masuk kedalam kategori tingkat ketimpangan rendah dengan rentang 0 - 0,35. Namun demikian, kondisi ini menunjukkan masih adanya distribusi pendapatan yang cenderung tidak merata diantara masyarakat Kabupaten Ciamis.

2. Masih adanya penduduk miskin

Tingkat kemiskinan Kabupaten Ciamis Tahun 2023 sebesar 7,42% masih harus menjadi perhatian, walaupun angka tersebut lebih rendah dari rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Berbagai program penanggulangan kemiskinan terus dilaksanakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

3. Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Kerja
Di Kabupaten Ciamis Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 sebesar 3,52, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kesempatan kerja baru serta kurangnya *link and match* antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja. Ketersediaan lapangan kerja yang terbatas, banyaknya korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) baik dari luar maupun dalam daerah yang belum memiliki pekerjaan baru, serta kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri menjadi faktor pemicu bertambahnya angka pengangguran di Kabupaten Ciamis.
4. Belum optimal penerapan teknologi pangan
Penerapan teknologi pangan yang belum optimal di Kabupaten Ciamis, khususnya dengan masih digunakannya metode konvensional dapat berdampak negatif pada produksi, produktivitas, dan pasca panen di sektor pertanian. Hal ini dapat menurunkan produktivitas, kualitas produk, daya saing, nilai tambah, serta kesejahteraan petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan penerapan teknologi pangan di sektor pertanian untuk menghasilkan produk yang berkualitas, memiliki daya saing, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ciamis.

3.1.2.2 Kesejahteraan Sosial

1. Belum optimalnya layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
PPKS merupakan layanan bagi seseorang atau keluarga yang kesulitan atau tidak dapat menggunakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. PPKS di Kabupaten Ciamis meliputi anak terlantar, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, dan perempuan rawan sosial ekonomi. Pelayanan PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar di Kabupaten Ciamis masih belum terlayani secara menyeluruh.
2. Pengembangan potensi kebudayaan belum optimal
Belum optimalnya pengembangan potensi kebudayaan disebabkan karena beberapa faktor, yaitu Jumlah SDM kebudayaan semakin berkurang karena meninggal dunia dan memungkinkan beralih profesi, lembaga pendidikan yang memiliki layanan pendidikan dan pelatihan dibidang kebudayaan belum tersebar secara merata, sebagian besar lembaga kebudayaan belum memiliki tata kelola yang baik, tidak sedikit lembaga kebudayaan yang masih bergantung pada hibah pemerintah dan lembaga donor swasta, belum terbentuknya jaringan kerja yang mempertemukan beragam SDM kebudayaan dan lembaga kebudayaan.
3. Belum optimalnya peran pemuda dalam Pembangunan masyarakat
Pemuda adalah kelompok yang memegang peranan penting dalam pembangunan masyarakat. Pemuda memiliki potensi dan energi untuk mempercepat dan memperluas kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi di sebuah negara atau daerah. Namun, jika peran pemuda dalam pembangunan masyarakat belum optimal, dampaknya bisa negatif terhadap kemajuan dan kualitas pembangunan suatu masyarakat. Indeks pembangunan pemuda di Kabupaten Ciamis Tahun 2023 baru mencapai 56,51 poin, artinya pembangunan dan pemberdayaan generasi muda di Kabupaten Ciamis masih belum optimal atau masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Penilaian indeks pembangunan pemuda dilakukan dengan menggunakan sejumlah indikator tertentu, seperti akses ke pendidikan yang layak, tingkat kesehatan, kesempatan kerja yang baik, perkembangan kreativitas, dan partisipasi dalam kegiatan politik dan sosial. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan dan meningkatkan aspek-aspek ini untuk mendorong indeks pembangunan pemuda lebih tinggi lagi.

4. Belum optimalnya kesetaraan gender
Kesenjangan gender adalah kondisi dimana ada ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses terhadap sumber daya dan peluang dalam berbagai aspek kehidupan. Kabupaten Ciamis memiliki tantangan dalam mencapai kesetaraan gender, hal ini disebabkan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Ciamis Tahun 2023 baru mencapai 87,5%, yang menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam hal akses terhadap sumber daya hidup mendasar telah berkurang. Selain itu Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mencapai 66%, yang menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan kesempatan pemberdayaan gender dalam lingkup ekonomi, sosial, dan politik.
5. Belum optimalnya pelaksanaan program Keluarga Berencana
Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) masih belum optimal di Kabupaten Ciamis, yang dapat menyebabkan dampak negatif seperti meningkatnya angka kelahiran, masalah kesehatan masyarakat, dan pertumbuhan populasi yang tidak terkontrol. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan ibu dan anak, pendidikan, kemiskinan, dan meningkatkan risiko kehamilan tidak diinginkan dan aborsi sehingga diperlukan perbaikan dalam program KB agar lebih efektif dalam mengendalikan pertumbuhan populasi dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
6. Belum optimalnya akses dan pelayanan kesehatan
Belum optimal akses dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Ciamis dapat memberikan dampak yang signifikan pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Beberapa dampak negatifnya antara lain meningkatnya angka kematian, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya aksesibilitas kesehatan, dan peningkatan biaya kesehatan. Hal ini didukung dengan data peningkatan prevalensi stunting Tahun 2023 menjadi sebesar 25,4%, masih adanya Angka Kematian Ibu di Tahun 2023 sebesar 71,6 per 100.000 kelahiran hidup, adanya beban ganda penyakit menular dan penyakit tidak menular ditandai dengan angka notifikasi semua kasus TB yang diobati, prevalensi HIV/AIDS, pelayanan kesehatan penderita hipertensi Tahun 2023 sebesar 95,69% serta *Universal Health Coverage* yang masih dibawah target.

3.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

3.1.3.1 Daya Saing Ekonomi

1. Belum optimalnya pengembangan dan digitalisasi UMKM
Pengembangan dan digitalisasi UMKM di Kabupaten Ciamis sangat penting karena dapat meningkatkan daya saing, produktivitas, akses pasar, akses permodalan, serta kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi digital, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis, menjangkau konsumen yang lebih luas, menarik minat investor, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis.
2. Belum optimalnya pertumbuhan koperasi aktif
Jumlah koperasi di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2023 sebanyak 635 koperasi, namun koperasi yang aktif baru sebesar 57,46%. Pertumbuhan koperasi aktif di Kabupaten Ciamis belum optimal dikarenakan jenis usaha mayoritas koperasi masih bergerak dalam bidang simpan pinjam, sangat terbatas dalam usaha produktif serta masih adanya koperasi yang bermasalah dalam BI *checking*, sehingga tidak bisa mengakses layanan perbankan.

3. Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata
Optimalisasi pengelolaan potensi wisata di Kabupaten Ciamis salah satunya melalui pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata. Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata di kabupaten ciamis dikarenakan belum terciptanya pariwisata yang terintegrasi, kurangnya promosi pariwisata, serta belum adanya *Creative Center*. Disamping itu salah satu strategi untuk mengoptimalkan pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata yaitu peningkatan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, dimana jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif masih lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhannya.
4. Belum optimalnya pengembangan dan pasca panen pertanian
Belum optimalnya pengembangan dan pasca panen pertanian di Kabupaten Ciamis dapat berdampak pada beberapa hal, seperti rendahnya nilai tukar petani subsektor tanaman pangan. Penyebabnya adalah belum optimalnya penerapan teknologi di sektor pertanian, sulitnya regenerasi petani milenial, akses pemasaran yang belum optimal, terbatasnya SDM penyuluh pertanian dan sarpras pertanian, alih fungsi lahan pertanian 0,031% sampai dengan Tahun 2023, lokasi areal pertanian endemis organisme pengganggu tumbuhan, dan masih terdapatnya penyakit hewan yang mengganggu produktivitas.
5. Masih rendahnya daya saing pelaku usaha
Masih rendahnya daya saing pelaku usaha di Kabupaten Ciamis dapat berkontribusi pada menurunnya nilai ekspor bersih. Hal ini disebabkan karena kurang diminatinya produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) buatan Kabupaten Ciamis oleh pasar, baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, kurangnya inovasi dan akses teknologi digital yang terbatas juga dapat menghambat UMKM untuk meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk. Dampak dari menurunnya nilai ekspor bersih tersebut adalah berkurangnya pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ciamis.
6. Belum optimalnya industri pengolahan dalam pemanfaatan potensi unggulan lokal
Sektor industri pengolahan dalam pemanfaatan potensi unggulan lokal memiliki prospek yang baik sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Industri pengolahan dalam pemanfaatan potensi unggulan lokal di Kabupaten Ciamis sampai dengan Tahun 2022 belum optimal, dimana industri pengolahan hanya berjumlah sebanyak 37 sentra/kluster.

3.1.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan
Akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Ciamis belum optimal ditinjau dari capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pada Tahun 2023 baru mencapai 8,09 Tahun, artinya belum mencapai pendidikan dasar 9 Tahun. Posisi RLS Kabupaten Ciamis Tahun 2023 masih berada dibawah capaian nasional dan Provinsi Jawa Barat.
2. Belum optimalnya pembangunan literasi masyarakat
Pembangunan literasi masyarakat dilakukan agar masyarakat memiliki kemampuan mengidentifikasi positif dan negatif informasi yang diterima berdasarkan hasil bacaannya. Oleh karenanya penyediaan pelayanan terhadap akses literasi yang dapat dijangkau masyarakat perlu ditingkatkan. Untuk meningkatkan budaya baca masyarakat, telah tersedia perpustakaan desa serta Taman Bacaan Masyarakat yang mudah dijangkau, namun Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2023 baru mencapai sebesar 62,85 poin.

3.1.3.3 Daya Saing Infrastruktur

1. Belum optimalnya akses tempat tinggal dan lingkungan yang layak

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan berarti memastikan akses pada perumahan yang aman dan terjangkau, serta memperbaiki pemukiman kumuh menjadi layak huni dengan dukungan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) yang memadai, sampai dengan Tahun 2022 dukungan PSU terhadap lingkungan yang sehat dan aman baru 8,7%. Di Kabupaten Ciamis masih terdapat 71 lokasi Kawasan Kumuh yang tersebar di 10 Kecamatan dan 30,59% rumah tidak layak huni yang perlu ditangani, keterbatasan anggaran dan peran serta Lembaga Masyarakat serta swasta masih harus ditingkatkan guna menangani permasalahan penanganan Perumahan dan Permukiman. Ketersediaan air minum dan sanitasi sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat masih menjadi problematika yang belum dapat terselesaikan hingga saat ini, dalam upaya mewujudkan Indonesia Sehat. Kedua aspek tersebut memiliki keterkaitan dan membentuk karakteristik lingkungan hidup dalam kawasan permukiman. Kondisi sanitasi yang buruk juga dapat menjadi pemicu pencemaran air dan penyebaran wabah penyakit, seperti diare dan malaria. Dampak berkepanjangan yang mungkin terjadi adalah kematian. Urusan Air Minum dan Sanitasi merupakan jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, capaian Kabupaten Ciamis Tahun 2023 untuk ketersediaan air minum layak baru mencapai 91,98% sementara akses air minum aman baru mencapai 25,13% dan sanitasi layak mencapai 74,67% sementara sanitasi aman hanya mencapai 2,62%, untuk akses layak belum mencapai target yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebesar 100%. Selain itu, kapasitas air baku di Kabupaten Ciamis masih belum teroptimalkan pemanfaatannya.

2. Belum optimalnya kualitas infrastruktur jalan, drainase, dan irigasi

Jalan sebagai infrastruktur konektivitas antar wilayah memegang peranan penting dalam perkembangan kegiatan ekonomi dan pelayanan transportasi umum. Dari 1.098,13 Km panjang jalan Kabupaten di Tahun 2023, masih terdapat 9,91% jalan yang belum mantap, hal ini ditunjukkan dengan masih adanya sepanjang 2,1 Km jalan berupa tanah dan 6,8 Km berupa jalan telford/kerikil. Selain itu, sarana dan prasarana transportasi umum masih perlu ditingkatkan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga penggunaan kendaraan umum lebih memasyarakat. Pada aspek sumber daya air, kinerja layanan jaringan irigasi belum sepenuhnya menopang peningkatan produktivitas pertanian. Jaringan irigasi dengan status kondisi baik pada Tahun 2023 baru mencapai 59,9%. Beberapa faktor penyebab diantaranya intensitas kejadian bencana alam yang tidak diimbangi dengan kecepatan penanganan terhadap kerusakan jaringan irigasi dan umur bangunan jaringan irigasi yang telah melewati umur konstruksi.

3.1.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Belum optimalnya implementasi kebijakan terkait iklim usaha dan investasi merupakan permasalahan terkait daya saing iklim investasi. Realisasi investasi di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2023 sebesar Rp 268,21 Miliar cenderung naik dari tahun sebelumnya, namun masih perlu mendapat perhatian dalam rangka optimalisasi dan meningkatkan iklim usaha dan investasi serta mempromosikan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis juga belum memiliki *Grand Design* Pemanfaatan KPI (Kawasan Peruntukkan Industri) sebagai alat untuk menarik investor. Selain itu Kabupaten Ciamis saat ini belum

memiliki Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai salah satu sarana yang mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Dukungan investasi di Kabupaten Ciamis khususnya di wilayah KPI memerlukan dukungan infrastruktur (jalan, jaringan listrik, jaringan internet, air bersih, dan pengolahan limbah) yang akan memberikan pengaruh terhadap daya tarik investasi.

3.1.4 Aspek Pelayanan Umum

1. Belum maksimalnya penyelenggaraan informasi publik
Peningkatan penyelenggaraan informasi publik, peningkatan efektivitas, efisiensi pengelolaan data dan sistem pemerintahan dilakukan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan penerapan SPBE tercermin dari capaian Indeks SPBE Tahun 2023 sebesar 3,09 poin dengan predikat Baik. Meskipun capaian SPBE di Kabupaten Ciamis sudah baik, namun masih terdapat hal yang perlu dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik ini, salah satunya belum tersedianya persandian antar perangkat daerah dan belum optimalnya sarana dan prasarana digitalisasi pada pelayanan publik.
2. Belum optimalnya pengelolaan administrasi kependudukan
Masalah kependudukan di Kabupaten Ciamis yaitu belum optimalnya pengelolaan administrasi kependudukan yang dapat berkontribusi terhadap cakupan penerbitan akta kelahiran. Selain itu, integrasi data antar instansi juga belum optimal serta masih ada sarana dan prasarana pendukung pelayanan kependudukan yang masih kurang. Ketiga faktor tersebut berpotensi menjadi hambatan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien di Kabupaten Ciamis.
3. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi pembangunan
Sampai dengan saat ini kondisi pengumpulan data, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, dokumentasi hingga pelayanan informasi di Kabupaten Ciamis belum seluruhnya terpenuhi secara maksimal. Kurang optimalnya pembaruan dan validasi data yang akhirnya berdampak pada ketersediaan data yang kurang lengkap. Faktor penyebab kurang optimalnya pembaruan dan validasi data berdampak pada ketersediaan data yang kurang lengkap antara lain kurangnya jumlah pengelola data yang melakukan pembaruan dan validasi data.
4. Kapasitas fiskal keuangan daerah di Kabupaten Ciamis masih belum mencukupi untuk mendanai program prioritas daerah
Kondisi anggaran pembangunan Kabupaten Ciamis masih besar ketergantungannya pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tingginya biaya layanan publik dan infrastruktur serta minimnya sumber pendapatan asli daerah.
5. Belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi
Penerapan SPM menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Ciamis. Belum optimalnya penerapan SPM, berdampak pada kualitas pelayanan publik yang diberikan. Nilai Reformasi Birokrasi di Kabupaten Ciamis Tahun 2023 sebesar 77,05 (B) belum maksimal, sehingga perlu ditingkatkan agar pihak pemerintah dapat mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Ciamis. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2023 yang sebesar 88,27 poin dapat menjadi indikasi bahwa ada peningkatan kepuasan layanan publik meski reformasi birokrasi masih belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik masih dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui penerapan SPM dan pembenahan birokrasi secara menyeluruh di Kabupaten Ciamis.

6. Belum optimalnya upaya pelayanan dalam pencegahan dan mitigasi bencana
Bencana yang setiap tahun terjadi di Kabupaten Ciamis yaitu tanah longsor, cuaca ekstrim dan banjir yang dapat menimbulkan risiko kebakaran, sehingga diperlukan pelayanan bencana yang baik. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Ciamis yang belum optimal, serta tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) mencapai 86,29% menunjukkan cakupan pelayanan bencana yang masih rendah dalam mitigasi risiko kebakaran.
7. Belum optimalnya kemandirian desa
Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan di tingkat desa. IDM mencakup berbagai dimensi seperti ketersediaan sumber daya manusia, akses terhadap sarana dan prasarana, pemberdayaan ekonomi dan sosial, serta kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. IDM sendiri pada dasarnya merupakan gambaran tentang kemampuan dan kualitas desa dalam mengelola sumber dayanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. Semakin tinggi skor IDM suatu daerah, semakin baik pula tingkat pembangunan yang telah dicapai di desa tersebut. Jumlah desa mandiri di Kabupaten Ciamis Tahun 2023 baru mencapai 178 desa dari 258 desa. Hal ini menunjukkan masih banyaknya desa-desa di Kabupaten Ciamis yang belum optimal dalam mengelola sumber daya dan mengembangkan potensi yang ada di desa sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara holistik. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kemandirian desa di Kabupaten Ciamis, antara lain minimnya ketersediaan modal usaha, terbatasnya akses desa terhadap teknologi, serta minimnya pengembangan sumber daya manusia di desa.

3.2 Isu Strategis Daerah

3.2.1 Isu Global

3.2.1.1 Demografi Global

Proyeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa penduduk global pada Tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Menurut *United Nation Development Programme* (UNDP), dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada Tahun 2050, dimana 95% pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies*. Di Asia dalam empat dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Sebanyak 25%–30% penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai.

3.2.1.2 Geopolitik dan Geoekonomi

Rivalitas dan dominasi negara-negara besar dalam perekonomian dan politik global memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian negara-negara lain dunia. Konflik yang saat ini berlangsung di kawasan Timur Tengah, Eropa Timur, dan Laut Cina Selatan – Indo Pasifik, efeknya dapat merambat secara langsung dan tidak langsung dalam skala global. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong deglobalisasi dimana setiap negara membangun kemandirian dan ketahanan dalam memitigasi risiko keterpaparan dampak potensi krisis yang merambat melalui jalur perdagangan dan keuangan internasional, serta komoditas dalam rantai pasok global. Di tengah tensi geopolitik yang ada, kawasan Indo-Pasifik yang diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berpotensi membuka

berbagai peluang yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan luar negeri, menjadi *windows of opportunity* sebagai bagian dari rantai pasok produksi dan perdagangan global.

3.2.1.3 Perkembangan teknologi

Saat ini, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Ke depan, akan banyak pekerjaan yang dapat tergantikan oleh pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.

3.2.1.4 Urbanisasi dunia

Menurut data *World Population Prospects (2022)*, populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada Tahun 2050. Porsi lansia di Asia juga meningkat yaitu sebesar 55 persen. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Kebutuhan pangan, energi, dan air akan semakin meningkat pula seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Selain itu, urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyebar ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa.

3.2.1.5 Perdagangan Internasional

Meningkatnya jumlah kelas menengah masyarakat global akan mendorong sisi permintaan produk dan peningkatan perdagangan internasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan peluang pasar ekspor produk dari Jawa Barat ke negara-negara potensial. Produk yang berdaya saing serta penguatan sistem logistik yang efisien diperlukan dalam meningkatkan kinerja ekspor Jawa Barat.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

3.2.2.1 Perpindahan IKN

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta baik dari sisi konsumsi, impor ekspor perdagangan antar daerah, serta belanja pemerintah pusat di wilayah tersebut. Potensi kehilangan belanja pemerintah pusat ke wilayah DKI diperkirakan mencapai 90 persen dari total keseluruhan belanja. Keterkaitan aktivitas perekonomian yang erat menjadikan perpindahan IKN akan berdampak langsung terhadap kinerja perekonomian Jawa Barat. Dampak yang diakibatkan berupa penurunan PDRB Jawa Barat sebesar 0,06 persen, serta upah nyata Jawa Barat di sektor pertanian turun sebesar 0,49 persen, sehingga dampaknya perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan yang telah menjadi permasalahan di Jawa Barat saat ini.

3.2.2.2 Bonus demografi Indonesia

Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penduduk ke empat terbesar di dunia yaitu sebesar 277 juta jiwa dan diproyeksikan pada Tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk dapat menjadikan potensi sumber daya pembangunan yang besar jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan

produktif. Selain itu, besarnya jumlah penduduk dapat memberikan potensi tenaga kerja yang besar untuk menunjang sektor-sektor ekonomi potensial menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian dan pariwisata. Namun dengan besarnya penduduk Indonesia saat ini masih terdapat tantangan yaitu kualitas pendidikan yang masih rendah yang dilihat dari capaian rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment (PISA)* siswa Indonesia Tahun 2018 untuk semua aspek (membaca, matematika dan sains) yaitu sebesar 382,00 dimana capaian tersebut masih dibawah siswa dari negara-negara *The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* yaitu sebesar 488,33. Selain itu produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu Tahun 2010-2022 masih relatif tertinggal yaitu sebesar 7.274,9 USD dimana angka tersebut berada dibawah rata-rata kawasan ASEAN. Komposisi struktur penduduk Indonesia masih dapat dioptimalkan, dimana rasio ketergantungan di bawah 50% yang diproyeksikan akan berlangsung sekitar 15 tahun ke depan, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan penduduk usia produktif yang tinggi sebagai modal utama pembangunan. Dengan penduduk usia produktif yang dominan akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila adanya peningkatan kualitas penduduk usia produktif melalui peningkatan produktivitasnya. Penduduk usia produktif yang dominan menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk yang memiliki daya beli cukup tinggi dan dapat membeli produk-produk berkualitas (*consuming class*) di dunia yang berpotensi akan terus bertambah. Masyarakat *consuming class* ini mendorong pertumbuhan dari sisi konsumsi tetapi perlu diimbangi dengan pemenuhan dari sisi produksi dan investasi di Indonesia. Untuk itu, kemampuan menguasai pasar domestik sangat penting, dengan membangun sektor-sektor ekonomi yang dapat memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh kelompok masyarakat tersebut.

3.2.2.3 Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka transformasi ekonomi dengan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru sebagai salah satu strategi yang dipersiapkan tidak hanya dalam rangka pemulihan dari pandemi *Covid-19* namun juga untuk membawa Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045. Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan rendah karbon sebagai "tulang punggung"-nya. Strategi Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru ini diharapkan dapat membantu Indonesia menjadi salah satu negara berpendapatan tinggi pada Tahun 2045. Penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Arah kebijakan penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru berlandaskan pada pelaksanaan pembangunan rendah karbon yang meliputi : (i) peningkatan efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan; (ii) transisi energi menyiapkan secara berkeadilan dengan menyiapkan keahlian dan kesempatan kerja baru termasuk pengembangan ekosistem dan insentif, khususnya untuk daerah penghasil energi fosil; (iii) pengembangan *smart grid* termasuk jaringan interkoneksi dalam (*island grid*) dan antar pulau (*national grid*) serta sistem terisolasi (*isolated grid*); (iv) pengembangan teknologi sistem penyimpanan energi (*battery/energy storage system*); (v) pengembangan transportasi ramah lingkungan; (vi) penerapan ekonomi sirkular; (vii) pengelolaan hutan lestari dan lahan pertanian serta produk-produk turunannya secara berkelanjutan; (viii) perkuatan implementasi sistem insentif dan disinsentif fiskal maupun non fiskal untuk mendorong produk-produk hijau, melalui pengembangan *green financing* dan penerapan *carbon pricing* untuk mendukung investasi hijau; serta (iv) penerapan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru di setiap sektor. Paradigma ekonomi biru merupakan kerangka pembangunan berkelanjutan untuk membantu menangani isu-isu seperti kesenjangan pembangunan, pengembangan, dan pemerataan kesejahteraan dari sumber daya laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kelautan, serta pertumbuhan ekonomi.

3.2.2.4 Konektivitas dan Infrastruktur Dasar

Terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, konektivitas *hinterland* (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih perlu ditingkatkan, serta masih rendahnya jangkauan jaringan serat optik sebagai layanan digital yang berkualitas, dan masih belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler di daerah terpencil menjadi tantangan nasional. Diperlukan kesinambungan pembangunan dalam menjaga konsistensi satu masa dan antar periode pemerintahan, terutama dalam menghadapi perubahan - perubahan mendasar yang memerlukan perkuatan implementasi dan pembiayaan pembangunan. Selain permasalahan tersebut, terdapat beberapa masalah lain yang perlu diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antar lembaga, kurangnya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur termasuk untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun, dan belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada sehingga tidak memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam pemenuhan infrastruktur dasar, tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana. Terkait pemenuhan kebutuhan air, terdapat tantangan keterbatasan prasarana untuk memanfaatkan potensi air sehingga keberlanjutan pasokan air baku menjadi tidak pasti dan produktivitas air dari sisi ekonomi masih merupakan salah satu yang terendah di Asia. Pelayanan tenaga listrik belum optimal dan belum berkelanjutan.

3.2.2.5 Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, serta Ketahanan Bencana

Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan. Kerugian ekonomi akibat bencana perubahan iklim diperkirakan mencapai rata-rata Rp22,8 triliun per tahunnya, adapun jumlah kematian akibat bencana hidrometeorologi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir mencapai 1.183 orang. Terdapat 18.000 km garis pantai Indonesia berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terlebih lagi hingga Tahun 2040, tinggi gelombang ekstrim dapat mengalami peningkatan 1-1,5 m yang menyebabkan potensi tinggi gelombang berdampak pada keselamatan pelayaran. Rerata kenaikan tinggi muka laut pun pada periode Tahun 2006-2040 mencapai 0,9 cm/tahun yang akan meningkatkan kerentanan pesisir seperti penggenangan pesisir. Selain itu, peningkatan musim kemarau yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami penurunan intensitas cuaca curah hujan juga berdampak pada meningkatnya potensi kekeringan, ketersediaan air, dan penurunan produksi padi. Potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim mencapai Rp544 triliun selama periode Tahun 2020-2024 yang diperkirakan akan terus meningkat apabila tidak dibangun ketahanan ekologi yang memadai.

Sebagai bentuk pengendalian perubahan iklim, Indonesia turut berkontribusi dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Global. Pada Tahun 2020 Indonesia berkontribusi menurunkan emisi GRK sebesar 1.05 Gr Co₂ atau 2,67 persen dari total emisi GRK global yang diestimasikan sebesar 39,32 GrCO₂e GrCO₂e (*Our World in Data based on the Global Carbon Project 2022*). Kontribusi emisi GRK Indonesia tersebut yang bersumber paling besar dari sektor energi, transportasi, serta penggunaan produk. Emisi GRK Indonesia diperkirakan akan terus meningkat apabila paradigma pembangunan tidak berubah.

Daya dukung sumber daya alam diperkirakan akan terus menurun. Daya dukung lahan hutan dan lahan sawah yang diperkirakan akan menurun seiring dengan proyeksi hilangnya luas hutan sebesar 10 juta hektar dari Tahun 2025 sampai Tahun 2060 (BaU) yang dipengaruhi oleh pengurangan luas tutupan hutan dalam kawasan konservasi sebesar 700 ribu hektar selama kurun waktu Tahun 2020-2045 serta pengurangan luas lahan sawah sehingga diproyeksikan akan menurun hingga 7 juta hektar diiringi dengan menurunnya tingkat produktivitas menjadi 7 ton/hektar/tahun akibat degradasi tanah. Selain itu, daya dukung ketersediaan air mengalami tren menuju kelangkaan, sampai dengan Tahun 2045 tingkat ketersediaan air di wilayah Jawa sudah berada pada tingkat langka atau kritis sehingga berdampak pada ketersediaan dan kualitas lahan untuk penyediaan pangan yang diprediksi akan mengalami penurunan. Adapun, daya dukung ekosistem laut yang diprediksi akan mengalami kerentanan seiring dengan kerusakan fisik ekosistem pesisir dan laut yang diakibatkan pengelolaan yang tidak berkelanjutan, sampah plastik menurunkan kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati laut secara signifikan serta berdampak pada kualitas sumber pangan akuatik, keselamatan pelayaran, dan daya tarik wisata bahari, selain itu naiknya suhu air laut semakin memperburuk daya dukung ekosistem yang mengancam pemutihan pada ekosistem terumbu karang.

Daya tampung kualitas air, lahan, dan lingkungan laut diperkirakan akan terus menurun. Daya tampung kualitas air akan mengalami krisis air bersih seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Komponen Indeks Kualitas Air (IKA) nasional memiliki tren fluktuatif dengan rata-rata Tahun 2015-2021 sebesar 52,35 (KLHK 2021) nilai yang paling rendah setiap tahunnya dibandingkan dengan komponen lainnya dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Adapun, daya tampung lahan mengalami penurunan secara kapasitas dan kualitas, persentase tutupan lahan diperkirakan terus turun hingga sekitar 44 persen akibat tingginya laju alih fungsi hutan ke lahan pertanian dan perkebunan. Selain itu, Daya tampung lingkungan laut mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dan perubahan iklim namun pengelolaan yang berkelanjutan yang disebabkan aktivitas perikanan, pariwisata, transportasi dan sampah laut masih rendah. Namun disisi lain, daya tampung kualitas udara telah melampaui standar baku mutu saat ini konsentrasi rata-rata tahunan polusi PM2.5 terus meningkat mencapai 26,5 mikrogram/hari atau berada di atas baku mutu udara ambien (15 mikrogram/hari) khususnya di daerah perkotaan.

3.2.2.6 Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Reformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menimbulkan tren pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya daerah yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya daerah yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Selain itu pemekaran wilayah bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum dan daya saing daerah. Tren pemekaran wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah alokasi transfer ke daerah yang memiliki peranan stimulan yang lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD. Alokasi transfer ke daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sektor-sektor terkait pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Disamping itu perlu adanya peningkatan kualitas belanja yang dilakukan pemerintah daerah dimana kualitas belanja daerah sangat mempengaruhi terhadap pencapaian indikator makro daerah.

3.2.3 Isu Provinsi Jawa Barat

Perumusan isu strategis pembangunan daerah Tahun 2025-2045 secara lebih rinci diuraikan sebagaimana berikut:

3.2.3.1 Green dan blue economy serta pembangunan inklusif

Perekonomian yang berkelanjutan mencakup pergeseran sektor-sektor perekonomian menjadi lebih bersih, pengarusutamaan *green economy*. Perekonomian yang bersih atau "*clean economy*" mengacu pada sistem ekonomi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mempromosikan penggunaan sumber daya yang terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi. Ekonomi biru atau "*blue economy*" mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dan kelautan secara berkelanjutan. Hal ini mencakup pemanfaatan laut, samudera, dan sumber daya alam didalamnya, dengan mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Sedangkan pembangunan inklusif adalah pembangunan yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga mengedepankan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dalam meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik, antar individu, antar kelompok, dan antar wilayah.

3.2.3.2 Kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Kualitas dan daya saing sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Kualitas sumber daya manusia mencakup kualifikasi pendidikan, keterampilan, pengetahuan, derajat kesehatan, karakter sosial budaya dan produktivitas. Karakter sosial budaya yang inklusif adalah sosial budaya yang terbuka dan ramah serta saling menghargai. Sosial budaya yang inklusif memiliki peran penting untuk membentuk identitas suatu masyarakat dan individu, serta berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Daya saing sumber daya manusia mengacu pada kemampuan untuk bersaing secara efektif dalam pasar kerja global serta kontribusi pada pembangunan.

3.2.3.3 Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar

Kesenjangan pembangunan merujuk pada perbedaan atau disparitas dalam tingkat kemajuan, atau perkembangan antara daerah, kelompok masyarakat, atau individu yang berbeda, dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kesenjangan infrastruktur pelayanan dasar merujuk pada perbedaan yang signifikan dalam ketersediaan, akses, dan kualitas layanan dasar.

Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar wilayah utara dan selatan Jawa Barat serta antara perkotaan dan perdesaan mengakibatkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan akses layanan dasar masyarakat di wilayah tersebut.

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Provinsi Jawa Barat bagian selatan seperti infrastruktur jalan, sumber daya air dan irigasi, kesehatan, pendidikan, dan digital akan meningkatkan pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi.

3.2.3.4 Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan merujuk pada kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan dan aktivitas manusia dalam jangka waktu yang berkelanjutan tanpa mengalami penurunan kualitas lingkungan dan degradasi atau kerusakan yang tidak dapat pulih, untuk memastikan bahwa aktifitas manusia menggunakan bahan baku yang lebih efisien dan terbarukan, mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya perekonomian, tidak melebihi kapasitas alam dalam menggunakan sumber daya serta tidak menghasilkan limbah (*economy circular*). Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pemanfaatan sumber daya serta kehidupan sosial budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan batas-batas pertumbuhan serta mewujudkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pembangunan jangka panjang.

3.2.3.5 Keberlanjutan Penataan Ruang

Keberlanjutan penataan ruang merujuk pada upaya untuk mengembangkan dan memelihara lingkungan yang seimbang antara kebutuhan manusia dengan keberlangsungan ekosistem alam, penggunaan teknologi dan inovasi dalam perencanaan, penggunaan lahan yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta pengembangan transportasi yang ramah lingkungan seperti transportasi publik dan penggunaan kendaraan listrik.

Keberlanjutan penataan ruang menjadi krusial karena pertumbuhan populasi dan perkotaan yang pesat mengakibatkan tekanan besar terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan ini, diharapkan pembangunan dapat berjalan seimbang dengan kebutuhan lingkungan dan keberlangsungan generasi mendatang, dalam hal pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, energi dan pangan.

3.2.3.6 Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Kualitas tata kelola pemerintahan merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti transparansi, akuntabilitas, kolaborasi, partisipasi publik, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan responsif. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Ciamis

Isu strategis Kabupaten Ciamis selain ditentukan oleh permasalahan juga didasarkan pada isu global, nasional dan provinsi serta memperhatikan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta hasil penjarangan aspirasi masyarakat. Adapun rumusan isu strategis Kabupaten Ciamis yang terdiri dari:

3.2.4.1 Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peran sentral dalam mewujudkan visi Indonesia Emas. Pengelolaan SDM yang baik dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan berkelanjutan. Pada Tahun 2023 Kabupaten Ciamis memiliki kuantitas penduduk usia produktif yang mendominasi struktur penduduk Kabupaten Ciamis. Kuantitas penduduk usia produktif harus didukung juga dengan kualitas sumber daya manusia dari berbagai macam aspek yang saling berkaitan, yaitu kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat dan pendidikan. Salah satu indikator untuk mengukur ketercapaian kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Ciamis adalah melalui angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2023 masih berada di bawah capaian nasional dan Provinsi Jawa Barat. IPM Kabupaten Ciamis diproyeksikan akan terus meningkat sampai dengan Tahun 2045.

Kabupaten Ciamis masih menghadapi isu-isu kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh partisipasi dan fasilitas pendidikan yang belum merata, derajat kesehatan yang belum optimal, pemberdayaan sosial yang kurang, serta pembangunan dan pemberdayaan gender yang belum optimal.

- **Kualitas dan Partisipasi Pendidikan**

Kualitas pendidikan merupakan hal penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan diharapkan penduduk dapat memiliki kesempatan kerja yang lebih baik. Kualitas pendidikan di Kabupaten Ciamis dapat dilihat dari aspek sarana, prasarana, tenaga pendukung penyelenggaraan pendidikan serta tingkat partisipasi pendidikan yang ada.

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Ciamis adalah 8,09 tahun yang berarti penduduk secara rata-rata menempuh pendidikan hanya sampai pendidikan menengah

(SMP). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya akses dan kualitas sarana prasarana pendidikan, belum optimalnya kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga pendukung pendidikan. Selain itu, motivasi dari murid untuk melanjutkan pendidikan harus lebih ditingkatkan melalui peran orang tua dalam mendukung pelaksanaan pendidikan.

Upaya yang telah dilakukan harus lebih diintegrasikan lagi dengan desa sebagai sasaran utama pendidikan sehingga kedepan akan terjadi pemerataan akses pendidikan dan percepatan wajib belajar 13 tahun sebagai tolak ukur/indikator keberhasilan dari kualitas layanan pendidikan khususnya di Kabupaten Ciamis.

- **Derajat Kesehatan Masyarakat**

Derajat kesehatan masyarakat menunjukkan suatu pencapaian produktifitas, kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Ciamis masih tergolong rendah. Hal ini ditandai dengan tingginya angka kematian ibu dan bayi yang cenderung menurun. Penyebab kematian ibu diantaranya anemia, kekurangan energi kalori, dan belum optimalnya pelaksanaan P4K (Perencanaan Program Persalinan dan Pencegahan Komplikasi). Sementara itu, penyebab kematian bayi salah satunya adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Kasus stunting dan balita gizi buruk juga masih ditemukan di Kabupaten Ciamis. Selanjutnya, masalah aspek kesehatan secara umum yang terjadi adalah beban ganda yaitu peningkatan prevalensi penyakit tidak menular, sementara penyakit menular belum teratasi sepenuhnya seperti HIV/AIDS, TBC, dan DBD.

Seiring dengan adanya bonus demografi diperlukan upaya transformasi kesehatan meliputi peningkatan kualitas layanan primer dan rujukan mulai dari sasaran ibu hamil, bayi balita, anak usia sekolah dan remaja, usia produktif, dan lanjut usia.

- **Kurangnya Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial**

Perlindungan sosial merupakan salah satu aspek penting yang menunjukkan keberhasilan dalam pemberdayaan sosial masyarakat. Saat ini, pemberdayaan dan penanganan bagi kelompok fakir miskin masih belum optimal. Bidang kemiskinan merupakan isu dengan dimensi yang luas dan memiliki banyak fokus, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga sosial. Oleh karena itu, dalam penanganannya diperlukan pemberdayaan, kerjasama dan koordinasi antara banyak pihak.

Pemberdayaan sosial juga dapat dilihat dari sisi pemberdayaan terhadap PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). Pemberdayaan sosial di Kabupaten Ciamis belum optimal diantaranya persentase PPKS yang tertangani masih fluktuatif dengan kecenderungan kasus PPKS yang meningkat dan persebaran merata di seluruh kecamatan.

Perlindungan sosial yang adaptif melalui pemberdayaan sosial yang holistik dan berkelanjutan akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan khususnya di Kabupaten Ciamis.

- **Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan serta Anak**

Kesetaraan gender memiliki peran kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing. Salah satu aspek yang dapat merepresentasikan kesetaraan gender adalah aspek pembangunan gender dan pemberdayaan wanita dan anak. Selama 10 Tahun terakhir, pertumbuhan Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Ciamis tidak terlalu signifikan.

Selanjutnya, kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Ciamis masih ada kasus, hal ini menunjukkan perlunya peningkatan upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan, penelantaran dan perlakuan lain melalui pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban, begitu juga berkaitan dengan pembangunan kependudukan.

Pembangunan berwawasan kependudukan diperlukan untuk meningkatkan kualitas kependudukan terutama terkait dengan aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi dalam

mewujudkan kependudukan berkualitas melalui kerjasama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat di Kabupaten Ciamis.

3.2.4.2 Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi

Pembangunan dan pemerataan ekonomi menjadi aspek penting dalam kemajuan daerah. Kebijakan-kebijakan strategis pembangunan daerah bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan dengan konsistensi pertumbuhan ekonomi dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Dalam pencapaian tujuan besar tersebut berbagai tantangan pembangunan dihadapi oleh Kabupaten Ciamis yaitu belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan adanya ketimpangan pendapatan.

- **Pertumbuhan Ekonomi**

Sektor produktif merupakan kunci pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan PDRB Kabupaten Ciamis, lapangan usaha dengan kontribusi terbesar adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan, kemudian perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, serta transportasi dan pergudangan. Namun, jika melihat kecenderungan bahwa pertumbuhan ketiga sektor tersebut mengalami fluktuatif pada lima tahun terakhir.

Dalam berbagai literatur teori pertumbuhan ekonomi, disebutkan bahwa berhasil tidaknya suatu daerah mempertahankan pertumbuhan ekonomi tinggi dalam waktu yang cukup lama hanya dipengaruhi oleh empat faktor yaitu keberuntungan, budaya, geografi dan institusi. Institusi menjadi yang terpenting karena faktor yang relatif lebih mudah untuk diubah. Salah satu tantangan terbesar dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah perbaikan institusi. Dalam institusi ada berbagai faktor diantaranya penegakan hukum (*rule of law*), kualitas pemerintahan (*governance*), serta pengendalian korupsi.

Kabupaten Ciamis memiliki sektor ekonomi potensial berbasis sumber daya alam yang belum dioptimalkan terutama pada sisi pasca panen. Pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta peternakan menunjukkan performa yang baik karena produksi surplus. Tetapi masih ada permasalahan antara lain belum optimalnya penerapan teknologi, sulitnya regenerasi petani milenial karena pertanian dianggap sebagai sektor pekerjaan yang tidak menguntungkan, bersifat konvensional dan tidak bergengsi, masih terbatasnya SDM penyuluh pertanian, terbatasnya penggunaan benih unggul, dan sarana dan prasarana pertanian. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi produktivitas sektor pertanian adalah ketersediaan air untuk irigasi pertanian, alih fungsi lahan pertanian menjadi terbangun, dan minimnya regenerasi petani. Sektor pertanian dan kelautan dan perikanan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam arti luas juga berperan untuk ketahanan pangan dan konsumsi pangan yang bergizi.

- **Ketimpangan Pendapatan**

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan perbedaan pendapatan antara golongan masyarakat atau daerah maju dengan daerah tertinggal. Semakin besar ketimpangan pendapatan maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan yang menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan. Indeks Gini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat. Angka Indeks Gini Tahun 2023 dikategorikan kelompok ketimpangan “rendah” karena berada di bawah 0,4 poin, capaian tersebut juga lebih baik dari Jawa Barat dan Nasional. Salah satu upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan bisa dilakukan melalui serangkaian strategi, diantaranya mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu, memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha, mempercepat pembangunan desa, dan mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan.

3.2.4.3 Infrastruktur Wilayah dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang dan penyediaan infrastruktur bagi masyarakat menjadi salah satu isu strategis di Kabupaten Ciamis. Koordinasi dan keterpaduan penataan ruang serta penyediaan infrastruktur untuk kebutuhan dasar perlu dicapai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penataan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang yang baik memperlihatkan bahwa daerah dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan maksimal. Infrastruktur yang berkualitas minimal dapat memfasilitasi kehidupan sosial dan lingkungan secara efektif, membantu mendorong ekonomi yang baik, dan mampu bertahan dalam waktu yang lama (CSIS, 2017). Isu infrastruktur wilayah dan penataan ruang di Kabupaten Ciamis dititikberatkan pada penyediaan infrastruktur wilayah dan penataan ruang, perencanaan pembangunan kawasan permukiman dan pemenuhan layanan transportasi.

- Penyediaan Infrastruktur Wilayah dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang diselenggarakan dengan 4 (empat) aspek penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Penataan ruang dimaksudkan sebagai upaya yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya buatan, serta memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Secara garis besar penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Ciamis relatif baik, hal ini terlihat dari ketaatan terhadap RTRW sebesar 85%, namun masih ada 2 Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dari 6 PKL yang belum disusun RDTRnya.

Kinerja jaringan jalan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya dengan makin meningkatnya volume kendaraan dan banyaknya kendaraan yang melintas tidak sesuai dengan kapasitas jalan. Hal ini dapat menurunkan kualitas kondisi jalan sehingga ditemukan masih ada sebanyak 9,01% jalan dalam keadaan rusak dan rusak berat pada Tahun 2023.

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Irigasi adalah upaya penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang kegiatan pertanian, tetapi masih terdapat 40,01% jaringan irigasi dalam kondisi rusak dan rusak berat dan pada saat musim kemarau beberapa jaringan irigasi tidak ada airnya.

Ketersediaan air minum dan sanitasi sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat masih menjadi problematika yang belum dapat terselesaikan hingga saat ini, dalam upaya mewujudkan Indonesia Sehat. Kedua aspek tersebut memiliki keterkaitan dan membentuk karakteristik lingkungan hidup dalam kawasan permukiman. Urusan air minum dan sanitasi merupakan jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sampai Tahun 2023 akses terhadap air minum layak mencapai 91,58% dan akses terhadap sanitasi layak mencapai 74,37% hal ini dipengaruhi oleh masih adanya desa yang belum *Open Defecation Free (ODF)* sebanyak 78 desa dan sulitnya mendapatkan sumber air baku.

- Perencanaan Pembangunan Kawasan Permukiman

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multisektor dan berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis, dan berkelanjutan.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman ditandai dengan pemenuhan kuantitas dan kualitas infrastruktur permukiman serta persentase kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni. Saat ini masih terdapat rumah tidak layak huni sebesar 30,38% juga belum seluruhnya rumah tangga di Kabupaten Ciamis terlayani oleh layanan air minum dan sanitasi layak. Kegiatan penunjang seperti melakukan pembangunan dan perbaikan aksesibilitas jalan, pembangunan pipa dan septic tank untuk sanitasi, dan penyediaan air minum terus dilakukan oleh pemerintah daerah agar seluruh wilayah mendapatkan akses terhadap air minum dan sanitasi layak dan aman. Selain itu, masih adanya 71 lokasi kawasan kumuh seluas 366,54 ha yang tersebar di 10 kecamatan dan rumah tidak layak huni menjadikan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman perlu dilaksanakan. Jumlah perumahan perlu dihitung dan diproyeksikan pertumbuhannya di masa mendatang sehingga terpenuhinya kebutuhan rumah di Kabupaten Ciamis. Program rehabilitasi kawasan kumuh juga menjadi salah satu solusi yang ditawarkan, namun program ini perlu terus dipantau agar kawasan kumuh yang direhabilitasi tidak menjadi kumuh kembali.

- **Pemenuhan Layanan Transportasi**

Isu ini ditunjukkan melalui masalah kinerja layanan transportasi angkutan umum dan belum optimalnya kualitas dan kuantitas perlengkapan jalan rasio konektivitas Kabupaten Ciamis hanya mencapai angka 0,248. Kondisi pelayanan angkutan umum/transportasi di Kabupaten Ciamis saat ini belum optimal dimana belum semua wilayah mendapat akses angkutan umum sehingga minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum saat ini berkurang. Dari data sektoral Dinas Perhubungan dari 12 terminal terdapat 3 terminal dalam kondisi yang tidak baik disamping itu persentase layanan angkutan darat masih sebesar 6,65%. Fasilitas perlengkapan jalan sebagai alat keselamatan berlalu lintas baru mencapai 36,07%, terdiri dari rambu 2.340 buah dari kebutuhan 7.000 buah (33,43%) alat pengendali pemakai jalan 472 buah dari kebutuhan 2.500 buah (18,88%), cermin tikungan 67 buah dari kebutuhan 250 buah (26,80%), marka jalan 5.561 meter dari kebutuhan 10.000 meter (14,45%), lampu isyarat 50 unit dari kebutuhan 117 unit (42,74%), dan alat Penerangan Jalan Umum (PJU) baru terpasang 6.960 titik dari kebutuhan PJU sebanyak 16.966 titik (41,02%).

3.2.4.4 Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Pengendalian lingkungan hidup merupakan hal mendasar dalam perwujudan pembangunan berkelanjutan. Target pembangunan berkelanjutan perlu diinternalisasikan dalam arahan pembangunan di tingkat daerah. Penurunan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengendalian lingkungan hidup yang berkelanjutan menjadi salah satu isu penting dalam perencanaan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Ciamis. Peningkatan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam serta pengelolaan kebencanaan menjadi isu strategis pembangunan Kabupaten Ciamis.

- **Peningkatan Kualitas, Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Kualitas lingkungan hidup secara sederhana dapat diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah, oleh karena itu kualitas lingkungan menjadi ukuran yang penting. Pada Tahun 2023, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Ciamis sebesar 70,76 (kategori Baik), namun kondisi ini masih lebih rendah dari capaian IKLH Nasional yaitu sebesar 72,42 (kategori Baik). Oleh karena itu, hal ini memerlukan perhatian khusus untuk dijadikan kebijakan jangka panjang.

Beberapa tantangan lain dalam peningkatan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup diantaranya adalah mempertahankan luas lahan konservasi dari tekanan fungsi lahan menjadi terbangun. Kawasan konservasi berperan penting dalam

penyangga pembangunan untuk menjaga ketersediaan air, kualitas udara, kerentanan terhadap bencana, dan ketahanan pangan yang dalam arti luas untuk keberlanjutan kehidupan manusia dan lingkungan.

Sampai saat ini persentase sampah terangkut/terlayani baru mencapai 5,01% sehingga ada sekitar 3.299,54 m³/hari sampah yang belum terlayani oleh sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Ciamis. Hal ini karena ada keterbatasan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaan pelayanan pengelolaan sampah baik itu sumber daya manusia maupun anggaran, kondisi geografis dan cakupan wilayah yang cukup berat sehingga sebagian besar masih mengandalkan pengelolaan berbasis tradisional oleh masyarakat.

- **Optimalisasi Manajemen Penanggulangan Bencana**

Wilayah Kabupaten Ciamis memiliki potensi kebencanaan yang tinggi, yaitu bencana cuaca ekstrim, banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Frekuensi dan intensitas kejadian bencana banyak dipengaruhi oleh kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Upaya dalam rangka mitigasi dan adaptasi terhadap bencana diperlukan untuk meminimalisir potensi kerugian bencana. Tantangan adaptasi dan mitigasi kebencanaan di Kabupaten Ciamis yaitu penurunan kualitas lingkungan hidup, belum optimalnya kapasitas masyarakat dan aparatur pemerintah dalam manajemen kebencanaan, serta masih terbatasnya akses informasi rawan bencana bagi masyarakat.

- **Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)**

Potensi sumber daya alam menjadi modal dasar dalam pembangunan berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya alam berperan dalam menjaga ketahanan pangan, air, dan energi. Dalam aspek pangan, permasalahan yang dihadapi adalah kecenderungan penurunan ketersediaan pangan utama. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan produktivitas pangan.

Selain masalah mengenai ketersediaan pangan, kondisi ketersediaan sumber daya air juga menjadi isu yang perlu diperhatikan. Berdasarkan hasil analisis terhadap daya dukung dan daya tampung air, data sampai dengan Tahun 2023 terdapat 3 kecamatan yaitu Kecamatan Purwadadi, Ciamis, dan Lumbung yang telah melampaui daya dukung air. Kebutuhan air akan semakin meningkat dimasa mendatang karena pertumbuhan beberapa fungsi kawasan, terutama permukiman, industri, dan pertanian. Dengan adanya pengembangan waduk/bendungan diharapkan menjadi salah satu program yang dapat dilakukan untuk meretensi tampungan air permukaan sehingga air permukaan tidak langsung mengalir jatuh dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan daerah.

3.2.4.5 Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan merupakan aspek yang krusial dalam pembangunan daerah karena berkaitan dengan aspek kontrol dan pengawasan terhadap banyak bidang dalam mencapai tujuan pembangunan. Indeks Reformasi Birokrasi dapat memperlihatkan kinerja pemerintah dalam mengupayakan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi.

Dari aspek akuntabilitas dan maturitas pelaksanaan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan juga masih perlu terus ditingkatkan terutama dari aspek tata kelola pemerintahan (*good governance*), tata kelola keuangan, pengelolaan manajemen SDM, dan lain-lain, termasuk peningkatan dan pemanfaatan inovasi daerah baik secara teknologi informasi maupun regulasi, sehingga dapat menyikapi setiap perubahan dinamika dan regulasi yang terus berkembang setiap waktu.

Untuk menggambarkan keterhubungan antara Permasalahan, Isu Penjaringan Aspirasi, Isu Global, Isu Nasional, Isu Strategis Provinsi Jawa Barat dan Isu Strategis Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada tabel berikut i

Tabel 3.1
Keterhubungan antara Permasalahan, Isu Penjaringan Aspirasi, Isu Global, Isu Nasional, Isu Strategis Provinsi Jawa Barat dan Isu Strategis Kabupaten Ciamis

Permasalahan	Isu Penjaringan Aspirasi	Isu Global	Isu Nasional	Isu Strategis Provinsi Jawa Barat	Isu Strategis Kabupaten Ciamis
<ul style="list-style-type: none"> • Pertambahan penduduk berimplikasi terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, alam dan ruang • Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Kerja • Belum optimalnya layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) • Pengembangan potensi kebudayaan belum optimal • Belum optimalnya peran pemuda dalam Pembangunan masyarakat • Belum optimalnya kesetaraan gender • Belum optimalnya pelaksanaan program Keluarga Berencana • Belum optimalnya akses dan pelayanan kesehatan • Belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan • Belum optimalnya pembangunan literasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pendidikan • Peningkatan Kesehatan • Ketenagakerjaan • Peningkatan Kualitas Keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Demografi Global • Perkembangan teknologi • Urbanisasi dunia 	Bonus demografi Indonesia	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Permasalahan	Isu Penjaringan Aspirasi	Isu Global	Isu Nasional	Isu Strategis Provinsi Jawa Barat	Isu Strategis Kabupaten Ciamis
<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya ketimpangan pendapatan • Masih adanya penduduk miskin • Belum optimalnya penerapan teknologi pangan • Belum optimalnya pengembangan dan digitalisasi UMKM • Belum optimalnya pengembangan, pemasaran, dan pengolahan pasca panen perikanan • Masih Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata • Belum optimalnya pengembangan dan pasca panen pertanian • Masih rendahnya daya saing pelaku usaha • Belum optimalnya industri pengolahan dalam pemanfaatan potensi unggulan lokal • Belum optimalnya implementasi kebijakan terkait iklim usaha dan investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Ekonomi • Peningkatan Pertanian • Pengembangan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Geopolitik dan Geoekonomi • Konstelasi perdagangan global • Pertumbuhan Kelas menengah • Persaingan Sumber Daya Alam 	Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	<i>Green</i> dan <i>blue economy</i> serta pembangunan inklusif	Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi

Permasalahan	Isu Penjaringan Aspirasi	Isu Global	Isu Nasional	Isu Strategis Provinsi Jawa Barat	Isu Strategis Kabupaten Ciamis
Belum optimalnya kualitas infrastruktur jalan, drainase, dan irigasi	Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Konektivitas dan Infrastruktur Dasa	<ul style="list-style-type: none"> • Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar • Keberlanjutan Penataan Ruang 	Infrastruktur Wilayah dan Penataan Ruang
<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi topografi di Kabupaten Ciamis yang berbukit menjadikan rawan terjadi gerakan tanah • Belum Optimalnya Pengelolaan Sistem Persampahan • Belum optimalnya akses tempat tinggal dan lingkungan yang layak 		<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan iklim • Luar angkasa 	Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
<ul style="list-style-type: none"> • Belum maksimalnya penyelenggaraan informasi publik • Belum optimalnya pengelolaan administrasi kependudukan • Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi pembangunan • Kapasitas fiskal keuangan daerah di Kabupaten Ciamis masih belum mencukupi untuk mendanai program prioritas daerah • Belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi • Belum optimalnya upaya pelayanan dalam pencegahan dan mitigasi bencana • Belum optimalnya kemandirian desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Kelola Pemerintah • Peningkatan Pemerintahan Desa 	Tata Kelola Keuangan Global	Perpindahan IKN	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan



BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Visi

4.1.1 Visi Indonesia Emas 2045

Cita-cita besar bangsa Indonesia adalah membangun Indonesia Emas 2045 sebagaimana tercermin dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Sasaran, Misi (Agenda), 17 (tujuh belas) arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila. Melalui kerangka pikir ini, Indonesia mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita luhur mewujudkan Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan pada peringatan 100 (seratus) tahun sebagai bangsa yang merdeka di Tahun 2045. Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya. Visi abadi Indonesia diterjemahkan kedalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 sebagai "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan".

Penentuan visi ini berlandaskan pada kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; perkembangan megatren global; dan pencapaian Pembangunan periode sebelumnya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu adalah negara kepulauan yang memiliki ciri nusantara serta memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan besar yang terletak diantara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kekuatan geopolitik Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya dan mengelola wilayah maritimnya secara efektif serta menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara lain di kawasan dan dunia internasional. Negara Indonesia juga memiliki kekuatan di bidang militer di seluruh matra, sehingga mampu melindungi wilayah Nusantara dari ancaman asing, mengamankan jalur pelayaran dan perbatasan, mengontrol perairan strategis dan melaksanakan operasi militer dengan kekuatan besar. Selain itu, Indonesia perlu mampu memanfaatkan sumber daya ekonomi di wilayah maritimnya, serta memperkuat perekonomian domestik dan posisinya dalam perdagangan internasional yang meliputi kemampuan untuk mengembangkan industri dan jasa terutama maritim, meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam serta memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan regional dan dunia internasional. Indonesia dan masyarakatnya mampu mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya baharinya, meliputi nilai-nilai, tradisi, seni, dan budaya bahari yang merupakan aset penting dalam memperkuat identitas budaya dan daya saing bangsa di kawasan regional dan dunia internasional. Pada Tahun 2045, Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya. Lebih lanjut, Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasis pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern,



tangguh, inovatif, dan adil sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional. Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

4.1.2 Visi Jawa Barat 2045

Rumusan mengenai keadaan atau kondisi Provinsi Jawa Barat yang diinginkan pada Tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan dan isu strategis Provinsi Jawa Barat serta penjabaran visi Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan perencanaan jangka panjang nasional 20 (dua puluh) tahun kedepan, Pulau Jawa diarahkan sebagai Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan.

Secara spesifik provinsi Jawa Barat pada tahun 2045 diarahkan sebagai pusat *cutting-edge industry*, inovasi dan pendidikan *Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics* (STEAM) bertaraf global harus mengintegrasikan sistem dan standar kualitas pendidikan internasional dengan keterampilan berpikir kritis, kreatif dan kolaboratif, sehingga mampu menghadapi tantangan masa depan dan mampu bersaing secara global. Sebagai penumpuk ketahanan pangan nasional harus memiliki sistem produksi pertanian, keanekaragaman pangan, keamanan pangan, keamanan lahan dan hak petani, infrastruktur yang maju, kawasan strategis agrikultur, serta kemitraan kolaborasi. Ketiga peran tersebut harus didukung infrastruktur yang berkualitas dan modern, terintegrasi dan handal; sistem pendidikan, kesehatan, dan pertanian yang maju dengan standar kualitas tinggi; serta pemerintahan yang kredibel, adaptif dan inovatif.

Visi Jawa Barat dirumuskan berdasarkan isu strategis Kualitas dan Daya Saing SDM, *Green* dan *Blue Economy* serta Pembangunan Inklusif, Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar serta Kualitas Tata Kelola Pemerintahan menjadi dasar perumusan visi Termaju dan Berdaya Saing Dunia. Isu strategis *Green* dan *Blue Economy* serta Pembangunan Inklusif, Keberlanjutan penataan ruang, Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dalam Pembangunan Serta Kualitas Tata Kelola Pemerintahan menjadi dasar perumusan visi Berkelanjutan.

Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 merupakan keberlanjutan dari visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025: "Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat termaju di Indonesia". Visi Tahun 2005-2025 berorientasi maju lingkup Indonesia, sedangkan visi tahun 2025-2045 akan berorientasi pada tingkat dunia.

Visi Provinsi Jawa Barat 2045 yaitu "Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan berkelanjutan", secara khusus dapat dijelaskan sebagai berikut:

Termaju merupakan kondisi Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2045 berada pada tingkat perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya. Peran sebagai pusat *cutting-edge industry*, Jawa Barat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah lainnya, yang didukung dengan infrastruktur yang berkualitas dan modern serta kawasan sains dan teknologi, memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara optimal untuk menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan keterkaitan UMKM dan industri besar, serta mengurangi ketergantungan impor dan



energi fosil. Peran sebagai penunjang pangan nasional, mampu mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian, ketahanan air, ketahanan pangan, adaptasi perubahan iklim, didukung dengan teknologi yang modern.

Kemajuan Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 termanifestasi pada pendapatan per kapita masyarakat yang tinggi, tingkat kemiskinan rendah, ketimpangan pendapatan masyarakat rendah, serta infrastruktur yang berkualitas dan modern.

Berdaya Saing Dunia merupakan kondisi Jawa Barat pada Tahun 2045 yang memiliki keunggulan kompetitif dalam bidang ekonomi, teknologi dan inovasi, sumber daya manusia, serta infrastruktur dalam jangka panjang, keunggulan kompetitif dalam bidang ekonomi ditunjukkan dengan transaksi perdagangan luar negeri yang tinggi, kualitas dan harga produk bersaing kerja sama luar negeri yang semakin meningkat. Keunggulan kompetitif bidang teknologi dan inovasi ditunjukkan dengan kemampuan untuk menciptakan, mengadopsi, dan mengelola teknologi lebih efisien efektif, dan inovatif, hal ini ditunjukkan dengan indikator Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi yang tinggi.

Keunggulan kompetitif sumber daya manusia ditunjukkan dengan kualitas SDM yang unggul, kritis, kreatif, inovatif, percaya diri, kolaboratif, berbudaya, dan mampu bersaing di tingkat dunia, hal ini ditunjukkan dengan indeks Modal Manusia yang tinggi.

Keunggulan kompetitif bidang infrastruktur ditunjukkan dengan prasarana transportasi, energi, dan ketenagalistrikan, sumber daya air, telekomunikasi yang modern, dan terintegrasi, hal ini ditunjukkan dengan indikator indeks Kualitas Infrastruktur yang tinggi.

Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2045 telah mewujudkan pembangunan **berkelanjutan**, yang dicirikan dengan adanya kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik, untuk berkelanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik, termanifestasi dengan penerapan perilaku ramah lingkungan seluruh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, perwujudan lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, pembangunan dan pengembangan infrastruktur hijau, pengelolaan limbah dan daur ulang sebagai prioritas untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas polusi (udara, air, suara, dan sampah), merupakan praktik pertanian organik, dan memanfaatkan energi terbarukan, serta menjaga keberlangsungan fungsi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya.

Keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang dimanifestasikan dengan pembangunan ekonomi hijau dan biru, pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi hijau dan biru dilaksanakan dengan tetap menjaga kelenturan ekonomi sistem (menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup), dan mewujudkan ekonomi yang inklusif secara produktif ditunjukkan dengan Indeks Ekonomi Hijau dan Biru yang tinggi, serta menurunnya emisi gas rumah kaca. Keberlanjutan kesejahteraan masyarakat dimanifestasikan dengan kondisi masyarakat yang memiliki akses terhadap seluruh aspek layanan sosial ekonomi yang sangat baik serta memiliki tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kualitas kehidupan yang tinggi.

4.1.3 Visi Ciamis 2025-2045

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045 merupakan pernyataan cita-cita selama 20 (dua puluh) tahun kedepan yang akan dicapai di Tahun 2045. Visi Kabupaten Ciamis dirumuskan berdasarkan kecenderungan kondisi yang ada hingga saat ini, pertimbangan akan proyeksi potensi, peluang, ancaman, hambatan, dan keberhasilan dari setiap sektor hingga Tahun 2045, serta memperhatikan berbagai keinginan dan aspirasi dari stakeholder dan pemerintah daerah.



Berbagai sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Ciamis sampai dengan Tahun 2045 difokuskan untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045, adalah:

“CIAMIS NANJEUR 2045”

KABUPATEN CIAMIS RELIGIUS, MAJU, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN

Pernyataan visi Kabupaten Ciamis 2025-2045 memiliki makna sebagai berikut:

- Ciamis Nanjeur** : “Nanjeur” merupakan kata dalam bahasa Sunda yang berarti membubung naik ke atas. Dengan harapan Kabupaten Ciamis terus melesat mengalami peningkatan dalam pembangunan yang berbasis pertanian, pariwisata, dan industri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis.
- Religius** : Setiap sikap dan perilaku yang didasari oleh ketaatan terhadap nilai-nilai agama yang tercermin dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Ciamis dengan berlandaskan keadilan, kejujuran, kebermanfaatn bagi orang lain, disiplin tinggi, keseimbangan, dan rendah hati.
- Maju** : Kabupaten Ciamis terus bergerak maju untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga menjadi lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya dan kesetaraan dengan daerah lain, serta menjadi daerah yang modern dan inovatif.
- Tangguh** : Kabupaten Ciamis mampu untuk bertahan dan melewati tantangan serta krisis baik dari segi ekonomi dan sosial dengan kekuatan, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki baik dari aspek pendidikan dan kesehatan. Selain itu, Kabupaten Ciamis memiliki daya tahan, adaptabilitas, dan kemampuan untuk mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan.
- Berkelanjutan** : Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Ciamis dilakukan secara terencana dan terukur dalam rangka menjaga keberlanjutan sumber daya alam, kualitas lingkungan hidup, dan tata kelola yang baik. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan tidak merusak dan mengorbankan faktor alam, lingkungan, dan faktor lainnya pada masa yang akan datang. Keberlanjutan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga keharmonisan sosial dan kesejahteraan bersama.

Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045 merupakan visi yang sinergis dengan visi pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Tabel 4.1

Keselarasan Visi RPJP Nasional, Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat dan Visi RPJPD Kabupaten Ciamis

Visi RPJP Nasional	Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat	Visi RPJPD Kabupaten Ciamis
<p>Indonesia Emas Tahun 2045 Cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045</p>		<p>Ciamis Nanjeur Tahun 2045 “Nanjeur” merupakan kata dalam bahasa Sunda yang berarti membubung naik ke atas. Dengan harapan Kabupaten Ciamis terus melesat mengalami peningkatan dalam pembangunan yang berbasis pertanian, pariwisata, dan industri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis.</p>



Visi RPJP Nasional	Visi RPJP Provinsi Jawa Barat	Visi RPJP Kabupaten Ciamis
<p>Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu Negara kepulauan yang memiliki ciri nusantara serta memiliki ketangguhan politik, ekonomi keamanan nasional dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia.</p>		<p>Religius Setiap sikap dan perilaku yang didasari oleh ketaatan terhadap nilai-nilai agama yang tercermin dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Ciamis dengan berlandaskan keadilan, kejujuran, kebermanfaatn bagi orang lain, disiplin tinggi, keseimbangan, dan rendah hati.</p>
<p>Berdaulat Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayahnya.</p>	<p>Berdaya Saing Dunia Memiliki keunggulan kompetitif dalam bidang ekonomi, teknologi dan inovasi, Sumber Daya Manusia, serta infrastruktur dalam jangka panjang.</p>	<p>Tangguh Kabupaten Ciamis mampu untuk bertahan dan melewati tantangan serta krisis baik dari segi ekonomi dan sosial dengan kekuatan, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki baik dari aspek pendidikan dan kesehatan. Selain itu, Kabupaten Ciamis memiliki daya tahan, adaptabilitas, dan kemampuan untuk mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan</p>
<p>Maju Indonesia sebagai negara maju, ekonominya mencapai posisi nomor lima terbesar di dunia, berbasis pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil.</p>	<p>Termaju Tingkat perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya</p>	<p>Maju Kabupaten Ciamis terus bergerak maju untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga menjadi lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya dan kesetaraan dengan daerah lain, serta menjadi daerah yang modern dan inovatif.</p>
<p>Berkelanjutan Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik</p>	<p>Berkelanjutan Kelestarian Sumber Daya Alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik untuk berkelanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang</p>	<p>Berkelanjutan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Ciamis dilakukan secara terencana dan terukur dalam rangka menjaga keberlanjutan sumber daya alam, kualitas lingkungan hidup, dan tata kelola yang baik. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan tidak merusak dan mengorbankan faktor alam, lingkungan, dan faktor lainnya pada masa yang akan datang. Keberlanjutan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga keharmonisan sosial dan kesejahteraan bersama.</p>

Visi diatas akan berhasil dicapai melalui kepemimpinan yang visioner, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Ketercapaian Visi Ciamis Nanjeur 2045 (Kabupaten Ciamis Religius, Maju, Tangguh dan Berkelanjutan), ditunjukkan dengan lima sasaran visi yaitu:

1. Peningkatan Pendapatan per Kapita;
2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan;
3. Kualitas Kepemimpinan Daerah Meningkatkan;
4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
5. Penurunan emisi GRK menuju net zero emission.



Tabel 4.2
Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Ciamis dengan Provinsi Jawa Barat dan RPJPN Tahun 2025-2045

RPJPN 2025-2045				RPJPD PROVINSI JAWA BARAT 2025-2045				RPJPD KABUPATEN CIAMIS 2025-2045			
Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Pendapatan per kapita setara negara maju	a. GNI Per Kapita (US\$)	5.500	30.300	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	57,41 - 57,77	273,17 - 325,25	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	34,24-34,6	66,56-118,64
	b. Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	48,19	186,06		b. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	7,46	7,72
	c. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28		c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	41,87 – 42,00	46,43 – 47,60				
Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 7,0	0,5 - 0,8	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5,85 - 6,46	0,09 - 0,34	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan	6,5-7,18	0,1-0,66
	b. Rasio Gini (indeks)	0,379 - 0,382	0,377 - 0,320		b. Rasio gini (Indeks)	0,383 – 0,390	0,357 – 0,380		b. Rasio Gini (Indeks)	0,334-0,341	0,309-0,332
	c. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5		c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	12,72	10,77		c. Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%)	1,50	1,41
Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	<i>Global Power Index</i> (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Kerjasama daerah dengan dunia internasional meningkat	Indeks Daya Saing Daerah (Poin)	3,87	5	Kualitas Kepemimpinan daerah meningkat	Indeks Daya Saing Daerah (Poin)	3,55	3,76
Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,54 (2022)	0,73	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,55	0,72	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	73,73	83,34
Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	6,61	75,84	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton Co2eq/ Milyar)	5,46	11,86
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,68	74,15		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	64,06	72,08		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	69,64	71,50



4.2. Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

4.2.1 Misi (Agenda) Pembangunan Nasional 2045

Delapan misi (agenda) Pembangunan 2045 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Mewujudkan transformasi sosial** untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. **Mewujudkan transformasi ekonomi** untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
3. **Mewujudkan transformasi tata kelola** untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. **Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia** dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. **Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi** dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. **Pembangunan kewilayahan** diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
7. **Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan** menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. **Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas** yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

4.2.2 Misi Pembangunan Jawa Barat 2045

Misi Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan sebagai berikut:



1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing sangat penting bagi Provinsi Jawa Barat. Hal ini didukung dengan fakta bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Pengembangan ini untuk membentuk masyarakat Provinsi Jawa Barat yang memiliki karakter, moralitas, etika yang baik, pemahaman yang luas terhadap nilai-nilai budaya, menghormati perbedaan, dan mampu berinteraksi secara efektif dalam konteks budaya, memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang relevan serta mutakhir. Upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia tersebut diantaranya melalui perbaikan kualitas kesehatan, penyediaan pendidikan yang berkualitas, dan pelatihan tenaga kerja. Diharapkan, masyarakat Provinsi Jawa Barat tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga memiliki nilai-nilai etika dan moral yang positif.

2. Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif

Transformasi ekonomi yang kokoh dan inklusif dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat, tetapi juga memperhatikan dan mendukung kepentingan seluruh masyarakat, termasuk yang kurang beruntung. Transformasi ini dilakukan melalui perubahan struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan yang memiliki nilai tambah tinggi serta menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dapat dilakukan dengan penguatan produktivitas daerah melalui investasi infrastruktur dasar, adopsi teknologi baru dan mendorong inovasi, penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini melibatkan dukungan bagi penelitian dan pengembangan serta integrasi teknologi dalam proses produksi. Penguatan produktivitas daerah dapat pula mencakup diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor yang rentan terhadap fluktuasi, peningkatan kerjasama dan kolaborasi dengan sektor swasta, dan mendorong kewirausahaan lokal.

3. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Berkualitas dan Inovatif

Tata kelola pemerintahan yang dinamis, berkualitas dan inovatif mengandung arti bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat harus melakukan reorientasi identitas pemerintah dengan mengubah kebiasaan lama dan menambah pernyataan nilai (*value statement*) serta manajemen pengetahuan (*knowledge management*) dalam tata kelola. *Value statement* dalam pemerintahan adalah menjelaskan prioritas dan mengungkapkan standar dan prinsip yang dimiliki pemerintah dalam memberikan pelayanan. *Knowledge management* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diharapkan memiliki kemampuan untuk berubah dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat terus berinovasi dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut.

4. Mewujudkan Provinsi yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat dipercaya oleh masyarakat, warga negara, dan pemangku kepentingan lainnya, menjalankan kebijakannya dengan transparan, akuntabel, jujur dan berintegritas, serta mematuhi standar etika tinggi dan



bertindak sesuai dengan hukum dan norma-norma yang berlaku untuk terjaganya stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan demikian, kemampuan untuk merespon tantangan dan memanfaatkan peluang baru, serta menerapkan kebijakan dan praktik yang dilakukannya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Dalam menghadapi dinamika yang kompleks dalam masyarakat modern, pemerintahan harus dapat dipercaya, dinamis, responsif, dan mampu beradaptasi dengan cepat, tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat dan investor, tetapi juga meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang cerdas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan jangka panjang.

5. Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan

Mewujudkan masyarakat madani, berbudaya, maju, dan peduli lingkungan merupakan suatu upaya untuk membentuk masyarakat yang tidak hanya memiliki kesejahteraan material, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, keberagaman budaya, kemajuan, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan pendidikan yang berkualitas, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia agar masyarakat Jawa Barat tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga memiliki nilai-nilai etika dan moral yang positif. Selain itu, kepedulian lingkungan ditunjukkan dengan menjaga keseimbangan ekosistem alam; memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam; mengurangi dan mencegah pencemaran lingkungan dan emisi gas rumah kaca serta dampak perubahan iklim; pengelolaan air yang efisien; pelestarian hutan, laut, pesisir, dan lahan basah; serta penggunaan energi baru terbarukan. Penerapan sirkuler ekonomi dalam pengelolaan limbah perlu ditingkatkan untuk meminimalkan dampak sampah terhadap lingkungan. Penanaman pohon, restorasi habitat, dan perlindungan keanekaragaman hayati menjadi fokus untuk memperkuat ekosistem alam dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

6. Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Inklusif

Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif adalah suatu upaya untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat di beberapa wilayah saja, tetapi juga merata di seluruh wilayah dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang, mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur. Infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif menjadi salah satu kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur wilayah yang berkualitas juga menjadi investasi masa depan yang penting bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah yang mencakup jalan, sumber daya air dan irigasi, transportasi.

7. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas

Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas merupakan investasi masa depan yang penting bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat. Pengembangan ini juga diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan, menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan. Upaya untuk membangun infrastruktur pelayanan dasar mencakup perumahan, air minum, sanitasi, persampahan, energi, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi secara terpadu.



Pemerataan infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat Provinsi Jawa Barat mendapatkan manfaat dari seluruh pembangunan secara adil tidak terkecuali masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau penduduk miskin. Karena itu, pengembangan ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai dan berkualitas terhadap layanan dasar yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari.

8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen untuk menciptakan suatu sistem yang menggabungkan pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan alam, pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, serta tata ruang yang efisien. Hal ini melibatkan serangkaian langkah dan kebijakan yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan dan memastikan penggunaan sumber daya alam yang bijaksana. Perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan juga memperhatikan tata ruang yang efisien, yang berarti bahwa perencanaan penggunaan lahan dan infrastruktur dilakukan dengan cermat. Perencanaan pembangunan yang terarah dapat mengurangi kepadatan populasi dan meminimalkan konversi lahan produktif menjadi lahan non-pertanian. Ini melibatkan identifikasi zona-zona yang sesuai untuk pertanian, pemukiman, dan kawasan industri. Pengembangan perkotaan yang terencana dengan baik juga menjadi bagian dari tata ruang efisien, dengan fokus pada penciptaan *Transit Oriented Development* (TOD) berbasis transportasi massal, sehingga mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan serta emisi karbon.

4.2.3 Misi Pembangunan Kabupaten Ciamis

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045, yaitu:

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Mengembangkan sumber daya manusia yang berakhlak dan berdaya saing sangat penting bagi Kabupaten Ciamis. Hal ini didukung dengan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata, kesehatan yang berkualitas untuk semua, pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga yang berkualitas dan perlindungan sosial yang adaptif. Pengembangan ini untuk membentuk masyarakat Kabupaten Ciamis yang memiliki karakter, moralitas, etika yang baik, pemahaman yang luas terhadap nilai-nilai budaya, menghormati perbedaan, dan mampu berinteraksi secara efektif dalam konteks budaya, memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang relevan serta mutakhir. Upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia tersebut diantaranya melalui perbaikan kualitas kesehatan, penyediaan pendidikan yang berkualitas, pengentasan kemiskinan, dan pelatihan tenaga kerja. Diharapkan, masyarakat Kabupaten Ciamis tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga memiliki nilai-nilai etika dan moral yang positif.

**Misi 2 : Mewujudkan Ekonomi yang Inklusif dan Berkualitas**

Transformasi ekonomi yang kokoh dan inklusif dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat, tetapi juga memperhatikan dan mendukung kepentingan seluruh masyarakat, termasuk yang kurang beruntung. Transformasi ini dilakukan melalui perubahan struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan yang memiliki nilai tambah tinggi serta menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dapat dilakukan dengan penguatan produktivitas daerah melalui investasi infrastruktur dasar, adopsi teknologi baru dan mendorong inovasi, ketahanan dan kemandirian pangan, penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini melibatkan dukungan bagi penelitian dan pengembangan serta integrasi teknologi dalam proses produksi. Penguatan produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah yang mencakup diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor yang rentan terhadap fluktuasi, peningkatan kerjasama dan kolaborasi dengan sektor swasta, dan mendorong kewirausahaan lokal.

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif

Tata kelola pemerintahan yang dinamis, berkualitas dan inovatif mengandung arti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis harus melakukan reorientasi identitas pemerintah dengan mengubah kebiasaan lama dan menambah pernyataan nilai (*value statement*) serta manajemen pengetahuan (*knowledge management*) dalam tata kelola. *Value statement* dalam pemerintahan adalah menjelaskan prioritas dan mengungkapkan standar dan prinsip yang dimiliki pemerintah dalam memberikan pelayanan. *Knowledge management* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis diharapkan memiliki kemampuan untuk berubah dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat terus berinovasi dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut.

Misi 4 : Mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas dan Stabilitas Ekonomi

Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis diharapkan dapat dipercaya oleh masyarakat, warga negara, dan pemangku kepentingan lainnya, menjalankan kebijakannya dengan transparan, akuntabel, jujur dan berintegritas, serta mematuhi standar etika tinggi dan bertindak sesuai dengan hukum dan norma-norma yang berlaku untuk terjaganya stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan demikian, kemampuan untuk merespon tantangan dan memanfaatkan peluang baru, serta menerapkan kebijakan dan praktik yang dilakukannya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Dalam menghadapi dinamika yang kompleks dalam masyarakat modern, pemerintahan harus dapat dipercaya, dinamis, responsif, dan mampu beradaptasi dengan cepat, tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat dan investor, tetapi juga meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang cerdas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan jangka panjang.



Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Madani, Budaya Lestari dan Lingkungan yang Berkelanjutan

Mewujudkan masyarakat madani, berbudaya, maju, dan peduli lingkungan merupakan suatu upaya untuk membentuk masyarakat yang tidak hanya memiliki kesejahteraan material, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, keberagaman budaya, kemajuan, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan pendidikan yang berkualitas, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia agar masyarakat Ciamis tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga memiliki nilai-nilai etika dan moral yang positif. Selain itu, kepedulian lingkungan ditunjukkan dengan menjaga keseimbangan ekosistem alam; memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam; mengurangi dan mencegah pencemaran lingkungan serta dampak perubahan iklim; pengelolaan air yang efisien; pelestarian hutan, dan lahan basah; serta penggunaan energi baru terbarukan. Penerapan sirkular ekonomi dalam pengelolaan limbah perlu ditingkatkan untuk meminimalkan dampak sampah terhadap lingkungan. Penanaman pohon, restorasi habitat, dan perlindungan keanekaragaman hayati menjadi fokus untuk memperkuat ekosistem alam dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

Misi 6 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah yang merata dan inklusif

Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif adalah suatu upaya untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat di beberapa wilayah saja, tetapi juga merata di seluruh wilayah dengan memperhatikan keberagaman dan kebutuhan masyarakat.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang, mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur. Infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif menjadi salah satu kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur wilayah yang berkualitas juga menjadi investasi masa depan yang penting bagi masyarakat Kabupaten Ciamis. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah yang mencakup jalan, sumber daya air dan irigasi, transportasi.

Misi 7 : Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar

Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas merupakan investasi masa depan yang penting bagi masyarakat Kabupaten Ciamis. Pengembangan ini juga diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan, menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan. Upaya untuk membangun infrastruktur pelayanan dasar mencakup perumahan, air minum, sanitasi, persampahan, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi secara terpadu.

Pemerataan infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat Kabupaten Ciamis mendapatkan manfaat dari seluruh pembangunan secara adil tidak terkecuali masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau penduduk miskin. Karena itu, pengembangan ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai dan berkualitas terhadap layanan dasar yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari.

**Misi 8 : Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan**

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen untuk menciptakan suatu sistem yang menggabungkan pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan alam dan berketahanan iklim, serta tata ruang yang efisien. Hal ini melibatkan serangkaian langkah dan kebijakan yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan dan memastikan penggunaan sumber daya alam yang bijaksana. Perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan juga memperhatikan tata ruang yang efisien, yang berarti bahwa perencanaan penggunaan lahan dan infrastruktur dilakukan dengan cermat. Perencanaan pembangunan yang terarah dapat mengurai kepadatan populasi dan meminimalkan konversi lahan produktif menjadi lahan non-pertanian. Ini melibatkan identifikasi zona-zona yang sesuai untuk pertanian, pemukiman, dan kawasan industri.

Tabel 4.3
Sinkronisasi Misi RPJP Nasional, Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat
dan Misi RPJPD Kabupaten Ciamis

Misi RPJP Nasional	Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat	Misi RPJPD Kabupaten Ciamis
1. Transformasi Sosial	Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Dan Berdaya	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Perekonomian Yang Kokoh dan Inklusif	Mewujudkan Ekonomi yang Inklusif dan Berkualitas
3. Transformasi Tata Kelola	Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan yang dinamis, berkualitas dan inovatif	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Provinsi yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi	Mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas dan Stabilitas Ekonomi
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli lingkungan	Mewujudkan Masyarakat Madani, Budaya Lestari dan Lingkungan yang Berkelanjutan
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Inklusif	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah yang merata dan inklusif
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar
8. Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan	Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan



BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 Arah Kebijakan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan arah kebijakan dan sasaran pokok serta indikator target yang hendak dicapai untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD, sedangkan sasaran pokok merupakan kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh).

Dalam rangka pencapaian visi jangka panjang daerah dirumuskan arah kebijakan yang ditempuh melalui empat tahapan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Adapun Tema Pembangunan per tahapan pada RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045 adalah sebagaimana gambar berikut:

Gambar 5.1

Tema Pembangunan Per Tahapan Pada RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045



Secara rinci hasil rumusan arah kebijakan per tahapan berdasarkan visi dan misi adalah sebagaimana tabel berikut:



Tabel 5.1
Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Ciamis
Tahun 2025-2045

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN CIAMIS			
		I	II	III	IV
		PENGUATAN MODAL DASAR PEMBANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENGUATAN INOVASI DAN DAYA SAING DAERAH	KEBERLANJUTAN DAN PERLUASAN DAYA SAING DAERAH	PERWUJUDAN KABUPATEN CIAMIS RELIGIUS, MAJU, TANGGUH BERKELANJUTAN
"Ciamis Nanjeur 2045" Kabupaten Ciamis Religius, Maju, Tangguh dan Berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Pemantapan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Perwujudan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
		Pemberian bantuan pendidikan khususnya bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	Pemerataan Pemberian bantuan pendidikan khususnya bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	Peningkatan pemerataan bantuan pendidikan khususnya bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	
		Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana.	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Penguatan akses pelayanan pendidikan anak usia dini dan dasar secara merata.	



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN CIAMIS			
		I	II	III	IV
		PENGUATAN MODAL DASAR PEMBANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENGUATAN INOVASI DAN DAYA SAING DAERAH	KEBERLANJUTAN DAN PERLUASAN DAYA SAING DAERAH	PERWUJUDAN KABUPATEN CIAMIS RELIGIUS, MAJU, TANGGUH BERKELANJUTAN
		<p>Penyiapan dan peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).</p>	<p>Akselerasi penerapan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).</p>	<p>Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).</p>	<p>Perwujudan anak usia dini yang bertalenta dan berkarakter, memahami literasi digital, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).</p>
			<p>Pengembangan bakat dan peningkatan prestasi peserta didik.</p>	<p>Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.</p>	
		<p>Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan.</p>	<p>Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan.</p>	<p>Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.</p>	<p>Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.</p>
				<p>Penguatan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan.</p>	
		<p>Penyediaan infrastruktur layanan pendidikan berbasis digital dan TIK.</p>	<p>Pemerataan infrastruktur layanan pendidikan berbasis digital dan TIK.</p>	<p>Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK di wilayah perbatasan</p>	<p>Perwujudan layanan pendidikan berbasis digital dan TIK.</p>



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN CIAMIS			
		I	II	III	IV
		PENGUATAN MODAL DASAR PEMBANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENGUATAN INOVASI DAN DAYA SAING DAERAH	KEBERLANJUTAN DAN PERLUASAN DAYA SAING DAERAH	PERWUJUDAN KABUPATEN CIAMIS RELIGIUS, MAJU, TANGGUH BERKELANJUTAN
		Peningkatan sekolah berbasis keagamaan	Penguatan sekolah berbasis keagamaan dan pengembangan sekolah berbasis asrama	Pemantapan Pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung pelayanan pendidikan yang berkualitas	Perwujudan pendidikan keagamaan yang berkualitas
		Peningkatan akses pendidikan nonformal	Akselerasi pendidikan vokasi bersertifikasi, peningkatan literasi dan edukasi, serta pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat ke bekerjaan tinggi dan terintegrasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal, dalam percepatan peningkatan kualifikasi angkatan kerja.	Perwujudan pendidikan nonformal yang berkualitas
		Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan.	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya dan agama	Percepatan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya dan agama	Pemantapan pemberdayaan dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya dan agama	Perwujudan Keluarga Sehat dan Tangguh Terhadap Penyakit.



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN CIAMIS			
		I	II	III	IV
		PENGUATAN MODAL DASAR PEMBANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENGUATAN INOVASI DAN DAYA SAING DAERAH	KEBERLANJUTAN DAN PERLUASAN DAYA SAING DAERAH	PERWUJUDAN KABUPATEN CIAMIS RELIGIUS, MAJU, TANGGUH BERKELANJUTAN
		Pelaksanaan eliminasi penyakit menular dan tidak menular.	Percepatan eliminasi penyakit menular dan tidak menular.	Pemantapan eliminasi penyakit menular dan tidak menular.	
		Peningkatan kesejahteraan, kompetensi dan pemerataan tenaga kesehatan.	Percepatan kesejahteraan, kompetensi dan pemerataan tenaga kesehatan.	Pemerataan kesejahteraan, kompetensi dan pemerataan tenaga kesehatan.	Perwujudan tenaga kesehatan yang sejahtera, merata, dan kompeten.
		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung pelayanan kesehatan	Percepatan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung pelayanan kesehatan	Pemantapan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung pelayanan kesehatan	Perwujudan kesadaran masyarakat lokal dalam mendukung pelayanan kesehatan
		Pencegahan dan Percepatan penuntasan stunting	Peningkatan Pencegahan dan Percepatan penuntasan stunting	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat	Perwujudan Keluarga Sadar Gizi dan Kesehatan Prima.
		Peningkatan kualitas sumber daya manusia usia produktif, terutama bagi masyarakat umum melalui berbagai pelatihan keahlian.	Pemantapan Peningkatan kualitas sumber daya manusia usia produktif, terutama bagi masyarakat umum melalui berbagai pelatihan keahlian.	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan.	Perwujudan pembangunan tanpa kemiskinan.
		Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	Pemerataan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.		



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN CIAMIS			
		I	II	III	IV
		PENGUATAN MODAL DASAR PEMBANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENGUATAN INOVASI DAN DAYA SAING DAERAH	KEBERLANJUTAN DAN PERLUASAN DAYA SAING DAERAH	PERWUJUDAN KABUPATEN CIAMIS RELIGIUS, MAJU, TANGGUH BERKELANJUTAN
		<p>Penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan.</p>	<p>Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan.</p>		
		<p>Pemenuhan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan.</p>	<p>Percepatan pemenuhan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan.</p>	<p>Perluasan pemenuhan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan.</p>	<p>Perwujudan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan.</p>
		<p>Pemicuan kepada masyarakat dalam pemenuhan sarana dan prasarana dalam penanganan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga.</p>	<p>Pelaksanaan eliminasi perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.</p>	<p>Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.</p>	<p>Perwujudan lingkungan yang sehat untuk mendukung derajat kesehatan masyarakat.</p>



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN CIAMIS			
		I	II	III	IV
		PENGUATAN MODAL DASAR PEMBANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENGUATAN INOVASI DAN DAYA SAING DAERAH	KEBERLANJUTAN DAN PERLUASAN DAYA SAING DAERAH	PERWUJUDAN KABUPATEN CIAMIS RELIGIUS, MAJU, TANGGUH BERKELANJUTAN
		Penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Percepatan penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Peningkatan kualitas infrastruktur air minum dan sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	
		Penyediaan rumah layak huni dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Percepatan penyediaan rumah layak huni dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Pemenuhan penyediaan rumah layak huni dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Perwujudan rumah layak huni dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Mewujudkan Ekonomi yang Inklusif dan Berkualitas		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan.	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani dan pembudi daya ikan guna meningkatkan produktivitasnya.	Pengembangan inovasi pertanian dan perikanan dalam meningkatkan produktivitasnya .	Perwujudan pertanian dan perikanan yang inklusif dan berkualitas serta adaptif terhadap teknologi serta perubahan iklim.
		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan			
		Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Percepatan pengembangan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Perluasan pemanfaatan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Perwujudan peningkatan hasil pertanian dan perikanan.



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN CIAMIS			
		I	II	III	IV
		PENGUATAN MODAL DASAR PEMBANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENGUATAN INOVASI DAN DAYA SAING DAERAH	KEBERLANJUTAN DAN PERLUASAN DAYA SAING DAERAH	PERWUJUDAN KABUPATEN CIAMIS RELIGIUS, MAJU, TANGGUH BERKELANJUTAN
		Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian dan perikanan unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor.	Percepatan dalam penyediaan sentra pembibitan dan varietas unggul untuk komoditas pertanian dan perikanan unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor	Pemantapan komoditas pertanian dan perikanan unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor.	Perwujudan produk pertanian dan perikanan yang berdaya saing global.
		Pembinaan kapasitas dan akses informasi bagi petani dan pembudi daya ikan guna meningkatkan produktivitasnya.	Percepatan pembinaan kapasitas dan akses informasi bagi petani dan pembudi daya ikan guna meningkatkan produktivitasnya		
		Penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan bagi para pelaku usaha serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi.	Pengembangan kemitraan dan pembiayaan para pelaku usaha, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi.	Perluasan akses pembiayaan dan digitalisasi usaha pertanian dan perikanan	Perwujudan kemudahan akses pembiayaan dan digitalisasi bagi pelaku usaha pertanian dan perikanan.
		Pembangunan industri pengolahan yang ramah lingkungan berbasis potensi keunggulan wilayah	Percepatan pembangunan industri pengolahan yang ramah lingkungan berbasis potensi keunggulan wilayah	Pengembangan pembangunan industri pengolahan yang ramah lingkungan berbasis potensi keunggulan wilayah	Perwujudan industri pengolahan yang ramah lingkungan berbasis potensi keunggulan wilayah
		Penyiapan dan pemetaan kualitas SDM, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling	Peningkatan akses terhadap kesempatan kerja dan pendidikan tenaga kerja bersertifikat	Pemantapan kualitas dan daya saing tenaga kerja bersertifikat	Perwujudan tenaga kerja berkualitas dan berdaya saing



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN CIAMIS			
		I	II	III	IV
		PENGUATAN MODAL DASAR PEMBANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENGUATAN INOVASI DAN DAYA SAING DAERAH	KEBERLANJUTAN DAN PERLUASAN DAYA SAING DAERAH	PERWUJUDAN KABUPATEN CIAMIS RELIGIUS, MAJU, TANGGUH BERKELANJUTAN
		Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam maupun wisata kultural secara kolaboratif dan partisipatif.	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik.	Pemantapan daya saing kawasan strategis pariwisata berkelanjutan.	Perwujudan kawasan strategis pariwisata berkelanjutan.
			Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha		
		Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	Pengembangan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	Pemantapan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	Perwujudan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
			Penataan ekosistem ekonomi hijau dan biru.	Penguatan ekosistem ekonomi hijau dan biru.	Penguatan ekosistem ekonomi hijau dan biru
		Pengembangan dan penguatan kapasitas dan kelembagaan koperasi.	Percepatan pengembangan dan penguatan kapasitas dan kelembagaan koperasi.	Pemantapan dan penguatan kapasitas dan kelembagaan koperasi.	Perwujudan koperasi yang berkualitas dan berdaya saing.
		Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis potensi unggulan lokal	Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis potensi unggulan lokal	Pemantapan usaha mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis potensi unggulan lokal	Perwujudan usaha mikro, kecil, dan menengah yang inklusif berbasis potensi unggulan lokal dan menjadi bagian dari rantai nilai perekonomian
		Pengembangan proses bisnis UMKM melalui perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi dan kreasi	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik.	Peningkatan dan pemantapan rantai nilai domestik melalui skema-skema kerja sama regional.	
		Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha	Akselerasi investasi, diversifikasi sektor dan pemerataan lokasi investasi	Akselerasi investasi, diversifikasi sektor dan pemerataan lokasi investasi	Perwujudan pemerataan investasi



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN CIAMIS			
		I	II	III	IV
		PENGUATAN MODAL DASAR PEMBANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENGUATAN INOVASI DAN DAYA SAING DAERAH	KEBERLANJUTAN DAN PERLUASAN DAYA SAING DAERAH	PERWUJUDAN KABUPATEN CIAMIS RELIGIUS, MAJU, TANGGUH BERKELANJUTAN
		Penataan dan restrukturisasi BUMD.	Peningkatan produktivitas BUMD.	Pengembangan bisnis BUMD berbasis unggulan lokal	Optimalisasi BUMD berbasis unggulan lokal.
		Penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor pertanian	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor pertanian	Pemantapan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor pertanian	Perwujudan infrastruktur untuk mendukung kawasan strategis pertanian yang berbasis potensi sumber daya alam dan sektor unggulan
		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan strategis lainnya.	Percepatan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan strategis lainnya.	Penguatan infrastruktur di kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan strategis lainnya.	Perwujudan infrastruktur permukiman yang tertata untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien dan berdaya saing
		Penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan strategis lainnya.	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan strategis lainnya.		
		Penyediaan sistem sanitasi terpadu menuju <i>zero waste</i> dan mendukung ekonomi sirkular pada kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan strategis lainnya.	Pengembangan sistem sanitasi terpadu menuju <i>zero waste</i> dan mendukung ekonomi sirkular pada kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan strategis lainnya.		
		Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan infrastruktur berbasis lingkungan pada kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan strategis lainnya.	Percepatan peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan infrastruktur berbasis lingkungan pada kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan strategis lainnya.		



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN CIAMIS			
		I	II	III	IV
		PENGUATAN MODAL DASAR PEMBANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENGUATAN INOVASI DAN DAYA SAING DAERAH	KEBERLANJUTAN DAN PERLUASAN DAYA SAING DAERAH	PERWUJUDAN KABUPATEN CIAMIS RELIGIUS, MAJU, TANGGUH BERKELANJUTAN
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif	Pembangunan sarana dan prasarana layanan pemerintahan berbasis digital melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.	Pemantapan dan pemerataan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.	Perwujudan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan berbasis digital	
	Penerapan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.			
	Penataan kelembagaan, penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi.	Percepatan penataan kelembagaan, penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi.	Pemanfaatan penataan kelembagaan, penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi.		Perwujudan <i>zero corruption</i> .
	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi.	Pemantapan tata kelola pemerintah daerah dan manajemen kualitas ASN.		Perwujudan ASN yang berdaya saing global untuk mendukung Indonesia Emas 2045



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN CIAMIS			
		I	II	III	IV
		PENGUATAN MODAL DASAR PEMBANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENGUATAN INOVASI DAN DAYA SAING DAERAH	KEBERLANJUTAN DAN PERLUASAN DAYA SAING DAERAH	PERWUJUDAN KABUPATEN CIAMIS RELIGIUS, MAJU, TANGGUH BERKELANJUTAN
		Peningkatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah.	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah.	Perwujudan kerjasama antar wilayah.
		Penataan regulasi berdasarkan riset dan inovasi daerah	Peningkatan kualitas regulasi berdasarkan riset dan inovasi daerah.	Pemantapan kualitas regulasi berdasarkan riset dan inovasi daerah.	Pemantapan kualitas regulasi daerah berbasis teknologi informasi.
Mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas dan Stabilitas Ekonomi		Peningkatan penegakan hukum melalui sosialisasi keamanan dan ketertiban kepada masyarakat	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	Pemantapan penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	Perwujudan keamanan dan ketertiban.
		Peningkatan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah Kabupaten Ciamis dengan prioritas nasional dan Provinsi Jawa Barat.	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional dan Provinsi Jawa Barat.	Penerapan akuntabilitas kinerja pemerintahan Kabupaten Ciamis yang bersinergi dengan dengan prioritas nasional dan Provinsi Jawa Barat.	Perwujudan Sinergitas akuntabilitas kinerja pemerintahan.
		Dukungan terhadap penyediaan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan.	Dukungan terhadap penyediaan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan.	Dukungan terhadap penyediaan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan.	Dukungan terhadap penyediaan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan.
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	Pemantapan partisipasi masyarakat dalam berbudaya politik yang kondusif untuk menciptakan kesatuan bangsa, serta penguatan integritas partai politik.	Perwujudan masyarakat yang Inklusif dalam kehidupan demokrasi yang sehat
			Penguatan integritas partai politik		



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN CIAMIS			
		I	II	III	IV
		PENGUATAN MODAL DASAR PEMBANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENGUATAN INOVASI DAN DAYA SAING DAERAH	KEBERLANJUTAN DAN PERLUASAN DAYA SAING DAERAH	PERWUJUDAN KABUPATEN CIAMIS RELIGIUS, MAJU, TANGGUH BERKELANJUTAN
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah.	Percepatan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah.	Pemantapan kapasitas fiskal daerah yang optimal/berkualitas serta sinergi perencanaan dan penganggaran.	Perwujudan peningkatan pendapatan daerah.
	Penataan kualitas belanja daerah dan optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD)	Peningkatan kualitas belanja daerah dan optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD)	Optimalisasi kualitas belanja daerah dan pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD)		
	Penataan pengendalian inflasi daerah.	Peningkatan dan pengembangan sistem distribusi pangan.	Pemantapan produksi pangan berkelanjutan.	Perwujudan inflasi daerah yang terkendali.	
	Mewujudkan Masyarakat Madani, Budaya Lestari dan Lingkungan yang Berkelanjutan	Perlindungan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat berasaskan kepada Pancasila.	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat berasaskan kepada Pancasila.	Pelestarian nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dan pemajuan kebudayaan yang bersinergi dengan kemajuan teknologi.	Perwujudan pelestarian kebudayaan yang bersinergi dengan kemajuan teknologi.
		Peningkatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	Pemantapan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	Pemantapan moderasi beragama dan keberagaman budaya dalam kehidupan bermasyarakat.	Penerapan moderasi beragama dan keberagaman budaya dalam kehidupan bermasyarakat.
		Penanggulangan bencana di daerah rawan bencana.	Percepatan pelaksanaan daerah tangguh bencana.	Penguatan kapasitas stakeholder menuju daerah tangguh bencana.	Perwujudan Kabupaten Ciamis tangguh bencana



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN CIAMIS			
		I	II	III	IV
		PENGUATAN MODAL DASAR PEMBANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENGUATAN INOVASI DAN DAYA SAING DAERAH	KEBERLANJUTAN DAN PERLUASAN DAYA SAING DAERAH	PERWUJUDAN KABUPATEN CIAMIS RELIGIUS, MAJU, TANGGUH BERKELANJUTAN
		Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga.	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Penguatan kualitas keluarga secara utuh dalam berbagai bidang.	Perwujudan Keluarga Berkualitas.
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Pemantapan pembangunan responsif gender berlandaskan inklusi sosial.	Perwujudan kesetaraan gender dan inklusi sosial.
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.			
		Pelaksanaan upaya pelestarian ekosistem	Percepatan upaya pelestarian ekosistem	Pemantapan upaya pelestarian ekosistem	Perwujudan lingkungan hidup lestari dan berkelanjutan



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN CIAMIS			
		I	II	III	IV
		PENGUATAN MODAL DASAR PEMBANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENGUATAN INOVASI DAN DAYA SAING DAERAH	KEBERLANJUTAN DAN PERLUASAN DAYA SAING DAERAH	PERWUJUDAN KABUPATEN CIAMIS RELIGIUS, MAJU, TANGGUH BERKELANJUTAN
		Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penanganan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga.	Percepatan pemenuhan sarana dan prasarana dalam penanganan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga.	Pemantapan sistem sanitasi lingkungan yang sehat.	Pemantapan sistem sanitasi lingkungan yang sehat.
		Pembangunan dan operasionalisasi pengelolaan sampah di TPST Ciminyak dan Banjaranyar	Optimalisasi pengelolaan sampah di TPST Ciminyak dan Banjaranyar	Pengintegrasian pengelolaan sampah dari hulu ke hilir	Perwujudan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, serta integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan ekonomi sirkular.
		Penyiapan dan penetapan instrumen ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah.	Implementasi dan pengembangan instrumen ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah.		
		Fasilitasi dan persiapan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah TPST Panjalu dan Rancah	Pembangunan dan operasionalisasi fasilitas pengelolaan sampah TPST Panjalu dan Rancah serta Fasilitasi dan persiapan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah TPST Ciamis dan Banjarsari	Pembangunan dan operasionalisasi fasilitas pengelolaan sampah TPST Ciamis dan Banjarsari, serta optimaslisasi pengelolaan sampah di TPST Panjalu dan Rancah	
		Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Percepatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Pemantapan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	
	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Pengelolaan jalan Kabupaten dan jalan desa.	Percepatan pengelolaan jalan Kabupaten dan jalan desa.	Penguatan pengelolaan jalan Kabupaten dan jalan desa.	Kemantapan jalan Kabupaten dan jalan desa.



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN CIAMIS			
		I	II	III	IV
		PENGUATAN MODAL DASAR PEMBANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENGUATAN INOVASI DAN DAYA SAING DAERAH	KEBERLANJUTAN DAN PERLUASAN DAYA SAING DAERAH	PERWUJUDAN KABUPATEN CIAMIS RELIGIUS, MAJU, TANGGUH BERKELANJUTAN
	yang merata dan inklusif	Peningkatan konektivitas antar wilayah, antara lain melalui pembangunan Jalan Baru, Pembangunan Jembatan Cirahong II, dan Pembangunan Jembatan Citanduy III (Jabar - Jateng).	Peningkatan konektivitas antar wilayah.	Pemantapan konektivitas antar wilayah.	
				Pemanfaatan pembangunan Jalan Tol untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Gedebage-Garut-Tasikmalaya-Kalipucang-Cilacap dan Tasikmalaya - Kuningan	Pemanfaatan pembangunan Jalan Tol untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Gedebage-Garut-Tasikmalaya-Kalipucang-Cilacap dan Tasikmalaya - Kuningan
			Pemanfaatan Reaktivasi layanan perkeretaapian, terutama pada ruas Banjar-Pangandaran.	Pemanfaatan Reaktivasi layanan perkeretaapian, terutama pada ruas Banjar-Pangandaran.	Pemanfaatan Reaktivasi layanan perkeretaapian, terutama pada ruas Banjar-Pangandaran.
		Pelaksanaan ketahanan bencana melalui pendekatan lingkungan dan konstruksi	Percepatan pelaksanaan ketahanan bencana melalui pendekatan lingkungan dan konstruksi	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan lingkungan dan konstruksi	Perwujudan ketahanan bencana daerah



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN CIAMIS			
		I	II	III	IV
		PENGUATAN MODAL DASAR PEMBANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENGUATAN INOVASI DAN DAYA SAING DAERAH	KEBERLANJUTAN DAN PERLUASAN DAYA SAING DAERAH	PERWUJUDAN KABUPATEN CIAMIS RELIGIUS, MAJU, TANGGUH BERKELANJUTAN
		Peningkatan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air dan pemanfaatan bendung leuwi keris	Akselerasi pengembangan infrastruktur sumber daya air serta pemanfaatan bendung leuwi keris dan matenggeng	Preservasi dan pendayagunaan sumber daya air yang optimal dan efisien. (diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan bendung leuwi keris dan matenggeng)	Perwujudan ketahanan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien.
		Pembangunan dan perluasan wilayah layanan, sarana-prasarana sistem transportasi publik, diantaranya melalui Pembangunan terminal penumpang Tipe B dan Tipe C	Percepatan Pembangunan dan perluasan wilayah layanan, sarana-prasarana sistem transportasi publik, diantaranya melalui Pembangunan terminal penumpang Tipe B dan Tipe C	Pemantapan perluasan wilayah layanan dan sarana-prasarana sistem transportasi publik rendah emisi.	Terwujudnya sistem transportasi publik rendah emisi



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN CIAMIS			
		I	II	III	IV
		PENGUATAN MODAL DASAR PEMBANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENGUATAN INOVASI DAN DAYA SAING DAERAH	KEBERLANJUTAN DAN PERLUASAN DAYA SAING DAERAH	PERWUJUDAN KABUPATEN CIAMIS RELIGIUS, MAJU, TANGGUH BERKELANJUTAN
		Pembangunan ekosistem digital dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur TIK melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis; (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital)	Peningkatan ekosistem digital untuk percepatan transformasi digital.	Optimalisasi pemanfaatan ekosistem digital dalam aktivitas sosial-ekonomi-lingkungan.	Perwujudan ekosistem digital dalam aktivitas sosial-ekonomi-lingkungan.
	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar	Pengembangan perumahan dan permukiman yang layak dan aman	Akselerasi Pengembangan perumahan dan permukiman yang layak dan aman	Penguatan pengembangan perumahan dan permukiman yang layak dan aman	Perwujudan perumahan dan permukiman yang layak dan aman, terjangkau, menyeluruh dan berkelanjutan
		Pengembangan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan aman	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan aman	Pemantapan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan aman	Perwujudan pemerataan layanan air minum dan sanitasi layak dan aman



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN CIAMIS			
		I	II	III	IV
		PENGUATAN MODAL DASAR PEMBANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENGUATAN INOVASI DAN DAYA SAING DAERAH	KEBERLANJUTAN DAN PERLUASAN DAYA SAING DAERAH	PERWUJUDAN KABUPATEN CIAMIS RELIGIUS, MAJU, TANGGUH BERKELANJUTAN
		Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak melalui penataan dan pemugaran kawasan kumuh	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak melalui penataan dan pemugaran kawasan kumuh.	Pemantapan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak melalui penataan dan pemugaran kawasan kumuh serta penyediaan hunian vertikal perkotaan	Perwujudan hunian layak di kawasan kumuh serta penyediaan hunian vertikal perkotaan
		Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata	Akselerasi penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan infrastruktur konektivitas pada Daerah perbatasan	Optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan infrastruktur konektivitas pada Daerah perbatasan	Perwujudan sarana dan prasarana yang berkualitas dan infrastruktur konektivitas pada Daerah perbatasan
	Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan	Penyusunan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), dsb.).	Akselerasi Penyusunan rencana pengembangan daerah/wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang dan struktur ruang.	Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang dan struktur ruang.	Perwujudan Tata Ruang Wilayah yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing
		Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim.			
		Pengimplementasian pengembangan tata ruang			
		Fasilitasi pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten	Fasilitasi pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten	Fasilitasi pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten	Perwujudan legalisasi aset dan redistribusi lahan bagi masyarakat.



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN CIAMIS			
		I	II	III	IV
		PENGUATAN MODAL DASAR PEMBANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENGUATAN INOVASI DAN DAYA SAING DAERAH	KEBERLANJUTAN DAN PERLUASAN DAYA SAING DAERAH	PERWUJUDAN KABUPATEN CIAMIS RELIGIUS, MAJU, TANGGUH BERKELANJUTAN
		Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	Akselerasi penerapan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	Optimalisasi standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	Perwujudan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
		Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
		Pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Pemantapan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Perwujudan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.



5.2 Sasaran Pokok

Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah. Sasaran pokok merupakan kinerja yang merefleksikan pada setiap tahapan dengan menggunakan indikator-indikator yang bersifat progresif. Sasaran pokok lima tahunan merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan pentahapan pembangunan. Sasaran pokok pembangunan dirinci berdasarkan prioritas masing-masing misi pada setiap tahapan pembangunan.

Tabel 5.2
Kesesuaian Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Ciamis dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2025-2045

No	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KABUPATEN CIAMIS	
	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
1	Transformasi Sosial	IE1. Kesehatan untuk Semua	Transformasi Sosial	Pelayanan Kesehatan prima untuk semua	Transformasi Sosial	Pelayanan kesehatan untuk semua
		IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		Pendidikan berkualitas yang merata		Pendidikan berkualitas yang merata
		IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		Ketahanan sosial masyarakat yang berbudaya maju		Ketahanan sosial masyarakat
2	Transformasi Ekonomi	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas ekonomi daerah.	Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas ekonomi daerah
		IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru		Penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru.		Penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru.
		IE 6. Transformasi Digital		Transformasi Digital.		Peningkatan daya saing digital
		IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global		Integrasi ekonomi domestik dan global
		IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan		Pembentukan pusat kegiatan lokal yang mendukung klaster perekonomian di setiap pusat pertumbuhan
3	Transformasi Tata Kelola	IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Transformasi Tata Kelola	Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Transformasi Tata Kelola	Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan	IE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan	Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan	Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi



No	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KABUPATEN CIAMIS	
	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
	Kepemimpinan Indonesia	Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Kepemimpinan Indonesia	yang berkualitas	Kepemimpinan Indonesia	yang berkualitas
		IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro		Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah		Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah
		IE 12. Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gantar Kawasan		Peningkatan kerjasama internasional dan Ketahanan Daerah		Peningkatan Kerjasama antar daerah
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan kerukunan umat beragama	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan kerukunan umat beragama
		IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender		Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender
		IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas		Peningkatan kualitas lingkungan hidup		Peningkatan kualitas lingkungan hidup
		IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi		Peningkatan ketahanan pangan
		IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim		Peningkatan ketahanan bencana daerah



Tabel 5.3
Keterkaitan Visi, Misi, Sasaran Pokok, Arah Pembangun Serta Target Indikator Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Ciamis
Tahun 2025-2045

Visi	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2045)						
"Ciamis Nanjeur 2045" Kabupaten Ciamis Religius, Maju, Tangguh Dan Berkelanjutan	1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing	Terwujudnya pelayanan kesehatan untuk semua	Pelayanan kesehatan untuk semua	Usia Harapan Hidup *)	Tahun	75,42	80,48						
				Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun *)	Jumlah	25	3						
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita *)	%	22,46	5,91						
				Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i> *)	%	91	98						
				Angka keberhasilan Pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i> *)	%	91	98						
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional *)	%	80,18	98						
	2. Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif	3. Menguatkan Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas dan Inovatif	4. Mewujudkan Kabupaten yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi	5. Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan	6. Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang merata dan inklusif	7. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas	8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	Pendidikan berkualitas yang merata	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
										Literasi Membaca :			
										SD	%	69,92	95,82
										SMP	%	74,64	98,16
										Numerasi:			
										SD	%	57,69	93,59
										SMP	%	69,51	97,22
										Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 25 tahun	Tahun	8,18	12,00
Harapan Lama Sekolah *)	Tahun	14,41	15,66										



Visi	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2045)
		Terwujudnya ketahanan sosial Masyarakat	Ketahanan Sosial masyarakat	Tingkat Kemiskinan *)	%	6,5-7,18	0,1-0,66*
				Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100
		Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah	Peningkatan produktivitas ekonomi daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan *)	%	7,46	7,72
				Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	24,39	28,12
				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum *)	%	4,62	6,98
				Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	5	5
				Rasio Kewirausahaan Daerah *)	%	4,74*	12,92*
				Tingkat Pengangguran Terbuka *)	%	3,04-3,31*	1,96-2,43*
				Indeks Inovasi Daerah	Poin	52,52	54,49
		Meningkatnya penerapan ekonomi hijau dan biru.	Penerapan ekonomi hijau dan biru	Indeks Ekonomi Hijau (Pilar Ekonomi)**	Point	54,02	73,83
				Indeks Ekonomi Biru	Point	0,19	0,52
		Meningkatnya daya saing digital	Peningkatan daya saing digital	Presentase Penduduk Umur 5 tahun ke atas yang mengakses internet	%	76,89	100
		Meningkatnya integrasi ekonomi domestik dan global	Integrasi ekonomi domestik dan global	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto *)	%	23,37*	23,44*
				Nilai Bersih Ekspor Perdagangan	USD	11,3	14



Visi	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2045)
		Terwujudnya pusat kegiatan lokal yang mendukung kluster Perekonomian di setiap pusat pertumbuhan	Pembentukan pusat kegiatan lokal yang mendukung kluster perekonomian di setiap pusat pertumbuhan	Persentase Desa Mandiri *)	%	12,79	47,29
				Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan *)	%	60,94*	100
		Terwujudnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	77,85	95
				Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,15	5
				Indeks SPBE	Poin	3,11	3,50
		Meningkatnya keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	85	95
				Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	%	79,5	82
		Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah	Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah	Rasio PAD terhadap PDRB Non Migas	%	0,73	1,11
				Tingkat Inflasi	%	3-2	2-4
		Meningkatnya Kerjasama antar daerah	Peningkatan Kerjasama antar daerah	Jumlah Kerjasama Daerah	Kerjasama	33	40
		Terwujudnya kerukunan umat beragama	Peningkatan kerukunan umat beragama	Nilai Pemajuan kebudayaan	Poin	52,54	58,82
				Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	Kegiatan	5	8
		Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender	Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	59,25	71,15
				Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,45-0,5	0,31



Visi	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target (2045)		
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah *)	Poin	69,44	71,50		
				Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman *)	%	5,79	77,29		
				Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah *)	%	13,11	84,48		
				Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah *)	%	98,69	100		
		Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan ketahanan pangan	Ketahanan air dan pangan:					
				Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan *)	%	6,45	1,32		
				Ketahanan Air					
				Kapasitas Air Baku	m3/detik	3,59	7,90		
		Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Peningkatan ketahanan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana			Poin	115	100,5
						Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,73	0,92
						Penurunan Emisi GRK			
						Kumulatif *)	Ton Co2eq	-81.047,86	-736.557,49

Sumber : Diolah Bappeda, 2024

Keterangan:

*) Indikator dan Target Turunan Provinsi

***) Dalam Proses Perhitungan



BAB VI PENUTUP

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan tahapan pembangunan berdasarkan pendekatan strategis. Sasaran pokok, target kinerja dan arah kebijakan jangka panjang Kabupaten Ciamis dirumuskan untuk menjamin terlaksana dan tercapainya keberhasilan pembangunan pada masa mendatang menuju tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Ciamis Tahun 2045 harus dikawal dengan kaidah pelaksanaan yang efektif. Kaidah pelaksanaan diperlukan sebagai norma-norma agar visi dan misi dapat dilaksanakan dan diukur keberhasilannya. Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, mekanisme perubahan dan komunikasi publik. Cakupan tersebut menjadi instrumen untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045 sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia.

6.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi dokumen perencanaan pembangunan dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pelaku non pemerintah.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

6.1.2 Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian tersebut dapat didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Pengendalian RPJPD dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan daerah terbagi menjadi dua bagian.

a. Pengendalian perencanaan.

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan meningkatkan kualitas penetapan prioritas pembangunan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

b. Pengendalian pelaksanaan



Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup:

1. pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan daerah;
2. pemantauan mitigasi risiko pembangunan;
3. evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah; dan
4. evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program pemerintah pusat yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan Daerah.

6.1.3 Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan *force majeure* yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, target RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMD. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

6.1.4 Komunikasi Publik

Pelaksanaan semua kebijakan dalam RPJPD perlu didukung oleh komitmen penyelenggara pemerintahan daerah, instansi vertikal, akademisi, sektor swasta, organisasi masyarakat dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Ciamis.

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu:

1. Struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional;
2. Penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah;
3. Keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

6.2. Pembiayaan

Pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD, perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD, dan seluruh indikator RPJMD Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun nonpemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan.

Pembiayaan pembangunan untuk pelaksanaan RPJPD Kabupaten Ciamis antara lain bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Ciamis serta sumber lain yang dimungkinkan untuk pembiayaan pembangunan dengan peraturan perundang-undangan.

6.3. Proses Pelaksanaan Manajemen Risiko

Keberhasilan RPJPD tidak luput dari hambatan dan tantangan, oleh karena itu diperlukan manajemen risiko dalam rangka mencapai tujuan pemerintah daerah dan



mengidentifikasi, menganalisa dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan pemerintah daerah.

Manajemen risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah dan mengidentifikasi, menganalisa dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan pemerintah daerah.

Proses manajemen risiko merupakan bagian yang penting dari manajemen risiko karena merupakan penerapan atas prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko yang telah dibangun. Adapun proses manajemen risiko terdiri atas tiga proses utama, yaitu penetapan konteks, penilaian risiko, dan penanganan risiko.

Penetapan konteks manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan dimana sasaran hendak dicapai, stakeholders yang berkepentingan, dan keberagaman kriteria risiko. Hal-hal tersebut akan membantu untuk mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas dari risiko. Penetapan konteks manajemen risiko erat kaitannya dengan melakukan penetapan tujuan, strategi, ruang lingkup dan parameter-parameter lain yang berhubungan dengan proses pengelolaan risiko suatu perusahaan. Proses ini menunjukkan kaitan atau hubungan antara permasalahan hal yang akan dikelola risikonya dengan lingkungan perusahaan (eksternal & internal), proses manajemen risiko, dan ukuran atau kriteria risiko yang hendak dijadikan standar.

Penilaian risiko meliputi tahapan identifikasi risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Berdasarkan risiko-risiko yang telah teridentifikasi dapat disusun sebuah daftar risiko untuk kemudian dilakukan pengukuran risiko untuk melihat tingkatan risiko. Proses pengukuran risiko berupa analisis risiko yang bertujuan untuk menganalisis kemungkinan dan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi. Hasil pengukuran berupa status risiko yang menunjukkan ukuran tingkatan risiko dan peta risiko yang merupakan gambaran sebaran risiko dalam suatu peta. Tahapan lainnya dalam penilaian risiko adalah evaluasi risiko yang ditunjukkan untuk membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang telah ditentukan untuk dijadikan sebagai dasar penerapan penanganan risiko.

Proses manajemen risiko adalah penanganan risiko yang berupa perencanaan atas mitigasi risiko-risiko untuk mendapatkan alternatif solusinya sehingga penanganan risiko dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Beberapa alternatif penanganan risiko yang dapat diambil antara lain yang bertujuan untuk menghindari risiko, memitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan atau dampak, mentransfer risiko kepada pihak ketiga (risk sharing) dan menerima risiko (risk acceptance).

Dalam melakukan manajemen Risiko, bukan hanya identifikasi risiko dan penilaian risiko, namun dilakukan pula mitigasi risiko yaitu langkah untuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang telah diidentifikasi. Hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi dampak atau kemungkinan bahkan mungkin juga untuk mencegah agar risiko tidak terjadi. Proses manajemen risiko dimulai dengan mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, penilaian risiko, solusi yang diterapkan dan pemantauan risiko. Penyusunan Manajemen risiko dilaksanakan dengan mengikuti lima unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.



Guna mewujudkan visi pembangunan jangka panjang "Ciamis Nanjeur 2045" (Kabupaten Ciamis Religius, Maju, Tangguh dan Berkelanjutan), diperlukan komitmen antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan pemangku kepentingan serta seluruh masyarakat Kabupaten Ciamis sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045.

Ditetapkan di Ciamis

pada tanggal

Pj.BURHAN CIAMIS,



ENGKUS SUTISNA

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 28 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,



ANDANG FIRMAN TRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

PROVINSI JAWA BARAT: (7/137/2024)



LAMPIRAN

Lampiran

Matrix Penelaahan Integrasi KLHS RPJPD ke RPJPD

INTEGRASI KEBIJAKAN UMUM

	Laporan KLHS RPJPD	Latar belakang pertimbangan disusunnya KLHS telah dijabarkan dalam laporan induk berdasarkan kondisi lingkungan hidup dan amanat peraturan perundang-undangan serta Visi Indonesia Emas 2045. Disertai peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang menjadi dasar hukum kegiatan KLHS RPJPD Kabupaten Ciamis. (Termuat dalam Bab 1 bagian 1.1 dan 1.4 hal. 1-5)				
	Dokumen RPJPD	Latar Belakang (Muatan tentang komitmen pembangunan berkelanjutan)	Hal	Dasar Hukum (Permendagri 7 Tahun 2018)		Hal
		Hubungan antara RPJP dengan memperhatikan Dokumen KLHS, untuk memberi muatan KLHS RPJPD Ciamis	I-3	Tahapan penyusunan RPJPD mengacu pada Permedagri 7 tahun 2018	I-2	

INTEGRASI GAMBARAN UMUM

		Daya Dukung Air	Hal	Daya Dukung Pangan	Hal	Data terkait LH	Hal
Laporan KLHS RPJPD		Secara keseluruhan Kabupaten Ciamis memiliki status daya dukung air belum terlampaui dengan surplus sebesar 3.647.993.725 m3/tahun dengan kebutuhan air sebesar 2.081.223.044 m3/tahun, dengan rasio rata-rata 1,8 serta memiliki ambang batas 2.631.057 . Namun terdapat 4 kecamatan tahun 2052 yang telah terindikasi memiliki status daya dukung air sudah terlampaui sebesar 206.098 atau 15.080,19 Ha (9,45 %) dari luas wilayah Kabupaten Ciamis	106-111	Secara keseluruhan Kabupaten Ciamis masih dominan dengan status pangan belum terlampaui (59,26 %), dengan status kurang aman sebanyak 12 kecamatan serta status aman sebanyak 4 kecamatan. Sedangkan ada 11 kecamatan yang sudah melampaui target. Jumlah konsumsi atau kebutuhan pangan sebesar 1.799.249.844.950 Kkal (atau 1,8 Trilyun Kkal) per tahun 2031 berdasarkan jumlah penduduk tahun proyeksi 2031 sebesar 2.292.768 Jiwa, dengan rasio rata-rata sebesar 0,9	97-105	Dalam laporan KLHS RPJPD Kabupaten Ciamis Dalam laporan KLHS RPJPD Kabupaten Ciamis terdapat penjelasan kondisi umum wilayah lainnya yaitu: <ul style="list-style-type: none"> •Wilayah Fungsional •Wilayah Perencanaan •Kondisi Geografis (ekoregion, hidrologi, klimatologi, topografi, penggunaan lahan, bencana geologi, dan Kawasan hutan) •Kondisi 6 Muatan Lingkungan Hidup •Kondisi Sosial Kemasyarakatan (Kependudukan, kesejahteraan penduduk, tingkat Pendidikan, tingkat kesehatan, Masyarakat adat) •Kondisi Umum Perekonomian Dan Keuangan Daerah 	21 - 159
	Dokumen RPJPD	Gambaran Umum	Hal	Gambaran Umum	Hal	Gambaran Umum	Hal
		Kabupaten Ciamis memiliki status daya dukung air belum terlampaui dengan surplus sebesar 3.647.993.725 m3/tahun dengan kebutuhan air sebesar 2.081.223.044 m3/tahun, dengan rasio rata-rata 1,8 serta memiliki ambang batas 2.631.057 . Namun terdapat 4 kecamatan tahun 2052 yang telah terindikasi memiliki status daya dukung air sudah terlampaui sebesar 206.098 atau 15.080,19 Ha (9,45 %) dari luas wilayah Kabupaten Ciamis	II-20 s/d II - 2	Kabupaten Ciamis memiliki status daya dukung air belum terlampaui dengan surplus sebesar 3.647.993.725 m3/tahun dengan kebutuhan air sebesar 2.081.223.044 m3/tahun, dengan rasio rata-rata 1,8 serta memiliki ambang batas 2.631.057 . Namun terdapat 4 kecamatan tahun 2052 yang telah terindikasi memiliki status daya dukung air sudah terlampaui sebesar 206.098 atau 15.080,19 Ha (9,45 %) dari luas wilayah Kabupaten Ciamis	II-16 s/d II - 19	Dalam laporan RPJPD Kabupaten Ciamis terdapat penjelasan kondisi umum wilayah lainnya yaitu: -Aspek Geografis (Kemiringan lereng, ketinggian, topografi, jenis tanah, kebencanaan, dan lainnya) -Aspek Demografi :(Jumlah penduduk, komposisi penduduk, masyarakat adat, -Kesejahteraan ekonomi dan keuangan - Kondisi kesejahteraan penduduk, tingkat kesehatan, pendidikan	II-1 II-28 II-33

INTEGRASI ISU

1	Laporan KLHS RPJPD	Isu Strategis		
		Isu adanya Kemiskinan		Hal.
		1. Masih tingginya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional		241
		2. Kurangnya persentase rumah tangga yang belum terlayani sanitasi layak dan berkelanjutan		
		3. Kurangnya persentase rumah tangga yang belum terlayani air minum layak dan aman yang berkelanjutan		
	4. Belum Optimalnya Partisipasi Sekolah			
	5. Rata rata lama sekolah di kabupaten ciamis 8,0 untuk sementara provinsi 8,78 sehingga ada dibawah Provinsi			
	Dokumen RPJPD	Isu dan Permasalahan		Hal.
		Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia:		
		1. Masih terdapatnya kasus stunting dan balita gizi buruk di Kabupaten Ciamis		III-15
2. Pemberdayaan dan penanganan bagi kelompok fakir miskin masih belum optimal		III-17		
3. Kasus stunting dan balita gizi buruk masih ditemukan di Kabupaten Ciamis				
2	Laporan KLHS RPJPD	Isu Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia		
		1. Belum Optimalnya Partisipasi Sekolah		186
		2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia		186
		3. Belum Optimalnya Partisipasi Sekolah		186
		4. Rata rata lama sekolah di kabupaten ciamis 8,0 untuk sementara provinsi 8,78 sehingga ada dibawah Provinsi		182
		5. Kesetaraan Gender		
		6. Proyeksi stunting meningkat dengan kondisi ekonomi yang turun		182
		7. Akses terhadap pelayanan kesehatan belum mencapai standar pelayanan minimal		182
		8. Masih ditemukannya bayi dan balita kasus stunting sebesar 16% thn 2021 dan 2022 naik menjadi 18,6%		182
	9. Masih tingginya penularan penyakit berbasis lingkungan seperti DBD dan TB serta penyakit menular lainnya seperti HIV dan AIDS.		182	
			186	
	Dokumen RPJPD	Isu dan Permasalahan		Hal.
		Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		
		1. pemberdayaan sosial yang kurang		III- 16
		2. Pembangunan dan pemberdayaan gender belum optimal		III- 16
		3. Belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan		III- 16
		4. Belim optimalnya pembangunan literasi masyarakat		III- 16
		5. IPM di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2023 masih berada di bawah capaian nasional dan Provinsi Jawa Barat		III- 16
		6. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Ciamis masih tergolong rendah		III- 17
7. tingginya angka kematian ibu dan bayi yang cenderung menurun		III- 17		
8. Belum optimalnya pelaksanaan P4K (Perencanaan Program Persalinan dan Pencegahan		III- 17		
9. Kasus stunting dan Balita gizi buruk masih ditemukan di Kabupaten Ciamis		III- 17		

3	Laporan KLHS RPJPD	Isu Strategis	
		Isu Pencemaran Air	
		1. Banyak perusahaan yang tak berizin dan mencemari lingkungan	Hal. 184
		2. Masih ada masyarakat yang BABS sebesar 29,4 %	184
		3. Sarana dan Prasarana Pengolahan air limbah domestik masyarakat (IPAL, MCK, IPLT dll) masih terbatas	184
		4. Potensi pencemaran air sungai karena pencemaran air limbah domestik dan industri, pertanian dan peternakan	184
	Dokumen RPJPD	5. Desa ODF tahun 2022 baru mencapai 70,6 %	184
		Isu dan Permasalahan	
		Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	
		1. Masih terdapatnya kondisi sanitasi yang buruk juga dapat menjadi pemicu pencemaran air dan penyebaran wabah penyakit, seperti	III- 6
	2. Sampai Tahun 2023 akses terhadap air minum layak mencapai 91,58% dan akses terhadap sanitasi layak mencapai 74,37% hal ini dipengaruhi oleh masih adanya desa yang belum Open Defecation Free (ODF) sebanyak 78 desa dan sulitnya mendapatkan sumber air baku	III- 25	
4	Laporan KLHS RPJPD	Isu Strategis	
		Sumber Daya Air	
		1. Masih tingginya rumah tangga yang belum terlayani air minum layak	244
		2. Masih tingginya rumah tangga yang belum memiliki sanitasi layak	244
		3. Belum adanya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	244
	Dokumen RPJPD	Isu dan Permasalahan	
		Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	
		1. Kondisi ketersediaan Sumber Daya Air, masih adanya beberapa kecamatan yang melebihi daya tampung air	III- 22
		2. Cakupan layanan air minum yang belum merata	III- 20
		3. Saat ini masih terdapat rumah tidak layak huni sebesar 30,38% juga belum seluruhnya rumah tangga diKabupaten Ciamis terlayani oleh layanan air minum dan sanitasi layak	III- 19
5	Laporan KLHS RPJPD	Isu Strategis	
		Pengelolaan Persampahan	
		1. Pengangkutan sampah belum menjangkau semua wilayah	184
		2. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah masih belum optimal	184
		3. Kinerja bank sampah masih belum optimal	184
		4. Timbulan sampah semakin meningkat seiring pertambahan penduduk	184

	Dokumen RPJPD	Isu dan Permasalahan	
		Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	
		1. Program penanganan sampah melalui Reduce, Reuse and Recycle (3R) mulai dari hulu masih belum dapat menurunkan volume	III-2
		2. Keterbatasan Pemerintah didalam pelaksanaan pelayanan pengelolaan sampah baik itu sumber daya manusia maupun anggaran serta kondisi geografis dan cakupan wilayah yang berat sehingga masih mengandalkan pengelolaan berbasis tradisional oleh	III- 21
6	Laporan KLHS RPJPD	Isu Ketahanan Pangan	
		1. Peningkatan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian	184
		2. Penurunan produktivitas akibat penurunan kualitas lahan	184
		3. Potensi Degradasi lahan peternakan dan perikanan	184
	Dokumen RPJPD	Isu dan Permasalahan	Hal.
		Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	
		1. Belum optimalnya penerapan teknologi pangan	III- 25
2. Belum optimalnya pengembangan, pemasaran dan pengolahan pasca panen perikanan		III- 25	
7	Laporan KLHS RPJPD	Isu Kebencanaan	
		1. Ancaman potensi terjadinya bahaya cuaca ekstrim berada di wilayah dengan keterbukaan lahan tinggi dan dataran yang landai	185
		2. Lahan kritis	185
		3. Kurangnya perlindungan dan pengamanan kehutanan	185
		4. Ancaman bencana tanah longsor pada Pembangunan di daerah rawan bencana	185
	Dokumen RPJPD	Isu dan Permasalahan	Hal.
		Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	
		1. Bencana disebabkan penurunan Kualitas Lingkungan	III- 21
		2. Belum optimalnya kapasitas masyarakat dan aparatur pemerintah dalam manajemen kebencanaan serta masih terbatasnya akses	III- 21
		3. Kondisi topografi di Kabupaten Ciamis yang berbukit menjadikan rawan terjadi gerakan tanah	III- 21
		4. Tingkat risiko bencana banjir di Kabupaten Ciamis menunjukkan tingkat risiko tinggi. adalah Cikoneng, Lakbok, dan Rancah.	II-22
8	Dokumen KLHD RPJPD	Isu Belum Optimalnya Partisipasi Pendidikan	
		1. Belum Optimalnya Partisipasi Sekolah	186
		2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia	186
		3. Belum Optimalnya Partisipasi Sekolah	186
		4. Rata rata lama sekolah di kabupaten ciamis 8,09 untuk sementara provinsi 8,78 sehingga ada dibawah Provinsi	182
	Dokumen RPJPD	Isu dan Permasalahan	
		Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	
		1. Belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan	III- 16
		2. Belum optimalnya pembangunan literasi masyarakat	III- 16
		3. Capaian RLS Kabupaten Ciamis setiap tahunnya mengalami peningkatan, Tahun 2023 menjadi 8,09 Tahun, namun posisinya masih	II-53

9	Laporan KLHS RPJPD	Isu Strategis Rendahnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi		
		1. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang belum merata antara wilayah kota dan wilayah desa	185	
		2. Ancaman penurunan produktifitas pertanian akibat penurunan kualitas tanah	185	
		3. Masih banyak aset daerah yang belum bersertifikat	185	
		4. Pendapatan daerah masih belum mencukupi kebutuhan belanja daerah	185	
	Dokumen RPJPD	Isu dan Permasalahan		Hal.
		Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi		
		1. Terbatasnya penggunaan benih unggul dan sarana prasarana pertanian		III- 18
		2. Masih terbatasnya SDM penyuluhan		III- 18
		3. Sulitnya regenerasi petani milenial karena pertanian dianggap sebagai sektor pekerjaan yang tidak menguntungkan bersifat sektor pekerjaan yang tidak menguntungkan		III- 18
4. Terdapatnya ketimpangan pendapatan		III- 18		
10	Laporan KLHS RPJPD	Isu Strategis Tata Kelola Pemerintahan		
		1. Capaian indicator makro 2022 sebagian masih belum mencapai target RPJMD	186	
		2. Tata Kelola data belum optimal	186	
		3. Pelaksana penguasa hukum yang belum optimal yang ada sehingga tidak semua data ada	186	
		4. Tidak semua indikator TPB relevan dengan kondisi	186	
	5. Latar belakang Kerjasama dinas dalam rangka pengawasan terhadap teguran hukum/denda	186		
	Dokumen RPJPD	Isu dan Permasalahan		Hal.
Kurang optimalnya tata kelola Pemerintahan				
1. Belum optimalnya terutama dari aspek tata kelola pemerintahan (good governance), tata kelola keuangan, pengelolaan manajemen SDM, dan lain-lain, termasuk peningkatan dan pemanfaatan inovasi daerah baik secara teknologi informasi maupun regulasi, sehingga dapat menyikapi setiap perubahan dinamika dan regulasi			III- 22	

INTEGRASI REKOMENDASI

1	Laporan KLHS RPJPD	<p align="center">Rekomendasi</p> <p>Sasaran Pokok: Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</p> <p>Arah Kebijakan: Meningkatkan mutu pendidikan dan rata rata lama sekolah, Peningkatan Pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat, Peningkatan sektor basis yang lebih efisiensi terutama pertanian, Meningkatkan perlindungan dan bantuan sosial Menjaga stabilitas ekonomi, Peningkatan peserta jaminan sosial dan bantuan sosial pada masyarakat miskin, Sosialisasi tentang program KPM, Peningkatan distribusi kualitas dan kuantitas sesuai standar SDM pelaksana pelayanan kesehatan secara merata, Peningkatan layanan kesehatan: layanan rumah sakit, maupun layanan rawat jalan (Halaman 308)</p>			<p align="center">Isu Strategis</p> <p align="center">Belum optimalnya pengentasan kemiskinan</p> <p>salah satu terjadinya kemiskinan, yaitu: a. Kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan mengakibatkan tidak adanya penghasilan b. Kurangnya keterampilan/skill setiap individu c. Rendahnya lamanya usia pendidikan</p>		<p align="center">Data Gambaran Umum</p> <p>Data Kemiskinan di Kabupaten Ciamis cenderung mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 8,2% hingga tahun 2022 menjadi sebesar 7,76% namun masih diatas target Nasional sebesar 7% dengan demikian masih terdapat GAP sebesar 0,76 %. Sedangkan tahun 2027 berdasarkan analisis diprediksi mengalami penurunan 0,1 % menjadi 6,9 %, dan tahun 2045 diperkirakan mengalami penurunan menjadi 4 % (Halaman 262)</p> <p>Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin masih naik turun terhitung dari tahun 2018 hingga 2019 mengalami peningkatan dari 8,42% menjadi 8,59%, hal ini disebabkan karena adanya kondisi pandemic Covid 19. Namun pada tahun 2020 terdapat penurunan persentase menjadi 7,22% dan terjadi kenaikan kembali pada tahun 2021 menjadi 7,97%. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pandemic menyebabkan banyaknya pemutusan hubungan kerja dan meningkatnya jumlah pengangguran. Dan pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 7,72% karena selesai masa pandemic perekonomian mengalami perubahan yang membaik (Halaman 47)</p>	
	Dokumen RPJPD	<p align="center">Sasaran Pokok Daerah</p> <p>-Terwujudnya pelayanan kesehatan untuk semua Terwujudnya -pendidikan berkualitas yang merata</p>	<p align="center">Hal.</p> <p>V-1 s/d V-5</p>	<p align="center">Arah Kebijakan Daerah</p> <p>-Pemberian bantuan pendidikan khususnya bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi, Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana. -Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.</p>	<p align="center">Hal.</p> <p>V-1 s/d V-5</p>	<p align="center">Isu dan Permasalahan</p> <p>Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia: Kabupaten Ciamis memiliki kuantitas penduduk usia produktif yang mendominasi struktur penduduk Kabupaten Ciamis. Kuantitas penduduk usia produktif harus didukung juga dengan kualitas sumber daya manusia dari berbagai macam aspek yang saling berkaitan, yaitu kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat dan pendidikan. Salah satu indikator untuk mengukur ketercapaian kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Ciamis adalah melalui angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2023 masih berada di bawah capaian nasional dan Provinsi Jawa Barat</p>	<p align="center">Hal.</p> <p>III-16</p>	<p align="center">Data Gambaran Umum</p> <p>Persentase penduduk miskin di Kabupaten Ciamis mengalami fluktuasi dan secara umum posisinya berada di bawah Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Ciamis memiliki angka kemiskinan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat dan tingkat Nasional. Penurunan persentase penduduk miskin menjadi 7,42 % pada Tahun 2023 seiring adanya perbaikan dalam pemulihan ekonomi pasca Covid-19 di wilayah Kabupaten Ciamis.</p>
2	Laporan KLHS RPJPD	<p align="center">Rekomendasi</p> <p>-Pendidikan: Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). (Halaman 218-322)</p> <p>Sasaran Pokok : -Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi semua -Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan yang sesuai dengan standar kesehatan -Berkurangnya Angka Kematian Ibu dan Bayi</p> <p>Kebijakan: -Meningkatkannya sumber daya tenaga kesehatan -Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak -Meningkatnya perlindungan kesehatan anak -Meningkatkan sumber daya tenaga kesehatan - peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan -Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak</p>			<p align="center">Isu Strategis</p> <p align="center">Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia</p> <p>Hal yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia adalah: pendidikan dan kesehatan</p>		<p align="center">Data Gambaran Umum</p> <p>IPM: Nilai IPM Kabupaten Ciamis pada tahun 2023 sebesar 71,45 2019 tercatat 70,39, dimana angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai IPM Kabupaten Tasikmalaya. Nilai IPM Kabupaten Ciamis lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Jawa Barat dimana nilainya mencapai 73,12 (Halaman 42)</p> <p>Kesehatan: -Kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan -Pernikahan usia dini. Perempuan yang menikah di usia muda memiliki risiko yang lebih tinggi terjadinya kematian saat melahirkan -Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya persalinan di fasilitas kesehatan - Angka tingkat kematian bayi tahun 2022 sebanyak 6,6 (Halaman 271)</p>	
	Dokumen RPJPD	<p align="center">Sasaran Pokok Daerah</p> <p>-Terwujudnya pelayanan kesehatan untuk semua Terwujudnya -pendidikan berkualitas yang merata</p>	<p align="center">Hal.</p> <p>V-27</p>	<p align="center">Arah Kebijakan Daerah</p> <p>-Pemberian bantuan pendidikan khususnya bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi, Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana, Peningkatan akses pendidikan nonformal -Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan, Pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung pelayanan kesehatan</p>	<p align="center">Hal.</p> <p>V-1 s/d V-5</p>	<p align="center">Isu dan Permasalahan</p> <p>Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia: Kabupaten Ciamis memiliki kuantitas penduduk usia produktif yang mendominasi struktur penduduk Kabupaten Ciamis. Kuantitas penduduk usia produktif harus didukung juga dengan kualitas sumber daya manusia dari berbagai macam aspek yang saling berkaitan, yaitu kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat dan pendidikan. Salah satu indikator untuk mengukur ketercapaian kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Ciamis adalah melalui angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2023 masih berada di bawah capaian nasional dan Provinsi Jawa Barat</p>	<p align="center">Hal.</p> <p>III-16</p>	<p align="center">Data Gambaran Umum</p> <p>-Kualitas dan Partisipasi Pendidikan: rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Ciamis adalah 8,09 tahun yang berarti penduduk secara rata-rata menempuh pendidikan hanya sampai pendidikan menengah (SMP). -Penyebab kematian ibu diantaranya anemia, kekurangan energi kalori, dan belum optimalnya pelaksanaan P4K (Perencanaan Program Persalinan dan Pencegahan Komplikasi). Sementara itu, penyebab kematian bayi salah satunya adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Kasus stunting dan balita gizi buruk juga masih ditemukan di Kabupaten Ciamis. Selanjutnya, masalah aspek kesehatan secara umum yang terjadi adalah beban ganda yaitu peningkatan prevalensi penyakit tidak menular, sementara penyakit menular belum teratasi sepenuhnya seperti HIV/AIDS, TBC, dan DBD</p>

3	Laporan KLHS RPJPD	Rekomendasi			Isu Strategis	Data Gambaran Umum			
		<p>Sasaran Pokok: Terjaminnya Akses Pendidikan</p> <p>Kebijakan: *-Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). *-Pemberian bantuan pendidikan khususnya bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi *-Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana, peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan Penyiapan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, (Halaman 323)</p>			Belum Optimalnya Partisipasi Pendidikan	<p>Nilai APK jenjang pendidikan SD Kabupaten Ciamis pada tahun 2021 adalah 106,42% dan mengalami peningkatan menjadi 106,63% pada tahun 2022. Nilai APM jenjang pendidikan SD pada tahun 2021 adalah 98,11% dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 99,95%. Nilai APK jenjang pendidikan SMP pada tahun 2021 adalah 106,69% dan menurun pada tahun 2022 menjadi 105,76%. Nilai APM jenjang pendidikan SMP tahun 2021 adalah 87,16% dan menurun pada tahun 2022 menjadi 87,09%. Dan nilai APK jenjang pendidikan SMA pada tahun 2021 adalah 114,29% menurun pada tahun 2022 menjadi 113,03% dan Nilai APM jenjang pendidikan SMA adalah 50,81% meningkat pada tahun 2022 menjadi 50,88%. (halaman 43).</p> <p>Permasalahan utama terjadinya rendahnya rata-rata lama sekolah karena kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, kurangnya kesadaran pendidikan, serta tekanan ekonomi suatu keluarga atau adanya penduduk miskin sehingga anak-anak tidak mendapatkan layanan pendidikan dengan baik (Halaman 296)</p>			
4	Dokumen RPJPD	Sasaran Pokok Daerah	Hal.	Arah Kebijakan Daerah	Hal.	Isu dan Permasalahan	Hal.	Data Gambaran Umum	Hal.
		<p>pendidikan berkualitas yang merata</p>	V-27	<p>-Pemberian bantuan pendidikan khususnya bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi, Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana, Peningkatan akses pendidikan nonformal</p>	V-1	<p>Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia: Kabupaten Ciamis memiliki kuantitas penduduk usia produktif yang mendominasi struktur penduduk Kabupaten Ciamis. Kuantitas penduduk usia produktif harus didukung juga dengan kualitas sumber daya manusia dari berbagai macam aspek yang saling berkaitan, yaitu kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat dan pendidikan.</p>	III-16	<p>Capaian RLS Kabupaten Ciamis setiap tahunnya mengalami peningkatan, Tahun 2023 menjadi 8,09 Tahun, namun posisinya masih berada dibawah capaian nasional dan Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Kabupaten Ciamis perlu mendapatkan perhatian lebih dalam upaya peningkatan kualitas dan akses pendidikan untuk mencapai atau melampaui angka rata-rata di tingkat provinsi dan nasional. Rendahnya angka harapan lama sekolah bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya fasilitas pendidikan, akses yang terbatas, atau anggaran yang tidak mencukupi. Kondisi ini menegaskan perlunya dukungan dan perbaikan dalam sistem pendidikan yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Ciamis.</p>	II-53
4	Laporan KLHS RPJPD	Rekomendasi			Isu Strategis	Data Gambaran Umum			
		<p>Sasaran Pokok : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pemerataan pembangunan infrastruktur</p> <p>Kebijakan: *-Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan system Pengolahan Air Limbah *-Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi *-Pengembangan perumahan dan permukiman yang layak dan aman Halaman 328</p>			Isu Pencemaran Air	<p>-Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan potensi beban pencemaran domestik bila tidak ada pengendalian , meningkatnya potensi beban pencemaran domestik akan mencemaran perairan bila tidak adanya tindakan pengendalian akibat terlampaui daya tampung sungai oleh beban pencemaran domestik yang masuk. Adanya tindakan pengendalian dapat meminimasi potensi beban pencemaran yang berasal dari limbah domestik (Halaman 112). *-Tahun 2023 akses terhadap air minum layak mencapai 91,58% dan akses terhadap sanitasi layak mencapai 74,37% (halaman 275)</p>			
4	Dokumen RPJPD	Sasaran Pokok Daerah	Hal.	Arah Kebijakan Daerah	Hal.	Isu dan Permasalahan	Hal.	Data Gambaran Umum	Hal.
		<p>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</p>	V-31	<p>-Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penanganan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga. *-Pengembangan perumahan dan permukiman yang layak dan aman *-Pengembangan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi</p>	V-18, V-22	<p>Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan</p> <p>Sampai Tahun 2023 akses terhadap air minum layak mencapai 91,58% dan akses terhadap sanitasi layak mencapai 74,37% hal ini dipengaruhi oleh masih adanya desa yang belum Open Defecation Free (ODF) sebanyak 78 desa dan sulitnya mendapatkan sumber air baku</p>		<p>Selama periode Tahun 2015-2023, IKLH Kabupaten Ciamis menunjukkan kecenderungan meningkat. Capaian IKLH Tahun 2015 sebesar 50,84 dan capaian Tahun 2023 adalah sebesar 70,76 dan termasuk dalam kategori "baik". Capaian IKA Kabupaten Ciamis dari Tahun 2015-2023 menunjukkan kecenderungan meningkat, yaitu dari 55,38 pada Tahun 2015 menjadi 60,34 pada Tahun 2023 dan termasuk dalam kategori "sedang". Nilai kualitas air ini diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan pada 15 sungai.</p>	II-25

5	Laporan KLHS RPJPD	Rekomendasi -Meningkatkan akses terhadap layanan sumber air minum layak melalui penambahan jumlah jaringan pelayanan -Pengembangan pengelolaan sumber daya air berdasarkan prinsip zonasi pemanfaatan dan konservasi secara adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan ekologis secara berkelanjutan, Peningkatan sumber air melalui pembangunan embung -Meningkatkan akses terhadap layanan sumber air minum layak melalui penambahan jumlah jaringan pelayanan (Halaman 330)				Isu Strategis Isu Sumber Daya Air		Data Gambaran Umum Secara umum daya dukung air di Kabupaten Ciamis Tahun 2022 belum terlampaui yaitu suplay/produksi air 3.647.993.725 m3/tahun lebih besar dari demand/konsumsi 1.879.518.788 m3/tahun, sehingga ada selisih daya dukung sebesar 1.768.474.937 m3/tahun. Kecamatan dengan status "telah melampaui daya dukung air" di Kabupaten Ciamis sebanyak 3 (tiga) kecamatan, secara terperinci yaitu Kecamatan Purwadadi dengan rasio 0,90 dengan selisih daya dukung -5.865.702 m3/tahun Kecamatan Ciamis dengan rasio sebesar 0,90 dengan selisih daya dukung -9.009.565 m3/tahun, Kecamatan Baregbeg rasio 1,0 dengan selisih daya dukung -1.122.453 m3/tahun dan Kecamatan Lumbung memiliki rasio 0,70 dengan selisih daya dukung air -15.506.791 m3/tahun. (Halaman 106)	
		Sasaran Pokok Daerah	Hal.	Arah Kebijakan Daerah	Hal.	Isu dan Permasalahan	Hal.	Data Gambaran Umum	
	Dokumen RPJPD	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	V-31	-Pengembangan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi -Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak melalui penataan dan pemugaran kawasan kumuh Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim	V-22	Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Beberapa tantangan lain dalam peningkatan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup diantaranya adalah mempertahankan luas lahan konservasi dari tekanan fungsi lahan menjadi terbangun. Kawasan konservasi berperan penting dalam penyangga pembangunan untuk menjaga ketersediaan air	III-21	Berdasarkan hasil analisis terhadap daya dukung dan daya tampung air, data sampai dengan Tahun 2023 terdapat 3 kecamatan yaitu Kecamatan Purwadadi, Ciamis, dan Lumbung yang telah melampaui daya dukung air	III-22
6	Laporan KLHS RPJPD	Rekomendasi Sasaran Pokok: -Mewujudkan Ketahanan Pangan yang tangguh dan berkelanjutan -Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup Kebijakan: -Meningkatkan produksi pangan yang berkualitas dari sektor pertanian, perikanan, dan peternakan -Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) -Peningkatan memenuhi pangan dengan kebutuhan gizi seimbang bagi balita, anak-anak, ibu hamil, dan manula Sosialisasi makanan bergizi/gizi seimbang				Isu Strategis Ketahanan Pangan		Data Gambaran Umum Kecamatan dengan status "telah melampaui daya dukung pangan" di Kabupaten Ciamis sebanyak 11 (sebelas) kecamatan, secara terperinci, yaitu Kecamatan Ciamis dengan rasio 0,30, hal ini bisa dipahami bahwa Kecamatan Ciamis merupakan perkotaan dengan tutupan lahan dominan merupakan permukiman kawasan perdagangan dan perkantoran yang merupakan memiliki karakteristik aspek sosial dan ekonomi yang heterogen. Selanjutnya adalah Kecamatan Sindangkasih dengan rasio sebesar 0,61, Cikoneng dengan rasio sebesar 0,63, Kecamatan Baregbeg dengan rasio 0,64, Kecamatan Cijeunjing dan Kecamatan Cipaku dengan rasio 0,70. Kecamatan Kawali memiliki rasio sebesar 0,82, Kecamatan Jatinagara memiliki rasio sebesar 0,80, serta Kecamatan Cimaragas memiliki rasio 0,96. Kecamatan kecamatan tersebut yang sudah melampaui daya dukung pangan memerlukan distribusi komoditi pangan dari kecamatan lainnya bahkan kabupaten lainnya yang daya dukung pangan belum terlampaui (Halaman 98)	
		Sasaran Pokok Daerah	Hal.	Arah Kebijakan Daerah	Hal.	Isu dan Permasalahan	Hal.	Data Gambaran Umum	Hal.
	Dokumen RPJPD	Meningkatnya ketahanan pangan	V-31	-Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan. -Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan -Pembinaan kapasitas dan akses informasi bagi petani dan pembudi daya ikan guna meningkatkan produktivitasnya.	V-8 s/d V-9	Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Beberapa tantangan lain dalam peningkatan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup diantaranya adalah mempertahankan luas lahan konservasi dari tekanan fungsi lahan menjadi terbangun. Kawasan konservasi berperan penting dalam penyangga pembangunan untuk menjaga ketersediaan air, kualitas udara, kerentanan terhadap bencana, dan ketahanan pangan yang dalam arti luas untuk keberlanjutan kehidupan manusia dan lingkungan.	III-21	Kecamatan dengan status "telah melampaui daya dukung pangan" di Kabupaten Ciamis sebanyak 11 (sebelas) kecamatan, secara terperinci, yaitu Kecamatan Ciamis dengan rasio 0,30, hal ini bisa dipahami bahwa Kecamatan Ciamis merupakan perkotaan dengan tutupan lahan dominan merupakan permukiman kawasan perdagangan dan perkantoran yang merupakan memiliki karakteristik aspek sosial dan ekonomi yang heterogen. Selanjutnya adalah Kecamatan Sindangkasih dengan rasio sebesar 0,61, Cikoneng dengan rasio sebesar 0,63, Kecamatan Baregbeg dengan rasio 0,64, Kecamatan Cijeunjing dan Kecamatan Cipaku dengan rasio 0,70. Kecamatan Kawali memiliki rasio sebesar 0,82, Kecamatan Jatinagara memiliki rasio sebesar 0,80, serta Kecamatan Cimaragas memiliki rasio 0,96. Kecamatan kecamatan tersebut yang sudah melampaui daya dukung pangan memerlukan distribusi komoditi pangan dari kecamatan lainnya bahkan kabupaten lainnya yang daya dukung pangan belum terlampaui (Halaman 98)	II-17

7	Laporan KLHS RPJPD	Rekomendasi				Isu Strategis		Data Gambaran Umum	
		<p>Sasaran Pokok: Tercapaian Permukiman yang bersih dari sampah</p> <p>Kebijakan: -Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan persampahan, serta peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana persampahan -Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan -Pengolahan sampah dengan TPS 3R (Halaman 339)</p>				Isu Pengelolaan Persampahan		Masalah pengelolaan sampah berdasarkan hasil analisis proyeksi prediksi jumlah timbulan sampah pada tahun 2032 mencapai 4.431.700 L/hari. Berdasarkan hasil analisis proyeksi, terjadi peningkatan timbulan sampah sebesar 195.585 L/hari dalam 10 tahun. (Halaman 120)	
		Sasaran Pokok Daerah		Hal.	Arah Kebijakan Daerah	Hal.	Isu dan Permasalahan	Hal.	Data Gambaran Umum
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	V-31	pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, serta integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan ekonomi sirkular.	V-18	Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	III-21	Ada sekitar 3.299,54 m3/hari sampah yang belum terlayani oleh sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Ciamis. Hal ini karena ada keterbatasan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaan pelayanan pengelolaan sampah baik itu sumber daya manusia maupun anggaran, kondisi geografis dan cakupan wilayah yang cukup berat sehingga sebagian besar masih mengandalkan pengelolaan berbasis tradisional oleh masyarakat.	III-21
8	Dokumen RPJPD	Rekomendasi				Isu Strategis		Data Gambaran Umum	
		<p>Sasaran Pokok: Meningkatnya sistem peringatan dini cuaca, iklim serta kebencanaan</p> <p>Kebijakan: -Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana -Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana -Upaya Penanggulangan Bencana -Pembangunan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat untuk menghadapi dan penanggulangan bencana -Kearifan lokal berkaitan dengan dan adat istiadat yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana -Pengembangan sarana dan prasarana tahan terhadap bencana</p>				Isu Kebencanaan		Pemicu bencana alam khususnya longsor dan pergeseran tanah dipicu oleh zona kerentanan tanah dan kemiringan lereng yang biasanya di atas 15% serta intensitas curah hujan yang tinggi, kerapatan tutupan lahan yang rendah serta kondisi geologi. Pemicu bencana banjir terjadi dikarenakan adanya perubahan penggunaan lahan dari lahan hijau menjadi lahan terbangun. Selain alih fungsi lahan, pemicu terjadinya bencana banjir juga dikarenakan kondisi drainase pada daerah perkotaan yang kurang bisa mengatasi debit air hujan dengan curah hujan tinggi. Faktor lainnya adalah keterpaparan terhadap daerah rawan banjir, intensitas curah hujan yang tinggi, topografi, dan kemiringan lereng. Pembangunan yang dilakukan di sempadan sungai atau bantaran sungai juga menjadi pemicu terjadinya banjir, Karena kurangnya daerah resapan air. (Halaman 123)	
		Sasaran Pokok Daerah		Hal.	Arah Kebijakan Daerah	Hal.	Isu dan Permasalahan	Hal.	Data Gambaran Umum
		Meningkatnya ketahanan bencana daerah	V-32	- Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim. - Penegetakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. -Pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. -Penanggulangan bencana di daerah rawan bencana.	V-16,V-20	Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan □ Optimalisasi Manajemen Penanggulangan Bencana Wilayah Kabupaten Ciamis memiliki potensi kebencanaan yang tinggi, yaitu bencana cuaca ekstrim, banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Frekuensi dan intensitas kejadian bencana banyak dipengaruhi oleh kerusakan dan pencemaran lingkungan.	III-21	1. Tingkat risiko bencana banjir di Kabupaten Ciamis menunjukkan tingkat risiko tinggi. adalah Cikoneng, Lakbok, dan Rancah. Kecamatan yang memiliki tingkat risiko sedang adalah Banjaranyar, Banjarsari, Baregbeg, Ciamis, Cidolog, Cihaurbeuti, Cijeungjing, Cimaragas, Cipaku, Cisaga, Jatinagara, Kawali, Lumbung, Pamarican, Panawangan, Panjalu, Panumbangan, Purwadadi, Rajadesa, Sadananya, Sindangkasih, Sukadana, Sukamantri, Tambaksari. Kecamatan yang memiliki; 2. Tingkat risiko bencana banjir bandang di Kabupaten Ciamis menunjukkan tingkat risiko sedang terdapat di Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, Baregbeg, Ciamis, Cidolog, Cijeungjing, Cikoneng, Cimaragas, Cipaku, Cisaga, Jatinagara, Kawali, Lumbung, Pamarican, Panawangan, Panjalu, Panumbangan, Purwadadi, Rajadesa, Rancah, Sadananya, Sindangkasih, Sukadana, Sukamantri, Tambaksari.	II-22
Laporan KLHS RPJPD	Rekomendasi				Isu Strategis		Data Gambaran Umum		
	<p>Sasaran Pokok: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Kebijakan: -Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan -Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas -Pengembangan ekonomi kerakyatan -Meningkatkan sarana dan prasarana secara merata untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap sumber perekonomian -Meningkatkan produktifitas tenaga kerja pada sektor unggulan, melalui regulasi dan inovasi -Meningkatkan kemampuan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengembangan produk sesuai kebutuhan pasar Halaman 347</p>				Rendahnya Kualitas Pertumbuhan ekonomi		Nilai PDRB tahun 2018 sampai tahun 2022 berdasarkan harga konstan menunjukkan tahun 2018 sebesar 5,31%, tahun 2019 meningkat menjadi 5,38%, pada tahun 2020 terjadi pandemik covid 19 sehingga mengalami penurunan hingga mencapai -0,14%, selanjutnya tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 3,66% walaupun relatif masih rendah, dan pada tahun 2022 adanya pemulihan ekonomi paska pandemik covid 19 hingga mencapai 5,02% (Halaman 50)		
	Sasaran Pokok Daerah		Hal.	Arah Kebijakan Daerah	Hal.	Isu dan Permasalahan	Hal.	Data Gambaran Umum	Hal.

9	Dokumen RPJPD	Sasaran Pokok Daerah	Hal.	Arah Kebijakan Daerah	Hal.	Isu dan Permasalahan	Hal.	Data Gambaran Umum	Hal.
		Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah	V-28	-Pengembangan proses bisnis UMKM melalui perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi dan kreasi *- Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis potensi unggulan lokal *- Penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor pertanian *- Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan. *- Penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor pertanian	V-11	Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi	III-18	Selama Tahun 2020 sampai 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis pernah mengalami kontraksi pada Tahun 2020 sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah dalam pembatasan aktivitas masyarakat karena pandemi COVID- 19. Namun seiring dengan normalnya kembali aktivitas masyarakat pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis kembali meningkat bahkan melebihi target yang telah ditetapkan akan tetapi pada tahun 2023 mengalami pelambatan menjadi 4,99%.	II-34
10	Laporan KLHS RPJPD	Rekomendasi Kebijakan: *-Pembangunan sarana dan prasarana layanan pemerintahan berbasis digital melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *-Penerapan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. *-Penataan kelembagaan, penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebaskorupsi.			Isu Strategis Kurang optimalnya tata kelola Pemerintahan		Data Gambaran Umum Permasalahan utama yaitu belum optimalnya penerapan SPM yang berdampak pada kualitas pelayanan publik yang diberikan. Nilai Reformasi Birokrasi di Kabupaten Ciamis Tahun 2023 sebesar 77,05 (B) belum maksimal, sehingga perlu ditingkatkan agar pihak pemerintah dapat mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Ciamis (Halaman 298)		
	Dokumen RPJPD	Sasaran Pokok Daerah	Hal.	Arah Kebijakan Daerah	Hal.	Isu dan Permasalahan	Hal.	Data Gambaran Umum	Hal.
		Tranformasi Tata Kelola	V-25	-Pembangunan sarana dan prasarana layanan pemerintahan berbasis digital melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *-Penerapan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. *-Penataan kelembagaan, penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebaskorupsi.	V-13	Tata Kelola Pemerintahan	III-22	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Ciamis dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 mencapai 77,05. Angka tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah Kabupaten Ciamis untuk mengoptimalkan kinerja sektor publik. Salah satu program yang digelar adalah membentuk lembaga koordinasi dan supervisi yang dapat memaksimalkan pelayanan publik dan meningkatkan kinerja birokrasi. Selain itu, terdapat juga program yang memberikan pelatihan dan bimbingan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Pemerintah Kabupaten Ciamis melakukan beberapa perubahan dalam tata kelola birokrasi, yaitu dengan melakukan pemangkasan birokrasi yang tidak produktif	II-63

Catatan: Seluruh daftar rekomendasi dan isu strategis diinput